



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

- Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
 8. Peraturan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Rencana ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II
RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja-Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah sebagai landasan penyusunan APBD Tahun 2025.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2025 memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- b. prioritas pembangunan Daerah; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- | | | |
|-----|-----|--|
| BAB | I | : Pendahuluan; |
| BAB | II | : Gambaran Umum Kondisi Daerah; |
| BAB | III | : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; |
| BAB | IV | : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; |
| BAB | V | : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; |
| BAB | VI | : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan |
| BAB | VII | : Penutup |

(3) Ketentuan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- (3) Ketentuan mengenai rincian RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 5 Juli 2024
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 5 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
NIP. 19850112 201101 1 003





PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

TAHUN 2024





PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

TAHUN 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB 1 PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB 2 GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	II - 1
2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2. Aspek Demografis	II-20
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-27
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum	II-45
2.1.5. Aspek Daya Saing	II-115
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur 2023	II-147
2.3. Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD Sampai Dengan Semester II	II-151
2.4. Permasalahan Pembangunan	II-1
2.5. Rekomendasi	II-4
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III - 7
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Timur	III-8
3.1.1. Strategi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur	III-12
3.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah	III-18
3.1.3. Target Makroekonomi Tahun 2025	III-29
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur.....	III-32
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-32
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-39
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-48
3.2.4. Kapasitas Riil Keuangan Daerah	III-50
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	IV-2
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur	IV-3
4.3. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025.....	IV-4

4.4. Indikator dan Target Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	IV-5
4.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	IV-6
4.6. Tujuan dan Sasaran, Pembangunan Kutai Timur 2025 dalam RPJMD 2021-2026	IV-9
4.7. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kutai Timur 2025 dalam RPJMD 2021-2026.....	IV-14
4.8. Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-32
BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V - 1
5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	V-1
5.2 Rekapitulasi Pagu Indikatif	V-2
BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VI - 1
6.1. Indikator Kinerja Utama Pembangunan	VI-1
6.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	VI-2
BAB 7 PENUTUP	VII-1
7.1. Kaidah Pelaksanaan	VII-1
7.2. Kaidah-Kaidah Pendanaan Pembangunan.....	VII-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan	II-3
Tabel 2.2 Batas Wilayah Kabupaten Kutai Timur	II-4
Tabel 2.3 Potensi di setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur	II-16
Tabel 2.4 Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2021-2023	II-22
Tabel 2.5 Proporsi Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022-2023	II-25
Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	II-31
Tabel 2.7 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	II-35
Tabel 2.8 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II-38
Tabel 2.9 Persentase APK, APM dan APS Menurut Tingkat Pendidikan	II-46
Tabel 2.10 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Kutai Timur	II-49
Tabel 2.11 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesehatan.....	II-50
Tabel 2.12 Capaian pekerjaan umum dan penataan ruang 2021-2023.....	II-52
Tabel 2.13 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-55
Tabel 2.14 Capaian Urusan Kententeraman, Ketertiban Umum	II-57
Tabel 2.15 Capaian Bidang Sosial.....	II-58
Tabel 2.16 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenagakerjaan.....	II-61
Tabel 2.17 Capaian Pemberdayaan Perempuan dan Anak 2021-2023.....	II-64
Tabel 2.18 Capaian Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023.....	II-66
Tabel 2.19 Capaian Bidang Pertanahan.....	II-69
Tabel 2.20 Capaian Lingkungan Hidup.....	II-71
Tabel 2.21 Capaian Perhubungan	II-78
Tabel 2.22 Capaian Koperasi dan UMKM 2021-2023	II-81
Tabel 2.23 Capaian Penanaman Modal 2021-2023	II-83
Tabel 2.24 Capaian Statistika dan Persandian.....	II-86
Tabel 2.25 Capaian Bidang Kebudayaan	II-87
Tabel 2.26 Capaian Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.....	II-90
Tabel 2.27 Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023..	II-91

Tabel 2.28 Potensi Obyek Wisata di Kabupaten Kutai Timur.....	II-94
Tabel 2.29 Capaian Urusan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur	II-97
Tabel 2.30 Produksi Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023.....	II-98
Tabel 2.31 Luas Lahan Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023	II-99
Tabel 2.32 Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan.....	II-101
Tabel 2.33 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perindustrian.....	II-104
Tabel 2.34 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perindustrian.....	II-105
Tabel 2.35 Capaian Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur	II-106
Tabel 2.36 Capaian Sekretariat DPRD	II-107
Tabel 2.37 Capaian Perencanaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023.....	II-109
Tabel 2.38 Capaian Keuangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023.....	II-110
Tabel 2.39 Capaian Pendidikan dan Pelatihan.....	II-112
Tabel 2.40 Capaian Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023	II-114
Tabel 2.41 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	II-115
Tabel 2.42 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023	II-117
Tabel 2.43 Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2021-2023.....	II-119
Tabel 2.44 Jumlah Pegawai di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2023	II-121
Tabel 2.45 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Timur	II-121
Tabel 2.46 Data Pensiun dan Mutasi Luar Daerah Pegawai Negeri Sipil	II-122
Tabel 2.47 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2023.....	II-122
Tabel 2.48 Luas lahan dan Produksi Hasil Pertanian Tanaman Pangan	II-129
Tabel 2.49 Populasi Ternak, Produksi Daging, dan Produksi Telur Hasil Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2023.....	II-132
Tabel 2.50 Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan.....	II-134
Tabel 2.51 Lokasi dan Kapasitas Pabrik Crude Palm Oil (CPO) Kelapa Sawit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023.....	II-135
Tabel 2.52 Rumah Tangga Perikanan, Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Kutai Tahun 2021 – 2023	II-138

Tabel 2.53 Realisasi Indikator Makro.....	II-148
Tabel 2. 54 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	II-152
Tabel 3.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah	III-35
Tabel 3.2 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	III-35
Tabel 3.3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023.	III-40
Tabel 3.4 Proyeksi Belanja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.....	III-41
Tabel 3.5 Tabel Rekapitulasi Pemenuhan SPM.....	III-43
Tabel 3.6 Tabel Pemenuhan Mandatory Spending	III-44
Tabel 3.7 Alokasi Anggaran Penurunan Stanting.....	III-46
Tabel 4.1 Indikator Makro Arah Kebijakan.....	IV-5
Tabel 4.2 Arah Kebijakan Kewilayahan dan Lokus Pembangunan.....	IV-6
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-9
Tabel 4.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	IV-14
Tabel 4.5 Penjabaran Prioritas Pembangunan Dalam Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-28
Tabel 4.6 Hasil penginputan Pokok Pokok Pikiran DPRD	IV-33
Tabel 5.1 Urusan Pembangunan	V-1
Tabel 5.2 Tabel Rekapitulasi Pagu Indikatif.....	V-3
Tabel 5.3 Tabel Rekapitulasi Alokasi Pagu RKPD Kabupaten Kutai Timur	V-5
Tabel 5. 4 Tabel Rekapitulasi Usulan Hibah.....	V-6
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kutai Timur 2025	VI-1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Kunci	VI-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alur Penyusunan RKPD 2025.....	I-2
Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	I-8
Gambar 2.1 Peta Kabupaten Kutai Timur.....	II-5
Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kutai timur 2023	II-117
Gambar 4.1 Kerangka Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	IV-4
Gambar 4.2 Design Strategi dan Program Prioritas	IV-20

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kutai Timur Tahun 2021 – 2023	II-27
Grafik 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kab./Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah)	II-30
Grafik 2.3 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur ..	II-32
Grafik 2.4 IPM Kabupaten Kutai Timur 2019-2023.....	II-39
Grafik 2.5 Prevalensi Stunting Kutai Timur 2021-2023.....	II-41
Grafik 2.6 Angka Kelahiran Total Kabupaten Kutai Timur 2021-2023.....	II-43
Grafik 2. 7 Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Kutai Timur	II-43
Grafik 2. 8 Angka Harapan Hidup Kutai Timur 2021-2023	II-44
Grafik 2.9 TPAK Kutai Timur 2021-2023	II-62
Grafik 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kutai Timur 2021-2023.....	II-63
Grafik 2. 11 IKLH Kutai Timur 2021-2023.....	II-72
Grafik 2. 12 Capaian Administrasi Kependudukan Catatan Sipil 2021-2023	II-73
Grafik 2. 13 Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa 2021-2023	II-74
Grafik 2.14 Capaian Pengendalian Penduduk.....	II-76
Grafik 2.15 Angka TFR Kutai Timur 2021-2023.....	II-77
Grafik 2.16 Capaian Komunikasi dan Informatika	II-79
Grafik 2.17 Capaian Bidang Pemuda dan Olahraga 2021-2023	II-85
Grafik 2.18 Garis Kemsikinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023.....	II-125
Grafik 2.19 Presentase Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023	II-126
Grafik 2. 20 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023.....	II-127
Grafik 2.21 Gini Ratio Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023	II-128
Grafik 2.22 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023	II-141



BAB 1

Pendahuluan



BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam kerangka pembangunan Kabupaten Kutai Timur, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 disusun sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Rencana Kerja Pembangunan Daerah dirancang untuk mengintegrasikan aspek-aspek penting dari pembangunan daerah, termasuk perekonomian, sosial, tata kelola, infrastruktur, dan lingkungan, dengan penekanan pada inovasi dan efisiensi. Pendekatan teknokratik yang diterapkan dalam penyusunan RKPD ini bertujuan untuk menjamin implementasi yang efektif dan akuntabel dari setiap program, dengan fokus pada Pemantapan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Mendukung Daya Saing Daerah. RKPD 2025 mengedepankan sinergi antar sektor serta keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, dalam rangka mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

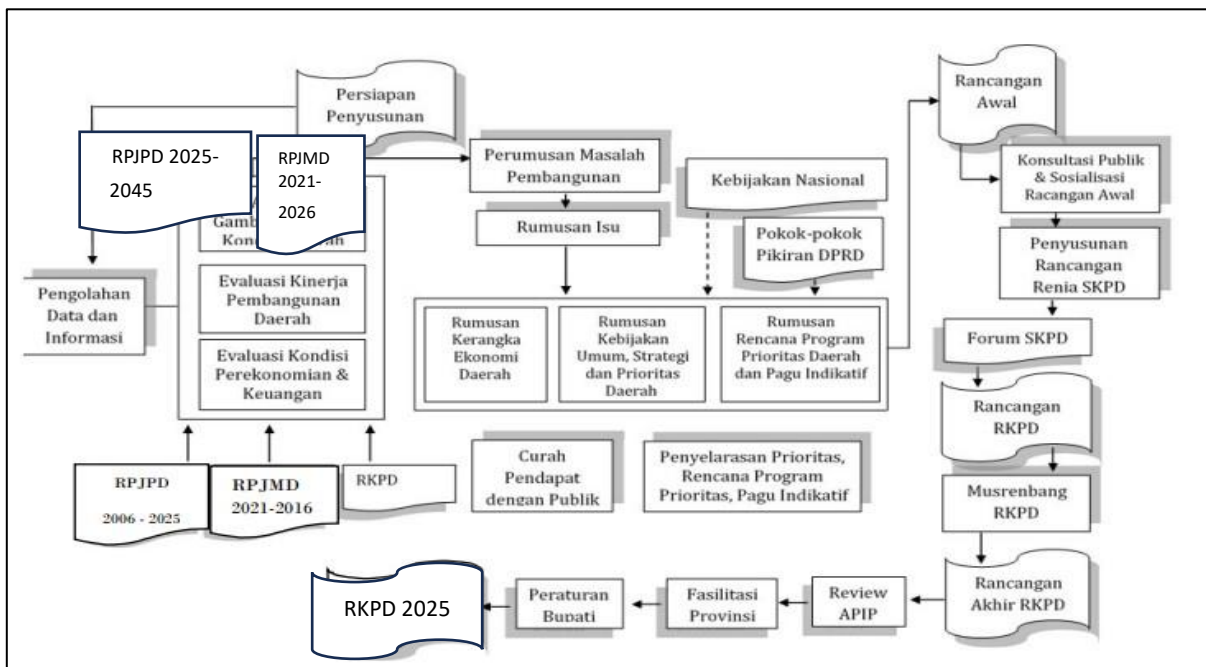
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur 2025, yang dirancang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, merupakan sebuah instrumen perencanaan tahunan yang vital untuk menetapkan arah pembangunan daerah. Dokumen ini terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 periode tahun 2025 dengan fokus pembangunan mengambil tema "Pemantapan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Mendukung Daya Saing Daerah". Tema ini merupakan sebuah refleksi atas komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam mengoperasionalkan visi strategis ke dalam rencana operasional tahunan. RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RPJPD 2025-2045 sebagai *baseline* data untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi perencanaan jangka panjang. RKPD 2025 memuat program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJPD 2025-2045. RKPD 2025 juga berperan sebagai dokumen transisi yang menghubungkan periode perencanaan RPJPD 2005-2025 dengan RPJPD 2025-2045, memastikan

bahwa capaian dan pembelajaran dari periode sebelumnya dapat diintegrasikan dan ditingkatkan pada periode berikutnya. Dengan demikian, RKPD berfungsi sebagai alat operasional tahunan yang mengkonversi tujuan strategis jangka panjang ke dalam tindakan nyata yang terukur dan terstruktur.

Dokumen RKPD memainkan peran strategis dalam sistem perencanaan daerah dengan mengkonversi rencana strategis jangka menengah yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMD menjadi langkah-langkah operasional tahunan yang terukur, teratur dan terstruktur. Langkah-langkah operasional ini menjamin kesinambungan antara tujuan strategis jangka menengah dan implementasi tahunan, menekankan pada kebutuhan untuk sinkronisasi dan koordinasi antara berbagai tingkatan perencanaan.

Dokumen RKPD selain bertindak sebagai penghubung antara perencanaan strategis dan operasional juga memastikan bahwa program pembangunan tahunan selaras dengan target jangka menengah. Hal ini menghasilkan harmonisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan, memungkinkan integrasi efektif berbagai aspek pembangunan daerah demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.



Gambar 1.1 Diagram Alur Penyusunan RKPD 2025

Dokumen RKPD berfungsi sebagai acuan penting dalam merancang Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Kutai Timur. Dokumen ini memetakan prioritas strategis untuk penataan dan pengalokasian sumber daya keuangan daerah, yang akan diimplementasikan dalam APBD melalui proses negosiasi dan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah. Dokumen RKPD berperan sebagai instrumen kunci dalam menyelaraskan rencana strategis pembangunan dengan manajemen anggaran daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menjabarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah secara detail dan efektif, memastikan integrasi yang efisien antara berbagai komponen pembangunan dalam kerangka anggaran tahunan, diantaranya:

1. Perencanaan pembangunan di tingkat daerah adalah komponen integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah oleh pemerintah daerah dilakukan dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, berdasarkan wewenang dan peranan masing-masing pemangku kepentingan.
3. Integrasi antara rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerah adalah kunci untuk mencapai sinergi dalam pembangunan.
4. Pelaksanaan rencana pembangunan di setiap daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi unik dan potensi lokal, serta mengakomodasi dinamika perkembangan regional dan nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun dokumen RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 terdiri dari:

1. Pendekatan akomodatif dalam perencanaan pembangunan daerah melibatkan penerimaan dan integrasi usulan pembangunan dari masyarakat, mempertimbangkan isu lokal, program prioritas pemimpin daerah, serta masukan dari berbagai pihak.

2. Pendekatan teknokratik dengan pendekatan metodologi ilmiah dan kerangka berpikir analitis yang dilakukan oleh para perencana dan institusi profesional dalam perumusan kebijakan pembangunan.
3. Melalui pendekatan partisipatif, aspirasi para pemangku kepentingan dikumpulkan dan diperhitungkan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menjamin keterlibatan masyarakat.
4. Pendekatan *bottom up* dan *top down* melibatkan proses perencanaan yang berjenjang dari tingkat desa hingga nasional (*bottom up*) dan implementasi program yang diarahkan dari tingkat yang lebih tinggi (*top down*) untuk memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

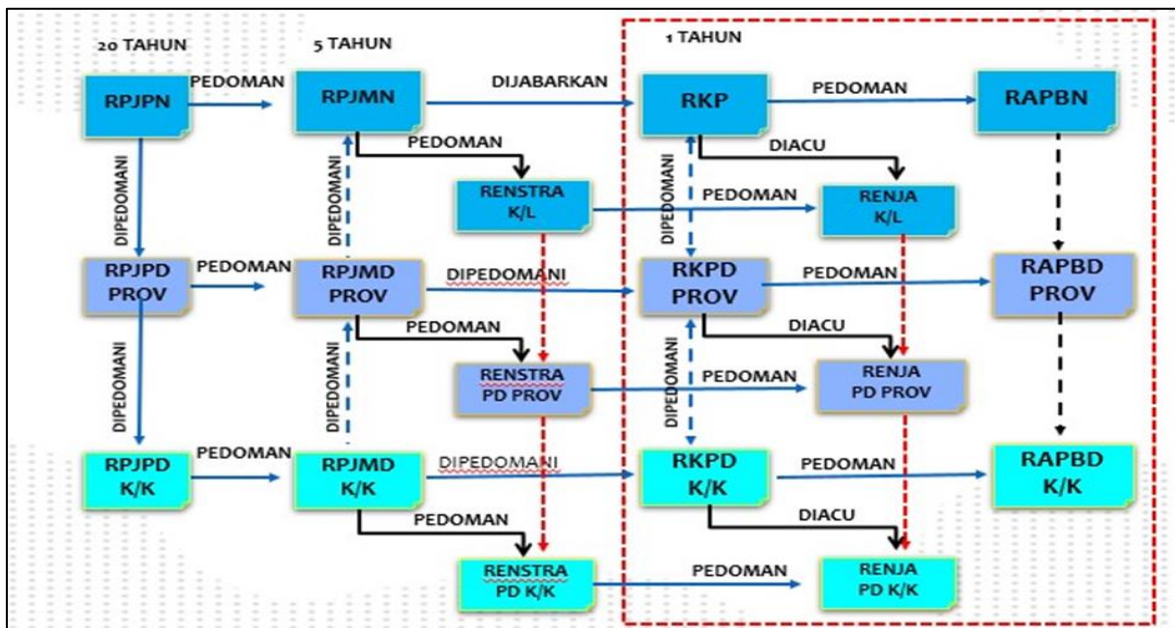
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68a1);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
31. Peraturan Daerah Kalimantan Timur tentang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2016 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
35. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antara berbagai dokumen perencanaan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria: jangka waktu (Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan), pelaksana (Perencanaan Induk, Managerial, Taktis Strategis, dan Teknis Operasional), tingkat kewenangan pemerintahan (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), serta aspek keruangan (spasial dan non-spasial). Untuk perencanaan yang bersifat spasial, ini umumnya diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku di berbagai tingkatan administrasi pemerintahan, dari nasional hingga ke tingkat kabupaten.



Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RPJPD sebagai baseline data untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi perencanaan jangka panjang. RKPD 2025 berfungsi sebagai dokumen transisi yang menghubungkan periode perencanaan RPJPD 2005-2025 dengan RPJPD 2025-2045, serta sebagai baseline data untuk RPJPD 2025-2045.

2. RKPD Kabupaten Kutai Timur 2025 mengikuti arahan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, dengan fokus pada:
 - a. Penyelarasan prioritas dan tujuan pembangunan tahunan daerah dengan program yang diuraikan dalam RPJMD kabupaten.
 - b. Kesesuaian program tahunan dan aktivitas prioritas dengan rencana prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten.
3. RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 juga mempertimbangkan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, dengan menyesuaikan program dan aktivitas pembangunan kabupaten dengan pembangunan provinsi. Program ini mencakup area yang melintasi lebih dari satu kabupaten/kota atau wilayah perbatasan.
4. RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan prioritas pembangunan nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2025, yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan mengintegrasikan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan nasional; dan
2. Menciptakan sinergi antara berbagai rencana program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah di tahun 2025. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa setiap elemen pembangunan di Kutai Timur selaras dengan rencana yang lebih besar di tingkat provinsi dan nasional, serta efisien dalam implementasi dan hasilnya.

Tujuan dari RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah:

1. Berfungsi sebagai dasar dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menyusun Rencana Kerja tahunan masing-masing perangkat daerah pada tahun 2025.

2. Memberikan landasan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk tahun 2025, yang nantinya akan menjadi dasar pengembangan Rancangan APBD Kabupaten Kutai Timur untuk tahun anggaran 2025.
3. Berperan sebagai alat untuk memastikan adanya konsistensi dan keterkaitan antara tahapan perencanaan, alokasi anggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang pembuatan RKPD, landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunannya, keterkaitan dokumen RKPD dengan dokumen lain, serta tujuan dan maksud dibuatnya RKPD. Bab ini juga menguraikan tentang struktur dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat kondisi umum daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyoroti kondisi umum daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, serta aspek kesejahteraan masyarakat. Fokus juga diberikan pada aspek pelayanan umum, daya saing daerah, dan evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan RKPD hingga tahun berjalan. Selain itu, bab ini juga mengidentifikasi dan membahas berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Kutai Timur.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan sasaran pembangunan daerah, yang dibangun berdasarkan analisis evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dan pencapaian kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026. Ini termasuk identifikasi masalah di tingkat daerah dan nasional, serta peninjauan atas Pokok-pokok Pikiran DPRD. Juga termasuk adalah perancangan kerangka ekonomi daerah dan struktur pendanaannya.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menyajikan detail mengenai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah untuk tahun 2025. Ini meliputi berbagai urusan pemerintahan, mulai dari urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, hingga urusan pemerintahan pilihan. Selain itu, bab ini juga mencakup unsur-unsur pendukung dan penunjang pemerintahan, pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, serta aspek-aspek pemerintahan umum.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini mendetailkan tentang target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk tahun 2025, memberikan gambaran jelas tentang tujuan kinerja yang hendak dicapai dalam periode ini.

BAB VII PENUTUP

Bagian ini menguraikan petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Perangkat Daerah terkait dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja, termasuk arahan spesifik untuk memastikan bahwa perencanaan kerja Perangkat Daerah sejalan dengan tujuan dan strategi pembangunan daerah secara keseluruhan.



BAB 2

Gambaran Umum dan Kondisi Daerah



BAB 2 GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Analisis terhadap gambaran umum kondisi suatu daerah merupakan instrumen krusial dalam evaluasi dan penilaian tingkat keberhasilan pembangunan yang telah diimplementasikan. Ini membantu dalam mengidentifikasi berbagai faktor dan aspek-aspek kritis yang memerlukan peningkatan guna mengoptimalkan keberhasilan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya, gambaran umum ini berfungsi sebagai dasar fundamental dalam merumuskan strategi dan rencana pembangunan daerah yang lebih terarah dan efektif. Hal ini mencakup analisis komprehensif terhadap aspek geografis, demografis, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya akan diinterpretasikan untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih sinergis dan responsif terhadap kebutuhan serta potensi daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Faktor geografis dan demografis sangat krusial dalam pengembangan wilayah. Pentingnya memahami kondisi geografis dan demografis sebelum merencanakan pembangunan adalah agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan spesifik wilayah Kabupaten Kutai Timur. Studi tentang karakteristik geografis di Kabupaten Kutai Timur esensial untuk mengetahui gambaran detail lokasi, kemungkinan pengembangan, dan risiko bencana. Di sisi lain, aspek demografi mengungkapkan kondisi penduduk secara umum atau spesifik pada waktu tertentu. Di Kabupaten Kutai Timur, analisis demografi mencakup ukuran, struktur, dan sebaran penduduk serta dinamika perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan. Studi demografi dapat berfokus pada populasi secara keseluruhan atau kelompok tertentu berdasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis.

A. Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Batas Administrasi

Dalam konteks koordinat astronomis, Kabupaten Kutai Timur terletak pada rentang lintang geografis yang signifikan, yakni mulai dari $0^{\circ}2'10''$ di selatan khatulistiwa hingga $1^{\circ}52'39''$ di utara khatulistiwa. Ini menandakan posisi Kutai Timur yang membentang melintasi ekuator. Secara longitude, Kabupaten Kutai Timur memiliki jangkauan yang terentang dari $115^{\circ}56'26''$ hingga $118^{\circ}58'19''$ Bujur Timur. Penempatan ini memberikan Kutai Timur posisi yang strategis di bumi, di mana bagian utaranya menikmati sudut insiden sinar matahari yang lebih langsung sepanjang tahun, sementara bagian selatannya sedikit lebih miring terhadap orbit bumi mengelilingi matahari.

Koordinat ini juga memainkan peran penting dalam klimatologi, ekologi, dan bahkan navigasi penerbangan serta maritim. Misalnya, dengan berada pada dua belahan bumi, Kutai Timur mengalami variasi musim dan pola hujan yang dipengaruhi oleh interaksi antara pergerakan matahari dan perubahan angin musiman. Demikian pula, koordinat ini memengaruhi durasi hari dan siklus vegetasi, yang penting untuk aktivitas pertanian dan perkebunan. Lebih lanjut, posisi longitudinal Kutai Timur memastikan bahwa wilayah ini memiliki waktu standar yang cocok dengan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), yang berpengaruh terhadap aktivitas sosial dan ekonomi penduduknya.

Berdasarkan data dari Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2024, wilayah Kabupaten Kutai Timur mencakup area seluas 31.239,84 kilometer persegi. Luas wilayah ini merupakan pembaharuan data yang mengacu pada penegasan batas kabupaten dari Kemendagri. Dari segi administrasi, Kabupaten Kutai Timur dibagi menjadi 18 kecamatan, mencakup 139 desa dan 2 kelurahan, dengan distribusi luas wilayah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan
Kabupaten Kutai Timur

Kecamatan	Banyaknya		Luas	
	Desa	Kelurahan	Km ²	%
Muara Ancalong	9	0	2.289,84	7,33
Busang	6	0	3.561,07	11,40
Long Mesangat	7	0	238,37	0,76
Muara Wahau	10	0	4.997,83	16,00
Telen	8	0	1.783,08	5,71
Kongbeng	7	0	1.101,24	3,53
Muara Bengkal	7	0	758,80	2,43
Batu Ampar	7	0	759,01	2,43
Sangatta Utara	3	1	333,56	1,07
Bengalon	11	0	3.429,36	10,98
Teluk Pandan	6	0	926,04	2,96
Rantau Pulung	3	0	916,04	2,93
Sangatta Selatan	9	1	1.201,06	3,84
Kaliorang	15	0	302,93	0,97
Sangkulirang	7	0	1.630,38	5,22
Sandaran	9	0	2.829,54	9,06
Kaubun	8	0	578,44	1,85
Karangan	7	0	3.603,23	11,53
Total	139	2	31.239,84	100,00

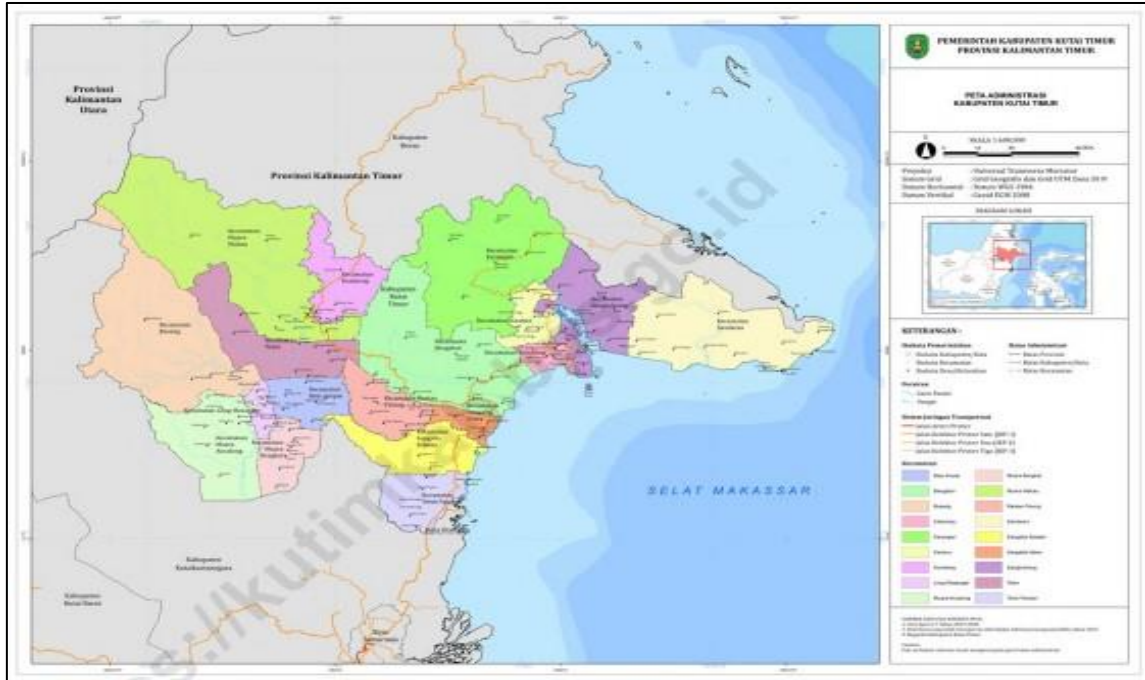
Sumber: BPS Kutai Timur, 2024

Kabupaten Kutai Timur terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai, yang dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 mengenai Pembagian Wilayah Provinsi dan Kabupaten. Proses resmi pembentukan Kabupaten Kutai Timur ini dijalankan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Oktober 1999. Kabupaten Kutai Timur telah melalui dua tahap pemekaran kecamatan. Awalnya hanya memiliki lima kecamatan, namun kemudian berkembang menjadi sebelas kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 1999. Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005, jumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur bertambah lagi menjadi delapan belas. Secara administratif Kabupaten Kutai Timur berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Batas Wilayah Kabupaten Kutai Timur

Arah/ Sebelah	:	Batas Wilayah
Utara	:	Berbatasan dengan Kabupaten Berau. Beberapa Kecamatan di Kabupaten Berau yang berbatasan langsung dengan Kab. Kutai Timur adalah Kecamatan: Kelay, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih dan Biduk-Biduk.
Timur	:	Berbatasan dengan Selat Makasar; Kota Bontang (Kecamatan Bontang Utara); dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Marang Kayu)
Selatan	:	Berbatasan dengan Kutai Kartanegara dan Kota Bontang
Barat	:	Berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang) serta Kabupaten Malinau.

Posisi geografis Kabupaten Kutai Timur menyediakan berbagai potensi strategis, terutama dalam konteks interaksi dengan wilayah lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mendukung interaksi tersebut, pembangunan infrastruktur ekonomi dan fasilitas transportasi yang memadai menjadi kebutuhan penting di Kabupaten Kutai Timur. Berikut merupakan peta administratif Kabupaten Kutai Timur:



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Kutai Timur
 Sumber: BPS Kutai Timur, 2024

Potensi posisi strategis tersebut terlihat dari posisinya yang dikaitkan dengan wilayah lebih luas adalah sebagai berikut:

- a) Kabupaten Kutai Timur terletak strategis pada rute utama Trans Kalimantan, yang merupakan jalur regional penting. Rute ini membentang, menghubungkan Tarakan (sebagai Kota Orde II) dan Tanjung Redeb, melanjutkan ke Samarinda (Kota Orde I dan Ibu Kota Provinsi), kemudian ke Balikpapan (Kota Orde I), serta melewati Kabupaten Penajam Paser Utara, dan berlanjut ke provinsi-provinsi lain seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Posisi Kabupaten Kutai Timur pada jalur ini sangat strategis dalam mendukung efisiensi dan kecepatan distribusi barang dan jasa, baik yang masuk maupun yang keluar dari Kabupaten Kutai Timur. Efektivitas dalam distribusi ini memainkan peran krusial dalam merangsang dinamika ekonomi lokal, yang mencakup peningkatan dalam aspek produksi dan konsumsi barang dan jasa. Dengan demikian, keberadaan jalur regional Trans Kalimantan ini berkontribusi signifikan terhadap akselerasi aktivitas ekonomi di Kabupaten Kutai Timur.

b) Wilayah Kabupaten Kutai Timur, yang mencakup garis pantai sepanjang 152 kilometer, berada di posisi yang strategis karena bertetangga langsung dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Bagian ini dari perairan Kalimantan Timur merupakan segmen dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Keberadaan wilayah ini dalam ALKI II menandai pentingnya posisi Kutai Timur dalam skema transportasi laut internasional. Posisi geografis ini tidak hanya memperkaya potensi maritim lokal tetapi juga menempatkan Kabupaten Kutai Timur sebagai titik penting dalam rute pelayaran dan perdagangan internasional. Sebagai hasilnya, wilayah ini mendapat manfaat dari aksesibilitas dan konektivitas yang lebih besar, yang berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi, terutama yang berkaitan dengan perdagangan dan transportasi laut.

Kabupaten Kutai Timur dengan lokasinya yang strategis, menghadapi serangkaian tantangan sekaligus peluang. Kondisi geografis yang menguntungkan ini seharusnya dijadikan sebagai *leverage* untuk memaksimalkan potensi yang ada. Posisi strategis ini perlu diintegrasikan secara efektif dalam strategi pembangunan daerah, dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan pemanfaatan yang tepat, lokasi Kabupaten Kutai Timur dapat menjadi katalis dalam mendorong kemajuan ekonomi, melalui peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, dan perluasan kegiatan perdagangan serta industri. Kunci dari memanfaatkan peluang ini terletak pada bagaimana pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait menyinkronkan upaya-upaya pembangunan dengan karakteristik unik dan keunggulan kompetitif Kabupaten Kutai Timur.

B. Topografi

Jika dilihat dari topografi, wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki variasi yang heterogen dari pantai, dataran, berbukit hingga pegunungan pantai. Untuk kemiringan pada garis besarnya terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan kelerengan di bawah 15% (<2-15), merupakan kawasan yang relatif datar, landai dekat dengan pantai, dimana memiliki wilayah dataran seluas 778.686 ha (23,63%), yang terdapat di Kecamatan

Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Muara Bengkal, Muara Ancalong serta sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang.

2. Wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan kelerengan di atas 15%, merupakan daerah pegunungan kapur dan bukit Karst. Contohnya; Kecamatan Muara Wahau dan Muara Ancalong merupakan wilayah pegunungan dan perbukitan memiliki areal paling luas yaitu masing-masing 1.608.915 ha dan 1.429.922,25 ha.

C. Hidrologi

Dalam rangka mengoptimalkan potensi kesuburan tanah di Kabupaten Kutai Timur, perlu penerapan strategi yang efisien dalam mengelola sumber daya perairan. Hal ini melibatkan integrasi sistematis antara pengelolaan laut, pantai, dan ekosistem perairan darat seperti sungai dan danau, yang tersebar di seluruh kecamatan. Fokus utama adalah pada pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara efektif, di mana Sungai Kedang Kepala di Kecamatan Muara Wahau, sebagai sungai terpanjang dengan panjang 319 km, dapat dijadikan model pengelolaan sumber daya air terpadu. Selanjutnya, pengembangan dan pengelolaan berbasis data dan teknologi untuk dua danau strategis di Kecamatan Mura Bengkal, yaitu Danau Ngayau dengan luas 1.900 hektar dan Danau Karang sebesar 750 hektar, dapat diintegrasikan ke dalam sistem irigasi dan pengairan yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Dengan pendekatan ini, strategi pembangunan daerah dapat lebih terarah dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal sekaligus menjaga keseimbangan ekologis.

Kabupaten Kutai Timur, yang dikelilingi oleh sejumlah sungai dengan panjang yang memadai, memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air, terutama dalam sektor irigasi pertanian. Sungai-sungai di wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi besar dalam mendukung sistem irigasi yang efisien dan berkelanjutan. Di sisi timur, wilayah pesisir pantai mendominasi, dengan ketinggian variatif antara 0 sampai 7 meter di atas permukaan laut. Potensi wisata bahari di wilayah ini cukup signifikan, terutama di Pantai Teluk Lombok dan Pantai Sekerat, yang menawarkan keindahan alam dan keanekaragaman biota laut.

Kawasan Pantai Teluk Lombok telah dimanfaatkan secara intensif oleh masyarakat lokal. Pemanfaatan ini meliputi berbagai aktivitas seperti pembangunan tambak ikan dan udang, budidaya rumput laut, serta pemanfaatan Karamba Jaring Apung (KJA) untuk budidaya perikanan.

D. Klimatologi

Kabupaten Kutai Timur yang terletak di zona iklim tropis, mengalami pola musiman yang serupa dengan sebagian besar wilayah di Indonesia, yaitu terbagi menjadi musim kemarau dan musim penghujan. Iklim tropis ini memberikan karakteristik cuaca tertentu di Kabupaten Kutai Timur. Dengan suhu udara rata-rata sekitar 26°C, Kabupaten Kutai Timur mengalami fluktuasi suhu harian yang relatif moderat, berkisar antara 5° hingga 7°C antara suhu terendah dan tertinggi.

Dari segi curah hujan, Kabupaten Kutai Timur memiliki tingkat presipitasi yang cukup tinggi, dengan curah hujan tahunan berkisar antara 2.000 hingga 4.000 mm. Ini menandakan bahwa Kabupaten Kutai Timur mengalami periode penghujan yang cukup intensif, dengan hari hujan rata-rata mencapai antara 130 hingga 150 hari per tahun. Pola cuaca ini memiliki implikasi penting dalam berbagai aspek, seperti pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan perencanaan infrastruktur.

E. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan keragaman yang mencerminkan karakteristik alam dan aktivitas ekonomi. Sejumlah besar wilayah, yakni 43,08%, ditetapkan sebagai kawasan hutan, yang mencakup berbagai tipe hutan seperti Hutan Mangrove, Hutan Primer, Hutan Rawa, Hutan Sekunder, dan Hutan Tanaman atau hutan produksi. Hutan Primer, yang cenderung berlokasi di daerah pegunungan, banyak terdapat di wilayah barat Kabupaten Kutai Timur, terutama di Kecamatan Muara Wahau, Telen, dan Busang.

Di sisi lain, kawasan non-hutan mencakup 56,14% dari total luas wilayah, dengan mayoritas terdiri dari belukar dan belukar rawa, yang masing-masing memiliki Persentase wilayah sebesar 37,65% dan 5,76% dari total luas. Lahan pertanian, yang meliputi perkebunan, sawah, dan lahan pekarangan, menyumbang 9,28% atau sekitar 296.119,33 hektar dari keseluruhan penggunaan lahan di kabupaten tersebut.

Sektor perikanan, meskipun memiliki potensi besar, masih berada pada skala yang lebih kecil dalam penggunaan lahan, baik dalam bentuk budidaya kolam maupun di perairan umum. Selain itu, kegiatan pertambangan batubara juga merupakan bagian dari penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur, meskipun hanya menyumbang sebesar 0,70% atau sekitar 22.410,51 hektar. Profil penggunaan lahan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara konservasi alam, aktivitas pertanian, dan industri ekstraktif, yang semuanya berperan dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Kutai Timur.

F. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Kutai Timur, yang dikenal dengan potensinya dalam budidaya tanaman pangan lahan basah, memiliki lahan basah yang sangat potensial terutama di kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong. Lahan basah ini berkontribusi signifikan terhadap produksi tanaman pangan, dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, khususnya di tingkat lokal kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam konteks persaingan dan peluang pasar, tanaman seperti kedelai dan jagung di Kabupaten Kutai Timur memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan pangan nasional.

Namun, di sisi lain, terdapat isu penurunan luas lahan sawah akibat alih fungsi lahan, yang menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian di masa depan. Alih fungsi lahan ini berpotensi menurunkan produksi dan produktivitas padi, yang bisa menghambat upaya mencapai swasembada pangan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya strategis seperti pengembangan dan pengelolaan sumber daya lahan pertanian secara berkelanjutan dan pencegahan pengurangan lahan sawah produktif. Ini termasuk mempertahankan lahan sawah yang sudah memiliki irigasi teknis dan lahan produktif lainnya.

Pertanian lahan basah di Kutai Timur tidak hanya penting dalam konteks ketahanan pangan, tetapi juga dalam pelestarian budaya. Selain itu, area ini juga diarahkan untuk menjadi kawasan penyangga atau *'buffer zone'* yang berfungsi menjaga kualitas lingkungan dengan menyediakan ruang terbuka hijau.

2. Kawasan Perkebunan

Pertumbuhan sektor perkebunan di Kabupaten Kutai Timur telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan peningkatan luas areal, produksi, dan produktivitas. Komoditas utama yang dikembangkan meliputi kakao, karet, lada, dan kelapa sawit, yang umumnya dikelola oleh perkebunan rakyat. Area perkebunan tersebar luas di 16 kecamatan, antara lain Sangatta Utara, Rantau Pulung, Bengalon, Muara Bengkal, dan lain-lain, menjadikan sektor perkebunan ini memiliki kontribusi besar dalam struktur ekonomi daerah.

Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur, yang terletak dekat dengan pusat-pusat kegiatan, juga berpotensi menjadi kawasan pengembangan perkotaan. Kebijakan pengelolaan kawasan perkebunan mencakup beberapa aspek, seperti peningkatan produktivitas tanaman yang ada, pemanfaatan sistem tumpang sari dalam budidaya pertanian lahan kering, pemilihan komoditi unggulan sesuai potensi lahan, dan intensifikasi penggunaan lahan perkebunan dengan teknologi tepat guna.

Salah satu fokus utama dalam strategi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit. Subsektor ini memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan, serta kontribusi pada pembangunan daerah. Di Kabupaten Kutai Timur, luas lahan perkebunan kelapa sawit terus bertambah, dari 450.635,31 ha pada tahun 2016 menjadi 529.586,73 ha pada tahun 2023 dengan rincian luas Kelapa Sawit Rakyat sebesar 59.524,88 ha (11,24%), Kelapa Sawit Kemitraan seluas 102.137,87 ha (19,29 %), dan Kelapa Sawit Perkebunan Besar/PBS seluas 367.923,98 ha (69,47%). Pertumbuhan ini diikuti dengan pengembangan industri olahan kelapa sawit, termasuk pabrik pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO), terutama di kecamatan-kecamatan yang menjadi sentra pengembangan kelapa sawit. Oleh karena itu, program pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur harus terus dilakukan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

3. Kawasan Peternakan

Sektor peternakan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan keanekaragaman dalam produksinya, meliputi peternakan kecil seperti unggas serta peternakan besar yang mencakup kambing, sapi, dan lainnya. Khususnya, aktivitas peternakan ayam di beberapa wilayah perencanaan telah berkembang dalam skala kecil, menjadi bagian penting dari ekonomi lokal.

Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sektor peternakan ini, kabupaten Kutai Timur telah mengimplementasikan beberapa kebijakan pengelolaan kawasan budidaya peternakan. Kebijakan-kebijakan ini termasuk:

- a. Meningkatkan Kualitas SDM Petani Ternak: Melalui program pelatihan dan pendidikan, petani ternak di Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan pengetahuan mereka dalam mengelola peternakan secara lebih efisien dan produktif.
- b. Peningkatan Teknologi, Produktivitas, dan Kualitas Ternak: Adopsi teknologi baru dan metode pemeliharaan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas produk ternak.
- c. Pengendalian Limbah Peternakan: Pentingnya mengelola limbah peternakan agar tidak mengganggu lingkungan permukiman dan sumber air menjadi prioritas. Hal ini termasuk pengelolaan kotoran hewan dan limbah lain agar tidak mencemari lingkungan.
- d. Pengembangan Sinergi antara Kegiatan Peternakan dan Usaha Pertanian Lainnya: Integrasi peternakan dengan aktivitas pertanian lain seperti perkebunan atau pertanian pangan, diharapkan dapat menciptakan sistem agribisnis yang lebih holistik dan berkelanjutan.

4. Kawasan Perikanan

Kabupaten Kutai Timur memiliki dua kawasan utama yang berkaitan dengan sektor perikanan: kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya, masing-masing dengan karakteristik dan regulasi yang berbeda.

- a. Kawasan Perikanan Tangkap: Ini adalah area dimana kegiatan perikanan dilakukan di perairan alami tanpa proses budidaya. Kegiatan perikanan tangkap

tidak hanya mencakup penangkapan ikan tetapi juga proses pengangkutan, penyimpanan, pendinginan, pengolahan, dan pengawetan ikan. Di Kabupaten Kutai Timur, kawasan perikanan tangkap telah diarahkan dan dibagi menjadi tiga jalur, dengan klasifikasi area dan peralatan yang berbeda untuk mendukung kegiatan tersebut secara efisien.

- b. Kawasan Perikanan Budidaya: Berbeda dengan perikanan tangkap, perikanan budidaya dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol. Kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan seperti pemeliharaan, pembesaran, dan pembiakan ikan, serta proses pasca-panen yang serupa dengan perikanan tangkap. Penetapan kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Kutai Timur mengikuti kriteria tertentu, seperti lokasi perairan yang terlindungi dari gelombang ekstrem, salinitas air yang konstan, aksesibilitas, jauh dari polusi dan zona perlindungan, serta kualitas air yang memenuhi standar untuk budidaya ikan. Pengembangan kedua jenis kawasan ini di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan upaya untuk mengoptimalkan potensi perikanan, baik tangkap maupun budidaya, sebagai sumber perekonomian dan ketahanan pangan.

5. Kawasan Pertambangan

Transformasi kawasan pertambangan menjadi kawasan lindung di masa depan merupakan salah satu strategi penting yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ini menandai upaya serius dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan konservasi lingkungan. Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan bekas pertambangan menjadi sangat penting untuk mencegah kerusakan ekologis yang parah dan dampak buruk yang dapat timbul di masa depan.

Sektor pertambangan di Kabupaten Kutai Timur berperan krusial dalam meningkatkan ekonomi regional. Produksi dari tambang, yang dioperasikan oleh perusahaan lokal, nasional, dan internasional, diharapkan menjadi penggerak utama dalam perekonomian. Kehadiran industri ini menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pertimbangan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam rencana tata ruang Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2015-2035, kawasan pertambangan ditetapkan berdasarkan izin konsesi pertambangan.

Namun, sebagian besar dari kawasan ini masih dalam proses studi kelayakan lebih lanjut untuk menentukan kesesuaian lahannya. Luas total kawasan yang memiliki potensi pertambangan di Kabupaten Kutai Timur mencapai lebih kurang 1.602.653 hektar.

6. Kawasan Pariwisata

Pariwisata di Kabupaten Kutai Timur berpotensi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi utama dan diharapkan menjadi tulang punggung masa depan Kabupaten Kutai Timur. Sebagai langkah strategis, kebijakan pembangunan khusus di sektor pariwisata telah diimplementasikan, termasuk penetapan status kawasan tertentu sebagai Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Provinsi (KSP3) Kalimantan Timur. Menurut data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, kawasan yang telah ditetapkan sebagai KSP3 meliputi Pantai Teluk Lombok, Kawasan Lindung Geologi Goa Tewet, dan Pulau Miang.

Selain itu, ada inisiatif kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mengusulkan pembentukan kawasan bentang alam Karst Sangkulirang Mangkalihat sebagai geo park nasional. Inisiatif ini menunjukkan pengakuan terhadap nilai geologis dan ekologis yang signifikan dari Kabupaten Kutai Timur. Kawasan ini juga menarik perhatian internasional dengan adanya cagar budaya *rock-art* yang berusia kira-kira 40.000 tahun, yang telah masuk dalam daftar *tentative list* UNESCO.

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di Kabupaten Kutai Timur. Dengan kekayaan alam yang melimpah, keindahan panorama alam, serta keberagaman budaya yang unik, Kabupaten Kutai Timur memiliki berbagai daya tarik yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah di masa depan, melalui peningkatan kunjungan wisatawan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Kabupaten *Kutai* Timur memiliki sejumlah destinasi wisata yang potensial untuk dikembangkan, antara lain:

a. Wisata Alam dan Petualangan:

1. Taman Nasional Kutai: Dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, taman nasional ini menawarkan pengalaman ekowisata yang menarik, seperti *trekking*, *birdwatching*, dan pengamatan satwa liar.
2. Pantai dan Pulau-pulau Eksotis: Pantai Teluk Lombok, Pulau Birah-Birahan, Pantai Sekerat, Pulau Miang menyajikan keindahan pantai berpasir putih, air laut yang jernih, serta terumbu karang yang menakjubkan untuk aktivitas *snorkeling* dan *diving*.

b. Wisata Budaya dan Sejarah:

1. Desa Wisata Budaya: Pengembangan desa-desa dengan potensi budaya lokal, seperti kerajinan tangan, tarian tradisional, dan festival adat, dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan kearifan lokal Kutai Timur.
2. Situs Sejarah dan Peninggalan Budaya: Pelestarian dan promosi situs-situs sejarah dapat menarik minat wisatawan yang tertarik pada sejarah dan budaya.

c. Wisata Agro dan Edukasi:

Kebun Raya dan Agrowisata: Pengembangan kebun raya dan kawasan agrowisata dapat memberikan pengalaman wisata edukasi tentang pertanian, perkebunan, dan konservasi lingkungan.

Dengan potensi pariwisata yang begitu kaya dan beragam, Kabupaten Kutai Timur siap untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah. Dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan visi ini. Dengan strategi yang tepat dan pengelolaan yang berkelanjutan, pariwisata di Kabupaten Kutai Timur tidak hanya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, tetapi juga turut melestarikan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki. Masa depan Kabupaten Kutai Timur yang cerah dan sejahtera dapat dicapai dengan menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

7. Kawasan Pemukiman

Kabupaten Kutai Timur memiliki dua tipe utama kawasan permukiman, yaitu permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan, masing-masing dengan kebijakan pengembangan yang berbeda.

- a. Kawasan Permukiman Pedesaan: Pengembangan di kawasan pedesaan difokuskan pada penciptaan sentra produksi yang prospektif, yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk memaksimalkan efektivitas sentra-sentra ini, penting untuk menciptakan koneksi yang baik antara sentra produksi dengan pusat pemasarannya, sehingga dapat saling mendukung dalam sistem perwilayahan. Kawasan permukiman pedesaan di Kutai Timur direncanakan mencakup area seluas lebih kurang 70.588,63 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten.
- b. Kawasan Permukiman Perkotaan: Terdapat tiga kecamatan utama yang membentuk kawasan permukiman perkotaan, yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan Kaliorang. Kecamatan Sangatta Utara dikenal sebagai pusat kegiatan wilayah dan sentra pemerintahan, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup besar. Sangatta Selatan juga penting, bukan hanya sebagai bagian dari pusat kegiatan wilayah, tetapi juga karena lokasinya yang dekat dengan Taman Nasional Kutai (TNK). Sementara itu, permukiman perkotaan di Kecamatan Kaliorang direncanakan sebagai bagian dari konsep Kota Terpadu Mandiri (KTM), dengan area yang dialokasikan seluas lebih kurang 126,04 hektar.

8. Potensi Kecamatan

Berikut beberapa potensi-potensi pengembangan kawasan kecamatan di Kabupaten Kutai Timur:

Tabel 2.3 Potensi di setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur

No	Kecamatan	Potensi Unggulan
1	Batu Ampar	Pertanian dan perkebunan (jagung, ketela pohon, padi, lada), peternakan, dan perikanan
2	Bengalon	Pertanian dan perkebunan (padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, kelapa sawit, karet, lada), hortikultura, peternakan
3	Busang	Pertanian dan perkebunan (padi, jagung, ubi-ubian, kelapa sawit, karet, kakao), peternakan, perikanan
4	Kaliorang	Pertanian (padi, jagung, ketela rambat, kacang tanah), perkebunan kelapa sawit, peternakan, perikanan, pertambangan
5	Karangan	Pertanian (jagung, ketela pohon), pariwisata
6	Kaubun	Pertanian (padi, kelapa sawit), peternakan (sapi potong, ayam kampung), perikanan
7	Kongbeng	Pertanian dan perkebunan (padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kelapa sawit), peternakan, perikanan
8	Long Mesangat	Pertanian (padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, sayuran), perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao), peternakan, perikanan
9	Muara Ancalong	Pertanian, perkebunan (kelapa sawit), peternakan, pertambangan batubara
10	Muara Bengkal	Pertanian (jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau), peternakan, perikanan
11	Muara Wahau	Pertanian (padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, sayuran, buah-buahan, biofarmaka), perkebunan kelapa sawit, peternakan

No	Kecamatan	Potensi Unggulan
12	Rantau Pulung	Pertanian, perkebunan kelapa sawit, peternakan, perikanan tangkap, pertambangan batu bara, pariwisata
13	Sandaran	Pertanian, perkebunan (kelapa sawit, jagung, pisang, durian), peternakan, perikanan, pariwisata
14	Sanggatta Selatan	Pertambangan batubara, perdagangan, pariwisata
15	Sanggatta Utara	Pertambangan batubara, perdagangan, pertanian (jagung), perkebunan kelapa sawit, peternakan, pariwisata
16	Sangkulirang	Pertambangan batubara, pertanian (jagung, karet, sawit), pariwisata
17	Telen	Pertanian, perkebunan kelapa sawit, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan emas.
18	Teluk Pandan	Pertanian jagung, Perkebunan Sawit, peternakan (sapi, babi, unggas), pariwisata, perikanan.

Sumber: Kajian Potensi Keunggulan Kutai Timur, LPPIA UI 2023

G. Wilayah Rawan Bencana

Berikut adalah hasil identifikasi kawasan rawan bencana di Kabupaten Kutai Timur:

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Selama musim hujan, khususnya dari November hingga Maret, Kabupaten Kutai Timur sering mengalami banjir yang menyebabkan genangan air bertahan hingga enam jam. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki banyak kawasan rawan banjir, yang tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan tetapi juga berpotensi berdampak serius pada kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Di Kota Sangatta, terdapat empat titik utama yang rawan banjir, yaitu Kabo Jaya, Gunung Teknik, Sangatta Selatan, dan Kampung Kajang. Banjir di wilayah-wilayah ini sering kali merendam ratusan rumah, dengan ketinggian air mencapai 1-2 meter, memaksa ribuan warga mengungsi ke berbagai titik pengungsian di fasilitas umum seperti kantor, tempat ibadah, sekolah, dan rumah jabatan. Dalam kejadian banjir tahun 2022, beberapa titik pengungsian di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan melibatkan hingga 16 titik pengungsian.

Selain Kota Sangatta, kecamatan lain seperti Bengalon, Rantau Pulung, Teluk Pandan, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Busang, dan Telen juga mengalami banjir setiap tahunnya pada musim hujan. Banjir di kecamatan-kecamatan ini berdampak pada ribuan kepala keluarga, memerlukan evakuasi serta bantuan logistik dan peralatan.

Untuk mengatasi masalah ini, pengendalian banjir harus menjadi prioritas dengan berbagai pendekatan yang meliputi:

1. Pembangunan Infrastruktur Drainase: Peningkatan kapasitas dan efisiensi sistem drainase untuk mengelola volume air yang besar selama musim hujan.
2. Pengaturan Tata Ruang: Perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan daerah aliran sungai guna meminimalkan risiko banjir.
3. Edukasi dan Pelatihan Masyarakat: Pendidikan dan pelatihan tentang tindakan pencegahan dan respon cepat terhadap banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Selain itu, solusi jangka panjang yang berkelanjutan juga penting untuk dipertimbangkan, seperti:

- **Reboisasi:** Penanaman kembali hutan di daerah-daerah yang gundul untuk meningkatkan penyerapan air dan mengurangi limpasan permukaan.
- **Pelestarian Ekosistem Hutan dan Daerah Aliran Sungai:** Melindungi dan melestarikan ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga alami terhadap banjir.

Dengan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan, risiko banjir di Kabupaten Kutai Timur dapat diminimalkan sehingga bisa memastikan keamanan dan kesejahteraan penduduk dalam jangka panjang. Pendekatan holistik yang

melibatkan pembangunan infrastruktur, pengaturan tata ruang, dan pelestarian lingkungan merupakan kunci untuk mengatasi tantangan banjir di Kabupaten Kutai Timur.

2. Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Kawasan yang rawan terhadap bencana alam tanah longsor biasanya ditandai dengan kondisi geografis tertentu, seperti kelerengan yang curam (lebih dari 40%) dan lokasi dekat aliran sungai dengan arus yang deras. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pergeseran batuan induk pembentuk tanah, yang berpotensi menyebabkan longsor, terutama ketika terjadi hujan lebat atau adanya perubahan tata guna lahan yang signifikan.

Di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, kondisi geografis seperti kelerengan yang curam dan kedekatan dengan aliran sungai deras membuat Kabupaten Kutai Timur menjadi rawan bencana tanah longsor. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian khusus dalam hal manajemen risiko bencana

3. Rawan Bencana Kebakaran Lahan dan Pemukiman.

Kabupaten Kutai Timur, yang dikategorikan sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, memerlukan pendekatan komprehensif dan sinergis untuk mencegah terjadinya kebakaran. Berdasarkan pemantauan satelit, Kabupaten Kutai Timur telah menunjukkan peningkatan daerah yang rawan kebakaran. Dalam menghadapi situasi ini, langkah-langkah berikut sangat penting untuk diterapkan:

1. Peningkatan Kesiagaan dan Respons Cepat: Meningkatkan kesiagaan dan respons cepat terhadap indikasi awal kebakaran, termasuk pembentukan tim respons kebakaran yang terlatih dan siap siaga.
2. Pemantauan dan Pengawasan Efektif: Menggunakan teknologi pemantauan, seperti satelit dan drone, untuk mengidentifikasi area rawan kebakaran dan memantau aktivitas di area tersebut.
3. Koordinasi Antar Lembaga: Memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah, organisasi lingkungan, masyarakat setempat, dan pihak swasta untuk pencegahan kebakaran.

4. Edukasi dan Pelibatan Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi mengenai pencegahan kebakaran, termasuk larangan pembakaran lahan terbuka dan praktik-praktik bertani yang berkelanjutan.
5. Pengendalian dan Manajemen Lahan: Menerapkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, termasuk penanaman kembali dan rehabilitasi area yang telah rusak.
6. Infrastruktur Pencegahan Kebakaran: Membangun dan memelihara infrastruktur yang diperlukan, seperti menara pemantau, jalur pemadam kebakaran, dan sumber air yang mudah diakses untuk pemadaman kebakaran.
7. Kesiapsiagaan dan Peralatan: Memastikan tersedianya peralatan pemadaman kebakaran yang memadai dan menjaga kesiapsiagaan fasilitas pemadaman kebakaran.

Mengingat risiko yang tinggi dan dampak yang luas dari kebakaran hutan dan lahan, pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan ini penting untuk melindungi ekosistem, properti, dan, yang paling penting, keselamatan penduduk di Kabupaten Kutai Timur.

Secara umum, capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui program dan kegiatannya adalah cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Kutai Timur mencapai 0,05%, tingkat waktu tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 73,35%, dan penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 161. Pencapaian ini menunjukkan upaya serius Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

2.1.2. Aspek Demografis

Penduduk Kabupaten Kutai Timur memainkan peran ganda dalam pembangunan daerah: sebagai objek, mereka adalah sasaran pembangunan, sementara sebagai subjek, mereka adalah pelaku yang menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, penduduk merupakan aset vital dalam proses pembangunan daerah.

Berdasarkan data BPS Kutai Timur tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 adalah 455.504 jiwa, yang terdiri dari 244.525 pria dan 210.979 wanita. Jumlah ini menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2022 - 2023 sebesar 0,90%. Dari segi rasio jenis kelamin, proporsi jumlah penduduk pria lebih banyak dibandingkan dengan penduduk wanita, dengan rasio jenis kelamin (RJK) sebesar 115. Angka ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Distribusi penduduk menurut jenis kelamin dan sebarannya di berbagai kecamatan memberikan informasi penting mengenai demografi yang berperan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah. Peningkatan jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin yang tinggi di beberapa daerah dapat memengaruhi berbagai aspek pembangunan, termasuk kebutuhan akan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, serta fasilitas dan layanan publik lainnya.

Untuk memaksimalkan potensi pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, penting untuk memastikan bahwa pendekatan pembangunan berbasis penduduk diterapkan. Hal ini termasuk memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan, mengakui peran penting perempuan dan laki-laki dalam berbagai sektor, serta menyediakan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang bagi semua kelompok penduduk. Jumlah dan perkembangan penduduk menurut jenis kelamin serta sebaran di kecamatan, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	2021		RJK	2022		RJK	2023		RJK
		L	P		L	P		L	P	
1.	Muara Ancalong	7.646	6.880	111	7.709	6.919	111	7.695	6.895	112
2.	Muara Wahau	16.292	14.247	114	16.447	14.330	115	16.533	14.482	114
3.	Muara Bengkal	7.209	6.590	109	7.183	6.534	110	7.116	6.475	110
4.	Sangatta Utara	65.291	57.881	113	64.895	57.936	112	66.412	58.998	113
5.	Sangkulirang	12.841	11.262	114	13.079	11.398	115	12.971	11.274	115
6.	Busang	3.001	2.685	112	3.120	2.733	114	3.155	2.773	114
7.	Telen	5.775	4.855	119	5.470	4.658	117	5.328	4.555	117
8.	Kongbeng	16.056	14.232	113	16.174	14.358	113	16.194	14.522	112
9.	Bengalon	23.175	18.998	122	22.954	19.110	120	23.186	19.116	121
10.	Kaliorang	8.630	7.226	119	9.148	7.537	121	9.795	7.887	124
11.	Sandaran	6.417	5.259	122	6.232	5.196	120	5.927	4.951	120
12.	Sangatta Selatan	16.619	14.426	115	16.453	14.316	115	16.422	14.338	115
13.	Teluk Pandan	7.843	6.705	117	7.681	6.693	115	7.608	6.639	115
14.	Rantau Pulung	6.940	6.130	113	7.109	6.335	112	7.336	6.535	112
15.	Kaubun	8.556	7.149	120	8.645	7.295	119	9.041	7.529	120
16.	Karangan	6.978	5.793	120	6.869	5.723	120	6.709	5.504	122
17.	Batu Ampar	4.281	3.729	115	4.408	3.862	117	4.560	3.953	115
18.	Long Mesangat	3.838	3.408	113	3.862	3.416	113	3.827	3.399	113
Jumlah		227.388	197.455		227.438	198.349		229.815	199.825	
Jumlah L + P		424.843		115	425.787		115	429.640		115
Pertumbuhan (%)		0,10			0,10			0,09		

Sumber: Kemendagri, hasil olahan Data SIAK Semester 2 Tahun 2023 Disdukcapil, 2024

Jumlah total penduduk di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil namun lambat selama periode 2021-2023. Berdasarkan data, laju pertumbuhan tahunan sebesar 0.10% tercatat antara tahun 2021 dan 2022, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 0.09% antara tahun 2022 dan 2023. Meskipun pertumbuhan penduduk ini relatif kecil, hal ini menunjukkan adanya stabilitas demografis di Kabupaten Kutai Timur. Stabilitas ini penting untuk perencanaan pembangunan, karena pertumbuhan yang terlalu cepat atau terlalu lambat dapat menimbulkan tantangan dalam penyediaan layanan publik, infrastruktur, dan sumber daya lainnya.

Rasio jenis kelamin (RJK) di Kabupaten Kutai Timur bervariasi antar kecamatan. RJK yang lebih tinggi dari 100 menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan. Variasi RJK ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang berbeda di setiap kecamatan. Misalnya, kecamatan dengan sektor pertambangan yang dominan mungkin memiliki RJK yang lebih tinggi karena pekerjaan di sektor ini lebih banyak diisi oleh laki-laki. Stabilitas RJK dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam pola migrasi atau kelahiran yang bisa mengganggu struktur demografis saat ini.

Kecamatan Sangatta Utara merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Kutai Timur, dengan total populasi mencapai lebih dari 125,000 jiwa pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Sangatta Utara merupakan pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang signifikan, karena keberadaan fasilitas infrastruktur yang lebih baik, peluang kerja yang lebih banyak, dan akses yang lebih mudah terhadap layanan publik. Dengan populasi yang besar, Sangatta Utara berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat menarik investasi dan mendorong perkembangan wilayah sekitarnya.

Beberapa kecamatan, seperti Kaliorang, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam rasio jenis kelamin (RJK). RJK di Kaliorang meningkat dari 119 pada tahun 2021 menjadi 124 pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan jumlah laki-laki dibanding perempuan. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk migrasi laki-laki untuk bekerja di sektor-sektor tertentu seperti pertambangan atau perkebunan, dimana laki-laki lebih dominan bekerja pada sektor ekstraksi maupun

perkebunan. Fenomena ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memahami dampaknya terhadap struktur keluarga, kebutuhan layanan kesehatan, dan pendidikan.

Sebaliknya, beberapa kecamatan seperti Muara Bengkal dan Sandaran menunjukkan sedikit penurunan dalam jumlah penduduk laki-laki dan perempuan selama periode yang sama. Penurunan ini bisa jadi disebabkan oleh faktor-faktor seperti migrasi keluar untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik di tempat lain, atau perubahan dalam kondisi ekonomi lokal yang membuat daerah tersebut kurang menarik bagi penduduk. Penurunan populasi ini perlu diatasi dengan kebijakan yang mendorong pembangunan ekonomi lokal, peningkatan kualitas hidup, dan penyediaan fasilitas yang lebih baik untuk menarik dan mempertahankan penduduk.

Migrasi masuk ke Kabupaten Kutai Timur kemungkinan besar didorong oleh peluang ekonomi yang ditawarkan, terutama di sektor-sektor seperti pertambangan, perkebunan, dan industri pengolahan. Kecamatan seperti Sangatta Utara, yang memiliki infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik, menarik lebih banyak penduduk dari daerah lain. Migrasi masuk ini dapat mengakibatkan peningkatan populasi laki-laki di kecamatan-kecamatan yang memiliki pekerjaan berat atau berisiko tinggi yang umumnya diisi oleh laki-laki.

Migrasi keluar dari Kabupaten Kutai Timur bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya peluang ekonomi yang memadai di beberapa kecamatan, kondisi lingkungan yang kurang mendukung, atau keinginan untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik di daerah lain. Kecamatan seperti Muara Bengkal dan Sandaran yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk, mungkin mengalami migrasi keluar yang lebih tinggi karena faktor-faktor tersebut. Migrasi keluar juga dapat disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi atau lingkungan, yang mendorong penduduk untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain.

Migrasi masuk ke kecamatan-kecamatan tertentu menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang positif, seperti ketersediaan pekerjaan dan kondisi kehidupan yang lebih baik. Ini dapat meningkatkan diversifikasi ekonomi di Kabupaten Kutai Timur, dengan menarik penduduk dari berbagai latar belakang yang dapat berkontribusi pada berbagai sektor ekonomi. Namun, peningkatan populasi yang cepat juga menuntut

pemerintah untuk meningkatkan kapasitas layanan publik dan infrastruktur agar dapat mengakomodasi pendatang baru.

Migrasi keluar menunjukkan adanya tantangan dalam pembangunan daerah, seperti kurangnya lapangan kerja yang memadai, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kurang, serta kondisi lingkungan yang mungkin tidak mendukung. Analisis terhadap penyebab migrasi keluar ini penting untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi akar masalah tersebut. Misalnya, peningkatan investasi dalam sektor-sektor kunci seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan dapat membantu menahan laju migrasi keluar dan bahkan membalikkan tren tersebut.

Secara keseluruhan, pola migrasi di Kabupaten Kutai Timur mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Migrasi masuk membawa peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi, sementara migrasi keluar menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi melalui kebijakan pembangunan yang komprehensif dan inklusif.

Sementara persentase penyebaran penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Proporsi Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	Proporsi Penduduk (%)		
		2021	2022	2023
1.	Muara Ancalong	3,42	3,43	3,40
2.	Muara Wahau	7,17	7,21	7,22
3.	Muara Bengkal	3,25	3,21	3,16
4.	Sangatta Utara	29,00	28,92	29,19
5.	Sangkulirang	5,67	5,71	5,64
6.	Busang	1,34	1,35	1,38
7.	Telen	2,50	2,44	2,30
8.	Kongbeng	7,13	7,16	7,15
9.	Bengalon	9,93	9,92	9,85
10.	Kaliorang	3,73	3,85	4,12
11.	Sandaran	2,75	2,68	2,53
12.	Sangatta Selatan	7,31	7,25	7,16

No	Kecamatan	Proporsi Penduduk (%)		
		2021	2022	2023
13.	Teluk Pandan	3,43	3,39	3,32
14.	Rantau Pulung	3,08	3,13	3,23
15.	Kaubun	3,70	3,74	3,86
16.	Karangan	3,01	2,97	2,84
17.	Batu Ampar	1,89	1,92	1,98
18.	Long Mesangat	1,71	1,71	1,68
Jumlah (%)		100,00	100,00	100,00

Sumber: Kemendagri, Data SIAK Semester 2 Tahun 2023 Disdukcapil, 2024

Berdasarkan data proporsi penduduk di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat bahwa Kecamatan Sangatta Utara konsisten memiliki proporsi penduduk terbesar. Proporsi penduduk di Kecamatan Sangatta Utara meningkat sedikit dari 29,00% pada tahun 2021 menjadi 29,19% pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Kecamatan Sangatta Utara tetap menjadi pusat populasi terbesar di Kutai Timur, yang disebabkan karena faktor ekonomi, infrastruktur, atau fasilitas yang lebih berkembang dibandingkan kecamatan lain.

Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng juga menunjukkan peningkatan proporsi penduduk yang stabil selama tiga tahun terakhir. Proporsi penduduk di Muara Wahau meningkat dari 7,17% pada tahun 2021 menjadi 7,22% pada tahun 2023, sedangkan di Kongbeng, proporsinya bergerak dari 7,13% menjadi 7,15%. Kenaikan ini mengindikasikan adanya daya tarik di kedua kecamatan ini, baik dari sisi peluang kerja, layanan publik, atau kondisi kehidupan yang semakin membaik.

Sebaliknya, beberapa kecamatan seperti Muara Bengkal, Sandaran, dan Telen mengalami penurunan proporsi penduduk selama periode yang sama. Di Muara Bengkal, proporsi penduduk turun dari 3,25% pada tahun 2021 menjadi 3,16% pada tahun 2023. Sandaran mengalami penurunan dari 2,75% menjadi 2,53%, dan Telen dari 2,50% menjadi 2,30%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti migrasi keluar, faktor ekonomi, dan kondisi lingkungan.

Kecamatan Kaliorang mencatat peningkatan signifikan dalam proporsi penduduk dari 3,73% pada tahun 2021 menjadi 4,12% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan perkembangan ekonomi atau infrastruktur di Kaliorang, menjadikannya

tempat yang lebih menarik untuk tinggal dan bekerja. Selain itu, kecamatan lain seperti Kaibun juga mengalami sedikit peningkatan dari 3,70% pada tahun 2021 menjadi 3,86% pada tahun 2023, menunjukkan adanya dinamika yang positif.

Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa kecenderungan proporsi penduduk di setiap kecamatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor demografis, tetapi juga faktor sosial ekonomi, kebijakan pemerintah, kondisi geografis, dan dinamika sosial lainnya. Perubahan proporsi ini dapat dijadikan indikator awal untuk analisis lebih lanjut mengenai kebutuhan pembangunan, alokasi sumber daya, dan perencanaan infrastruktur.

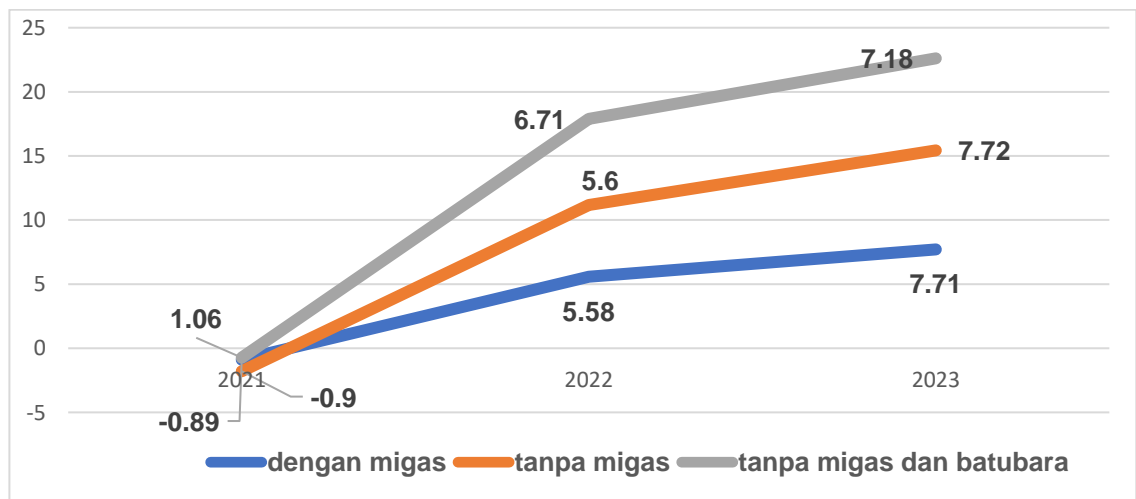
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga melalui indikator-indikator yang diuraikan berikut ini:

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur

Laju pertumbuhan ekonomi dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:



Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kutai Timur Tahun 2021 – 2023
Sumber: BPS Kutai Timur, 2024.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan dinamika yang menarik selama periode 2021 hingga 2023. Data Laju Pertumbuhan Ekonomi diatas mengungkapkan tren pemulihan ekonomi yang signifikan di berbagai sektor, meskipun terdapat perbedaan yang mencolok tergantung pada apakah sektor migas dan batubara diperhitungkan atau tidak.

Secara umum, LPE mengalami perbaikan drastis dari kondisi negatif pada tahun 2021, beranjak ke pertumbuhan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan menyertakan sektor migas menunjukkan angka yang tinggi. Namun ketika sektor migas dikeluarkan dari perhitungan, LPE tetap menunjukkan tren positif yang hampir sebanding. Hal ini menandakan bahwa meskipun migas memberikan kontribusi, namun sektor-sektor non-migas mulai menunjukkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kutai Timur.

Menariknya, ketika sektor batubara juga dikeluarkan, LPE masih menunjukkan angka positif yang cukup kuat. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi ekonomi yang signifikan di luar sektor migas dan batubara, dengan adanya diversifikasi ekonomi yang mulai membuahkan hasil. Sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, industri manufaktur, perdagangan dan sektor lain turut memberikan kontribusi dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sehat, meskipun kontribusi utama masih datang dari sektor sumber daya alam.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi yang berfokus pada pengembangan sektor-sektor non-migas dan non-batubara dapat menjadi strategi jangka panjang yang efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Diversifikasi ekonomi yang ditunjukkan oleh data LPE juga dapat membantu Kabupaten Kutai Timur dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan, terutama jika ada perubahan signifikan dalam permintaan dan harga migas serta batubara.

Secara keseluruhan, LPE Kabupaten Kutai Timur mencerminkan kekuatan pemulihan ekonomi dan potensi pertumbuhan yang luas, menunjukkan bahwa wilayah ini sedang bergerak ke arah diversifikasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

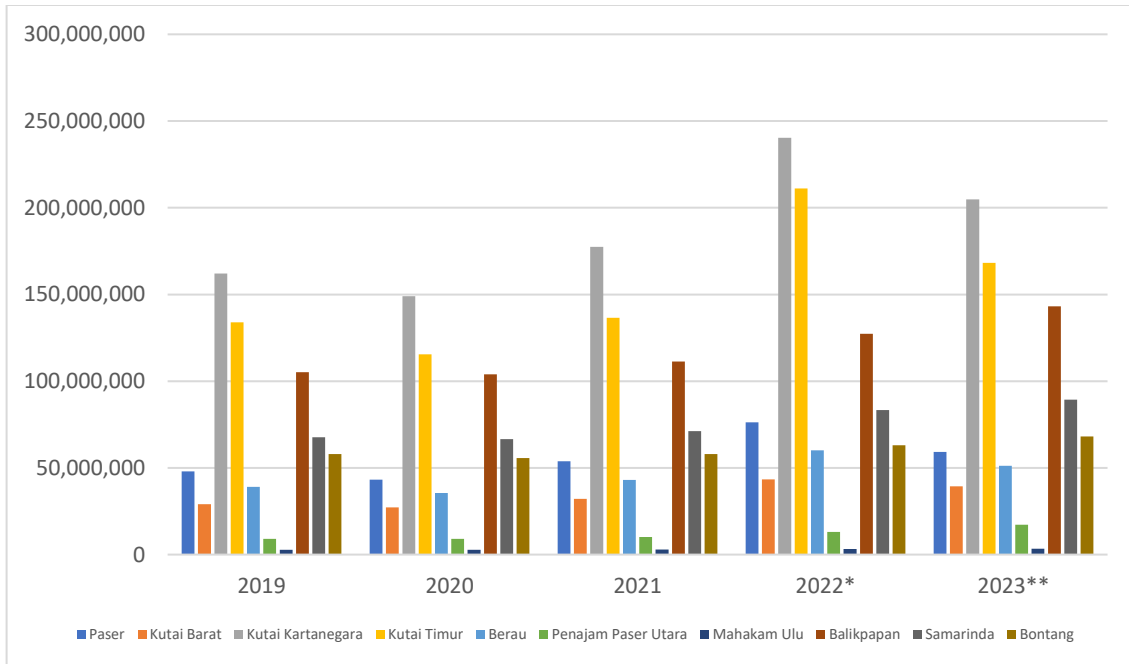
Ini merupakan indikasi positif bagi perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Timur

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang menggambarkan kinerja ekonomi suatu daerah. PDRB mengukur nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor-sektor produktif dalam perekonomian sebuah daerah. Pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDRB adalah melalui produksi, pengeluaran, dan pendapatan, yang masing-masing memberikan perspektif berbeda mengenai kinerja ekonomi.

Dalam konteks Kabupaten Kutai Timur, nilai PDRB memberikan gambaran tentang bagaimana sumber daya yang ada di Kabupaten Kutai Timur diolah menjadi produk atau layanan. Nilai tambah yang tercipta di setiap sektor kegiatan ekonomi menunjukkan efektivitas daerah dalam memanfaatkan potensi sumber dayanya. PDRB dihitung dalam dua harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan (tahun dasar 2010). PDRB atas dasar harga konstan memberikan gambaran tentang perkembangan produksi riil dari masing-masing sektor ekonomi yang tidak terdistorsi oleh inflasi, sementara PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan perkembangan produksi dengan mempertimbangkan pengaruh harga.

PDRB atas dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menempati posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada Tahun 2023, terjadi penurunan dari 211.101.483,67 (Juta Rupiah) menjadi 168.271.523,71 (Juta Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar 20,29%. Penurunan ini juga terjadi pada hampir seluruh Kabupaten/Kota.



Grafik 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kab./Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah)
 Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024.

Berdasarkan Kontribusi, Sektor Pertambangan dan Pengalihan secara konsisten menjadi dominan dalam perekonomian Kutai Timur, dengan proporsi sangat tinggi mencapai 77,75% pada tahun 2020 dan naik signifikan menjadi 85,09% di tahun 2022, meskipun mengalami penurunan menjadi 79,67% pada tahun 2023. Penurunan ini mungkin mencerminkan diversifikasi ekonomi yang sedang berlangsung atau fluktuasi dalam output sektor ini.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Jasa Pertanian, di sisi lain, menunjukkan penurunan kontribusi dari 9,12% pada tahun 2020 menjadi 5,90% pada tahun 2022, sebelum naik lagi menjadi 7,60% pada tahun 2023. Ini menunjukkan volatilitas dalam sektor ini yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi iklim dan pasar.

Sektor Industri Pengolahan memiliki porsi kecil tetapi stabil dalam ekonomi, dengan sedikit penurunan dari 3,55% pada tahun 2020 menjadi 2,55% pada tahun 2022, namun naik lagi menjadi 3,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan upaya untuk mengembangkan industri pengolahan di Kabupaten Kutai Timur meskipun masih dalam skala terbatas.

Sektor Konstruksi menunjukkan tren peningkatan yang positif dari 2,23% pada tahun 2020 menjadi 2,81% pada tahun 2023, menandakan adanya kegiatan pembangunan yang bertambah.

Sementara itu, sektor-sektor lain seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda, Transportasi & Pergudangan, dan Jasa Pendidikan cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi dalam porsi kontribusinya terhadap ekonomi. Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, dan Administrasi Pemerintahan serta sektor-sektor yang lebih kecil lainnya memiliki kontribusi yang relatif kecil dan stabil, menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di sektor-sektor ini tetap konsisten tetapi tidak menjadi penggerak utama ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur dipengaruhi secara signifikan oleh sektor pertambangan. Namun, ada indikasi bahwa diversifikasi ekonomi sedang berlangsung, meskipun pada laju yang berbeda-beda di setiap sektor. Upaya untuk menyeimbangkan struktur ekonomi ini penting bagi ketahanan dan keberlanjutan ekonomi regional di masa depan. Adapun struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur dalam periode 5 (lima) tahun terakhir secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023 (Juta Rp)

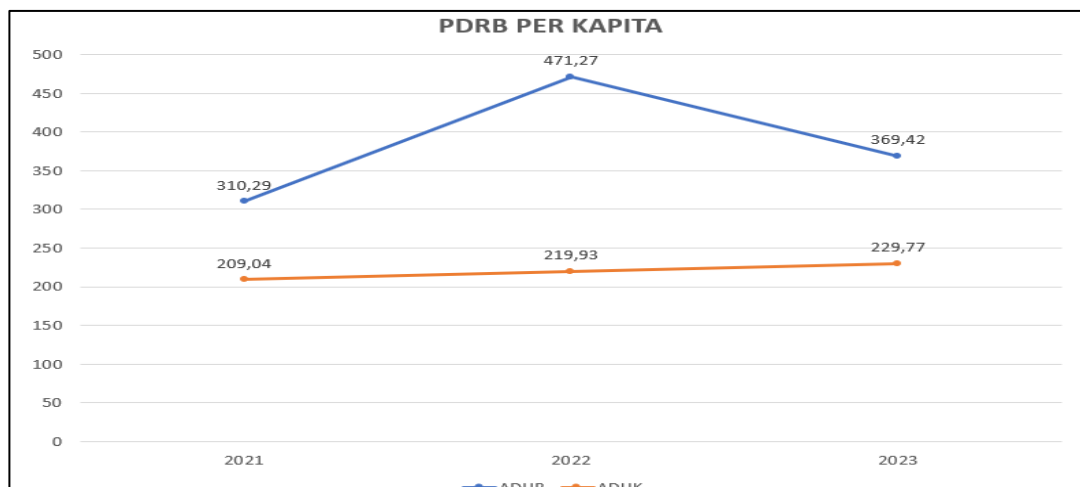
No	Sektor Usaha	2021	%	2022	%	2023*	%
		Harga berlaku		Harga berlaku		Harga berlaku	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Jasa Pertanian	11.366.916,76	8,32	12.460.886,38	5,90	12.783.081,99	7,60
2.	Pertambangan & Penggalian	108.984.971,50	79,77	179.628.766,56	85,09	134.057.967,01	79,67
3.	Industri Pengolahan	4.616.394,59	3,38	5.378.676,25	2,55	5.419.381,65	3,22
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	16.052,18	0,01	17.523,79	0,01	21.913,25	0,01
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.485,63	0,01	18.909,63	0,01	21.326,82	0,01
6.	Konstruksi	2.700.808,85	1,98	3.593.881,65	1,70	4.723.578,12	2,81
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	2.719.778,61	1,99	3.126.743,45	1,48	3.625.015,41	2,15
8.	Transportasi & Pergudangan	1.534.113,34	1,12	1.671.647,11	0,79	1.904.723,29	1,13

No	Sektor Usaha	2021	%	2022	%	2023*	%
		Harga berlaku		Harga berlaku		Harga berlaku	
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	362.434,65	0,27	403.297,05	0,19	449.818,51	0,27
10.	Informasi dan Komunikasi	361.688,74	0,26	397.006,95	0,19	442.990,14	0,26
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	229.051,61	0,17	266.271,52	0,13	303.299,97	0,18
12.	Real Estate	421.083,09	0,31	478.915,58	0,23	524.632,57	0,31
13.	Jasa Perusahaan	89.920,07	0,07	100.218,47	0,05	113.023,52	0,07
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.151.449,69	0,84	1.302.507,68	0,62	1.392.686,20	0,83
15.	Jasa Pendidikan	1.516.813,14	1,11	1.667.829,95	0,79	1.826.759,12	1,09
16.	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	275.568,55	0,20	304.646,40	0,14	335.148,29	0,20
17.	Jasa Lainnya	253.042,30	0,19	283.755,26	0,13	326.177,88	0,19
	Jumlah	136.617.573,31	100,00	211.101.483,67	100,00	168.271.523,71	100

Sumber: BPS Kutai Timur, 2024

3. PDRB Perkapita Kabupaten Kutai Timur

PDRB perkapita Kabupaten Kutai Timur selama periode 2019 - 2023 yang dihitung dengan tahun dasar 2010 cenderung meningkat. Data PDRB perkapita yang dipisahkan antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas dan batubara, terlihat seperti di tabel berikut:



Grafik 2.3 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023. Sumber: BPS Kutai Timur, 2024.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Kutai Timur dalam juta rupiah menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2023, baik dalam harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK).

Pada tahun 2021, PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 310,29 juta rupiah, sementara PDRB per kapita ADHK adalah 209,04 juta rupiah. Ini menunjukkan dasar ekonomi yang cukup stabil meskipun berada dalam kondisi pandemi global yang mempengaruhi ekonomi secara luas. Pada tahun 2022, terdapat lonjakan signifikan dalam PDRB per kapita ADHB yang mencapai 471,27 juta rupiah, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat setelah pemulihan dari pandemi. Namun, PDRB per kapita ADHK hanya meningkat sedikit menjadi 219,93 juta rupiah, yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan ekonomi, inflasi mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan riil penduduk.

Pada tahun 2023, PDRB per kapita ADHB mengalami penurunan menjadi 369,42 juta rupiah, sementara PDRB per kapita ADHK meningkat lebih signifikan menjadi 229,77 juta rupiah. Ini menandakan bahwa meskipun terjadi penurunan nilai nominal PDRB, nilai riil ekonomi yang mencerminkan output produksi meningkat. Hal ini bisa menunjukkan peningkatan efisiensi ekonomi dan stabilitas harga yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Analisis ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Timur mengalami pemulihan ekonomi yang cepat setelah pandemi, namun perlu memperhatikan inflasi dan stabilitas harga untuk memastikan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan PDRB per kapita ADHK yang lebih stabil menunjukkan adanya perbaikan dalam ekonomi riil yang perlu dijaga untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan keuangan yang diperoleh oleh suatu pemerintah daerah, yang diatur melalui peraturan daerah yang sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Sumber PAD ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu

Pajak Daerah yang merupakan kontribusi wajib yang tidak mendapatkan imbalan langsung; Retribusi Daerah yang diberikan sebagai imbalan atas jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah; serta hasil dari pengelolaan aset daerah yang telah dilepaskan, yang meliputi segala bentuk pendapatan yang diakui menurut hukum. Komponen lainnya mencakup berbagai penerimaan yang sah seperti pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak terpisahkan, pendapatan bunga, keuntungan dari fluktuasi nilai tukar, serta komisi atau potongan yang diperoleh dari transaksi penjualan atau penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah. PAD ini menandai kemandirian fiskal daerah dalam mengelola sumber daya dan pendapatan untuk membiayai pengeluaran daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 2.7 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2023

No	Uraian	2021		%	2022		%	2023		%
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1.	PENDAPATAN									
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (Juta Rupiah)	158.318,5	253.159,61	159,91	243.674,61	272.430,83	111,80	787.536,71	901.067,61	114,42
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah (Juta Rupiah)	82.233,79	99.793,47	121,35	102.651,80	98.631,76	96,08	106.829,26	119.665,57	112,02
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah (Juta Rupiah)	4.945,57	6.314,20	127,67	4.657,97	6.356,41	136,46	5.309,93	4.638,18	87,35
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Juta Rupiah)	4.258,76	4.258,76	100,00	4.258,76	5.085,76	119,42	7.441,88	5.332,83	71,66
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Juta Rupiah)	66.880,36	142.793,17	213,51	132.106,10	162.356,91	122,90	667.955,66	771.431,03	115,49

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur, 2024

Data pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan tren positif secara keseluruhan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan mencapai 159,91% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu Rp 253.159.605.188,67. Pada tahun 2022, meskipun persentase pencapaian sedikit menurun menjadi 111,80%, realisasi pendapatan meningkat menjadi Rp 272.430.833.077,81. Pada tahun 2023, tren positif ini berlanjut dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 901.067.608.356,50 atau 114,42% dari anggaran yang ditetapkan. Pendapatan dari pajak daerah juga menunjukkan performa yang kuat, khususnya pada tahun 2023 dengan pencapaian 112,02%. Namun, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan pencapaian hanya 71,66%. Secara keseluruhan, pengelolaan pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan efektivitas dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi.

5. Inflasi Kabupaten Kutai Timur

Peningkatan harga yang dikenal sebagai inflasi yang dibahas di sini memiliki kerangka berbeda dari angka inflasi bulanan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi yang dilaporkan oleh BPS dihitung berdasarkan perubahan harga dari perspektif konsumen, yang ditentukan melalui survei harga untuk berbagai komoditas yang rutin dikonsumsi oleh masyarakat di pasar. Di sisi lain, inflasi sektoral mencerminkan perubahan harga agregat barang dan jasa di semua sektor yang berkontribusi pada Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Inflasi sektoral dihitung melalui analisis indeks harga implisit, yang sering kali disebut dengan deflator PDRB. Deflator ini diestimasi dengan membagi PDRB dengan harga berlaku oleh PDRB dengan harga konstan dan kemudian dikalikan dengan 100 persen.

Sepanjang tahun 2023, Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan bagian integral dari Provinsi Kalimantan Timur, mengalami fenomena ekonomi inflasi dengan tingkat yang relatif terkendali. Inflasi di wilayah Kalimantan Timur tercatat sebesar 3,46 persen, sebuah angka yang menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2022, di mana inflasi mencapai 5,35 persen. Penurunan ini mengindikasikan efektivitas kebijakan dan langkah-langkah

pengendalian harga yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dan stakeholders terkait.

Penanganan inflasi yang terkendali ini tidak hanya menunjukkan stabilitas ekonomi regional tetapi juga mencerminkan keberhasilan dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang serta jasa di pasar. Dengan inflasi yang lebih rendah dan terkendali, daya beli masyarakat dapat dipertahankan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Kutai Timur dan secara lebih luas di Provinsi Kalimantan Timur.

Penurunan tingkat inflasi dari tahun 2022 ke tahun 2023 ini dapat diatributkan kepada berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter yang prudent, stabilitas harga komoditas penting, serta upaya pemerintah dalam mengoptimalkan distribusi barang dan jasa. Hal ini juga menandakan responsivitas pemerintah daerah dalam mengatasi potensi tekanan inflasi, termasuk menghadapi tantangan eksternal yang mungkin mempengaruhi harga di pasar lokal.

Dengan inflasi yang terkendali, Kabupaten Kutai Timur dan Kalimantan Timur secara keseluruhan dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif untuk investasi dan pengembangan usaha, yang penting untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di masa depan. Keberhasilan dalam menjaga inflasi pada level yang terkendali merupakan langkah positif yang berkontribusi terhadap pencapaian stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komprehensif yang digunakan untuk menilai dan membandingkan tingkat pembangunan manusia di berbagai negara atau wilayah. Sebagai salah satu alat ukur yang dirancang untuk mengungkapkan kemajuan bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja, IPM memperhitungkan faktor-faktor yang lebih luas dalam kualitas hidup manusia, termasuk akses dan kualitas pendapatan, kesehatan, dan pendidikan penduduk. Inisiatif ini merupakan upaya dari *United Nation Development Program (UNDP)*

yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 dan sejak itu menjadi bagian integral dari Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) yang diterbitkan setiap tahun. IPM bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kemakmuran suatu wilayah dan menjadi indikator kunci untuk mengevaluasi sejauh mana penduduk sebuah wilayah menikmati hasil pembangunan secara merata dan berkelanjutan.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Tabel 2.8 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

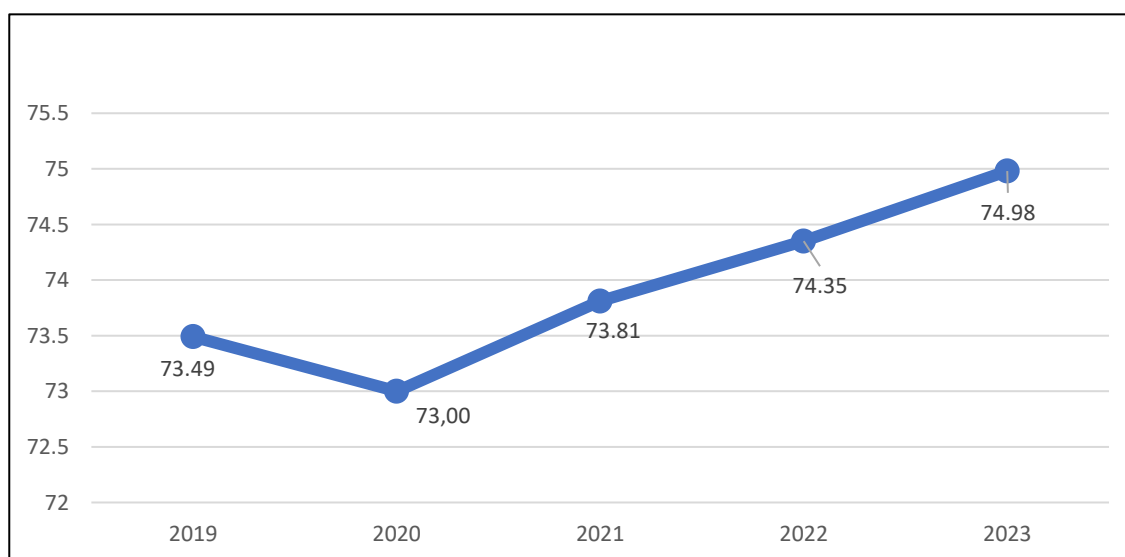
No	IPM	Satuan	2021	2022	2023
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,46	73,47	73,57
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,43	9,44	9,45
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,90	13,00	13,01
4.	Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan	Ribu rupiah	10.868	11.322	11.961
5.	IPM	Indeks	73,81	74,35	74,98

Sumber: LKPJ Bupati Kutai Timur, 2023 (diolah)

Dalam hal kesehatan, terlihat dari sedikitnya peningkatan angka harapan hidup yang naik dari 73,46 tahun di tahun 2021 menjadi 73,57 tahun pada tahun 2023. Meskipun peningkatannya tidak besar, hal ini menandakan perbaikan dalam aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, gizi, dan kebersihan yang secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Pada dimensi pendidikan, terdapat peningkatan rata-rata lama sekolah yang bergerak naik secara perlahan dari 9,43 tahun menjadi 9,45 tahun dalam periode yang sama. Ini menunjukkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, meskipun kemajuan yang dicapai terbilang kecil. Lebih lanjut, harapan lama sekolah juga mengalami kenaikan, dari 12,90 tahun menjadi 13,01 tahun, mengindikasikan aspirasi dan komitmen terhadap pendidikan yang lebih tinggi di kalangan generasi muda.

Sementara itu, dalam aspek standar hidup, tercatat peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dari 10.868 ribu rupiah pada tahun 2021 menjadi 11.961 ribu rupiah pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan belanja masyarakat, yang secara tidak langsung mengindikasikan peningkatan kualitas hidup mereka.



Grafik 2.4 IPM Kabupaten Kutai Timur 2019-2023
Sumber: LKPJ Bupati Kutai Timur, 2023

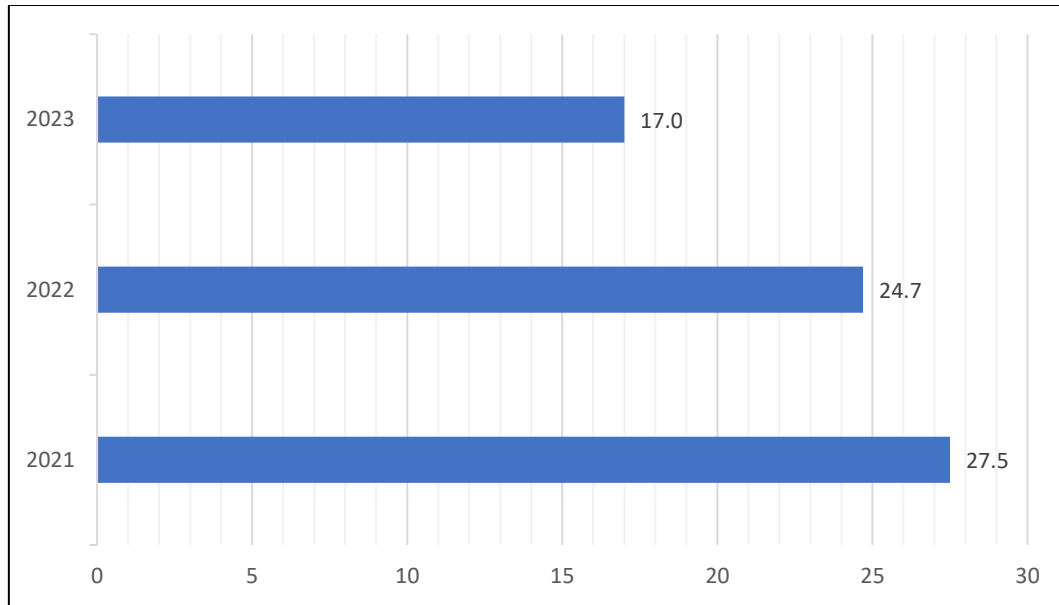
Grafik menunjukkan tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, IPM tercatat sebesar 73,49, namun mengalami penurunan menjadi 73,00 pada tahun 2020, akibat dampak pandemi COVID-19. Setelah itu, terjadi pemulihan yang signifikan dengan IPM meningkat menjadi 73,81 pada tahun 2021, 74,35 pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya di 74,98 pada tahun 2023. Peningkatan IPM

ini mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan manusia, termasuk pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas program-program pemerintah dan upaya masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan di Kabupaten Kutai Timur.

Angka harapan hidup, sebagai indikator kunci dalam mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat, telah menunjukkan tren peningkatan berkelanjutan dari tahun ke tahun di Kabupaten Kutai Timur. Umur Harapan Hidup (UHH), yang mencerminkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, meningkat dari 73,46 tahun pada 2021 menjadi 73,47 tahun pada 2022 dan 73,57 tahun pada 2023. Peningkatan UHH ini menunjukkan perbaikan dalam akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, nutrisi yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sebagai salah satu dimensi yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan UHH mencerminkan kemajuan dalam pembangunan manusia secara keseluruhan di Kutai Timur.

2. Prevalensi Stunting

Salah satu isu kesehatan masyarakat yang kritis di Kabupaten Kutai Timur adalah prevalensi stunting di kalangan balita. Stunting, atau gagal tumbuh pada anak-anak, merupakan indikator penting dari masalah gizi kronis yang mempengaruhi potensi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam beberapa tahun terakhir, Kutai Timur telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menangani masalah ini, dengan angka prevalensi stunting yang menunjukkan penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun.



Grafik 2.5 Prevalensi Stunting Kutai Timur 2021-2023
 Sumber: LKPJ Bupati Kutai Timur, 2023

Pada tahun 2021, angka prevalensi stunting di Kutai Timur tercatat sebesar 27,5%, yang kemudian menurun menjadi 24,7% pada tahun 2022. Upaya berkelanjutan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dan berbagai stakeholder terkait berhasil membawa angka tersebut turun lebih lanjut menjadi 17% pada tahun 2023. Penurunan ini menggambarkan hasil positif dari strategi multisektoral yang diterapkan, meskipun masih di atas target Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2024, yaitu 12,83%.

Dalam rangka mencapai target penurunan stunting tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengimplementasikan serangkaian upaya komprehensif. Langkah-langkah ini mencakup pemberian makanan tambahan untuk balita, persiapan kesehatan bagi calon pengantin, dan penekanan pada pentingnya perawatan kesehatan bayi selama 1.000 hari pertama kehidupan. Selain itu, sosialisasi dan penanganan penyakit yang dapat menyebabkan stunting, seperti diare, menjadi fokus utama, dengan rekomendasi untuk memastikan vaksinasi dan imunisasi lengkap bagi bayi, yang kini mencakup 14 jenis imunisasi termasuk tambahan imunisasi rotavirus, PCV untuk pneumonia, dan vaksin HPV.

Tantangan dalam menurunkan angka stunting di Kutai Timur tidak hanya terkait dengan aspek kesehatan fisik, tetapi juga dengan faktor sosial ekonomi dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan kerja sama lintas sektor, tidak hanya dari instansi pemerintah tetapi juga dari masyarakat itu sendiri.

Pendidikan kesehatan kepada masyarakat menjadi aspek krusial dalam upaya penanganan stunting. Ini tidak hanya berkaitan dengan pengobatan tetapi juga perilaku gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Inisiatif seperti pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan pengaturan lahan untuk penanaman tanaman pangan bergizi menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mengatasi masalah stunting.

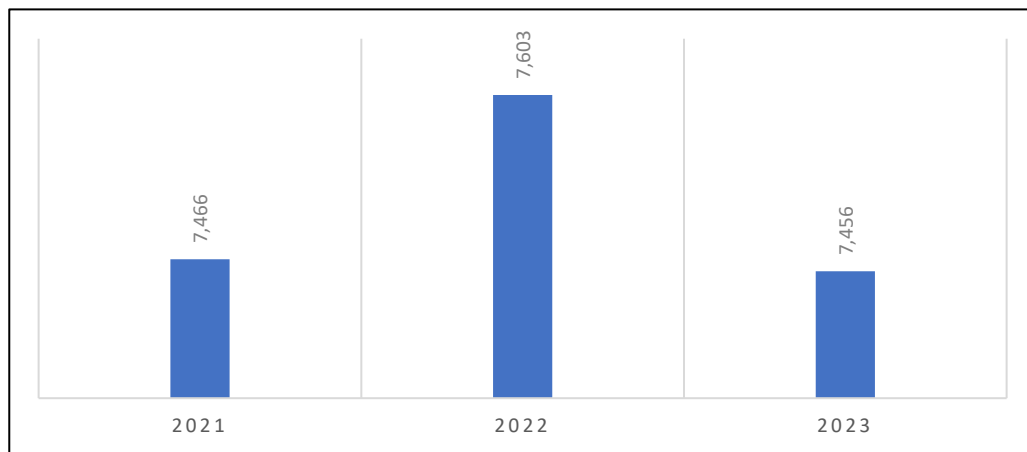
3. Angka Kematian Ibu dan Anak

Salah satu indikator penting dalam menilai IPM adalah indikator kesehatan yang dinilai dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kegunaan: AKB digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat.

Angka kematian Ibu (AKI) melahirkan dan bayi di Kabupaten Kutai Timur masih sangat tinggi atau masih diatas rata-rata nasional, sehingga kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak terkait, untuk berupaya menurunkan kematian tersebut. Kondisi serupa juga terjadi pada kematian bayi.

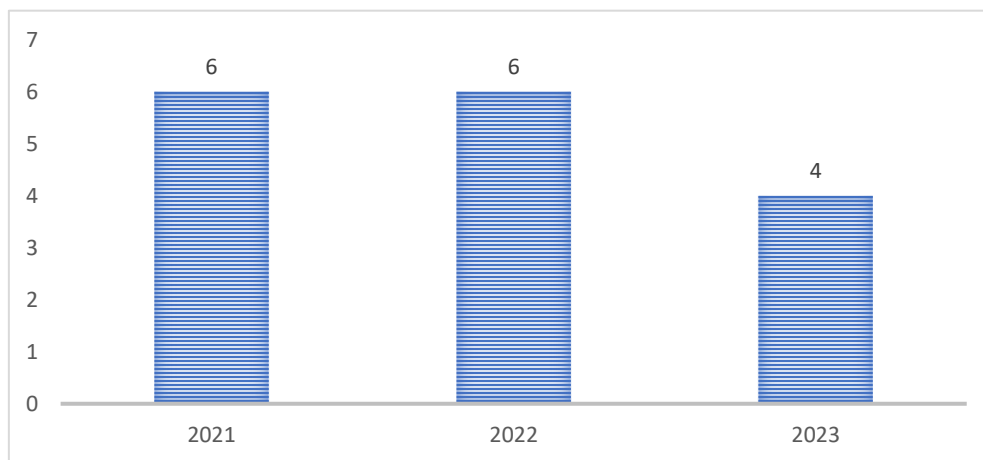
Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kutai Timur, yang bersifat wajib, terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas pelayanan maupun aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar bidang kesehatan. Perkembangan dampak pembangunan bidang kesehatan masyarakat hingga tahun 2022 digambarkan

dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Jumlah Kelahiran Total (JKT) dapat terlihat sebagaimana dalam tabel berikut:



Grafik 2.6 Angka Kelahiran Total Kabupaten Kutai Timur 2021-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

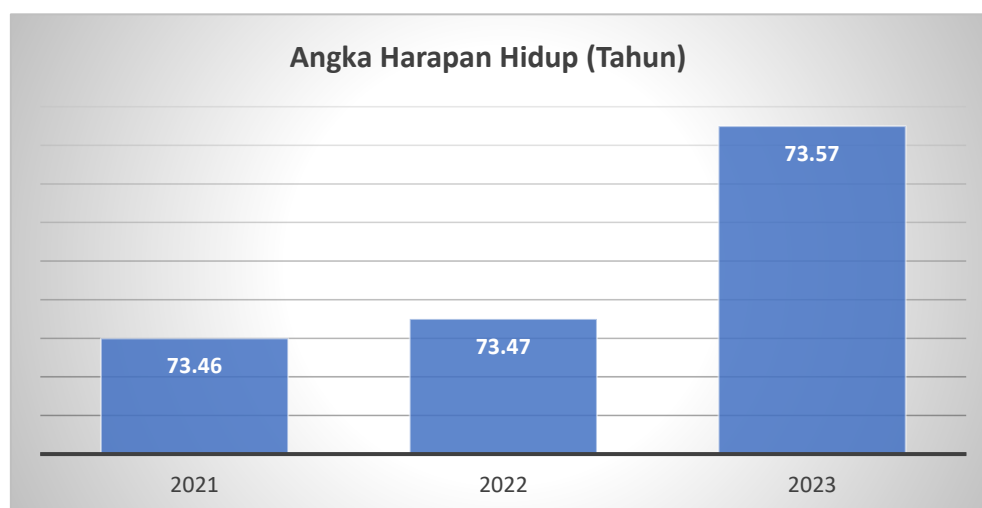
Selama tahun 2023, Kabupaten Kutai Timur mencatat total 7.456 kejadian kelahiran. Rinciannya, terdapat 7.434 bayi yang lahir dalam kondisi hidup dan 22 kasus kelahiran dimana bayi lahir dalam keadaan tidak hidup. Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, yaitu 2022, terjadi penurunan jumlah kelahiran dari total 7.603 kejadian. Penurunan ini mengindikasikan adanya varian dalam dinamika populasi dan kemungkinan pengaruh dari program keluarga berencana atau faktor sosial ekonomi lainnya yang mempengaruhi keputusan berkeluarga.



Grafik 2. 7 Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Kutai Timur
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, 2024

Dari total kelahiran hidup di tahun 2023, tercatat sebanyak 33 bayi mengalami kematian. Beberapa faktor penyebab kematian bayi ini mencakup kondisi kesehatan seperti Pneumonia, Diare, Asfiksia, berat badan lahir rendah (BBLR), dan prematuritas. Kondisi-kondisi ini menunjukkan pentingnya akses ke layanan kesehatan neonatal yang berkualitas dan intervensi kesehatan masyarakat untuk mengurangi risiko kematian bayi.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kutai Timur pada tahun tersebut adalah 4 per 1.000 kelahiran hidup, menandakan penurunan dari tahun 2022 yang mencatat angka kematian bayi sebesar 6 per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator positif dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, serta kesadaran masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak.



Grafik 2. 8 Angka Harapan Hidup Kutai Timur 2021-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, 2024

Selanjutnya, capaian Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2023 mencapai 73,57 tahun, menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada pada angka 73,47 tahun. Peningkatan ini menggambarkan adanya perbaikan dalam aspek-aspek yang menentukan kesejahteraan umum, seperti kesehatan, pendidikan, dan kondisi hidup masyarakat Kutai Timur secara keseluruhan. Peningkatan AHH menandakan adanya kemajuan dalam kualitas

hidup yang dinikmati oleh masyarakat, seiring dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan stakeholders terkait dalam mempromosikan gaya hidup sehat, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta pengurangan risiko kesehatan yang dapat memperpendek rentang hidup individu.

Kabupaten Kutai Timur terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor seni, budaya, dan olahraga, yang memiliki peran penting dalam memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang mencakup berbagai jenis jasa dan barang publik. Pelayanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 untuk Kabupaten Kutai Timur, analisis kondisi daerah khususnya terkait aspek pelayanan umum menjadi langkah awal yang krusial.

Dalam mencapai tujuan ini, penyusunan tabel capaian indikator dari setiap variabel yang dianalisis berdasarkan kondisi eksisting di Kabupaten Kutai Timur diperlukan. Tabel capaian indikator ini akan memberikan gambaran rinci mengenai efektivitas dan cakupan layanan publik yang saat ini disediakan, termasuk menilai sejauh mana layanan tersebut memenuhi kebutuhan dan standar yang diharapkan oleh masyarakat. Informasi ini penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan atau penyesuaian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Analisis yang komprehensif dan terperinci akan mendukung pembuatan keputusan yang tepat dalam merancang RKPD yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat Kutai Timur.

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Dalam konteks pembangunan wilayah, keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan dan kemajuan daerah. SDM berkualitas diartikan sebagai individu-individu yang dilengkapi dengan pendidikan yang memadai, keterampilan yang relevan, serta motivasi yang tinggi untuk berkontribusi dalam perkembangan diri mereka sendiri, masyarakat, dan negara secara umum. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberi perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu fokus utama dalam agenda pembangunannya.

Upaya peningkatan kualitas SDM ini dilakukan melalui serangkaian program pembangunan yang diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, baik formal maupun non-formal. Pendidikan formal mencakup sistem pendidikan konvensional dari tingkat dasar hingga tinggi, sedangkan pendidikan non-formal meliputi berbagai jenis pelatihan dan program pengembangan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kerja dan kompetensi individu. Target dari program-program ini dirancang untuk relevan dan sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah, sehingga mampu menghasilkan SDM yang tidak hanya terdidik dan terampil, tetapi juga mampu beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan dan peluang di era global saat ini. Melalui investasi yang berfokus pada pengembangan SDM, Kutai Timur berupaya untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di masa depan.

Tabel 2.9 Persentase APK, APM dan APS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021-2023

Indikator	Satuan	Tahun		
		2021	2022	2023
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	%	94,05	99,16	99,69
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP	%	62,92	65,27	70,05
Angka putus sekolah SD	%	0,05	0,04	-
Angka putus sekolah SLTP	%	0,05	0,24	-

Indikator	Satuan	Tahun		
		2021	2022	2023
Angka Kelulusan (AL) SD	%	100	100	-
Angka Kelulusan (AL) SLTP	%	100	100	-
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	85,25	91,71	70,26
Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	96,10	100	100
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk (SD)	Rasio	56,58	44,48	45,18
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk (SMP)	Rasio	41,96	41,37	43,64
Rasio guru/murid (SD)	Rasio	17,51	16,98	16,19
Rasio guru murid (SMP)	Rasio	14,60	13,75	13,38
Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	84,62	88,34	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur Tahun 2023

Berdasarkan data pendidikan di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat beberapa tren yang signifikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tingkat SD meningkat dari 94,05% pada tahun 2021 menjadi 99,69% pada tahun 2023, menunjukkan hampir seluruh anak usia SD berpartisipasi dalam pendidikan dasar. APS pada tingkat SLTP juga menunjukkan peningkatan yang positif, dari 62,92% pada tahun 2021 menjadi 70,05% pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan kesadaran dan akses terhadap pendidikan lanjutan.

Angka putus sekolah pada tingkat SD menunjukkan penurunan yang baik, dari 0,05% pada tahun 2021 menjadi 0,04% pada tahun 2022, dengan data untuk tahun 2023 belum tersedia. Pada tingkat SLTP, angka putus sekolah meningkat dari 0,05% pada tahun 2021 menjadi 0,24% pada tahun 2022, dengan data untuk tahun 2023 juga belum tersedia. Angka Kelulusan (AL) pada tingkat SD dan SLTP mencapai 100% pada tahun 2021 dan 2022, menunjukkan bahwa semua siswa yang bersekolah berhasil menyelesaikan pendidikan mereka.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami peningkatan signifikan dari 85,25% pada tahun 2021 menjadi 91,71% pada tahun 2022, namun menurun drastis

menjadi 70,26% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan atau kondisi sosial-ekonomi. Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV meningkat dari 96,10% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan peningkatan dalam kualitas tenaga pengajar.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk pada tingkat SD menunjukkan penurunan dari 56,58 pada tahun 2021 menjadi 45,18 pada tahun 2023, sementara pada tingkat SMP rasio ini relatif stabil, meningkat sedikit dari 41,96 pada tahun 2021 menjadi 43,64 pada tahun 2023. Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD menurun dari 17,51 pada tahun 2021 menjadi 16,19 pada tahun 2023, dan pada tingkat SMP dari 14,60 pada tahun 2021 menjadi 13,38 pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan dalam ketersediaan guru per siswa.

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs meningkat dari 84,62% pada tahun 2021 menjadi 88,34% pada tahun 2022, dengan data untuk tahun 2023 belum tersedia. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan peningkatan positif dalam berbagai indikator pendidikan di Kabupaten Kutai Timur, meskipun ada beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Timur.

2. Kesehatan

Pengembangan sektor kesehatan di Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan tanggung jawab pemerintah, terus mengalami peningkatan, termasuk dalam hal peningkatan kualitas layanan serta kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan dasar. Kemajuan dalam dampak yang dihasilkan dari pengembangan sektor kesehatan pada masyarakat hingga tahun 2023 dapat dilihat melalui indikator seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Total Jumlah Kelahiran (JKT).

Tabel 2.10 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit	9	9	9
2	Jumlah Puskesmas	21	21	21
3	Jumlah Poliklinik	75	66	64
4	Jumlah Pustu	116	116	111
5	Jumlah Dokter Umum	109	211	213
6	Jumlah Dokter Gigi	31	44	45
7	Jumlah Dokter Spesialis	40	51	55
8	Bidan	530	794	816
9	Perawat	874	1204	1232
10	Tenaga Farmasi	120	173	186
11	Tenaga Sanitarian	22	28	37
12	Kesehatan Masyarakat	60	72	79
13	Tenaga Gizi	26	37	41
14	Tenaga Terapi Fisik	10	16	21
15	Tenaga Keteknisan Medis	19	36	45
16	Jumlah Penduduk	440.290	447.940	455.504
17	Jumlah Kecamatan	18	18	18
18	Jumlah Desa/Kelurahan	141	141	141

Sumber: Dinas Kesehatan Kutai Timur, 2024

Dalam bidang kesehatan, Kabupaten Kutai Timur menunjukkan berbagai pencapaian yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Jumlah rumah sakit dan puskesmas tetap stabil dengan masing-masing 9 rumah sakit dan 21 puskesmas selama tiga tahun tersebut, menunjukkan keberlanjutan dalam fasilitas kesehatan dasar. Namun, jumlah poliklinik menurun dari 75 pada tahun 2021 menjadi 64 pada tahun 2023, dan jumlah pustu juga berkurang dari 116 menjadi 111.

Jumlah tenaga medis mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah dokter umum meningkat hampir dua kali lipat dari 109 pada tahun 2021 menjadi 213 pada tahun 2023. Jumlah dokter gigi dan dokter spesialis juga bertambah, masing-masing

menjadi 45 dan 55 pada tahun 2023. Peningkatan ini diiringi oleh peningkatan jumlah bidan dari 530 menjadi 816 dan perawat dari 874 menjadi 1232, yang menunjukkan perbaikan dalam ketersediaan layanan kesehatan primer.

Tenaga kesehatan lainnya seperti tenaga farmasi, sanitarian, kesehatan masyarakat, dan gizi juga mengalami peningkatan jumlah. Tenaga farmasi bertambah dari 120 menjadi 186, sanitarian dari 22 menjadi 37, kesehatan masyarakat dari 60 menjadi 79, dan tenaga gizi dari 26 menjadi 41. Selain itu, terdapat peningkatan dalam jumlah tenaga terapi fisik dari 10 menjadi 21 dan tenaga keteknisan medis dari 19 menjadi 45, memperkuat dukungan layanan kesehatan komplementer.

Peningkatan jumlah tenaga kesehatan ini diimbangi oleh peningkatan jumlah penduduk dari 440.290 pada tahun 2021 menjadi 455.504 pada tahun 2023. Peningkatan tenaga kesehatan dan fasilitas yang ada diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus meningkat di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.11 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

INDIKATOR	Satuan	2021	2022	2023
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,51	0,48	0,47
Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,02	0,02
Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persen	95%	98,23%	98%
Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	67,38%	85,71%	91%
Angka Harapan Hidup	Persen	74,33	73,47	74,33
Pesentase Apotik dan Toko Obat serta ORTP (Indutsri Rumah Tangga Pangan) yang memenuhi syarat	Persen	70,25%	94,80%	75%
Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persen	11%	65,40%	98%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, 2024

Analisis capaian pelayanan umum bidang kesehatan di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan beberapa tren penting. Rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per satuan penduduk mengalami penurunan dari 0,51 pada tahun 2021 menjadi 0,47 pada tahun 2023. Meskipun jumlah fasilitas kesehatan tetap atau sedikit berkurang, peningkatan jumlah penduduk membuat rasio ini menurun, mengindikasikan kebutuhan untuk penambahan fasilitas kesehatan seiring pertumbuhan penduduk. Rasio rumah sakit per satuan penduduk tetap stabil di angka 0,02, menunjukkan bahwa kapasitas rumah sakit relatif konstan meskipun ada pertumbuhan penduduk.

Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 95% pada tahun 2021 menjadi 98,23% pada tahun 2022, dan stabil pada 98% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 67,38% pada tahun 2021 menjadi 91% pada tahun 2023, yang mengindikasikan investasi berkelanjutan dalam pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan.

Angka harapan hidup mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 73,47%, namun kembali ke angka 74,33% pada tahun 2023, menunjukkan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat setelah dampak pandemi. Persentase apotik dan toko obat serta ORTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang memenuhi syarat menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 mencapai 94,80%, namun menurun menjadi 75% pada tahun 2023, mengindikasikan perlunya konsistensi dalam pengawasan dan pemenuhan standar kesehatan.

Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) meningkat drastis dari 11% pada tahun 2021 menjadi 98% pada tahun 2023. Ini menunjukkan keberhasilan kampanye kesehatan publik dan implementasi kebijakan kesehatan yang efektif di tingkat kecamatan, berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan praktik hidup sehat di masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian pelayanan umum bidang kesehatan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas dan jangkauan layanan kesehatan, meskipun terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan yang konsisten.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, terdapat standar teknis mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam konteks perumahan rakyat, standar pelayanan ini mencakup dua aspek utama:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi Korban Bencana: Ini mencakup inisiatif untuk menyediakan dan memperbaiki rumah yang layak bagi individu atau keluarga yang rumahnya rusak atau hancur akibat bencana alam.
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah: Ini berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat yang harus direlokasi karena berbagai program pembangunan atau kebijakan pemerintah.

Tabel 2.12 Capaian Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur 2021-2023

Program	TAHUN		
	2021	2022	2023
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	45,03%	49,45%	65,28%
Capaian Akses Air Minum Layak	48,70%	53,50%	58,10%
Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	75,32%	40,60%	82,58%
Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air /Banjir (Perkotaan)	94,00%	6,40%	53,69%
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	2	2,65	2,26
Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik	52,19%	76,08%	77,58%
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0	0	0

Program	TAHUN		
	2021	2022	2023
Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap	52,00%	26,83%	27,93
Cakupan Penerbitan IUJK	43,12	0	70,59
Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi	6,42	4,99	6,17
Ketaatan Terhadap RTRW	100%	100%	100%
Jumlah Perkada RDTR	1 dok.	1 dok.	1 dok

Sumber: DPUPR Kabupaten Kutai Timur, 2024

Pada tahun 2023, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan signifikan menjadi 65,28% dari 49,45% pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi yang esensial untuk mendukung sektor pertanian.

Capaian akses air minum layak juga menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 53,50% pada tahun 2022 menjadi 58,10% pada tahun 2023. Ini menandakan upaya yang terus-menerus dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Dalam hal pengelolaan sampah perkotaan, terdapat lonjakan capaian yang signifikan dari 40,60% pada tahun 2022 menjadi 82,58% pada tahun 2023. Peningkatan drastis ini merefleksikan keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien di perkotaan.

Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air atau banjir di perkotaan meningkat secara signifikan menjadi 53,69% pada tahun 2023 dari hanya 6,40% pada tahun 2022, menunjukkan upaya yang berhasil dalam mitigasi banjir dan pengelolaan drainase perkotaan. Namun, terdapat penurunan pada rasio tempat ibadah per satuan penduduk dari 2,65 pada tahun 2022 menjadi 2,26 pada tahun 2023, yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab dan solusi terhadap penurunan tersebut.

Persentase bangunan gedung perkantoran dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan menjadi 77,58% pada tahun 2023 dari 76,08% pada tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan dalam pemeliharaan dan kualitas infrastruktur perkantoran.

Perubahan dalam rasio ruang terbuka hijau dan cakupan penerbitan IUJK pada tahun 2023 tidak tersedia, mengindikasikan area yang membutuhkan perhatian dan strategi baru untuk memastikan pencapaian target di masa mendatang. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap mengalami peningkatan kecil menjadi 27,93% pada tahun 2023 dari 26,83% pada tahun 2022, menandakan perbaikan bertahap dalam kondisi infrastruktur jalan. Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat menjadi 6,17 pada tahun 2023 dari 4,99 pada tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan dalam kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja terampil.

Ketaatan terhadap RTRW dan jumlah Perkada RDTR tetap pada 100% dan 1 dokumen secara berturut-turut, menunjukkan konsistensi dalam pengaturan dan penerapan peraturan tata ruang wilayah. Pembangunan infrastruktur transportasi di Kabupaten Kutai Timur memegang peranan kunci dan strategis dalam mendukung pertumbuhan serta pemerataan pembangunan. Keterbatasan akses transportasi, dikombinasikan dengan pola sebaran penduduk yang tidak merata, berpotensi menciptakan kesenjangan dalam proses pembangunan dan memperburuk disparitas antarwilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai menjadi langkah awal yang krusial dalam mengatasi masalah ini dan mendorong pemerataan pembangunan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Indikator Kinerja Program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2021-2026, khususnya untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dinas ini bertugas mengimplementasikan dan memonitor berbagai program serta inisiatif yang sesuai dengan target dan tujuan yang tercantum dalam RPJMD, yang berfokus pada peningkatan kualitas perumahan rakyat dan pengembangan kawasan permukiman.

Tabel 2.13 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kutai Timur 2021-2023

Program	TAHUN		
	2021	2022	2023
Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)	0,15%	25,00%	23%
Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten Yang Ditangani	30,67 % (3 Lokasi SK 2016)	30,67% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	23%
Cakupan penerbitan ijin pengembangan	62,85	0	70,59
Berkurangnya Jumlah Unit RTLH	0,25	0,25	0,24

Sumber: Dinas Perkim Kabupaten Kutai Timur, 2024

Pada tahun 2023, capaian dari beberapa indikator kinerja mencerminkan kemajuan serta tantangan dalam sektor perumahan rakyat dan pengembangan kawasan permukiman.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah dalam aspek penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, dimana capaian pada tahun tersebut tercatat sebesar 0,00%. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada progres yang signifikan dalam menyediakan atau merehabilitasi rumah untuk korban bencana, suatu area yang memerlukan perhatian dan upaya intensif untuk peningkatan di masa mendatang.

Dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh, telah dicapai progres sebesar 23,00% untuk kawasan dengan luas di bawah 10 hektar yang telah ditangani. Ini menunjukkan komitmen dan langkah positif dalam mengurangi prevalensi permukiman kumuh, namun tetap memerlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target yang lebih ambisius.

Pencapaian lain yang relevan adalah berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan luas lebih dari 10 hektar sebesar 0,24%. Meskipun penurunan ini tampak minor, hal ini tetap mencerminkan kemajuan dalam upaya peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat.

Terkait dengan penyediaan perumahan yang sudah dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), tercatat capaian sebesar 23,00%. Ini menandakan bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk peningkatan dalam aspek penyediaan fasilitas dan utilitas yang memadai di perumahan yang ada.

Selain itu, terdapat capaian yang signifikan dalam cakupan penerbitan izin pengembangan, yang mencapai 70,59%. Capaian ini menunjukkan efektivitas dalam proses perizinan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, yang merupakan aspek kunci dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur perumahan yang terencana dan berkelanjutan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Untuk mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, khususnya dalam aspek Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, terdapat tiga instansi utama yang bertanggung jawab.

Kerjasama dan koordinasi antar ketiga instansi ini sangat penting untuk memastikan tercapainya kondisi yang kondusif, aman, dan terlindungi bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Masing-masing lembaga ini memiliki peran khusus yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD, khususnya dalam aspek ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

Tabel 2.14 Capaian Urusan Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kab. Kutai Timur Tahun 2021-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota (%)	%	0,05	0,05	0,05
2	Tingkat Waktu Tanggap (Time Response Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	%	97,83	97,83	73,35
3	Indeks Resiko Bencana	Indeks	188	190	161
4	Persentase Penegakan PERDA	%	53,99	72,41	65

Sumber: Dinas PKP, BPBD dan Sat Pol PP Kabupaten Kutai Timur, 2024

Dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur untuk periode tahun 2021-2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Satuan Polisi Pamong Praja, telah melaksanakan program dan kegiatan yang strategis. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada tahun 2023, capaian dari indikator kinerja tersebut menunjukkan hasil yang bervariasi, yang mencerminkan kemajuan serta tantangan dalam sektor ini.

Salah satu capaian yang dicatat adalah cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten, yang tercatat sebesar 0,05%. Angka ini, meskipun tampak kecil, menandakan upaya yang telah dilakukan dalam memberikan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di wilayah yang terdampak. Efektivitas dan ketersediaan layanan ini merupakan faktor penting dalam manajemen risiko dan respons terhadap kebakaran.

Tingkat waktu tanggap (time response limit) untuk daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dicatat sebesar 73,95%. Ini menunjukkan seberapa cepat tim pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat merespons panggilan

darurat. Waktu tanggap yang cepat kritikal dalam meminimalisir kerusakan dan korban akibat kebakaran.

Selanjutnya, terdapat penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 161 poin. Penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan bencana yang dilakukan telah efektif dalam mengurangi risiko bencana di Kabupaten Kutai Timur. Reduksi indeks risiko bencana ini penting untuk membangun ketahanan komunitas terhadap bencana alam dan kebakaran.

Capaian lain yang penting adalah persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang tercatat sebesar 65,00%. Penegakan Perda merupakan aspek kunci dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum, serta memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah diikuti oleh masyarakat.

6. Sosial

Urusan wajib pemerintahan di bidang sosial memiliki peran vital dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Tujuan utama dari urusan ini adalah untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat, adil, dan berkeadilan, di mana setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan sosial yang memadai. Ini mencakup aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan layak, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.15 Capaian Bidang Sosial
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

Program	TAHUN		
	2021	2022	2023
Persentase Panti Sosial atau Lembaga Pelatihan yang Menerima program pemberdayaan sosial baik melalui kelompok maupun perorangan	66,15%	71,73%	64,28%
Persentase Warga Negara Migran Yang Ditangani	50,00%	100%	20%
Persentase PMKS yang mendapatkan Jaminan Dan Perlindungan Sosial kelompok maupun perorangan	66,15%	71,73%	90,87%

Program	TAHUN		
	2021	2022	2023
Persentase Korban Bencana Kabupaten Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100%	98,69%	100%
Persentase PMKS Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	34,41%	30,11%	100%
Persentase PMKS Yang Mendapatkan Jaminan Dan Perlindungan Sosial	66,51%	66,79%	64,28%
Nilai SAKIP	73,81	71,73	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur, 2024

Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian indikator kinerja di bidang sosial. Capaian ini pada tahun 2023 telah menunjukkan hasil yang signifikan, yang mencerminkan komitmen dan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Timur.

Salah satu capaian penting adalah persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial, baik secara kelompok maupun perorangan, tercatat sebesar 64,28%. Meskipun terjadi penurunan dari 66,79% pada tahun 2022, angka ini masih menunjukkan komitmen kuat terhadap penyediaan jaminan sosial bagi PMKS.

Di sisi lain, persentase warga negara migran yang menjadi korban tindak kekerasan tercatat sebesar 20%, menandakan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam perlindungan terhadap kelompok rentan ini. Peningkatan signifikan terlihat pada persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial, yang mencapai 100% pada tahun 2023, melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yang hanya sebesar 34,41%. Ini menunjukkan efektivitas program rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial.

Selanjutnya, persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial mencapai 90,87%, menunjukkan peningkatan signifikan dalam upaya penyediaan jaminan sosial. Sementara itu, persentase warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial mencapai 100%,

menandakan bahwa sistem perlindungan sosial telah berfungsi efektif dalam merespons kebutuhan mendesak akibat bencana.

Analisis kesesuaian kegiatan dan target kinerja program menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur. Penurunan pada indikator tertentu seperti persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial, dari 66,79% pada tahun 2022 menjadi 64,28% pada tahun 2023, memerlukan evaluasi dan penyesuaian strategi untuk memastikan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Sebaliknya, peningkatan yang luar biasa pada persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dari 30,11% pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2023 menunjukkan capaian yang melebihi ekspektasi dan target RPJMD, mencerminkan efektivitas intervensi sosial yang telah dilakukan.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian indikator kinerja di sektor tenaga kerja. Pada tahun 2023, capaian dari indikator kinerja tersebut memberikan gambaran mengenai efektivitas dan dampak dari intervensi yang dilakukan dalam meningkatkan kondisi tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Kutai Timur.

Pertama, persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Rencana Tenaga Kerja (RTK) mencapai 50%, menandakan bahwa separuh dari kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan perencanaan strategis dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Ini menunjukkan adanya upaya yang terstruktur dalam merespons kebutuhan pasar kerja dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan relevan dengan tujuan pembangunan tenaga kerja.

Lebih lanjut, persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi mencapai 71,75%, menegaskan pentingnya pelatihan vokasional dan pengembangan kompetensi sebagai alat untuk meningkatkan employability dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini juga mencerminkan kualitas dari program

pelatihan yang diselenggarakan, yang berhasil menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten.

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan, baik dalam maupun luar negeri, melalui mekanisme layanan antar kerja mencapai 26,52%. Angka ini mengindikasikan bahwa lebih dari seperempat tenaga kerja telah berhasil ditempatkan melalui sistem layanan antar kerja, yang merupakan indikator positif terhadap efektivitas mekanisme penempatan tenaga kerja yang ada.

Dalam aspek tata kelola kerja yang layak, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak, meliputi penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lembaga Kerjasama Bipartis, struktur upah, dan kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, mencapai 62,43%. Ini menunjukkan kemajuan dalam upaya memastikan lingkungan kerja yang adil dan layak bagi pekerja.

Di sisi transmigrasi, indeks tahapan perencanaan kawasan transmigrasi sebesar 55,00, indeks perkembangan pengembangan kawasan transmigrasi sebesar 61,14, dan indeks pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi juga sebesar 55,00, menunjukkan progres yang signifikan dalam pengembangan dan pemberdayaan kawasan transmigrasi. Angka-angka ini mencerminkan upaya yang dilakukan dalam merencanakan, mengembangkan, dan memberdayakan masyarakat dalam kawasan transmigrasi, yang merupakan aspek penting dari pembangunan sosial ekonomi wilayah.

Tabel 2.16 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

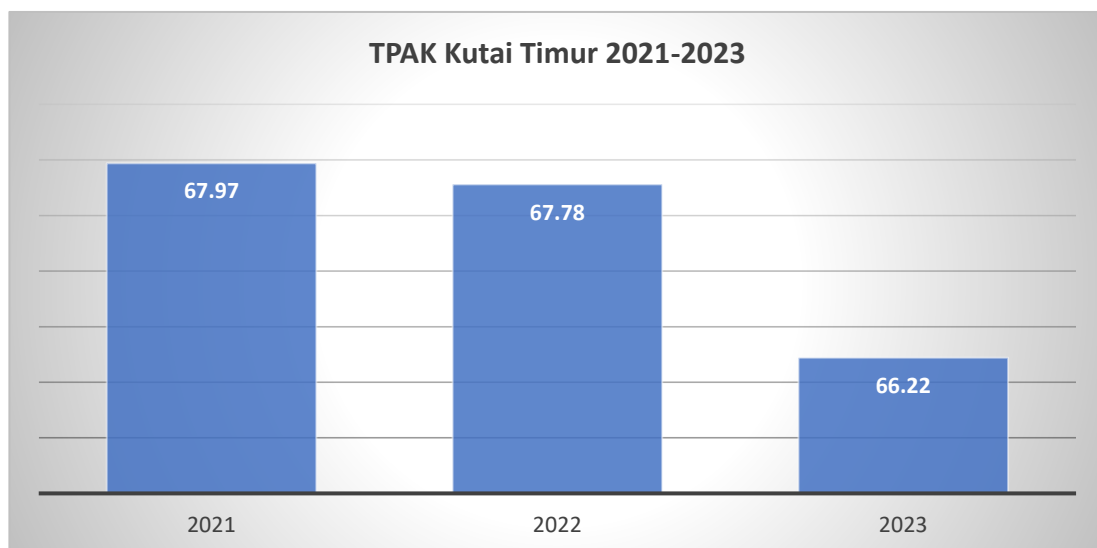
Program (Outcome)	TAHUN		
	2021	2022	2023
Persentase Lulusan Pelatihan Yang Memiliki Keterampilan/ Kompetensi	69,00%	63,10%	71,75%
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	30,62%	112,37%	26,52%
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak (PP/PKB, LKS Bipartis, Struktur Upah Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	75,99%	70,02%	62,43%

Program (Outcome)	TAHUN		
	2021	2022	2023
Indeks Tahapan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	45	50	55
Indeks Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi	45	50	55
Indeks Perkembangan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	45	50	61,14

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur, 2024

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah indikator penting yang mencerminkan seberapa besar partisipasi tenaga kerja dalam perekonomian suatu daerah, dengan mempertimbangkan perbedaan usia dan gender. TPAK dihitung berdasarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam suatu periode survei. Di Indonesia, TPAK biasanya lebih rendah di kalangan usia muda (15-24 tahun) karena banyak yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa, dan di kalangan usia lanjut (di atas 65 tahun) karena banyak yang sudah pensiun. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan antara TPAK laki-laki dan perempuan, dengan TPAK perempuan umumnya lebih rendah.

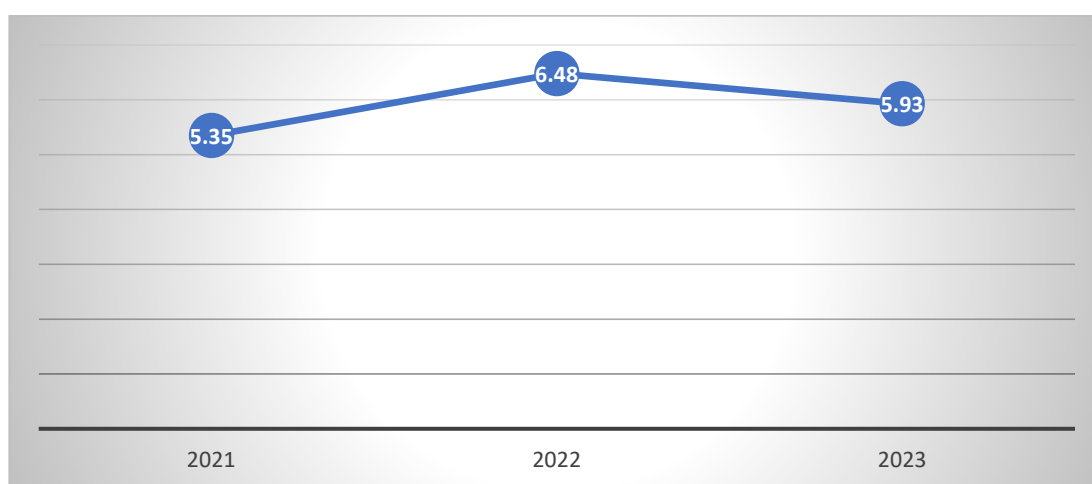


Grafik 2.9 TPAK Kutai Timur 2021-2023
Sumber: LKPJ Bupati Kutai Timur, 2023

Di Kabupaten Kutai Timur, TPAK terlihat fluktuatif selama periode 2021-2023, dengan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Grafik menunjukkan Tren Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, TPAK tercatat sebesar 67,97%, kemudian sedikit menurun menjadi 67,78% pada tahun 2022, dan kembali turun lebih signifikan menjadi 66,22% pada tahun 2023. Penurunan TPAK ini mengindikasikan bahwa proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja berkurang selama periode 2021-2023. Penurunan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kutai Timur.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah persentase pengangguran dalam populasi angkatan kerja. Pengangguran ini meliputi mereka yang sedang mencari kerja, yang sedang mempersiapkan usaha, yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang telah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT menjadi indikator kunci untuk menilai ketersediaan lapangan kerja dan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPT, semakin besar potensi kerawanan sosial.



Grafik 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kutai Timur 2021-2023
Sumber: LKPJ Bupati Kutai Timur, 2023

Di Kabupaten Kutai Timur, TPT juga menunjukkan fluktuasi. Tahun 2021 TPT adalah 5,35%, namun pada tahun 2022, TPT meningkat menjadi 6,48%. Peningkatan ini mengindikasikan tantangan dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap angkatan kerja, yang memerlukan perhatian dan strategi khusus dari pihak terkait untuk mengurangi tingkat pengangguran.

4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan wajib bukan pelayanan dasar terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan komitmen dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak di masyarakat mendapatkan perlindungan, pemberdayaan, serta kesejahteraan yang layak. Upaya ini mencakup serangkaian kebijakan, program, dan inisiatif yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.17 Capaian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Timur 2021-2023

Program (Outcome)	Tahun		
	2021	2022	2023
Profil Gender Dan Anak	1 Dok.	3 Dok.	1 Dok
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,72	-	53,00
Rasio KDRT	0,004	0,005	0,007
Kota Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	Madya
Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,16	0,026	0,027

Sumber: DPPPA Kabupaten Kutai Timur, 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memainkan peranan penting dalam mengimplementasikan serangkaian program dan aktivitas yang strategis. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan, khususnya dalam ranah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2023. Hasil dari upaya ini

mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam bidang tersebut dan menandakan dedikasi serta komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi isu-isu terkait gender dan anak.

Salah satu pencapaian yang menonjol adalah peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mencapai angka 53 pada tahun 2023, yang merupakan langkah maju dalam usaha mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Timur. Meskipun data pencapaian IDG untuk tahun 2022 belum diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka tersebut pada tahun 2023 menunjukkan kemajuan yang berarti.

Selain itu, tercatatnya rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada angka 0,007 menjadi indikator penting yang menggambarkan efektivitas program pencegahan dan penanganan KDRT. Upaya ini dilengkapi dengan pencapaian dalam dokumentasi Profil Gender dan Anak, yang tersedia dalam satu dokumen penting untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terkait.

Kemajuan signifikan juga terlihat dari status Kota Layak Anak (KLA) yang berhasil dicapai pada level Madya, menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Rasio kekerasan terhadap anak yang mencapai 0,027 juga mengindikasikan komitmen kuat terhadap perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan.

5. Pangan

Urusan pemerintah di bidang pangan memegang peran krusial dalam memastikan kesejahteraan dan keamanan pangan bagi seluruh penduduk. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan dan pengawasan komprehensif terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.

Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, program, dan regulasi yang mendukung rantai pangan, dari produksi hingga konsumsi, untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Tujuan utamanya adalah mencapai ketahanan pangan yang tinggi, mengurangi kelaparan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Tabel 2.18 Capaian Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

Program (Outcome)	Tahun		
	2021	2022	2023
Ketersediaan Pangan Utama	43,66%	32,56%	32,77%
Nilai Tukar Petani (NTP)	109,66%	100,62%	102,31%
Penguatan Cadangan Pangan	70%	72,39%	72,98%
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,40%	87,10%	87,00
Persentase Desa Yang Memiliki Lumbung Pangan	4,29%	3,54%	34,75%
Penanganan Daerah Rawan Pangan	19,51%	59,09%	24,53
Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	95,00%	53,33%	89,58%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur, 2024

Dinas Ketahanan Pangan telah memainkan peranan kunci melalui pelaksanaan berbagai program dan aktivitasnya yang dirancang khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dalam sektor pangan pada tahun 2023. Hasil dari upaya ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam bidang ketahanan pangan dan menandakan dedikasi serta komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi isu-isu terkait pangan di Kabupaten Kutai Timur.

Dalam tahun 2023, berbagai capaian indikator kinerja telah menunjukkan hasil yang positif dan beragam. Persentase desa yang memiliki lumbung pangan mencapai 34,75%, menandakan langkah maju dalam usaha memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tercatat sebesar 87,00%, yang mengindikasikan adanya peningkatan dalam pola konsumsi pangan yang harapan di masyarakat. Penguatan cadangan pangan mencapai angka 72,98%, menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya pangan untuk memastikan ketersediaannya dalam situasi darurat.

Nilai Tukar Petani (NTP), yang merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan ekonomi petani dalam bertukar produk pertanian dengan barang dan jasa lain, tercatat sebesar 102,31%, menunjukkan kondisi ekonomi petani yang relatif baik. Ketersediaan pangan utama tercatat sebesar 32,77%, yang menandakan upaya yang berhasil dalam memastikan ketersediaan pangan utama untuk masyarakat. Penanganan daerah rawan pangan tercatat sebesar 24,53%, meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun angka ini masih di atas target RPJMD yang sebesar 20,00%, menandakan keberhasilan dalam mengelola daerah yang rawan pangan. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang dilakukan mencapai 89,58%, menunjukkan keberhasilan dalam menjaga standar keamanan pangan.

Analisis kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja program menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara aktivitas yang dijalankan dengan pencapaian indikator yang ditetapkan dalam RPJMD. Peningkatan dalam penguatan cadangan pangan dari 72,39% pada tahun 2022 menjadi 72,98% pada tahun 2023, serta peningkatan dalam ketersediaan pangan utama dari 32,56% menjadi 34,75% pada tahun yang sama, menunjukkan efektivitas intervensi yang dilakukan. Meskipun terdapat penurunan dalam penanganan daerah rawan pangan, capaian ini masih melampaui target yang telah ditetapkan, menegaskan komitmen Dinas Ketahanan Pangan dalam memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur.

Selanjutnya untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Kutai Timur menjadi bagian integral dari strategi pemerintah dalam urusan pangan. Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk melestarikan dan mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian yang ada guna menjamin ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur. Adapun Peran dan Strategi Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- a. Inventarisasi dan Verifikasi Lahan: Pemerintah melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap lahan pertanian untuk memastikan lahan yang ada tetap digunakan sesuai peruntukannya. Proses ini melibatkan verifikasi lapangan

untuk mengidentifikasi apakah lahan tersebut masih berfungsi sebagai lahan sawah atau telah beralih fungsi.

- b. **Regulasi dan Kebijakan:** Penerapan kebijakan yang ketat mengenai penggunaan lahan dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-produktif atau pemukiman. Kebijakan ini didukung oleh koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- c. **Pengembangan Infrastruktur Pertanian:** Pemerintah juga fokus pada peningkatan infrastruktur pendukung pertanian, seperti sistem irigasi yang efisien dan akses pasar yang lebih baik bagi petani. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan kesejahteraan petani.
- d. **Pendidikan dan Pendampingan:** Program pendidikan dan pendampingan bagi petani juga dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang praktik pertanian berkelanjutan dan penggunaan teknologi modern.
- e. **Pelestarian Ekosistem:** Upaya pelestarian ekosistem juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung keberlanjutan pertanian. Ini termasuk reboisasi dan perlindungan daerah aliran sungai.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah daerah berupaya untuk memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian di Kabupaten Kutai Timur. Upaya ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini tetapi juga untuk menjamin ketersediaan pangan di masa depan, mendukung perekonomian daerah, dan menjaga keseimbangan ekosistem.

6. Pertanahan

Dinas Pertanahan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di bidang pertanahan, dengan memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan selaras dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

Tabel 2.19 Capaian Bidang Pertanahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

Program (Outcome) Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah Kasus Yang terselesaikan	7 Kasus	7 Kasus	22
Persentase Antara Luas Bidang Tanah Yang Sudah Diselesaikan Ganti Kerugian/Jumlah Bidang Tanah Target Ganti Kerugian	86,00%	94,22%	96%
Terdokumentasinya Administrasi Pertanahan, dan Penatagunaan Tanah	1 Dok.	1 Dok.	1 dok
Jumlah Laporan Izin Yang Diterbitkan	1 Lap.	1 Lap.	
Jumlah Laporan Rekomendasi Pemberian Izin Lokasi (Rekomendasi KKPR)		1 Lap.	
Persentase Antara Luas Bidang Jumlah Laporan Hasil Survei Tanah Ulayat			100
Jumlah Laporan Inventarisasi Tanah Kosong		1 Dok.	100

Sumber: Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, 2024

Dinas Pertanahan telah mengambil peran strategis melalui implementasi berbagai program dan aktivitas yang dirancang khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dalam sektor pertanahan pada tahun 2023. Hasil dari upaya-upaya tersebut mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan dan penyelesaian isu-isu pertanahan, serta menunjukkan komitmen dan dedikasi pemerintah daerah dalam memperbaiki dan memperkuat tata kelola pertanahan di Kabupaten Kutai Timur.

Capaian indikator kinerja untuk urusan pertanahan pada tahun 2023 mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan tanah. Di antaranya, penyelesaian sejumlah 22 kasus sengketa tanah menandakan peningkatan signifikan dalam penanganan masalah pertanahan, dibandingkan dengan hanya 7 kasus yang berhasil diselesaikan pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa tanah.

Selanjutnya, pencapaian persentase sengketa tanah garapan yang bisa diselesaikan berdasarkan berkas yang masuk sebesar 100% mencerminkan keberhasilan penuh dalam penanganan sengketa tanah garapan, yang berarti setiap kasus yang masuk dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini merupakan indikasi kuat dari sistem pengelolaan sengketa tanah yang baik dan responsif.

Persentase antara luas bidang tanah yang sudah diselesaikan ganti kerugian dengan jumlah bidang tanah target ganti kerugian sebesar 96,00% menunjukkan efektivitas dalam penyelesaian kompensasi tanah, yang hampir mencapai target penyelesaian sepenuhnya. Ini menegaskan komitmen terhadap hak-hak pemilik tanah dan penerapan keadilan dalam penggantian kerugian.

Penetapan tanah ulayat dan pengelolaan serta pemanfaatan tanah kosong, yang masing-masing mencapai persentase administrasi sebesar 100%, serta inventarisasi tanah kosong yang terdokumentasi dalam satu dokumen, dan terdokumentasinya administrasi pertanahan serta penatagunaan tanah dalam satu dokumen lainnya, semuanya mencerminkan pencapaian yang luar biasa dalam aspek administrasi dan manajemen tanah. Keberhasilan ini menunjukkan efisiensi dan ketelitian dalam dokumentasi serta pemanfaatan tanah, yang penting untuk pengembangan berkelanjutan dan pencegahan konflik tanah di masa depan.

Analisis kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja program menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Pertanahan telah berhasil dalam mencapai tujuan yang diharapkan, sebagaimana dibuktikan oleh indikator capaian yang telah dicapai.

7. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat pengukuran penting yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. IKLH merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan dan Environmental Performance Index (EPI), yang mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan lingkungan.

IKLH berperan penting dalam menilai kinerja program pemerintah terkait perbaikan kualitas lingkungan hidup. Indeks ini memberikan gambaran umum tentang seberapa baik suatu wilayah mengelola lingkungannya. Informasi yang

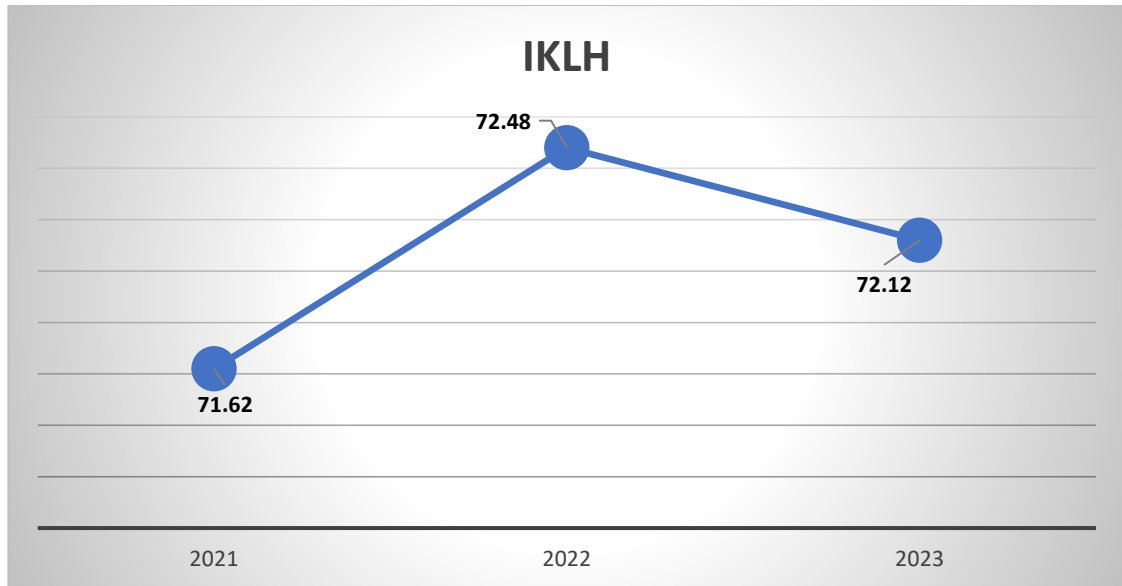
diperoleh dari IKLH sangat berguna dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, membantu pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian dan peningkatan serta mengukur efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Selama lima tahun terakhir, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kutai Timur bisa digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.20 Capaian Lingkungan Hidup
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

Indeks	Tahun		
	2021	2022	2023
IKLH	71,62	72,48	72,12
IKA	50,63	50,00	-
IKU	86,16	86,61	-
IKTL/ IKL	80,76	81.78 / 84.95	83,51
Kategori IKLH	Baik	Baik	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur, 2024

Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencatat nilai 72,12, sedikit menurun dari tahun 2022 yang berada pada nilai 72,48. Meskipun terjadi penurunan, kategori kualitas lingkungan hidup masih berada pada klasifikasi "Baik". Penurunan ini mungkin mengindikasikan adanya fluktuasi dalam beberapa aspek pengelolaan lingkungan hidup yang perlu ditangani untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan tetap terjaga atau bahkan ditingkatkan.



Grafik 2. 11 IKLH Kutai Timur 2021-2023

Sumber: DLH Kabupaten Kutai, 2023

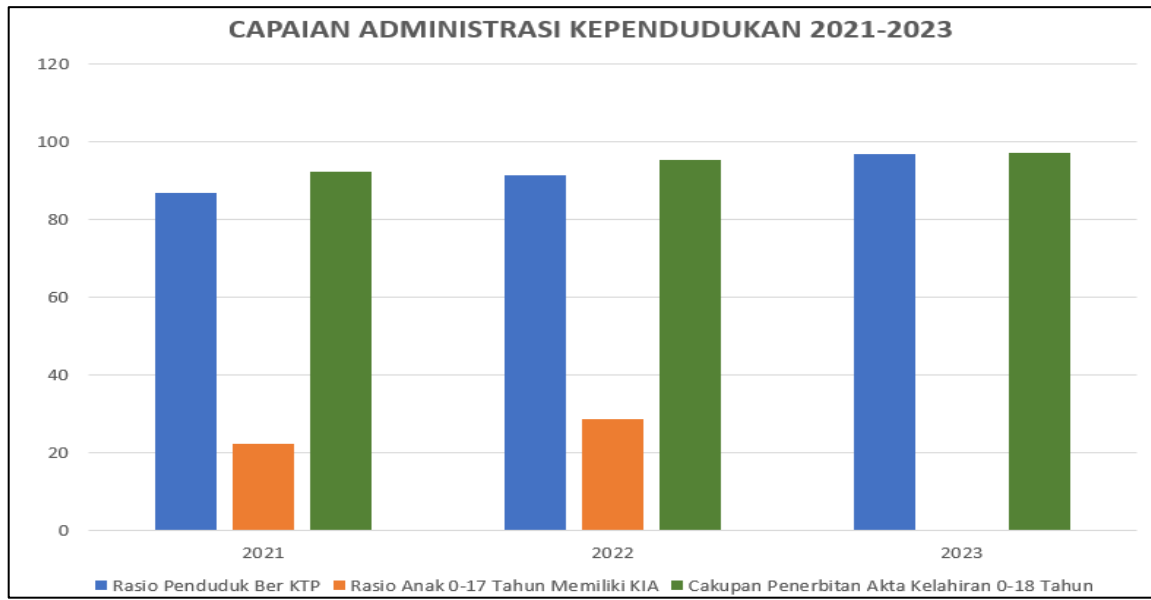
Sementara itu, Indeks Kualitas Air (IKA) tidak menunjukkan data untuk tahun 2023. Pada tahun 2022, IKA berada pada nilai 50,00, yang menandakan adanya penurunan kualitas dari tahun 2021 dengan nilai 50,63. Penurunan ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya dalam pengelolaan sumber daya air untuk memastikan ketersediaan air bersih dan layak konsumsi bagi masyarakat.

Indeks Kualitas Udara (IKU), yang tidak memiliki data untuk tahun 2023, tercatat stabil dengan nilai 86,61 pada tahun 2022, sedikit meningkat dari tahun 2021 yang memiliki nilai 86,16. Stabilitas ini menunjukkan efektivitas upaya pengendalian polusi udara yang telah dilaksanakan, meskipun tetap perlu adanya pemantauan dan upaya berkelanjutan untuk mengatasi potensi masalah kualitas udara yang dapat muncul.

Untuk Indeks Kualitas Tanah/Lahan (IKTL/IKL), terdapat penurunan dari 84,95 pada tahun 2022 menjadi 83,51 pada tahun 2023. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk erosi, penurunan kesuburan tanah, atau konversi lahan. Hal ini mengindikasikan pentingnya pengelolaan tanah dan lahan yang lebih berkelanjutan untuk mencegah degradasi lebih lanjut dan memastikan ketersediaan lahan untuk kegiatan pertanian dan kebutuhan lainnya.

8. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kualitas layanan di bidang kependudukan dan catatan sipil bisa dinilai dari beberapa aspek. Selama periode tahun 2021-2022, terdapat indikator capaian yang mengalami fluktuasi dan ada pula yang mengalami peningkatan. Berikut adalah data yang menyajikan capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama periode tersebut.



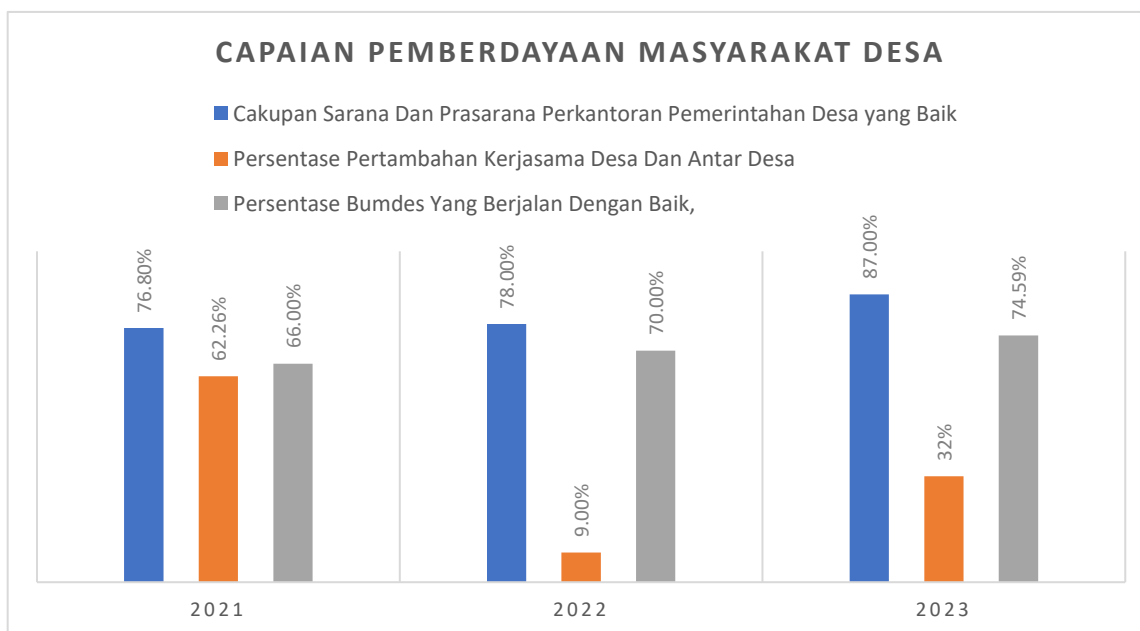
Grafik 2. 12 Capaian Administrasi Kependudukan Catatan Sipil 2021-2023
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, 2024

Pada tahun 2022, rasio penduduk yang memiliki KTP di Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar 91,42%. Ini menandakan bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Kutai Timur telah terdaftar dan memiliki dokumen identitas resmi yang diperlukan untuk berbagai keperluan administratif dan kependudukan. Kemudian, pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam rasio kepemilikan KTP, di mana angka tersebut meningkat menjadi 96,74%. Peningkatan ini mencerminkan upaya serius dari pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap dokumen identitas yang sah, yang merupakan langkah penting dalam pengakuan hak sipil dan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Selain itu, pencapaian di bidang administrasi kependudukan lainnya terlihat dari rasio cakupan akta kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 yang mencapai 100%. Ini berarti setiap anak yang lahir di Kabupaten Kutai Timur telah terdaftar secara resmi dan memiliki akta kelahiran. Cakupan akta kelahiran yang universal ini tidak hanya penting dalam aspek hukum dan administrasi kependudukan, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap perlindungan hak-hak anak dan akses mereka terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya.

9. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah suatu proses atau upaya untuk meningkatkan peran serta, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai strategi, program, dan kegiatan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya lokal sehingga mereka dapat lebih baik mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi.



Grafik 2. 13 Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa 2021-2023
 Sumber: Dispemasdes Kabupaten Kutai Timur, 2024.

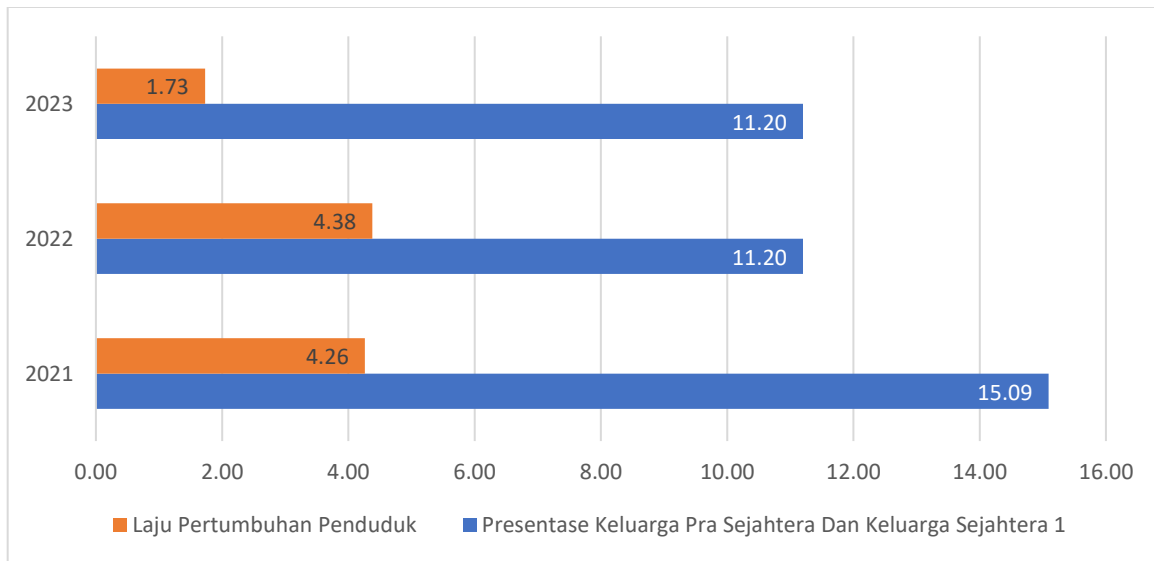
Pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam penyebaran cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan persentase mencapai 87,00% dari 78,00% pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dan pengembangan fasilitas perkantoran yang lebih memadai, mendukung efektivitas dan efisiensi operasional dalam pelayanan kepada masyarakat dan desa.

Selanjutnya, terdapat peningkatan yang sangat signifikan dalam persentase penambahan kerjasama desa dan antar desa, dari 9,00% pada tahun 2022 menjadi 32,00% pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan adanya ekspansi dan penguatan kolaborasi antar desa yang berpotensi meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan sumber daya serta implementasi program-program pembangunan desa yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Sementara itu, terdapat penurunan kecil dalam persentase Badan Usaha Milik Desa yang berjalan baik, dari 77,00% pada tahun 2022 menjadi 74,59% pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih mencerminkan sebagian besar BUMDes beroperasi dengan baik, menunjukkan pentingnya terus menerus melakukan evaluasi dan peningkatan model bisnis serta strategi pengelolaan yang dapat mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan BUMDes.

10. Pengendalian Penduduk

Program pengendalian penduduk merupakan serangkaian kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh suatu pemerintah untuk mengatur pertumbuhan populasi dalam suatu negara atau wilayah. Tujuan dari program ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan sumber daya yang ada, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

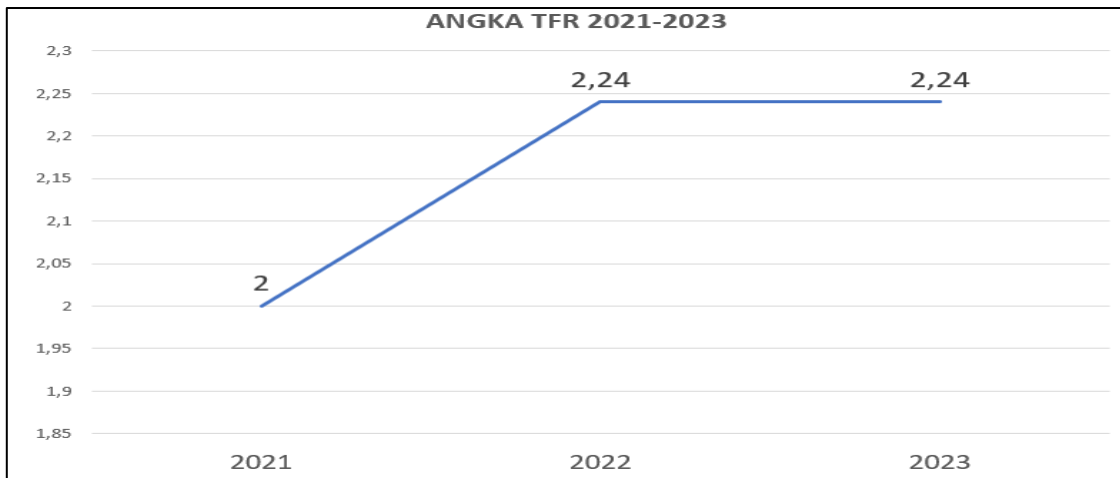


Grafik 2.14 Capaian Pengendalian Penduduk

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kutai Timur, 2024

Terkait dengan presentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1, tidak terjadi perubahan antara tahun 2022 dan 2023, dengan angka tetap stabil pada 11,20%. Stabilitas ini menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi keluarga yang berada dalam kategori pra sejahtera dan sejahtera 1 selama periode tersebut. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Kutai Timur telah mencapai titik stabilisasi tertentu, meskipun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengurangi jumlah keluarga dalam kategori pra sejahtera dan meningkatkan kesejahteraan mereka lebih lanjut.

Untuk laju pertumbuhan penduduk, tidak terdapat data spesifik yang menunjukkan perubahan dari tahun 2022 ke tahun 2023 dalam narasi sebelumnya. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memberikan analisis yang akurat mengenai dinamika perubahan laju pertumbuhan penduduk selama periode tersebut.



Grafik 2.15 Angka TFR Kutai Timur 2021-2023

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kutai Timur, 2024

Sama halnya, angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) tidak menunjukkan adanya perubahan antara tahun 2022 dan 2023, dengan nilai tetap pada 2,24. Kestabilan angka kelahiran total mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kabupaten Kutai Timur tetap konstan selama periode ini, tidak menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan signifikan dalam jumlah kelahiran per wanita. Ini bisa mencerminkan berbagai faktor, termasuk kebijakan keluarga berencana, kondisi ekonomi, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang mempengaruhi keputusan keluarga terkait jumlah anak.

11. Perhubungan

Pembangunan di sektor transportasi merupakan elemen yang sangat penting dan terlihat dalam perkembangan suatu wilayah. Peran vital sektor ini dalam mendukung aktivitas transportasi memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian daerah. Ketika akses transportasi mudah dan efisien, distribusi barang menjadi lebih lancar, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Namun, kelemahan dalam infrastruktur transportasi bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur.

Di Kabupaten Kutai Timur, sampai saat ini, infrastruktur transportasi umum, baik di area perkotaan maupun pedesaan, masih belum memenuhi kebutuhan. Masalah ini juga termasuk dalam kelancaran lalu lintas yang masih terbatas. Selain

itu, layanan untuk pengujian kendaraan bermotor belum berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini berakibat pada rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengujian kendaraan, yang dapat berdampak negatif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2.21 Capaian Perhubungan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

Indikator	Satuan	Tahun		
		2021	2022	2023
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit			3.884
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis		P: 4 B: 1 T: 3	P: 4 B: 1 T: 3	P:4 B:1 T:4

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur, 2024

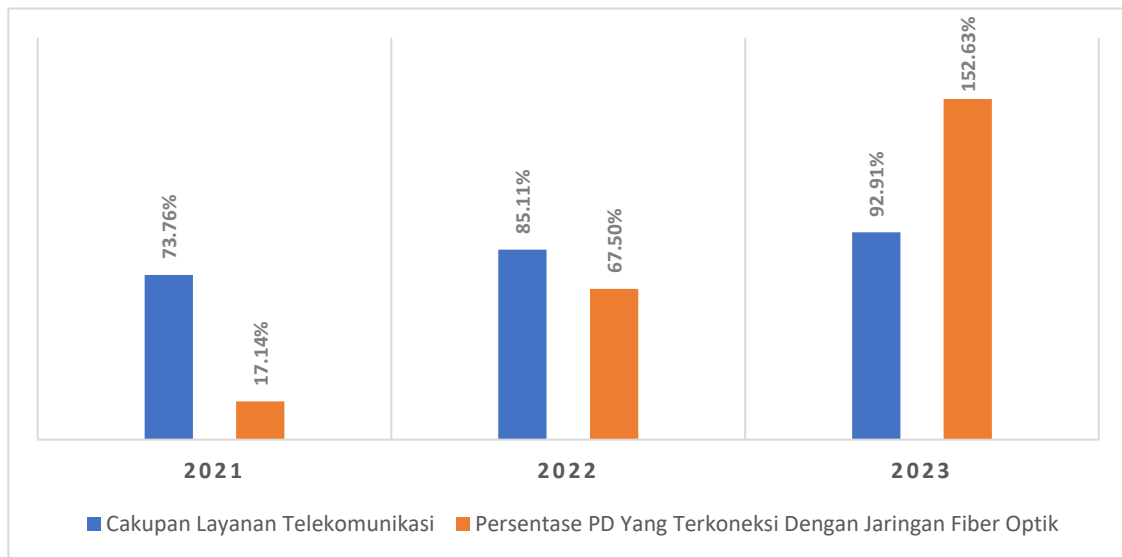
Terkait dengan jumlah uji KIR angkutan umum, data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2023, dari 3.529 unit menjadi 3.884 unit. Meskipun tidak ada data spesifik untuk tahun 2021 dan 2022, peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan dalam aktivitas pemeriksaan kendaraan angkutan umum untuk memastikan keselamatan dan kelayakan operasional. Peningkatan jumlah uji KIR dapat mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan standar keselamatan transportasi umum serta respons terhadap pertumbuhan jumlah angkutan umum yang beroperasi.

Perubahan jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis dari tahun 2022 ke tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang stabil dalam jumlah pelabuhan laut dan udara, dengan pelabuhan laut (P) tetap berjumlah 4, bandara (B) tetap 1, namun terjadi peningkatan pada jumlah terminal bis dari 3 menjadi 4. Peningkatan jumlah terminal bis ini menandakan upaya pemerintah dalam memperluas dan memperbaiki fasilitas transportasi darat untuk mendukung mobilitas masyarakat dan logistik. Stabilitas jumlah pelabuhan laut dan udara menunjukkan bahwa tidak terjadi ekspansi besar-besaran dalam infrastruktur tersebut selama periode ini, namun penambahan terminal bis menunjukkan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan pelayanan transportasi darat.

12. Komunikasi dan Informatika

Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas komunikasi di seluruh wilayahnya, meskipun dihadapkan pada tantangan tertentu. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah kesulitan dalam komunikasi antar wilayah di kabupaten tersebut. Sebagai respons atas masalah ini, pemerintah telah memprioritaskan pembangunan jaringan Base Transceiver Station (BTS) di berbagai desa yang tersebar di setiap kecamatan. Upaya ini merupakan bagian dari strategi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2021-2026.

Selain pembangunan infrastruktur BTS, pemerintah juga aktif dalam memfasilitasi proses perijinan bagi penyedia layanan telekomunikasi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memudahkan ekspansi jaringan komunikasi sehingga layanan telekomunikasi bisa tersedia secara merata di seluruh wilayah Kutai Timur. Dengan demikian, baik penduduk di daerah perkotaan maupun pedesaan diharapkan dapat menikmati akses komunikasi yang lebih baik dan efisien. Inisiatif ini tidak hanya penting untuk memperkuat konektivitas antar warga, tetapi juga mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial di Kutai Timur.



Grafik 2.16 Capaian Komunikasi dan Informatika

Sumber: Diskominfo, Statistik & Persandian Kabupaten Kutai Timur, 2024

Berdasarkan data cakupan layanan telekomunikasi dan konektivitas jaringan fiber optik di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat peningkatan yang signifikan dalam akses dan konektivitas. Cakupan layanan telekomunikasi meningkat dari 73,76% pada tahun 2021 menjadi 85,11% pada tahun 2022, dan mencapai 92,91% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan layanan telekomunikasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan ekonomi yang semakin digital.

Selain itu, persentase Perangkat Daerah (PD) yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada tahun 2021, hanya 17,14% Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik. Angka ini meningkat tajam menjadi 67,50% pada tahun 2022, dan melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 152,63% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur digital, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional pemerintah daerah tetapi juga memperkuat layanan publik berbasis digital.

Peningkatan dalam cakupan layanan telekomunikasi dan konektivitas jaringan fiber optik merupakan langkah penting dalam mendukung transformasi digital di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini tidak hanya memberikan akses yang lebih luas dan cepat kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi dan mendukung berbagai sektor ekonomi. Dengan infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik, Kabupaten Kutai Timur dapat lebih efektif menjalankan program-program pembangunan yang berbasis teknologi dan informasi, sehingga mampu mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

13. Koperasi dan UKM

Koperasi berperan sebagai entitas penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam upaya mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja. Sebagai model usaha yang berbasis pada prinsip kekeluargaan dan kerjasama, koperasi dirancang untuk memberdayakan anggotanya melalui kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan.

Peningkatan jumlah koperasi yang aktif diharapkan dapat meningkatkan kekuatan ekonomi kerakyatan. Hal ini dikarenakan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan pendapatan anggotanya melalui berbagai kegiatan usaha, tetapi juga sebagai sarana untuk redistribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dengan beroperasinya lebih banyak koperasi yang efektif dan efisien, akan tercipta lebih banyak peluang kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Koperasi juga berperan dalam meningkatkan keterampilan dan kapasitas anggotanya, memberikan akses ke pasar yang lebih luas, dan memberikan layanan keuangan yang lebih terjangkau. Dengan demikian, keberadaan dan pengembangan koperasi diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat, terutama dalam mendukung ekonomi di daerah pedesaan dan komunitas yang kurang mampu.

Tabel 2.22 Capaian Koperasi dan UMKM 2021-2023

Program	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah UMKM Yang Difasilitasi	114	627	100
Persentase Koperasi Yang Aktif	57,21%	27,00%	58%
Jumlah KSP/USP Yang Mendapat Penilaian Kesehatan	na	20	20
Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10	312	210
Jumlah Koperasi Yang Difasilitasi Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen Dan Restrukturisasi Usaha	na	24 koperasi	90
Jumlah UMKM	9.627	9.248	7542

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kutai Timur, 2024

Berdasarkan data program fasilitasi UMKM dan koperasi di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat berbagai tren yang signifikan dan beberapa fluktuasi. Pada tahun 2021, jumlah UMKM yang difasilitasi sebanyak 114

unit, meningkat drastis menjadi 627 unit pada tahun 2022, namun kembali menurun tajam menjadi hanya 100 unit pada tahun 2023. Fluktuasi ini mungkin mencerminkan perubahan dalam prioritas program atau kendala dalam implementasi program fasilitasi UMKM.

Persentase koperasi yang aktif menunjukkan penurunan drastis pada tahun 2022 dengan hanya 27% dari koperasi yang aktif, namun meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 58%. Jumlah KSP/USP yang mendapat penilaian kesehatan tetap stabil pada angka 20 baik pada tahun 2022 maupun 2023. Sementara itu, jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan menunjukkan peningkatan luar biasa dari 10 koperasi pada tahun 2021 menjadi 312 pada tahun 2022, sebelum sedikit menurun menjadi 210 koperasi pada tahun 2023.

Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk mendapatkan nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, dan restrukturisasi usaha juga menunjukkan peningkatan dari 24 koperasi pada tahun 2022 menjadi 90 koperasi pada tahun 2023. Namun, jumlah total UMKM di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan penurunan setiap tahun, dari 9.627 unit pada tahun 2021, menjadi 9.248 unit pada tahun 2022, dan lebih lanjut menurun menjadi 7.542 unit pada tahun 2023. Penurunan jumlah UMKM ini mengindikasikan tantangan yang dihadapi oleh sektor UMKM dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya upaya yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja koperasi serta UMKM di Kabupaten Kutai Timur, meskipun terdapat fluktuasi dalam hasil yang dicapai setiap tahunnya. Untuk mencapai keberlanjutan dan peningkatan yang konsisten, diperlukan strategi yang lebih terfokus dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak terkait.

14. Penanaman Modal

Dalam upaya meningkatkan investasi di daerah, khususnya di Kabupaten Kutai Timur, dua tindakan utama yang diperlukan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi investasi, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan. Strategi ini didukung dengan perencanaan yang strategis dan melibatkan semua pegawai serta

stakeholder terkait. Tujuannya adalah untuk menghadapi tantangan yang dibawa oleh perubahan iklim dan membuat daerah lebih menarik bagi investor.

Intensifikasi investasi melibatkan upaya untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor yang sudah ada, sementara ekstensifikasi berfokus pada penciptaan peluang investasi baru di berbagai sektor yang belum dimanfaatkan. Upaya ini harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang berkualitas, termasuk proses perizinan yang lebih efisien dan efektif.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur memegang peran kunci dalam pelaksanaan kewenangan otonomi daerah terkait peningkatan investasi dan perizinan. Peningkatan kewenangan ini membawa tanggung jawab tambahan bagi daerah dalam memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan optimal. Oleh karena itu, diperlukan sumber pembiayaan yang memadai serta peningkatan kreativitas dan kemampuan aparat daerah dalam menggali potensi lokal guna mendukung peningkatan investasi.

Tabel 2.23 Capaian Penanaman Modal 2021-2023

Program	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah Kajian Potensi Daerah (Dokumen)	1	1	3
Jumlah Kegiatan Promosi	2	4	2
Jumlah Realisasi Investasi PMDN Dan PMA (Triliun)	3,01	5,86	9,10
Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	688	2.140	3.854
Indeks Kepuasan Masyarakat	76	85	85,14

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Kutai Timur, 2024

Berdasarkan data program pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat beberapa perkembangan signifikan dalam kajian potensi daerah, promosi, investasi, dan kepuasan masyarakat. Jumlah kajian potensi daerah yang dihasilkan mengalami peningkatan dari 1 dokumen pada tahun 2021 dan 2022, menjadi 3 dokumen pada tahun 2023. Ini menunjukkan upaya yang lebih

intensif dalam mengeksplorasi dan memetakan potensi daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan promosi juga menunjukkan fluktuasi, dengan jumlah kegiatan promosi meningkat dari 2 pada tahun 2021 menjadi 4 pada tahun 2022, kemudian menurun kembali menjadi 2 pada tahun 2023. Meskipun jumlahnya berfluktuasi, promosi tetap menjadi bagian penting dalam menarik investor dan meningkatkan kesadaran tentang potensi daerah.

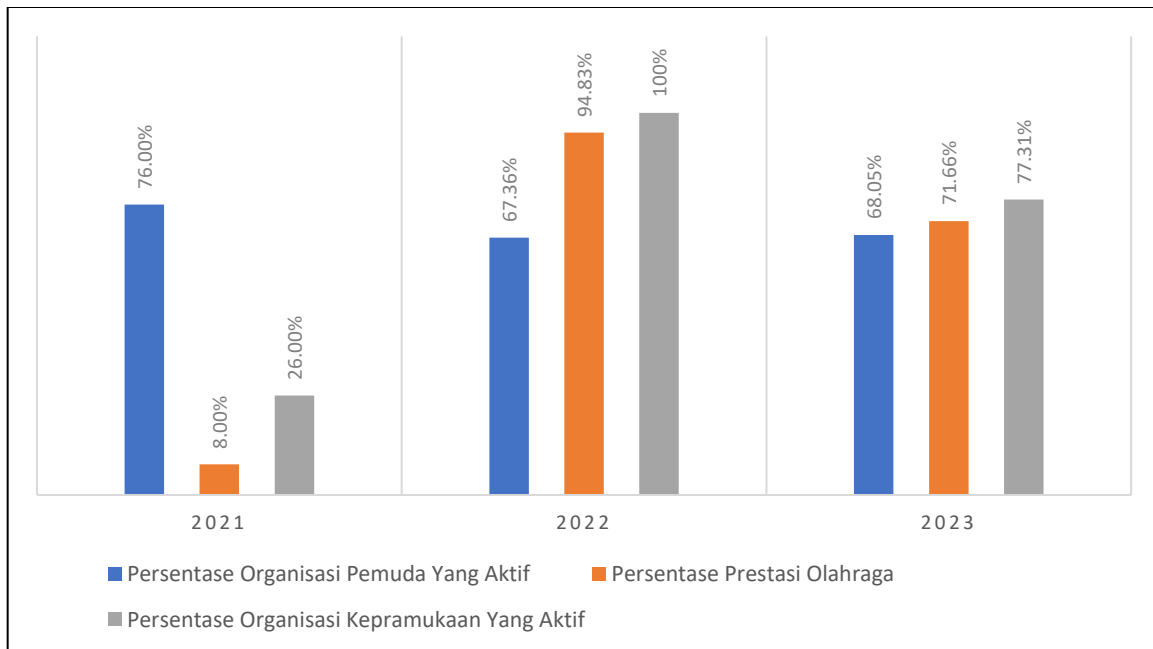
Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif. Nilai investasi meningkat dari Rp 3,01 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 5,86 triliun pada tahun 2022, dan mencapai Rp 9,10 triliun pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi Kabupaten Kutai Timur dan efektivitas strategi pemerintah dalam menarik investasi.

Jumlah investor berskala nasional, baik PMDN maupun PMA, juga mengalami peningkatan tajam, dari 688 investor pada tahun 2021 menjadi 2.140 investor pada tahun 2022, dan melonjak menjadi 3.854 investor pada tahun 2023. Peningkatan jumlah investor ini menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi para investor.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tetap tinggi, dengan nilai 76 pada tahun 2021, meningkat menjadi 85 pada tahun 2022, dan sedikit meningkat lagi menjadi 85,14 pada tahun 2023. Tingginya IKM mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

15. Pemuda dan Olahraga

Peran pemerintah dalam pembinaan pemuda dan olahraga memegang posisi strategis dalam mencetak generasi muda yang sehat, aktif, dan berpotensi, baik dalam bidang olahraga maupun dalam konteks pembangunan nasional secara lebih luas. Melalui pembinaan yang efektif, pemerintah dapat berkontribusi signifikan dalam mengembangkan pemuda yang tidak hanya unggul dalam prestasi olahraga, tetapi juga menjadi aset berharga bagi pembangunan bangsa.



Grafik 2.17 Capaian Bidang Pemuda dan Olahraga 2021-2023
 Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur, 2023

Data capaian indikator menunjukkan bahwa kegiatan dan program yang dijalankan telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, baik dalam aspek pengembangan organisasi pemuda maupun dalam pencapaian prestasi olahraga.

Pertama, jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Kutai Timur hingga akhir masa periode RPJMD 2021-2026 mencapai 76 organisasi. Pada tahun 2023, persentase organisasi pemuda yang aktif mencapai 68,05%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 63,88%. Pencapaian ini menandakan keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi dan aktivitas organisasi pemuda di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini penting karena organisasi pemuda berperan kritis dalam pembangunan karakter, kepemimpinan, dan keterlibatan sosial di kalangan generasi muda.

Kedua, terdapat peningkatan signifikan dalam pencapaian prestasi olahraga, dengan jumlah prestasi yang dicapai hingga akhir masa periode RPJMD tahun 2021-2026 sebanyak 8 prestasi. Presentase prestasi olahraga pada tahun 2023 mencapai 71,66%, jauh melebihi target tahunan yang ditetapkan sebesar 40,00%. Prestasi ini tidak hanya menaikkan nama Kabupaten Kutai Timur di kancah olahraga, tapi juga mendorong motivasi dan inspirasi bagi para atlet muda untuk berprestasi lebih tinggi.

Ketiga, persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2023 mencapai 77,31%, angka ini juga melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 29,89%. Pencapaian yang jauh melampaui target ini menunjukkan adanya dinamika positif dalam keaktifan organisasi pemuda, yang menandakan tingginya tingkat keterlibatan dan partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan sosial, edukasi, dan pengembangan masyarakat.

Kesimpulannya adalah data capaian indikator menunjukkan bahwa program-program urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur tidak hanya berhasil mencapai, tapi juga melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD.

16. Statistika dan Persandian

Sistem data dan statistik yang terintegrasi memiliki peran penting dalam menyediakan akses yang mudah dan cepat ke data yang relevan, memfasilitasi analisis yang mendalam, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan terpercaya. Namun, pengembangan dan pengoperasian sistem seperti ini juga menghadapi beberapa tantangan signifikan.

Tabel 2.24 Capaian Statistika dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

Program	Tahun		
	2021	2022	2023
Tersedianya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi	ada	ada	ada

Sumber: Diskominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur, 2024

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam mengelola program-program urusan statistik telah menunjukkan kesesuaian yang signifikan antara kegiatan yang dijalankan dan target kinerja yang ditetapkan. Salah satu capaian penting dari program-program tersebut adalah tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi di Kabupaten Kutai Timur.

Ketersediaan sistem ini merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data untuk pembangunan daerah. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi menandakan adanya kemajuan dalam infrastruktur pengelolaan data di Kabupaten Kutai Timur. Sistem ini memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara efisien, menyediakan informasi yang akurat dan terkini untuk berbagai kepentingan pemerintahan, penelitian, dan pengembangan.

17. Kebudayaan

Kabupaten Kutai Timur, yang memiliki kekayaan budaya yang beragam, belum mengoptimalkan potensinya dalam mempromosikan sektor pariwisata. Kurangnya pengenalan terhadap keanekaragaman budaya ini berdampak pada kontribusi minimal sektor pariwisata terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk lebih aktif memperkenalkan budaya Kutai Timur tidak hanya kepada masyarakat lokal tetapi juga kepada pengunjung dari luar daerah.

Tabel 2.25 Capaian Bidang Kebudayaan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

Program	Tahun		
	2021	2022	2023
Tokoh Adat Yang Menerima Insentif	0	0	103
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	5	7	7
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	42	43	43
Fasilitasi SDM Dan Lembaga Sejarah	na	25	25
Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, 2024

Analisis kinerja program-program urusan kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan capaian indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2021-2026, menunjukkan hasil yang positif dan mencerminkan upaya yang konsisten dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur.

Pertama, signifikansi peningkatan jumlah tokoh adat yang menerima insentif dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, dari 0 tokoh pada tahun 2022 menjadi 103 tokoh pada tahun 2023, menandakan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menghargai dan memelihara peran penting tokoh adat dalam masyarakat. Peningkatan ini tidak hanya mengakui kontribusi tokoh adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, tetapi juga mendorong mereka untuk terus aktif berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan pelestarian adat istiadat.

Kedua, identifikasi dan program perlindungan terhadap 43 benda, situs dan cagar budaya pada tahun 2023 menunjukkan upaya yang terstruktur dalam pengelolaan dan pelestarian warisan budaya. Ini mencerminkan kesadaran yang meningkat akan pentingnya melindungi sumber daya budaya sebagai bagian dari identitas nasional dan warisan untuk generasi mendatang.

Ketiga, penyelenggaraan festival seni dan budaya yang tetap konsisten sebanyak 7 event dari tahun 2022 ke tahun 2023 menunjukkan keberlanjutan dalam promosi dan pengembangan seni dan budaya lokal. Penyelenggaraan event-event tersebut berperan penting dalam meningkatkan apresiasi publik terhadap kekayaan budaya daerah, serta mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lokal.

Keempat, fasilitasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga sejarah yang dibina pada tahun 2023 sebanyak 25 orang, melebihi target capaian yang ditetapkan sebanyak 20 orang, mengindikasikan efektivitas program pembinaan yang dijalankan. Peningkatan kapasitas ini esensial untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan terkait kebudayaan dan sejarah dapat dilestarikan dan dikembangkan.

Kelima, terpeliharanya 100% koleksi benda cagar budaya yang berada di Galeri Cagar Budaya menegaskan standar pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian tidak hanya terfokus pada aspek imaterial, namun juga pada pemeliharaan fisik artefak budaya yang memiliki nilai sejarah dan estetika.

18. Perpustakaan dan Kearsipan

Untuk mendukung keberadaan perpustakaan di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan manajemen perpustakaan yang memadai. Hal ini termasuk menyediakan koleksi buku yang relevan dengan kebutuhan pengguna dan mencatat aktivitas perpustakaan untuk menilai kinerja serta minat baca masyarakat. Di Kutai Timur, terdapat upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan, khususnya dalam rangka mengangkat minat baca masyarakat.

Salah satu area yang perlu ditingkatkan adalah indeks koleksi perpustakaan secara digital, termasuk penyediaan e-book dan majalah digital. Ini akan mempermudah akses masyarakat ke sumber bacaan dan informasi. Perpustakaan juga diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui upaya literasi. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya kesadaran literasi di kalangan masyarakat Kutai Timur. Dengan demikian, perpustakaan diharapkan dapat menjadi katalis dalam meningkatkan kesadaran literasi di Kabupaten Kutai Timur.

Di samping itu, perbaikan sistem kearsipan di Kabupaten Kutai Timur juga penting, dengan mengadopsi sistem berbasis elektronik atau teknologi informasi yang memadai. Ini sesuai dengan kebijakan kearsipan nasional yang menjadi dasar pengelolaan arsip penting milik pemerintah. Keseluruhan upaya ini diharapkan dapat memajukan pengelolaan perpustakaan dan literasi di Kabupaten Kutai Timur, mendukung peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat.

Tabel 2.26 Capaian Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-203

Program	Tahun		
	2021	2022	2023
Persentase Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, Sosial Diperpustakaan	70%	72,92%	76,23%
Jumlah Rata Rata Pengunjung Perpustakaan /Tahun	19.000	860	4.151
Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Sesuai Aturan	2 OPD	5 OPD	8 OPD
Jumlah Arsip Terlindungi Dan Terselamatkan	1 Dok.	29 Arsip	900 Arsip
Jumlah Arsip Yang Dapat Diakses	0	1 Dok.	100 Arsip

Sumber: LKPJ Bupati Kutai Timur, 2023

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah dengan mempertimbangkan potensi khusus yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur. Dalam konteks Kabupaten Kutai Timur, Urusan Pemerintahan Pilihan yang ditangani meliputi sektor-sektor kunci yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, termasuk perikanan, pariwisata, pertanian, serta perindustrian dan perdagangan.

1. Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Kutai Timur memegang peranan penting dalam perekonomian lokal, berperan sebagai penyedia sumber daya pangan, pencipta lapangan kerja, dan kontributor pendapatan daerah. Kabupaten kutai Timur, yang kaya akan potensi laut dan sungai, memiliki akses luas ke berbagai sumber daya perikanan seperti ikan, udang, kerang, dan lainnya, yang tidak hanya memperkuat sektor hulu tetapi juga memberikan dampak positif pada sektor hilir. Pengembangan potensi perikanan ini secara berkelanjutan dapat meningkatkan produksi, membuka peluang ekspor, dan meningkatkan pendapatan daerah melalui perdagangan internasional. Selain itu, agroindustri perikanan juga dapat menambah nilai ekonomi

lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai ekonomi produk ikan lokal.

Di sisi lain, Kabupaten Kutai Timur, yang dikelilingi laut dan mayoritas wilayah perdesaannya merupakan desa pesisir, memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. Luas wilayah lautnya yang mencapai 2.641 km² menawarkan sumber daya laut yang luas dan berpotensi menghasilkan keuntungan finansial. Namun, sektor perikanan juga menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan laut. Isu-isu seperti *overfishing*, perusakan habitat, dan dampak perubahan iklim memerlukan penanganan yang bijaksana. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan pelaku industri perikanan sangat penting untuk mengimplementasikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan menjaga pelestarian lingkungan laut, demi mencapai visi "Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua" dengan memaksimalkan potensi perikanan darat.

Tabel 2.27 Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RT)				
1	Perikanan Laut	1.926	1.977	2.308
2	Perikanan Perairan Umum	995	1.003	1.655
3	Tambak	65	65	65
4	Kolam	110	110	166
5	Keramba	-	-	-
6	Budidaya Pantai/ Sawah	-	-	-
7	Rumput Laut	22	22	22
8	Jaring Apung Tawar	2	2	2
9	Jaring Tancap	-	-	-
10	Minapadi	2	2	2
11	Jaring Apung Laut	2	2	1
	Jumlah	3.124	3.183	4.221
Jumlah Produksi Hasil Perikanan (Ton)				
1	Perikanan Laut	4.977,00	4.978,00	6.315,05
2	Perikanan Perairan Umum	1.179,00	1.179,02	2.170,99
3	Tambak	36,35	36,34	37,69

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
4	Kolam	728,40	729,77	754,80
5	Keramba	-	-	-
6	Budidaya Pantai / Sawah	-	-	-
7	Rumput Laut	110,92	110,96	4,04
8	Jaring Apung Tawar			150,31
9	Jaring Tancap			33,46
10	Minapadi	3,00	1,50	-
11	Jaring Apung laut	4,97	-	0,44
	Jumlah	7.072,42	7.068,38	9.466,78
Nilai Produksi Hasil Perikanan (Ribuan Rp)				
1	Perikanan Laut	161.558.253	182.975.575	228.741.636
2	Perikanan Perairan Umum	28.661.060	32.641.340	55.932.240
3	Tambak	1.024.335	1.305.455	1.469.262
4	Kolam	26.906.975	29.260.295	27.091.604
5	Keramba	-	-	-
6	Budidaya Pantai / Sawah	-	-	-
7	Rumput Laut	332.565	446.544	149.650
8	Jaring Apung Tawar	1.332.565	1.411.250	1.052.135
9	Jaring Tancap			1.320.841
10	Minapadi	112,5	56,25	-
11	Jaring Apung Laut	1.151.716	-	145.950
	Jumlah	221.080.188	248.096.709	315.903.318

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur, 2024

Perkembangan sektor perikanan di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2022 ke tahun 2023, berdasarkan data jumlah Rumah Tangga Perikanan (RT), jumlah produksi hasil perikanan, dan nilai produksi hasil perikanan, memberikan gambaran penting tentang dinamika dan tren yang terjadi. Perubahan dalam ketiga indikator ini memberikan wawasan terhadap efektivitas kebijakan pemerintah, adaptasi terhadap teknologi baru dalam perikanan, serta respons industri terhadap permintaan pasar.

a. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RT)

Dari tahun 2022 ke tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah RT perikanan dari 3.183 menjadi 4.221. Peningkatan ini mencerminkan ekspansi yang positif dalam sektor perikanan di Kabupaten Kutai Timur, yang mungkin dipicu oleh berbagai faktor seperti peningkatan akses ke modal, perbaikan infrastruktur pendukung perikanan, serta program pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan yang efektif. Khususnya, peningkatan jumlah RT perikanan laut dan perikanan perairan umum menunjukkan diversifikasi dan penguatan dalam kedua subsektor tersebut, yang menandakan adanya peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal.

b. Jumlah Produksi Hasil Perikanan (Ton)

Jumlah produksi hasil perikanan mengalami peningkatan dari 7.068,38 ton pada tahun 2022 menjadi 9.466,78 ton pada tahun 2023. Peningkatan produksi ini mengindikasikan efisiensi yang lebih tinggi dan peningkatan kapasitas produksi dalam industri perikanan. Pertumbuhan produksi perikanan laut dan perairan umum secara khusus menunjukkan peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi perikanan yang lebih maju. Peningkatan ini juga dapat mencerminkan kondisi lingkungan yang mendukung dan manajemen sumber daya perikanan yang efektif.

c. Nilai Produksi Hasil Perikanan (Ribu Rp)

Nilai produksi hasil perikanan menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, dari 248.096.709 ribu Rp pada tahun 2022 menjadi 315.903.318 ribu Rp pada tahun 2023. Peningkatan nilai produksi ini tidak hanya menegaskan peningkatan volume produksi tetapi juga menunjukkan peningkatan nilai tambah dan efisiensi dalam proses produksi. Pertumbuhan nilai produksi perikanan laut yang signifikan mencerminkan potensi ekonomi yang besar dari sektor ini, kemungkinan didorong oleh peningkatan kualitas produk, pemasaran yang efektif, serta peningkatan permintaan pasar baik lokal maupun internasional.

2. Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah karena menjadi sumber pendapatan utama. Peningkatan pendapatan lokal yang signifikan dapat terjadi melalui dampak *multiplier effect* dari industri pariwisata, yang tidak hanya menguntungkan sektor pariwisata itu sendiri tetapi juga sektor-sektor terkait lainnya. Kabupaten Kutai Timur menawarkan berbagai objek wisata menarik, termasuk destinasi wisata alam seperti gunung, pantai, dan danau, yang menarik baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain keindahan alam, kekayaan budaya dan warisan sejarah Kutai Timur juga menambah daya tarik bagi wisatawan yang ingin menjelajahi dan memahami kekayaan kultural Kabupaten Kutai Timur. Tabel yang berikut menunjukkan berbagai tempat wisata potensial di Kabupaten Kutai Timur, memberikan gambaran tentang keragaman dan potensi pariwisata Kutai Timur.

Tabel 2.28 Potensi Obyek Wisata di Kabupaten Kutai Timur

No	Kecamatan	Desa	Jenis Budaya			
			Alam	Budaya	Sejarah	Buatan
1	Sangkulirang	Pulau Miang	-	-	Sumur Minyak	-
		Sangkuli-rang	Mangrove Tungkap	-	-	-
2	Teluk Pendan	Marthadi-nata	Gua Sampe Marta	-	-	-
		Suka Rahmat	Gua Gajah/Rahmat	-	-	-
		Kandolo	-	-	-	Bukit Hijau
3	Karangan	Sempayau	Air Terjun Sempayau	-	-	-
4	Kaliorang	Kaliorang	Air Terjun Ngarai Hitam	-	-	-
		Kaliorang	Air Terjun Tangga Bidadari	-	-	-
		Kaliorang	Pantai Marang	-	-	-

No	Kecamatan	Desa	Jenis Budaya			
			Alam	Budaya	Sejarah	Buatan
		Bukit Harapan	-	-	-	Taman Wisata Bukit Harapan
		Kaliorang	Goa Segegeh	-	-	
5	Sangatta Selatan	Rindang Benua	Air Terjun Jantur Benua	-	-	-
		Sangkima Dalam	Pantai Pasir Putih Teluk Singkama	-	-	-
6	Rantau Pulung	Rantau Pulung	Arum Jeram	-	-	-
			Air Terjun Manupak	-	-	-
7	Bengalon	Teplang Langsat	-	Desa Budaya Marata	-	-
8	Sandaran	Sandaran	Air Terjun Langga Duae	-	-	-
		Ta'Doan	Danau Ta'Doan	-	-	-
		Marukangan	Pantai Badang-badang	-	-	-
		Manubar	Pantai Manubar	-	-	-
		Birah-Birahan	-	-	Kuburan Tua	-
9	Busang	Busang	Sungai Atan	-	-	-
10	Sangatta Utara	Sangatta Utara	-	-	-	Rumah Kelinci Pendidikan
11	Kongbeng	Miau Baru	Sungai Mejeang	-	-	-
12	Muara Wahau	Muara Wahau	Danau Senal	-	-	-
		Muara Wahau	Danau Leihut	-	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, 2024

Dinas Pariwisata telah berhasil mencapai sejumlah target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan upaya yang konsisten dan terpadu dalam mengembangkan pariwisata sebagai salah satu pilar penting pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Kutai Timur.

Pada tahun 2023, tercatat bahwa terdapat 15 objek destinasi wisata yang telah diidentifikasi dan dikembangkan. Peningkatan jumlah destinasi wisata ini tidak hanya menambah daftar atraksi yang dapat ditawarkan kepada pengunjung tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap diversifikasi produk pariwisata. Pengembangan objek wisata baru ini tentunya didukung oleh penelitian dan pemetaan potensi lokal yang mendalam, serta keterlibatan komunitas setempat dalam pengelolaan dan pelestarian destinasi.

Capaian kunjungan wisata sebesar 100% mencerminkan keberhasilan strategi promosi dan pemasaran yang telah diimplementasikan, menarik jumlah pengunjung yang optimal sesuai dengan kapasitas dan rencana pengembangan pariwisata daerah. Angka ini juga menandakan adanya peningkatan kesadaran dan minat terhadap pariwisata Kutai Timur, baik di kalangan wisatawan domestik maupun internasional.

Selanjutnya, penyelenggaraan 30 event pariwisata, baik dalam maupun luar negeri, menunjukkan upaya aktif Dinas Pariwisata dalam mempromosikan Kutai Timur sebagai destinasi wisata yang menarik dan beragam. Event-event ini tidak hanya berfungsi sebagai platform promosi tetapi juga sebagai medium untuk memperkuat identitas kultural daerah dan meningkatkan interaksi sosial-ekonomi antara wisatawan dengan komunitas lokal.

Dalam aspek penyediaan dan pengembangan infrastruktur kepariwisataan, pencapaian pembangunan 5 infrastruktur baru menandakan upaya strategis dalam memperkuat fasilitas pendukung pariwisata. Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan pengalaman wisatawan dan memastikan aksesibilitas serta kenyamanan selama berada di destinasi wisata.

Terakhir, pembentukan 11 kelompok sadar wisata yang bergerak pada ekonomi kreatif mencerminkan inisiatif untuk mendorong partisipasi komunitas lokal dalam industri pariwisata. Kelompok-kelompok ini berkontribusi pada

pengembangan ekonomi lokal melalui inovasi dan kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya alam dan budaya. Pendekatan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Tabel 2.29 Capaian Urusan Pariwisata
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Kunjungan wisata	-	91,73%	100%
Objek Destinasi Wisata (lokasi)	-	187	15
Event Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-	5	30
Jumlah Penyediaan, Pengembangan Infrastruktur Kepariwisataaan (lokasi)	-	0	5
Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang Bergerak pada Ekonomi Kreatif	-	12	11

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, 2024

3. Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Kutai Timur memegang peranan penting dalam ekonomi dan pembangunan daerah, terutama sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang fokus pada pengembangan agribisnis. Diversifikasi produk pertanian merupakan langkah strategis dan utama, dengan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan berbagai komoditas selain kelapa sawit dan karet, yang telah menjadi komoditas utama. Diversifikasi ini tidak hanya membuka peluang pasar baru, baik lokal maupun ekspor, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada komoditas tunggal, meningkatkan produksi dan nilai tambah produk pertanian, serta memperkuat sektor agribisnis secara keseluruhan. Data terkait sektor pertanian di Kutai Timur menunjukkan potensi yang signifikan, dengan padi sebagai tanaman utama, baik padi sawah maupun padi ladang, dan juga produksi signifikan dari tanaman ubi kayu, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Meskipun ada penurunan dalam produksi padi sawah, produksi padi ladang dan

komoditas lain tetap tinggi, memberikan gambaran tentang potensi dan keberagaman sektor pertanian di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.30 Produksi Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Padi sawah	Ton	14.883,8	14.883,8	20.193,93
2	Padi ladang	Ton	6.586,4	5.319,43	4.795,67
3	Jagung	Ton	6.774,0	8.516,2	2.062,66
4	Ubi kayu	Ton	12.014,0	9.035,49	8.520,24
5	Ubi jalar	Ton	1.696,0	1.658,09	1.628,55
6	Kacang tanah	Ton	166,9	100,4	88,14
7	Kedelai	Ton	9,0	16,72	5,89
8	Kacang hijau	Ton	13,9	0,52	2,72
9	Sayuran	Ton	2.133,28	2.092,01	4.263,80
10	Buah-buahan	Ton	114.220,76	45.993,82	78.330,55
Total		Ton	158.498	87.616	119.893

Sumber: DTPHP, Kabupaten Kutai Timur, 2024

Berdasarkan data produksi tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat beberapa tren yang signifikan dalam berbagai komoditas pertanian. Produksi padi sawah mengalami peningkatan dari 14.883,8 ton pada tahun 2021 dan 2022, menjadi 20.193,93 ton pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan yang substansial dalam produksi padi sawah. Sebaliknya, produksi padi ladang menurun dari 6.586,4 ton pada tahun 2021 menjadi 5.319,43 ton pada tahun 2022, dan terus turun menjadi 4.795,67 ton pada tahun 2023.

Produksi jagung juga menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Dari 6.774 ton pada tahun 2021, produksinya meningkat menjadi 8.516,2 ton pada tahun 2022, tetapi kemudian menurun drastis menjadi 2.062,66 ton pada tahun 2023. Penurunan serupa juga terlihat pada produksi ubi kayu, yang turun dari 12.014 ton pada tahun

2021 menjadi 9.035,49 ton pada tahun 2022, dan lebih lanjut menurun menjadi 8.520,24 ton pada tahun 2023.

Komoditas sayuran menunjukkan tren peningkatan yang sangat baik, dari 2.133,28 ton pada tahun 2021 menjadi 2.092,01 ton pada tahun 2022, dan melonjak menjadi 4.263,80 ton pada tahun 2023. Produksi buah-buahan mengalami penurunan drastis dari 114.220,76 ton pada tahun 2021 menjadi 45.993,82 ton pada tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 78.330,55 ton pada tahun 2023.

Total produksi keseluruhan tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan tren yang berfluktuasi. Dari 158.498 ton pada tahun 2021, total produksi menurun menjadi 87.616 ton pada tahun 2022, dan meningkat lagi menjadi 119.893 ton pada tahun 2023.

Tabel 2.31 Luas Lahan Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

Luas Lahan	Satuan	Tahun		
		2021	2022	2023
Padi Sawah	Ha	5.105	5.006	4.385,15
Padi Ladang	Ha	1824	1807	2.384,93
Jagung	Ha	2.356	2.663	461,56
Ubi Kayu	Ha	262,3	355	233,15
Ubi Jalar	Ha	93,8	120,4	110,53
Kacang Tanah	Ha	66,9	93	86,07
Kedelai	Ha	9,1	13	6,00
Kacang Hijau	Ha	8,7	2,4	1,10
Sayuran	Ha	938,27	944,79	1.036,61
Buah-buahan	Ha	7.274,34	4.499,87	15.232,31
Total	Ha	17.938	15.504	23.937

Sumber: DTPHP, Kabupaten Kutai Timur, 2024

Berdasarkan data luas lahan pertanian di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2021 hingga 2023, terdapat berbagai perubahan dalam penggunaan lahan untuk berbagai komoditas pertanian. Luas lahan padi sawah mengalami penurunan dari 5.105 hektar pada tahun 2021 menjadi 5.006 hektar pada tahun 2022, dan lebih lanjut menurun menjadi 4.385,15 hektar pada tahun 2023. Penurunan ini mungkin

mencerminkan peralihan penggunaan lahan atau tantangan dalam budidaya padi sawah.

Luas lahan untuk padi ladang juga mengalami sedikit penurunan dari 1.824 hektar pada tahun 2021 menjadi 1.807 hektar pada tahun 2022, namun mengalami peningkatan signifikan menjadi 2.384,93 hektar pada tahun 2023. Sebaliknya, luas lahan jagung mengalami penurunan drastis dari 2.356 hektar pada tahun 2021 menjadi 2.663 hektar pada tahun 2022, dan kemudian menurun drastis menjadi hanya 461,56 hektar pada tahun 2023.

Luas lahan untuk ubi kayu dan ubi jalar menunjukkan fluktuasi, dengan lahan ubi kayu meningkat dari 262,3 hektar pada tahun 2021 menjadi 355 hektar pada tahun 2022, namun menurun menjadi 233,15 hektar pada tahun 2023. Lahan untuk ubi jalar juga meningkat dari 93,8 hektar pada tahun 2021 menjadi 120,4 hektar pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 110,53 hektar pada tahun 2023.

Untuk kacang tanah, luas lahan meningkat dari 66,9 hektar pada tahun 2021 menjadi 93 hektar pada tahun 2022, namun sedikit menurun menjadi 86,07 hektar pada tahun 2023. Lahan untuk kedelai dan kacang hijau mengalami penurunan signifikan, dengan kedelai menurun dari 9,1 hektar pada tahun 2021 menjadi hanya 6 hektar pada tahun 2023, dan kacang hijau menurun dari 8,7 hektar pada tahun 2021 menjadi hanya 1,10 hektar pada tahun 2023.

Luas lahan untuk sayuran dan buah-buahan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Lahan sayuran meningkat dari 938,27 hektar pada tahun 2021 menjadi 944,79 hektar pada tahun 2022, dan lebih lanjut meningkat menjadi 1.036,61 hektar pada tahun 2023. Lahan buah-buahan mengalami fluktuasi besar, dari 7.274,34 hektar pada tahun 2021 menurun menjadi 4.499,87 hektar pada tahun 2022, namun meningkat drastis menjadi 15.232,31 hektar pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, total luas lahan pertanian di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan variasi yang cukup signifikan, dari 17.938 hektar pada tahun 2021 menurun menjadi 15.504 hektar pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 23.937 hektar pada tahun 2023. Perubahan ini mencerminkan dinamika penggunaan lahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi iklim, kebijakan pertanian, dan permintaan pasar. Untuk mencapai hasil yang optimal, perlu ada pengelolaan

lahan yang lebih efektif dan strategi adaptif dalam budidaya pertanian di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.32 Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023*
1	Karet	19.307,02	18.591,47	19.153,95
2	Kelapa	1.286,10	1.404,15	1.419,15
3	Kopi Robusta	99,35	89,55	88,80
4	Lada	419,75	438,63	493,13
5	Vanili	6,68	7,68	7,50
6	Kakao	3.440,33	3.661,00	3.607,80
7	Kelapa Sawit	459.526,27	495.385,51	509.562,64
8	Aren	313,70	348,99	391,75
9	Kemiri	30,40	34,10	34,10
Jumlah		484.429,60	519.961,04	534.758,82
1	Karet	1.155,87	1.788,4	3.070,07
2	Kelapa	1.055,12	1.060,03	877,59
3	Kopi Robusta	46,97	50,98	28,32
4	Lada	122,80	127,72	61,20
5	Vanili	1,64	2,78	7,66
6	Kakao	1.409,77	1.414,09	464,94
7	Kelapa Sawit	6.452.834,38	7.060.686,10	7.759.931,02
8	Aren	31,49	35,55	418,09
9	Kemiri	4,67	7,83	213,01
Jumlah		6.456.662,72	7.065.173,57	7.767.966,85

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, 2024

Keterangan: *) Angka Tetap, **) Angka Sementara

Perkembangan yang signifikan dalam sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur dari waktu ke waktu telah menggiring pada industri turunan,

khususnya pembangunan pabrik pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO). Kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat pengembangan perkebunan sawit telah berdiri beberapa unit industri pengolahan CPO, menandakan sinergi antara sektor pertanian dan industri dalam ekonomi lokal. Sampai dengan tahun 2023, jumlah pabrik pengolahan CPO di Kutai Timur tetap stabil, dengan total 38 unit yang beroperasi. Kapasitas produksi yang terpasang pada pabrik-pabrik tersebut mencapai 1.982 ton per jam, sedangkan kapasitas yang terpakai berada pada angka 1.835 ton per jam.

Dari keseluruhan 38 unit pabrik CPO yang berada di Kutai Timur, produksi *Crude Palm Oil* pada tahun 2023 mencapai 1.867.415 ton. Selain itu, pabrik-pabrik tersebut juga berhasil menghasilkan produk turunan lain seperti 356.567 ton Kernal dan 102.155 ton *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO), menunjukkan kapasitas produksi yang signifikan serta kontribusi penting terhadap pasokan CPO dan produk turunannya baik untuk pasar lokal maupun internasional. Produksi yang masif ini mencerminkan kemampuan teknis dan efisiensi operasional yang tinggi dari industri pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur, sekaligus memberikan gambaran tentang potensi ekonomi yang besar dari sektor perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya di Kabupaten Kutai Timur.

Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, baik oleh petani lokal maupun investor. Data menunjukkan bahwa luas perkebunan untuk komoditas utama seperti karet, kelapa, kopi robusta, lada, vanili, kakao, kelapa sawit, aren, dan kemiri mengalami fluktuasi namun tetap menunjukkan tren yang positif secara keseluruhan. Pada tahun 2023, luas perkebunan kelapa sawit mencapai 509.562,64 hektar, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2021. Ini mencerminkan potensi besar yang dimiliki oleh komoditas kelapa sawit untuk menjadi andalan dalam sektor perkebunan di Kutai Timur.

Perkebunan kelapa sawit, khususnya, menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan terhadap ekonomi daerah, dengan produksi mencapai 7.759.931,02 ton pada tahun 2023. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan kesuksesan sektor perkebunan di bawah pengelolaan petani lokal dan perusahaan besar tetapi juga

membuka peluang besar bagi para investor untuk menanam modal di wilayah Kutai Timur. Komoditas lain seperti karet dan kakao juga menunjukkan tren peningkatan yang stabil, yang dapat menarik minat lebih banyak investor untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan teknologi pertanian yang lebih modern. Potensi ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan di Kutai Timur memiliki prospek cerah untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Kutai Timur.

4. Perindustrian dan Perdagangan

Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang menarik dan penting untuk dipahami dalam konteks pembangunan ekonomi regional. Perubahan angka-angka ini mencerminkan fluktuasi dalam performa sektor industri relatif terhadap total output ekonomi selama periode tersebut.

Pada tahun 2019, kontribusi sektor industri terhadap PDRB berada pada angka 2,94%. Tahun berikutnya, 2020, terjadi peningkatan menjadi 3,55%, menandakan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor industri yang mungkin dipicu oleh faktor-faktor seperti peningkatan investasi, perluasan kapasitas produksi, atau peningkatan permintaan baik dari pasar domestik maupun internasional. Kenaikan ini mencerminkan periode optimisme dalam sektor industri, yang mungkin juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang kondusif dan stabilitas ekonomi makro.

Akan tetapi, pada tahun 2021, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami penurunan menjadi 3,43%. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari berbagai tantangan ekonomi. Penurunan ini juga bisa mencerminkan dampak dari kondisi global, seperti pandemi COVID-19, yang berdampak signifikan pada ekonomi global, termasuk sektor industri.

Pada tahun 2022, terjadi penurunan lebih lanjut dalam kontribusi sektor industri terhadap PDRB menjadi 2,55%, yang menandakan periode tantangan yang lebih berat bagi sektor industri. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berlanjutnya dampak negatif dari kondisi global, penyesuaian struktural dalam ekonomi, atau kebutuhan akan modernisasi dan inovasi dalam sektor industri untuk menjawab perubahan permintaan dan tantangan kompetitif.

Memasuki tahun 2023, terjadi pemulihan dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB meningkat menjadi 3,22%. Pemulihan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja sektor industri, mungkin sebagai hasil dari adaptasi terhadap kondisi baru, perbaikan dalam lingkungan bisnis, dan implementasi strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan sebelumnya. Peningkatan ini dapat juga mencerminkan efek dari kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan industri, peningkatan investasi, dan pemulihan dalam permintaan pasar.

Tabel 2.33 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perindustrian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	3,43	2,55	3,22

Sumber: BPS Kutai Timur, 2024

Realisasi program dan aktivitas yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam konteks agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2021-2026, menunjukkan keselarasan yang signifikan antara rencana dan pelaksanaan. Hal ini dibuktikan melalui pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan, yang didukung oleh serangkaian kegiatan strategis sesuai dengan rencana. Salah satu bukti konkret dari kesesuaian ini adalah peningkatan jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tercatat, yang merupakan hasil langsung dari inisiatif perencanaan dan pembangunan yang diluncurkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada tahun 2021, tercatat sejumlah 1.341 IKM, yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 1.436 IKM pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor IKM di Kabupaten Kutai Timur, menegaskan efektivitas strategi yang diadopsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung ekosistem industri lokal.

Tabel 2.34 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perindustrian
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

Program (Outcome)	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah Pasar	13	13	13
Jumlah Rekomendasi Izin Yang Diterbitkan	1	30	-
Jumlah Operasi Pasar	4	16	-
Jumlah Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Ekspor	5	1	-
Jumlah Alat UTTP Yang Terstandarisasi	400	181	-
Pertumbuhan IKM	1.341	1.436	1.540

Sumber: Disperindag Kabupaten Kutai Timur, 2024

C. Urusan Pendukung Pemerintahan

Elemen pendukung dalam pemerintahan memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran jalannya pemerintahan yang efektif. Dalam konteks eksekutif, tugas kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan dibantu secara signifikan oleh sekretaris daerah. Di sisi lain, dalam ranah legislatif, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peranan vital.

1. Sekretaris Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang berfungsi sebagai bagian penunjang kepemimpinan Pemerintah Kabupaten, dikelola oleh Sekretaris Daerah, yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas utama Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, administrasi, organisasi, dan manajemen serta memberikan layanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.35 Capaian Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

Program (Outcome)	Tahun		
	2021	2022	2023
Pemuka Agama Yang Menerima Insentif	595	545	678
Penyelenggaraan Festival Keagamaan	1	1	-
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,89	13	13
Rata - Rata Lama Sekolah	9,19	9,44	9,45
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Status Tinggi	Predikat Status Tinggi	Predikat Status Tinggi
Persentase Implementasi Kebijakan Daerah di Bidang Tata Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama	100%	100%	100%
Persentase Implementasi Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian, Administrasi Pembnagunan, Pengadaan Barang dan Jasa dan Sumberdaya Alam	100%	63,00%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, 2024

Sekretariat Daerah telah berhasil mencapai sejumlah target kinerja yang signifikan pada tahun 2023, yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahannya.

Salah satu capaian penting adalah pemberian insentif kepada 678 pemuka agama, menandakan pengakuan dan apresiasi terhadap peran pemuka agama dalam pembangunan sosial dan keagamaan di Kabupaten Kutai Timur. Namun, pada tahun yang sama, tidak tercatat adanya penyelenggaraan festival keagamaan, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis atau kondisi tertentu yang membatasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memperoleh predikat status tinggi menunjukkan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dalam pengelolaan pemerintahan. Ini menegaskan

komitmen Sekretariat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya alam, telah tercapai implementasi kebijakan daerah sebesar 100%, mencerminkan pencapaian penuh terhadap target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan eksekusi kebijakan, yang berkontribusi terhadap efektivitas pembangunan di berbagai sektor.

Di bidang pendidikan, angka harapan lama sekolah yang mencapai 13 tahun dan rata-rata lama sekolah sebesar 9,45 tahun menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. Ini menandakan adanya investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia, yang merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan dan pembangunan jangka Panjang.

2. Sekretaris DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kutai Timur, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam menyediakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Tabel 2.36 Capaian Sekretariat DPRD
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

Program (Outcome)	Tahun		
	2021	2022	2023
Tersusunnya Dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA. Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana 5 Tahunan RPJMD Maupun Dokumen Perencanaan RKPD	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, 2024

Data dalam 3 tahun terakhir menunjukkan adanya kontribusi yang dilakukan oleh sekretariat DPRD dalam mendukung proses pembangunan Kutai Timur. Selain menyaring aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD secara administrative sekretariat DPRD ikut serta dalam proses Tersusunnya Dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana 5 Tahunan RPJMD Maupun Dokumen Perencanaan RKPD.

D. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang urusan pemerintahan daerah melibatkan beberapa aspek krusial yang menjamin kelancaran dan efisiensi tugas-tugas pemerintahan. Aspek-aspek ini termasuk administrasi pemerintahan yang efisien, yang merupakan fondasi dalam pelaksanaan program dan kebijakan publik. Hal ini melibatkan pengarsipan yang baik, koordinasi antar instansi, dan sistem pelaporan yang transparan. Keuangan daerah yang sehat juga sangat penting, dengan pengelolaan anggaran yang bijaksana dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan dukungan terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas, terutama pegawai negeri yang terlatih dan kompeten, meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan teknologi informasi yang efisien juga memainkan peran penting dalam mempercepat akses informasi, meningkatkan transparansi, dan memudahkan administrasi serta pelayanan publik. Di Kabupaten Kutai Timur, fokus utama unsur penunjang urusan pemerintahan terletak pada aspek perencanaan, keuangan, dan sumber daya manusia, termasuk pelatihan dan pendidikan tenaga kerja pemerintahan, untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

1. Perencanaan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam konteks program dan aktivitas unsur perencanaan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2021-

2026. Realisasi ini mencerminkan sinergi dan kesesuaian strategis antara rencana pembangunan daerah dengan implementasi program yang dijalankan, menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan dan koordinasi pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.

Pada tahun 2022, indikator kinerja yang berkaitan dengan penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencapai 98,97%. Angka ini menandakan bahwa hampir seluruh program yang direncanakan dalam RPJMD telah berhasil diintegrasikan ke dalam RKPD dengan sangat baik. Tingginya persentase ini menunjukkan kemampuan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam memastikan bahwa arah dan fokus pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD dapat diwujudkan secara konkret melalui program-program kerja tahunan pemerintah daerah.

Lebih lanjut, indikator kinerja penjabaran konsistensi program RPJMD dan RKPD ke dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai 100%. Capaian ini menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak hanya konsisten dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD, tetapi juga telah sepenuhnya diadopsi dan diterjemahkan ke dalam rencana-rencana operasional di tingkat OPD. Pencapaian konsistensi ini penting untuk memastikan bahwa setiap OPD bergerak secara sinkron dan terarah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.37 Capaian Perencanaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Program (Outcome)	Tahun		
	2021	2022	2023
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	99,66%	98,97%
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD Kedalam Renstra Dan Renja OPD	100%	100%	100%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur, 2024

2. Keuangan

Urusan Keuangan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu: 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan 2) Badan Pendapatan Daerah, dimana program tahun 2022 yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 2.38 Capaian Keuangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Program (Outcome)	Tahun		
	2021	2022	2023
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	7,05%	5,39%	10,51%

Sumber: BPKAD, Bapenda Kabupaten Kutai Timur, 2024

Pencapaian kinerja yang signifikan dalam sektor keuangan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bersama dengan Badan Pendapatan Daerah telah memberikan kontribusi yang fundamental terhadap tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2021-2026. Hal ini mencerminkan sinergi dan koordinasi yang efektif antara berbagai entitas pengelola keuangan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.

Salah satu indikator kinerja utama dalam bidang keuangan yang menjadi fokus pada tahun 2023 adalah pencapaian opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP ini merupakan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, di mana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peningkatan ini bukan hanya mencerminkan perbaikan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan yang lebih akurat dan transparan, tetapi juga menandakan adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif.

Capaian predikat WTP dari BPK merupakan bukti nyata dari komitmen dan upaya bersama yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik. Predikat ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga membuka peluang lebih besar untuk akses terhadap sumber pembiayaan pembangunan, baik dari pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya.

Selain itu, pencapaian predikat WTP juga mencerminkan kesuksesan Kabupaten Kutai Timur dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam semua aspek pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap kemajuan pembangunan daerah, khususnya dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara konsisten berusaha menjalin kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Upaya ini sesuai dengan perubahan paradigma dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggeser sistem pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik melalui otonomi daerah. Otonomi daerah menjadi hal yang sangat penting dalam memberdayakan pemerintahan daerah dan memajukan pembangunan masyarakat setempat. Urusan Pendidikan dan Pelatihan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah, yaitu: 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2) Sekretariat Korpri, dan 3) Badan Penelitian dan Pengembangan.

Tabel 2.39 Capaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Program	Tahun		
	2021	2022	2023
Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	35,00%	24,82%	45,57%
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	260 hari	124 hari	567 hari
Distribusi ASN	2.500 SK	3.693 SK	3.778 SK
Cakupan Pembinaan dan Fasilitas Anggota Korpri	1	93,00%	-
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	50,00%	50,00%	72,72%

Sumber: BKPP, dan BRIDA Kabupaten Kutai Timur, 2024

Pencapaian kinerja dalam sektor pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Sekretariat KORPRI, serta Badan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan kontribusi signifikan terhadap realisasi target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2021-2026. Implementasi program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh entitas-entitas ini secara efektif mendukung pencapaian indikator kinerja yang berkaitan dengan unsur pendidikan dan pelatihan pada tahun 2022, mencerminkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.

Pada tahun 2022, tercatat distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 3.778 Surat Keputusan (SK), yang menandakan efisiensi dalam manajemen kepegawaian serta distribusi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas institusional. Pencapaian ini menunjukkan upaya yang terstruktur dalam mengalokasikan sumber daya manusia secara optimal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi layanan publik.

Selanjutnya, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan tercatat selama 567 hari. Durasi ini mencerminkan investasi yang berarti dalam pengembangan kapasitas pegawai, dengan harapan bahwa peningkatan

kompetensi dan keterampilan akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan dan kebijakan publik. Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti oleh 45,57% ASN menunjukkan fokus yang jelas pada pembangunan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta inovasi dalam pelayanan publik.

Persentase implementasi rencana kelitbangan sebesar 72,72% menunjukkan komitmen terhadap penelitian dan pengembangan sebagai dasar untuk inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Implementasi ini penting dalam mengidentifikasi dan merespons tantangan pembangunan dengan solusi yang berbasis bukti dan inovatif, menandakan langkah penting dalam pengembangan kebijakan publik yang responsif dan efektif.

4. Penelitian dan Pengembangan

Badan Riset dan Inovasi Daerah telah melaksanakan satu program utama, yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Program ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja berupa persentase implementasi target Kelitbangan. Dengan capaian sebesar 72,72%, program ini telah menunjukkan kinerja yang memuaskan dan seluruh target yang direncanakan berhasil dicapai. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen dan usaha Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam mendorong inovasi dan penelitian yang relevan untuk mendukung pembangunan daerah.

E. Pengawasan Pemerintahan

1. Inspektorat

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari fungsi pengawasan adalah untuk memperbaiki sistem internal dan mengawasi pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Selain itu, fungsi pengawasan juga meliputi kegiatan sosialisasi, penanganan temuan, dan pembinaan untuk meningkatkan integritas kepala daerah. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan dalam

mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Inspektorat.

Tabel 2.40 Capaian Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Program (Outcome)	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah Temuan BPK	15	15	21
Cakupan Pengaduan OPD Dan Masyarakat	0,00%	0,22%	60%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kutai Timur, 2024

Pencapaian kinerja oleh Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, yang dilakukan oleh Inspektorat, telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung tercapainya target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2021-2026. Analisis terhadap perbandingan capaian di tahun 2021 sampai 2023 memberikan wawasan mengenai kemajuan yang telah dicapai dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan.

Pada tahun 2022, belum ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditetapkan oleh Inspektorat, yang dikarenakan proses audit oleh BPK masih berlangsung. Situasi ini mencerminkan fase transisi dan penantian terhadap hasil audit yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebaliknya, pada tahun 2023, terdapat 21 temuan oleh BPK, yang mengindikasikan bahwa proses audit telah selesai dan menghasilkan temuan-temuan spesifik yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Temuan-temuan ini berperan penting dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan peningkatan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, serta dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Lebih lanjut, terjadi peningkatan yang signifikan dalam cakupan pengaduan dari Perangkat Daerah OPD dan masyarakat, dari hanya 0,22% pada tahun 2022

menjadi 60% pada tahun 2023. Peningkatan dramatis ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam mekanisme pengaduan dan partisipasi aktif dari OPD serta masyarakat dalam proses pengawasan. Cakupan pengaduan yang lebih luas ini penting dalam memastikan bahwa keluhan dan masukan dari berbagai pihak dapat diakomodasi dan ditindaklanjuti, membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah dan area yang memerlukan perhatian dalam pemerintahan daerah.

2.1.5. Aspek Daya Saing

A. Aspek Daya Saing SDM

1. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, tampak bahwa jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 45.532 jiwa, kemudian kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 42.414 jiwa dan kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 40.428 jiwa.

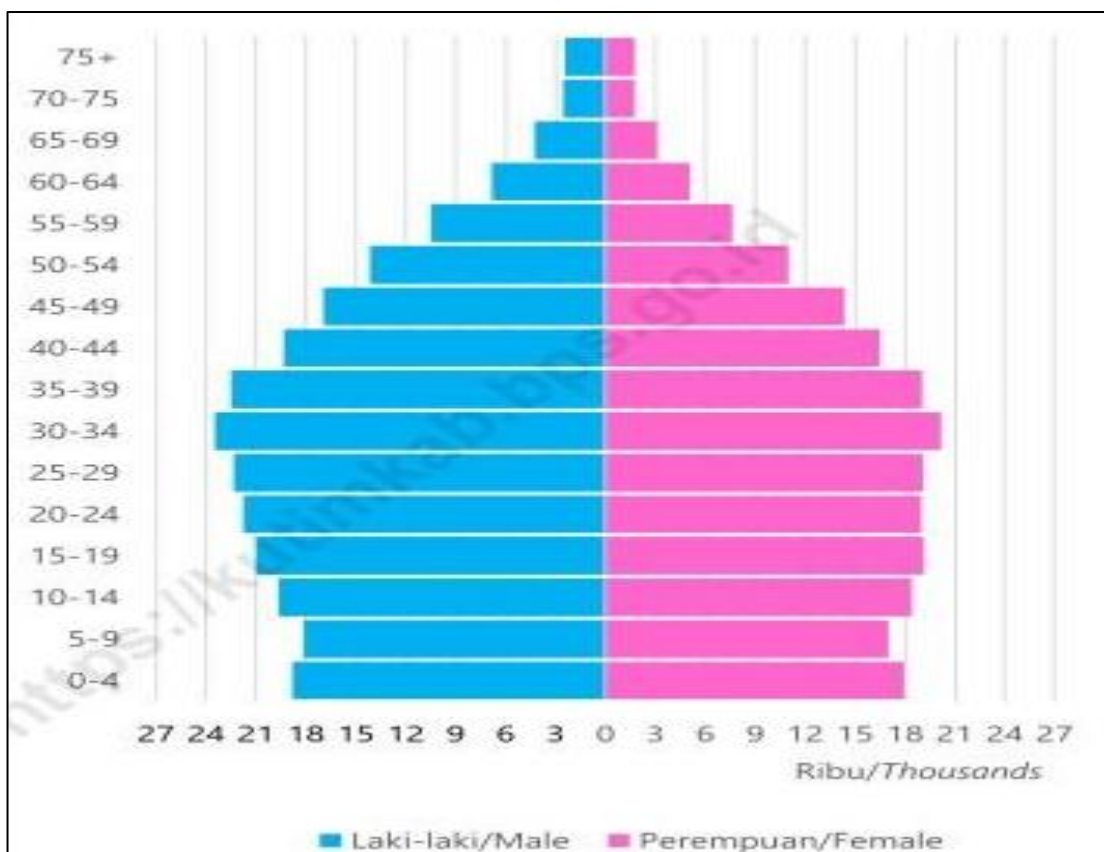
Tabel 2.41 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

No	Kelompok Umur	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	0 – 4	22.820	25.489	29,301
2.	5 – 9	42.084	41.797	42,414
3.	10 – 14	45.759	45.441	45,532
4.	15 – 19	41.733	41.771	40,428
5.	20 – 24	40.932	42.071	38,987
6.	25 – 29	39.650	35.642	36,408
7.	30 – 34	39.364	36.251	36,681
8.	35 – 39	35.510	35.714	35,945
9.	40 – 44	33.141	33.896	34,053

No	Kelompok Umur	Tahun		
		2021	2022	2023
10.	45 – 49	27.018	27.655	27,772
11.	50 – 54	21.767	22.528	22,548
12.	55 – 59	14.023	15.351	15,315
13.	60 – 64	9.455	9.805	9,789
14.	65 – 69	5.311	5.821	5,807
15.	70 – 74	3.258	3.473	3,455
16.	75 +	2.918	3.082	3,057
Jumlah		424.743	425.787	427,492

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kutai Timur, 2024

Piramida penduduk Kutai Timur pada tahun 2023 menggambarkan struktur demografis yang didominasi oleh kelompok usia muda dan produktif, mencerminkan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial di masa depan. Tingginya jumlah penduduk usia muda menunjukkan bahwa daerah ini mungkin memerlukan investasi yang signifikan dalam sektor pendidikan dan kesehatan untuk mempersiapkan generasi mendatang. Selain itu, dengan populasi usia produktif yang besar, ada peluang untuk mengembangkan sektor pekerjaan dan pelatihan keterampilan guna memaksimalkan potensi angkatan kerja. Namun, rendahnya jumlah penduduk lanjut usia juga menandakan perlunya perhatian terhadap layanan kesehatan dan program kesejahteraan sosial untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan harapan hidup yang lebih baik. Analisis ini penting untuk perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan demografis yang terjadi.



Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kutai timur 2023
 Sumber: BPS Kutai Timur, 2024

Tabel 2.42 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

No	Variabel	2021		2022	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuhan dan Perikanan	53.905	29,47	39.731	21,30
2.	Sektor Pertambangan dan Penggalan	20.159	11,02	21.409	11,48
3.	Sektor Industri Pengolahan	3.822	2,09	8.303	4,45
4.	Sektor Listrik, Gas dan Air	859	0,47	1.392	0,75
5.	Sektor Bangunan	13.889	7,59	11.262	6,04
6.	Sektor Perdagangan Besar, Eceran Rumah dan Rumah Makan serta Hotel	31.621	17,29	33.994	18,23

No	Variabel	2021		2022	
		Jumlah	%	Jumlah	%
7.	Sektor Angkutan, Perdagangan dan Komunikasi	118	0,05	17.692	9,49
8.	Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	5.723	3,13	5.100	2,73
9.	Sektor Jasa Kemasyarakatan	32.134	17,57	36.743	19,70
10.	Sektor Bidang Lainnya	20,686	11,31	10.876	5,83
	Jumlah	182.916	100,00	186.502	100,00

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur, 2023

No	Variabel	2023	
		Jumlah	%
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan. Menggunakan data: • Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	60.979	28,20
2.	Sektor Manufaktur. Menggunakan data: • Pertambangan dan Penggalian • Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin • Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi • Konstruksi	47.737	22,07
3.	Sektor Jasa-jasa. Menggunakan data: • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor • Pengangkutan dan Pergudangan • Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Aktivitas Keuangan dan Asuransi • Real Estate • Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis • Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	107.537	49,73

No	Variabel	2023	
		Jumlah	%
	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib • Pendidikan • Aktivitas Jasa Lainnya 		
	Jumlah	216.253	100,00

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur, 2023

Jumlah angkatan kerja di Kutai Timur pada tahun 2022 mencapai 203.186 jiwa, di mana jumlah penduduk yang bekerja mencapai 190.015 jiwa dan yang masih berstatus pengangguran mencapai 13.171 jiwa. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, jumlah dan komposisi tenaga kerja akan mengalami perubahan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2022 menunjukkan besaran 67,78% di mana TPAK merupakan indikator persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Dari sisi pengangguran dapat dilihat berdasarkan TPT atau Tingkat Pengangguran Terbuka yang bernilai 6,48%, selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.43 Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2021-2023

No	Variabel	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Jumlah Angkatan Kerja	197.053	203.186	229.893
2.	Jumlah Penduduk yang Bekerja	186.502	190.015	216.253
3.	Jumlah Pengangguran Terbuka	10.551	13.171	13.640
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67.97	67.78	66,22
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.35	6.48	5,93
6.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94.65	93.52	94.07

Sumber: BPS Kutai Timur, 2024

2. Aparatur Sipil Negara

Sumber daya manusia adalah elemen penting dalam pelaksanaan dan efektivitas kinerja organisasi secara umum. Penting untuk menyusun kualitas dan jumlah sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan, khususnya dalam menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kutai Timur. Pada tahun 2021, total jumlah pegawai tercatat sebanyak 13.041, dengan dominasi signifikan dari TK2D yang berjumlah 7.091 pegawai dan PNS sebanyak 5.950 pegawai.

Memasuki tahun 2022, terjadi peningkatan total jumlah pegawai menjadi 13.847. Tahun ini menandai munculnya CPNS dan PPPK dalam catatan, masing-masing berjumlah 42 dan 906. Ini menunjukkan adanya inisiatif penerimaan atau pengangkatan baru dalam kedua kategori tersebut. PNS mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 6.731, sementara TK2D mengalami penurunan menjadi 6.168. Peningkatan jumlah PNS dan kemunculan CPNS serta PPPK dapat mencerminkan upaya penguatan struktur kepegawaian formal dan respons terhadap kebutuhan layanan publik atau implementasi kebijakan baru.

Pada tahun 2023, terjadi penurunan total jumlah pegawai menjadi 12.771. Menariknya, jumlah PNS turun cukup drastis menjadi 5.623. Penurunan ini terjadi seiring dengan implementasi kebijakan penghapusan tenaga honorarium menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN dengan memastikan bahwa semua tenaga kerja di pemerintahan memiliki status yang jelas dan sesuai dengan standar ASN. Penghapusan tenaga honorarium dan pengangkatan mereka menjadi PPPK juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat dedikasi serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Tabel 2.44 Jumlah Pegawai di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2023

No	Status Pegawai	Tahun		
		2021	2022	2023
1	PNS	5.950	6.731	5.623
2	CPNS	-	42	-
3	PPPK	-	906	2.288
4	TK2D	7.091	6.168	4.860
	Jumlah	13.041	13.847	12.771

Sumber: BKPDSDM Kabupaten Kutai Timur, 2024

Jumlah PNS di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2019-2023 yang cenderung menunjukkan tren meningkat, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2021–2023

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
2021	2.841	3.109	5.950
2022	3.007	3.724	6.731
2023	3.283	4.628	7.911

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kutai Timur, 2023

Sementara data pensiun dan data mutasi di Kabupaten Kutai Timur tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46 Data Pensiun dan Mutasi Luar Daerah Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Golongan	Data Pensiun	Data Mutasi Luar Daerah
IV	41	-
III	56	-
II	10	-
I	1	-
Jumlah	108	-

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kutai Timur, 2024

Jumlah PNS berdasarkan jabatannya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Fungsional Tertentu; Fungsional Umum; dan Struktural. Struktural dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V.

Tabel 2.47 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2023

Jabatan	2021			2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Fungsional									
Fungsional Tertentu	1.299	2.001	1.871	3.555	5.426	1.003	1.871	3.555	5.426
Fungsional Umum	1.055	911	1.003	902	1.905	2.807	1.003	902	1.905
Struktural									
Eselon IV	279	154	224	118	342	152	224	118	342
Eselon III	170	40	152	49	201	33	152	49	201
Eselon II	38	3	33	4	37	0	33	4	37
Eselon I	0	0	0	0	0	3.283	0	0	0
Jumlah	2.841	3.109	3.283	4.628	7.911	1.871	3.283	4.628	7.911

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kutai Timur, 2023

Dalam rentang tiga tahun, dari 2021 hingga 2023, Pemerintah Kabupaten Kutai timur telah mengalami perubahan yang signifikan dalam struktur jabatan dan komposisi gender pegawainya.

Tahun 2021, tercatat Kutai Timur memiliki jumlah pegawai yang cukup seimbang antara jabatan fungsional tertentu dan umum, serta struktural. Untuk jabatan fungsional tertentu, jumlah pegawai laki-laki adalah 1.299 dan perempuan 2.001, menunjukkan kecenderungan perempuan lebih dominan. Pada jabatan fungsional umum, angka tersebut nyaris seimbang dengan 1.055 laki-laki dan 911 perempuan. Pada jabatan struktural, mulai dari Eselon IV hingga II, terlihat adanya ketidakseimbangan dengan dominasi laki-laki, kecuali pada Eselon I yang tidak tercatat adanya pegawai.

Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan jumlah pegawai secara dramatis, khususnya pada jabatan fungsional tertentu, dengan jumlah laki-laki meningkat menjadi 3.555 dan perempuan 5.426. Jabatan fungsional umum terpantau stabil, menunjukkan konsistensi dalam peranannya. Sementara pada jabatan struktural, terjadi penurunan jumlah pada Eselon IV dan III, namun jumlah pegawai pada Eselon II tetap, dan pada Eselon I masih tidak tercatat adanya pegawai.

Pada tahun 2023, jumlah pegawai pada jabatan fungsional tertentu kembali ke distribusi yang lebih seimbang, mirip dengan tahun 2021. Untuk jabatan fungsional umum dan struktural, jumlahnya tetap stabil dengan tahun sebelumnya, menunjukkan kondisi yang telah stabil pasca-lonjakan pada tahun 2022. Jabatan struktural menunjukkan konsistensi dengan sedikit fluktuasi pada jumlah pegawai antara laki-laki dan perempuan.

Analisis ini memperlihatkan dinamika yang kompleks dalam struktur organisasi dari tahun ke tahun. Kenaikan signifikan pada tahun 2022, terutama pada jabatan fungsional tertentu, bisa mengindikasikan adanya perubahan strategi dalam rekrutmen atau kebijakan internal yang mendorong peningkatan sumber daya manusia. Konsistensi pada tahun 2023 menunjukkan stabilitas setelah periode perubahan. Penyesuaian ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam jumlah pegawai, tetapi juga dalam komposisi gender yang menjadi lebih beragam, mencerminkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kesetaraan gender di lingkungan kerja.

3. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Indonesia mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang berada dalam fase kritis perkembangan, yaitu usia 16 hingga 30 tahun. Di rentang usia ini, pemuda memiliki energi yang besar dan semangat yang tinggi, serta berusaha mencari identitas diri mereka. Ini termasuk merencanakan masa depan, mencari pasangan hidup, memulai karier, dan memasuki dunia kerja. Pemuda memiliki peranan kunci dalam pembangunan daerah.

Pembangunan di sektor pemuda oleh pemerintah dapat diartikan sebagai strategi yang sistematis untuk meningkatkan keterlibatan pemuda dalam semua aspek kehidupan, termasuk partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program di berbagai bidang. Pemerintah Daerah Kutai Timur fokus pada pengembangan kapasitas dan daya saing di bidang kepemudaan dan olahraga, dengan menargetkan capaian pembangunan yang signifikan di sektor ini.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Pemda Kutai Timur terdapat peningkatan capaian indikator di tahun 2021 dari 65,07% menjadi 67,36% di tahun 2022. Peningkatan tersebut terlihat dari peningkatan jumlah Organisasi Pemuda yang aktif sebanyak 97 OKP. Selain itu, terdapat peningkatan Capaian dari Target di tahun 2022 sebesar 16,31% dengan capaian persentase menjadi 100% dengan jumlah organisasi Kepramukaan yang aktif sebanyak 76 Organisasi Kepramukaan

Kenaikan ini menunjukkan adanya antusias potensi Pemuda untuk pengembangan dirinya yang berkontribusi positif pada pembangunan. Namun sebaliknya, apabila potensi tersebut tidak dikelola dengan baik justru akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan untuk menghasilkan manfaat semaksimal mungkin, pemuda perlu dilibatkan dalam proses-proses pembangunan.

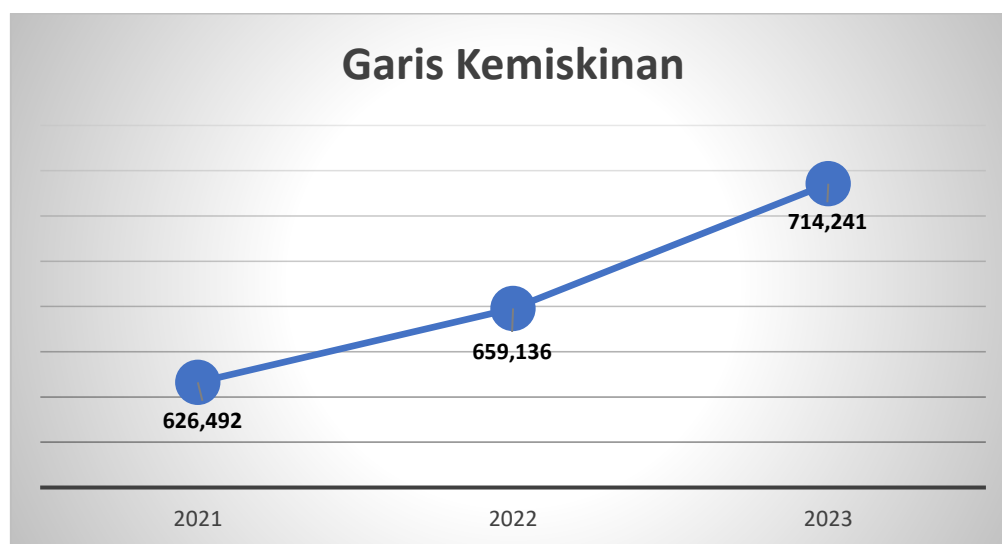
Kebijakan Pengembangan Pemuda dan Olahraga ini menjadi strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan

harapan dapat diraihny tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olahraga. Untuk itu diperlukan kerja sama serta komitmen berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun pemuda itu sendiri dalam berupaya agar pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dapat tercapai secara maksimal. Langkah-langkah strategis yang mendorong implementasi kebijakan ini perlu disusun agar seluruh pihak dapat terbuka dan melaksanakannya.

Kebijakan Pengembangan Olahraga Pemda Kutai Timur menunjukkan peningkatan capaian di Tahun 2021 dari 38,09% dengan jumlah Prestasi Olahraga yang diperoleh sebanyak 501 medali dari 70 Cabang yang di ikuti.

B. Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Data mengenai kemiskinan dari tahun 2021 hingga 2023 memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur. Perubahan dalam garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan kompleksitas masalah kemiskinan serta menunjukkan efektivitas intervensi yang dilakukan untuk mengatasinya.

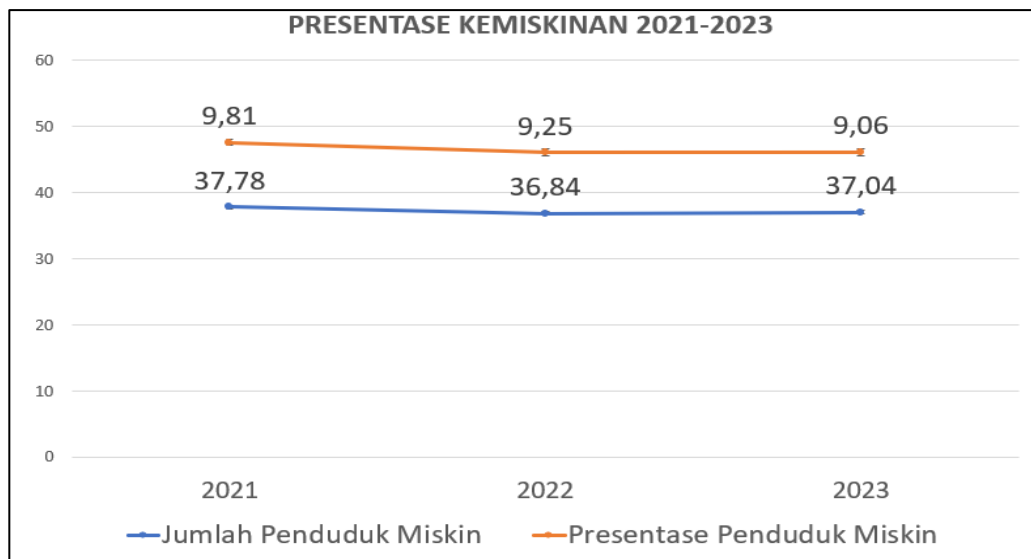


Grafik 2.18 Garis Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Dari tahun 2021 ke tahun 2023, garis kemiskinan meningkat dari Rp 626.492 menjadi Rp 714.241. Peningkatan ini menandakan bahwa standar minimal kebutuhan hidup mengalami kenaikan, yang mungkin disebabkan oleh inflasi atau perubahan harga barang dan jasa esensial. Hal ini menunjukkan bahwa biaya untuk mencapai standar hidup minimal menjadi lebih tinggi, menuntut peningkatan pendapatan bagi penduduk untuk menghindari kemiskinan.

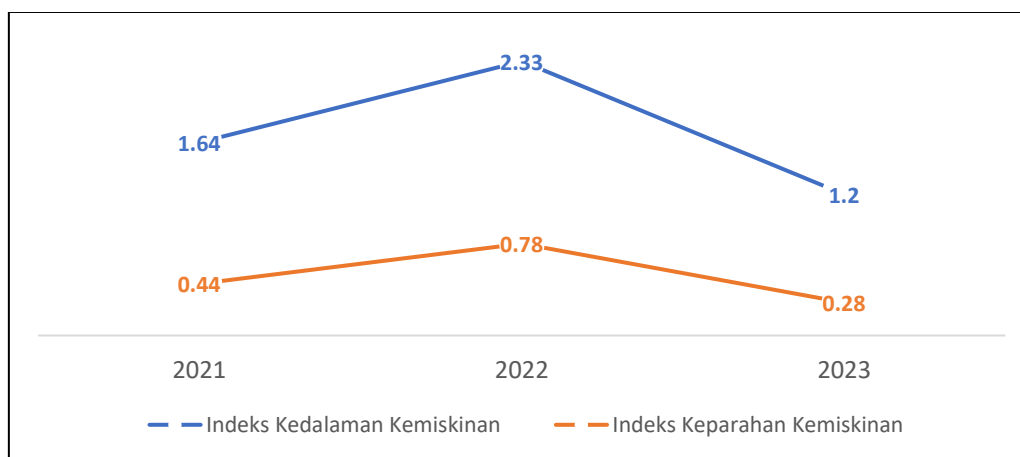
Selanjutnya Jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi dari 37,78 ribu jiwa di tahun 2021 menjadi 36,84 ribu jiwa di tahun 2022, dan sedikit naik menjadi 37,04 ribu jiwa di tahun 2023. Penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun 2021 ke tahun 2022 menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun kenaikan kecil pada tahun 2023 menandakan tantangan yang masih ada dalam mempertahankan momentum positif tersebut.

Adapun persentase penduduk miskin menunjukkan tren penurunan dari 9,81% di tahun 2021 menjadi 9,06% di tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan bahwa proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan relatif menurun, menunjukkan efektivitas kebijakan dan program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan.



Grafik 2.19 Presentase Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Indeks kedalaman kemiskinan, yang mengukur seberapa jauh rata-rata penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, meningkat dari 1,64 di tahun 2021 menjadi 2,33 di tahun 2022, kemudian turun signifikan menjadi 1,20 di tahun 2023. Peningkatan di tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk miskin menghadapi kesulitan yang lebih besar, namun penurunan tajam di tahun 2023 menandakan perbaikan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan di antara penduduk miskin.

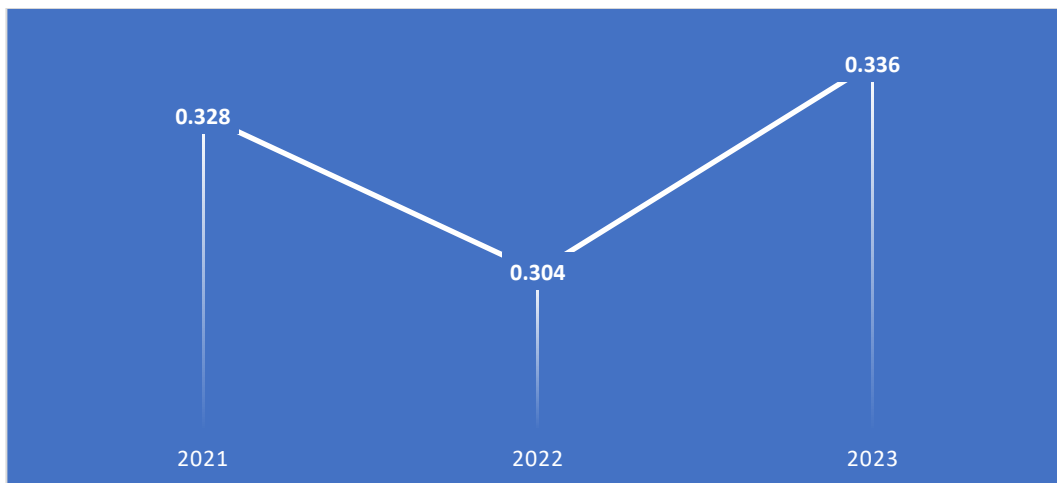


Grafik 2. 20 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Kab. Kutai Timur Tahun 2021-2023
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Indeks keparahan kemiskinan, yang mengukur ketidaksetaraan di antara penduduk miskin, menunjukkan penurunan dari 0,44 di tahun 2021 menjadi 0,28 di tahun 2023, meskipun mengalami kenaikan menjadi 0,78 di tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam pemerataan kondisi ekonomi di antara penduduk miskin, mengurangi disparitas dalam tingkat kemiskinan yang parah.

Ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi merupakan salah satu persoalan ekonomi serius yang dihadapi Indonesia, secara umum dan khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ini bertolak belakang dengan salah satu tujuan pembangunan yang selama ini dicita-citakan yaitu tercapainya peningkatan pendapatan per kapita yang terdistribusi secara merata dan dapat dinikmati oleh keseluruhan penduduk secara seimbang. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah Gini Ratio. Gini

Ratio dihitung berdasarkan kelas pendapatan dengan skala 0-1. Nilai Gini Ratio berada pada interval 0 sampai dengan 1, semakin mendekati angka satu menunjukkan semakin tingginya tingkat ketimpangan penduduk di suatu tempat. Sebaliknya, semakin dekat Gini Ratio dengan angka 0 menunjukkan semakin terjadinya pemerataan pendapatan.



Grafik 2.21 Gini Ratio Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Pada tahun 2021, Gini Rasio tercatat sebesar 0,328, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. Nilai ini kemudian menurun menjadi 0,304 pada tahun 2022, menunjukkan perbaikan dalam distribusi pendapatan dan penurunan ketimpangan. Penurunan ini mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Namun, pada tahun 2023, Gini Rasio kembali meningkat menjadi 0,336. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan lagi. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata. Peningkatan ketimpangan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan akses terhadap peluang ekonomi, perbedaan dalam upah atau pendapatan, dan mungkin adanya dampak dari dinamika ekonomi lokal maupun nasional.

C. Aspek Potensi Unggulan Daerah

1. Pertanian Tanaman Pangan

Perkembangan bidang pertanian di wilayah Kabupaten Kutai Timur selama periode 2020-2021 menunjukkan perkembangan yang cukup stabil dalam mendukung ketersediaan pangan, khususnya padi (padi sawah dan padi ladang) sebagai pangan utama, di mana sampai dengan musim tanam tahun 2022 produksi padi sebanyak 24.110 ton meningkat sebanyak 2.640,5 ton dibandingkan tahun 2021, namun terjadi penurunan luas tanam padi seluas 116,7 Ha pada tahun 2021 menjadi 6.813 Ha pada tahun 2022.

Sedangkan untuk tanaman palawija pada tahun 2022 mengalami peningkatan luas tanam seluas 449,8 Ha dari 2.356,2 Ha pada tahun 2021 menjadi 2.663 Ha pada tahun 2022., namun mengalami penurunan produksi sebesar 1.346,4 Ha dari sebesar 20.673,8 Ton pada tahun 2021, menjadi sebesar 19.327,4 Ton pada tahun 2022.

Tabel 2.48 Luas lahan dan Produksi Hasil Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten kutai Timur Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023*
Luas lahan (Ha) :				
A.	Luas Lahan Sawah Eksisting		2.613,27	2.613,27
B.	Luas Lahan Potensial		2.056,98	2.056,98
Luas Tanam (Ha) :				
A.	Padi	6.929,70	7273	6770,08
1.	Padi Sawah	5.105,30	5.006	4.385,15
2.	Padi Ladang	1.824,40	2267	2.384,93
B.	Palawija	2.797	4415	898,41
1.	Jagung	2.356,20	3190	461,56
2.	Kedelai	9,1	30	6
3.	Kacang Tanah	66,9	200	86,07
4.	Kacang Hijau	8,7	2,4	1,10
5.	Ubi Kayu	262,3	746	233,15
6.	Ubi Jalar	93,8	247	110,53
C.	Hortikultura	8.212,61	24887,84	17305,53
1.	Sayuran (Luas Panen)	938,27	1324,56	1036,61
2.	Buah-buahan (Luas Panen)	7.274,34	22238,72	15232,31

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023*
Produksi pertanian (Ton) :				
A.	Padi	21.470,20	24.110,53	24.989,61
1.	Padi Sawah	14.883,80	18.791,10	20.193,93
2.	Padi Ladang	6.586,40	5.319,43	4.795,67
B.	Palawija	20.673,80	40.226,89	12.308,18
1.	Jagung	6.774,00	14.567,00	2.062,66
2.	Kedelai	9	44,00	5,89
3.	Kacang Tanah	166,9	249,00	88,14
4.	Kacang Hijau	13,9	1,89	2,72
5.	Ubi Kayu	12.014,00	25.119,00	8.520,24
6.	Ubi Jalar	1.696,00	246,00	1.628,55
C.	Hortikultura	116.354,04	105.394,49	86.858,15
1.	Sayuran	2.133,28	4.653,38	4.263,80
2.	Buah-buahan	114.220,76	96.087,72	78.330,55
Produktifitas (Ton/Ha)				
A.	Padi	7,12	7,12	7,12
1.	Padi Sawah	4,5	4,50	4,50
2.	Padi Ladang	2,62	2,62	2,62
B.	Palawija	50,17	50,17	50,18
1.	Jagung	5,5	5,50	5,50
2.	Kedelai	1,52	1,52	1,52
3.	Kacang Tanah	1,1	1,10	1,11
4.	Kacang Hijau	0,25	0,25	0,25
5.	Ubi Kayu	27,02	27,02	27,02
6.	Ubi Jalar	14,78	14,78	14,78
C.	Hortikultura	17,97	12,43	-
1.	Sayuran	2,27	2,21	-
2.	Buah-buahan	15,7	10,22	-

Sumber: DTHP Kab. Kutai Timur Tahun 2024 Keterangan: *) Angka Sementara

2. Peternakan

Pada periode tahun 2021 hingga tahun 2023, data statistik menunjukkan dinamika populasi dan produksi di sektor peternakan dan unggas.

- a. Populasi Ternak Besar: Terdapat penurunan jumlah populasi sapi dari 19.486 ekor di tahun 2021 menjadi 19.305 ekor di tahun 2023. Kerbau mengalami fluktuasi dengan jumlah awal 541 ekor di tahun 2021, turun menjadi 479 ekor

di tahun 2022, dan kemudian naik sedikit menjadi 491 ekor di tahun 2023. Populasi kambing menunjukkan penurunan di tahun 2022 menjadi 8.096 ekor, namun mengalami kenaikan menjadi 8.460 ekor pada tahun berikutnya. Sementara itu, populasi babi menunjukkan penurunan drastis dari 11.640 ekor di tahun 2021 menjadi 4.839 ekor di tahun 2023.

- b. **Produksi Daging Ternak Besar:** Produksi daging sapi turun dari 691,37 ton pada tahun 2021 menjadi 447,50 ton di tahun 2023. Untuk daging kerbau, terjadi peningkatan signifikan dari 4,45 ton di tahun 2021 menjadi 12,30 ton di tahun 2023. Produksi daging kambing relatif stabil dengan sedikit kenaikan dari 54,63 ton menjadi 55,50 ton. Namun, produksi daging babi meningkat dari 279,99 ton menjadi 392,80 ton pada periode yang sama.
- c. **Populasi Unggas:** Populasi ayam kampung meningkat secara signifikan dari 453.662 ekor di tahun 2021 menjadi 693.328 ekor di tahun 2023. Ayam ras pedaging juga mengalami peningkatan dari 3.826.782 ekor menjadi 4.187.827 ekor. Populasi ayam ras petelur meningkat dari 63.000 ekor menjadi 105.931 ekor. Sebaliknya, populasi itik mengalami penurunan dari 82.883 ekor menjadi 38.381 ekor.
- d. **Produksi Daging Unggas:** Produksi daging ayam kampung tumbuh dari 241,8 ton menjadi 349,80 ton. Daging ayam ras pedaging mengalami kenaikan produksi dari 2.617,75 ton menjadi 3.132,60 ton. Produksi daging ayam ras petelur sedikit naik dari 12,84 ton menjadi 16,60 ton. Produksi daging itik juga menunjukkan kenaikan dari 8,47 ton menjadi 10,10 ton.
- e. **Produksi Telur Unggas:** Pada kategori ini, produksi telur ayam kampung meningkat dari 312,12 ton menjadi 493,00 ton. Produksi telur ayam ras petelur meningkat dari 498,33 ton menjadi 810,00 ton. Produksi telur itik juga mengalami kenaikan dari 161,96 ton menjadi 223,00 ton.

Tabel 2.49 Populasi Ternak, Produksi Daging, dan Produksi Telur Hasil
Pernakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2023

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
A. Populasi Ternak Besar (ekor):					
1.	Sapi	Ekor	19,486	19.336	19.305
2.	Kerbau	Ekor	541	479	491
3.	Kambing	Ekor	8,625	8.096	8.460
4.	Babi	Ekor	11,64	4.089	4.839
B. Produksi Daging Ternak Besar (Ton):					
1.	Sapi	Ton	691,37	436,66	447,50
2.	Kerbau	Ton	4,45	11,98	12,30
3.	Kambing	Ton	54,63	54,18	55,50
4.	Babi	Ton	279,99	383,19	392,80
C. Populasi Unggas (ekor):					
1.	Ayam Kampung	Ekor	453.662	685.920	693.328
2.	Ayam Ras Pedaging	Ekor	3.826.782	4.181.452	4.187.827
3.	Ayam Ras Petelur	Ekor	63.000	99.561	105.931
4.	Itik	Ekor	82.883	37.444	38.381
D. Produksi Daging Unggas (Ton) :					
1.	Ayam Kampung	Ton	241,8	341,26	349,80
2.	Ayam Ras Pedaging	Ton	2,617,75	3.056,19	3.132,60
3.	Ayam Ras Petelur	Ton	12,84	16,19	16,60
4.	Itik	Ton	8,47	9,19	10,10
E. Produksi Telur Unggas (Ton) :					
1.	Ayam Kampung	Ton	312,12	471,50	493,00
2.	Ayam Ras Petelur	Ton	498,33	787,20	810,00
3.	Itik	Ton	161,96	202,90	223,00

Sumber: DTHP Kabupaten Kutai Timur, 2024.

3. Perkebunan

Selama tahun 2021 hingga tahun 2023, Kabupaten Kutai timur telah mengalami berbagai perubahan dalam sektor perkebunan yang terlihat dari data luas lahan dan produksi perkebunan.

- a. Luas Lahan Perkebunan: Pada tahun 2021, luas lahan perkebunan karet tercatat sebesar 19.307,02 hektar dan mengalami penurunan kecil hingga tahun 2023 menjadi 19.153,95 hektar. Di sisi lain, luas lahan perkebunan kelapa menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 1.286,10 hektar di tahun 2021 menjadi 1.419,15 hektar di tahun 2023. Luas lahan untuk kopi robusta dan vanili mengalami fluktuasi sedikit, namun lahan untuk lada menunjukkan kenaikan yang signifikan dari 419,75 hektar menjadi 493,13 hektar dalam periode yang sama. Perkebunan kakao menunjukkan penurunan luas lahan dari 3.440,33 hektar menjadi 3.607,80 hektar. Namun, kelapa sawit, sebagai komoditas utama, mengalami peningkatan luas lahan yang dramatis dari 459.526,27 hektar di tahun 2021 menjadi 509.562,64 hektar di tahun 2023. Komoditas aren dan kemiri juga menunjukkan pertumbuhan luas lahan.
- b. Produksi Perkebunan: Produksi karet mencatat penurunan produksi dari 1.788,40 ton menjadi 3.070,07 ton di tahun 2023. Sebaliknya, produksi kelapa sawit meningkat secara luar biasa dari 7.060.686,10 ton di tahun 2021 menjadi 7.759.931,02 ton di tahun 2023. Sementara produksi kelapa, kopi robusta, lada, dan kakao menunjukkan penurunan. Vanili dan aren, meskipun memiliki luas lahan yang tidak besar, menunjukkan peningkatan produksi. Kemiri menunjukkan peningkatan yang mencolok dalam produksi dari 7,83 ton di tahun 2021 menjadi 213,01 ton di tahun 2023.
- c. Produktivitas Perkebunan: Dari segi produktivitas, kelapa sawit tetap menjadi komoditas paling produktif dengan rata-rata produksi 16,09 kg per hektar, meski mengalami penurunan dari 16,95 kg per hektar di tahun sebelumnya. Vanili menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan hingga 2,95 kg per hektar. Produksi per hektar untuk karet, kelapa, kopi robusta, lada, dan kakao mengalami penurunan. Sementara itu, produktivitas aren dan kemiri meningkat, dengan kemiri mencatat kenaikan menjadi 6,87 kg per hektar.

Dalam rentang waktu tiga tahun, sektor perkebunan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan perubahan yang beragam. Pertumbuhan luas lahan perkebunan dan produksi kelapa sawit menjadi sorotan utama, menandakan potensi besar komoditas ini dalam kontribusi terhadap ekonomi daerah. Namun, penurunan produktivitas di beberapa komoditas lain menuntut evaluasi dan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan hasil perkebunan. Kondisi ini mendorong pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan kebijakan pertanian dan perdagangan yang diadopsi oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.50 Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022*	2023**
A. Luas Lahan perkebunan (Ha):				
1.	Karet	19.307,02	19.305,25	19.153,95
2.	Kelapa	1.286,10	1.404,15	1.419,15
3.	Kopi Robusta	99,35	89,55	88,80
4.	Lada	419,75	438,63	493,13
5.	Vanili	6,68	7,68	7,50
6.	Kakao	3.440,33	3.661,00	3.607,80
7.	Kelapa Sawit	459.526,27	508.639,29	509.562,64
8.	A r e n	313,7	348,95	391,75
9.	Kemiri	30,4	34,10	34,10
	Jumlah	484.429,60	533.928,60	534.758,82
B. Produksi pekebunan (Ton):				
1.	Karet	1.788,40	6.620,18	3.070,07
2.	Kelapa	1.060,03	679,02	877,59
3.	Kopi Robusta	50,98	59,13	28,32
4.	Lada	127,72	131,23	61,20
5.	Vanili	2,78	2,87	7,66
6.	Kakao	1.414,09	1.455,75	464,94
7.	Kelapa Sawit	7.060.686,10	7.936.369,29	7.759.931,02
8.	A r e n	35,55	325,14	418,09
9.	Kemiri	7,83	203,61	213,01
	Jumlah	7.065.173,57	7.945.846,20	7.767.966,85

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022*	2023**
C. Produktivitas (Kg/Ha) Produksi/Luas Lahan yang menghasilkan:				
1.	Karet		2,01	0,80
2.	Kelapa		0,63	0,88
3.	Kopi Robusta		0,78	0,68
4.	Lada		0,45	0,20
5.	Vanili		1,04	2,95
6.	Kakao		0,60	0,53
7.	Kelapa Sawit		16,95	16,09
8.	A r e n		2,82	3,52
9.	Kemiri		6,46	6,87

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, 2024

Keterangan: *) Angka Tetap, **) Angka Sementara

Perkembangan industri hasil perkebunan kelapa sawit berupa pabrik pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) belum mengalami perubahan hingga tahun 2023. Jumlah pabrik CPO sebanyak 38 unit Pabrik CPO di Kutai Timur dengan total kapasitas produksi terpasang 1.982 ton/jam dan kapasitas terpakai 1.835 ton/jam. Dari sebanyak 38 unit pabrik CPO yang ada, pada tahun 2023 telah dihasilkan CPO sebanyak 1.867.415 ton serta 356.567 ton Kernal dan 102.155 ton *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) :

Tabel 2.51 Lokasi dan Kapasitas Pabrik Crude Palm Oil (CPO) Kelapa Sawit Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Jumlah			Kapasitas Terpasang (ton/jam)			Kapasitas Terpakai (ton/jam)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Muara Wahau	8	9	9	530	545	545	530	494	494
2	Kongbeng	2	3	3	75	165	165	75	123	123
3	Sangkulirang	4	5	5	270	233	233	210	230	230
4	Karangan	4	4	4	195	180	180	180	165	165
5	Telen	2	1	1	180	45	45	180	45	45

No	Kecamatan	Jumlah			Kapasitas Terpasang (ton/jam)			Kapasitas Terpakai (ton/jam)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
6	Muara Bengkal	2	2	2	120	130	130	120	109	109
7	Kaubun	3	3	3	130	135	135	130	135	135
8	Bengalon	5	5	5	255	249	249	255	234	234
9	Rantau Pulung	1	1	1	30	30	30	30	30	30
10	Muara Ancalong	1	1	1	60	60	60	60	60	60
11	Busang	1	1	1	75	60	60	60	60	60
12	Sandaran	3	3	3	180	150	150	180	150	150
Jumlah		36	38	38	2.100	1.982	1.982	1.982	1.835	1.835

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, 2024

4. Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Kutai Timur telah mengalami perkembangan yang signifikan selama tahun 2021 hingga 2023, dengan berbagai aspek yang menunjukkan tren pertumbuhan yang beragam dari jumlah rumah tangga perikanan, produksi hasil perikanan, hingga nilai produksi yang dicapai.

- a. Rumah Tangga Perikanan: Terdapat peningkatan jumlah rumah tangga perikanan di berbagai sub-sektor dari tahun ke tahun. Pada perikanan laut, jumlah rumah tangga meningkat dari 1.926 pada tahun 2021 menjadi 2.308 pada tahun 2023, menunjukkan adanya penambahan rumah tangga yang signifikan dalam sektor ini. Perikanan perairan umum juga menunjukkan kenaikan yang mencolok dari 995 rumah tangga menjadi 1.655. Sementara itu, jumlah rumah tangga di sektor tambak tetap stabil di angka 65, dan kolam meningkat dari 110 menjadi 166 rumah tangga. Jumlah total rumah tangga perikanan meningkat dari 3.124 pada tahun 2021 menjadi 4.221 pada tahun 2023, menunjukkan adanya ekspansi aktivitas perikanan.

- b. **Produksi Hasil Perikanan:** Produksi hasil perikanan mengalami fluktuasi, dengan perikanan laut yang mengalami penurunan produksi pada tahun 2022 yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, namun kemudian meningkat tajam pada tahun 2023 menjadi 6.315,05 ton. Perikanan perairan umum hampir menggandakan produksinya pada tahun 2023 menjadi 2.170,99 ton. Sektor lain seperti tambak, kolam, dan rumput laut juga menunjukkan peningkatan produksi. Total produksi keseluruhan meningkat dari 7.072,42 ton pada tahun 2021 menjadi 9.466,78 ton pada tahun 2023.
- c. **Nilai Produksi Hasil Perikanan:** Nilai produksi hasil perikanan menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dari Rp 221,080 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 315,903 miliar pada tahun 2023. Perikanan laut merupakan kontributor terbesar dengan nilai produksi meningkat dari Rp 161,558 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 228,741 miliar pada tahun 2023. Sektor lain seperti perikanan perairan umum dan rumput laut juga menunjukkan kenaikan nilai produksi yang signifikan, menunjukkan peningkatan kualitas dan kuantitas hasil yang dapat dipasarkan.
- d. **Banyaknya Perahu/Kapal Penangkap Ikan:** Jumlah perahu dan kapal yang digunakan dalam aktivitas penangkapan ikan juga meningkat. Perahu tanpa motor meningkat secara signifikan dari 45 unit pada tahun 2021 menjadi 210 unit pada tahun 2023, sementara jumlah kapal motor juga meningkat dari 1.926 menjadi 2.235 unit.
- e. **Banyaknya Alat Penangkap Ikan:** Ada penambahan alat tangkap di sektor ini, terutama pada jaring insang yang meningkat dari 950 buah pada tahun 2021 menjadi 1.709 buah pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan usaha yang lebih intensif dalam penangkapan ikan, mendukung pertumbuhan total produksi dan nilai produksi yang tercatat.

Kabupaten Kutai Timur telah menunjukkan pertumbuhan yang dinamis dalam sektor perikananannya, dengan peningkatan jumlah rumah tangga perikanan, kapasitas produksi, serta nilai ekonomi dari hasil perikanan. Inisiatif untuk memperluas dan mendukung kegiatan perikanan melalui bantuan peralatan dan

infrastruktur telah membuahkan hasil yang menggembirakan, memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal dan keberlanjutan sumber daya alam.

Tabel 2.52 Rumah Tangga Perikanan, Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Kutai Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun			Keterangan
			2021	2022	2023	
A. Rumah Tangga Perikanan						
1	Perikanan Laut	RT	1.926	1.977	2.308	Adanya Penambahan Rumah Tangga Perikanan
2	Perikanan Perairan Umum	RT	995	1.003	1.655	
3	Tambak	RT	65	65	65	
4	Kolam	RT	110	110	166	
5	Keramba	RT	-	-	-	
6	Budidaya Pantai / Sawah	RT	-	-	-	
7	Minapadi (Sawah)	RT	2	2	2	
8	Rumput Laut	RT	22	22	22	
9	Jaring Apung Tawar	RT	2	2	2	
10	Jaring Tancap Tawar	RT	-	-	-	
11	Jaring Apung Laut	RT	2	2	1	
	Jumlah	RT	3.124	3.183	4.221	
B. Produksi Hasil Perikanan						
1	Perikanan Laut	Ton	4.977,00	4.978,00	6.315,05	Produksi sedikit menurun disebabkan cuaca ekstrem
2	Perikanan Perairan Umum	Ton	1.179,00	1.179,02	2.170,99	
3	Tambak	Ton	36,35	36,34	37,69	

No	Uraian	Satuan	Tahun			Keterangan
			2021	2022	2023	
4	Kolam	Ton	728,4	729,77	754,80	
5	Keramba	Ton	-	-	-	
6	Budidaya Pantai / Sawah	Ton	-	-	-	
7	Minapadi (Sawah)	Ton	3	1,50	4,04	
8	Rumput Laut	Ton	110,92	110,96	150,31	
9	Jaring Tancap Tawar	Ton	32,78	32,79	33,46	
10	Jaring Apung Laut	Ton	-	-	-	
11	Jaring Apung Laut		4,97	-	-	
	Jumlah	Ton	7.072,42	7.068,38	9.466,78	
C. Nilai Produksi Hasil Perikanan						
1	Perikanan Laut	Ribu Rp	161.558.253	182.975.575	228.741.636	
2	Perikanan Perairan Umum	Ribu Rp	28.661.060	32.641.340	55.932.240	
3	Tambak	Ribu Rp	1.024.335	1.305.455	1.469.262	
4	Kolam	Ribu Rp	26.906.975	29.260.295	27.091.604	
5	Keramba	Ribu Rp	-	-	-	
6	Budidaya Pantai / Sawah	Ribu Rp	-	-	-	
7	Minapadi (Sawah)	Ribu Rp	112.500	56.250	149.650	
8	Rumput Laut	Ribu Rp	332.565	446.544	1.052.135	
9	Jaring Apung Tawar	Ribu Rp	1.332.565	1.411.250	1.320.841	
10	Jaring Tancap Tawar	Ribu Rp	-	-	-	
11	Jaring Apung Laut	Ribu Rp	1.151.716	-	145.950	
	Jumlah	Ribu Rp	221.080.188	248.096.709	315.903.318	

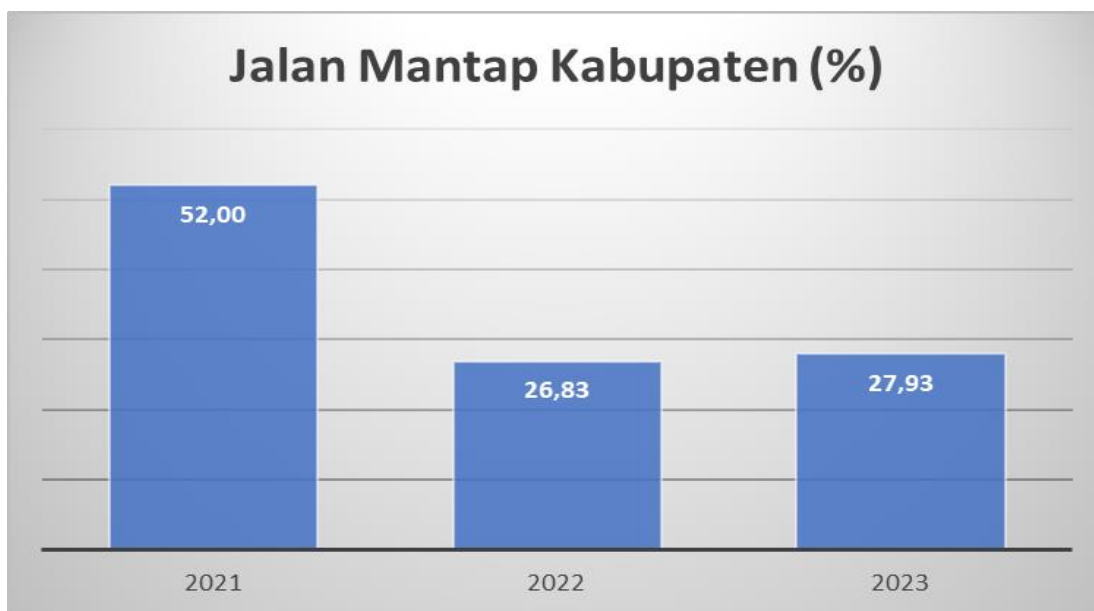
No	Uraian	Satuan	Tahun			Keterangan
			2021	2022	2023	
D. Banyaknya Perahu/Kapal Penangkap Ikan Laut dan Ikan Perairan Umum						
1.	Perahu tanpa motor	Unit	45	45	210	Alat Tangkap Rusak
2.	Perahu motor tempel	Unit	995	1.055	962	
3.	Kapal Motor	Unit	1.926	1.912	2.235	
	Jumlah	Unit	2.966	3.012	3.407	
E. Banyaknya Alat Penangkap Ikan Laut dan Perairan Umum						
1	Pukat	Buah	2	2	2	Ada Penambahan Alat Tangkap dari bantuan hibah
2	Jaring Insang	Buah	950	1.484	1.709	
3	Jaring Angkat	Buah	128	128	128	
4	Pancing/Rawai	Buah	7.101	7.075	7.075	
5	Perangkap	Buah	2.695	2.695	2.695	
6	Lainnya	Buah	200	214	214	
	Jumlah	Buah	11.076	11.598	11.823	

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

D. Aspek Infrastruktur Daerah

1. Kondisi Jalan Mantap

Kemantapan jalan merupakan indikator penting dalam menilai daya saing infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Jalan yang berada dalam kondisi mantap, baik dari segi kualitas permukaan maupun pemeliharaan, mencerminkan kesiapan daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi.



Grafik 2.22 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023
 Sumber: DPUPR Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

Kemantapan jalan di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan signifikan, dari 52% pada tahun 2021 menjadi 26,83% pada tahun 2022 dan sedikit meningkat menjadi 27,93% pada tahun 2023. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh perubahan kebijakan dalam perumusan perhitungan status jalan mantap yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR. Perubahan ini membuat status jalan mantap lebih sulit dicapai, sehingga target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi sulit terpenuhi. Upaya peningkatan kualitas jalan menjadi prioritas yang harus terus ditingkatkan untuk mendukung mobilitas dan ekonomi daerah.

2. Presentase Infrastruktur Sampah Perkotaan

Pada tahun 2022, angka persentase infrastruktur pengelolaan sampah perkotaan tercatat mencapai 40,60 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 82,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam pencapaian target pengelolaan infrastruktur sampah, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan peralatan, sumber daya manusia, atau masalah teknis lainnya. Di sisi lain, persentase penanganan sampah pada tahun yang sama mencapai 40,52 persen dari target sebesar 41,66 persen.

Meskipun pencapaian ini lebih mendekati target, namun masih ada ruang untuk perbaikan agar target dapat tercapai sepenuhnya.

Selama tahun 2023, upaya untuk meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah perkotaan menunjukkan hasil yang lebih baik. Dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 89,30 persen, telah tercapai sebesar 82,58 persen, atau tingkat ketercapaian mencapai 92,47 persen. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam penanganan dan pengelolaan sampah perkotaan dibandingkan tahun sebelumnya. Keberhasilan ini dapat menjadi indikator bahwa strategi dan program yang diterapkan mulai membuahkan hasil positif, meskipun masih diperlukan usaha lebih lanjut untuk mencapai target yang ditetapkan sepenuhnya.

3. Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Dalam konteks Program Perumahan dan Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh, capaian di bidang Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk tahun 2022 dalam Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup beberapa aspek. Ini termasuk persentase perumahan yang telah dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang mencapai 25%, serta rekapitulasi data mengenai kawasan kumuh di Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari luas kawasan kumuh seluas 783,72 hektar, dengan jumlah bangunan hunian sebanyak 11.897 unit dan RTLH sebanyak 1.252 unit, menunjukkan penurunan sebesar 0,25%.

Adapun persentase penanganan kawasan permukiman kumuh yang berukuran di bawah 10 hektar di kabupaten tercatat sebesar 30,67% (berdasarkan 6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021). Sementara itu, persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana masih berada pada angka 0%. Hal ini disebabkan karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2022 masih berfokus pada identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota, serta identifikasi lahan potensial untuk lokasi relokasi perumahan. Akibatnya, capaian indikator terkait belum dapat direalisasikan.

4. Cakupan Wilayah Saluran Drainase Rawan Genangan Air/Banjir (Perkotaan)

Ketersediaan saluran drainase yang tidak memadai dapat menimbulkan berbagai masalah seperti terjadinya genangan air atau banjir. Genangan air yang terjadi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerugian materiil maupun imateriil, sehingga diperlukan monitoring secara berkala. Berdasarkan Tabel Capaian Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Cakupan Wilayah Saluran Drainase Rawan Genangan Air/ Banjir (Perkotaan) pada tahun 2022 sebesar 6,40%, masih jauh dari target yang dicanangkan sebesar 94,86%.

Selama periode 2023, cakupan wilayah drainase rawan genangan air/banjir perkotaan, dari target kinerja sebesar 95%, baru tercapai sebesar 53,69%, yang diakibatkan karena kurang memadainya jaringan drainase, khususnya yang terkait penanganan air limpasan dan lokasi genangan air/ banjir (penanganan air limpasan dan air genangan saat hujan). Masih terdapat banyak ruang perbaikan dengan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain yang bersinggungan dengan program.

E. Aspek Pembangunan Pariwisata

Pariwisata dianggap sebagai sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan efek berganda pada sektor-sektor lain seperti pertanian (termasuk bunga, buah, dan perikanan), industri kerajinan, perdagangan (seperti rumah makan), serta jasa (misalnya penginapan, pemandu wisata, dan transportasi). Perkembangan sektor pariwisata diharapkan dapat memacu perekonomian dan secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah sekitar destinasi wisata.

1. Potensi Objek Wisata

Kabupaten Kutai Timur, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, menawarkan berbagai obyek wisata yang menarik bagi pengunjung. Salah satu tempat yang terkenal adalah Taman Nasional Kutai, yang memiliki luas sekitar 192.709,55 hektar. Taman Nasional ini terkenal dengan kekayaan ekosistemnya yang mencakup hutan Dipterocarpaceae, hutan Ulin-Meranti-Kapur, vegetasi hutan mangrove, dan berbagai flora dan fauna khas seperti orangutan, bekantan, owa

kalimantan, dan lainnya. Lokasi ini menawarkan pengalaman alam yang luar biasa dengan topografi yang sebagian besar datar dan kondisi hutan yang kaya.

Selain itu, Kutai Timur juga memiliki delapan lokasi wisata utama yang harus dikunjungi, di antaranya adalah Pantai Teluk Lombok, Teluk Perancis, Pantai Kenyamukan, dan Aquatiq yang berada di Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan, serta Taman Nasional Kutai Mentoko, Pantai Birah-birahan di Kecamatan Sandaran, dan wisata tambang serta wisata religi di Bukit Pelangi. Hutan Lindung Wehea, yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk berbagai jenis flora dan fauna. Kawasan ini juga mencakup Gugusan Karst Sangkulirang dan Mangkalihat, yang menawarkan pemandangan gua-gua dan lukisan purba yang menarik bagi para penjelajah dan peneliti sejarah.

Kabupaten Kutai Timur dengan potensi wisata alamnya yang kaya dan beragam, menawarkan peluang besar untuk pengembangan pariwisata yang dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Kabupaten Kutai Timur.

2. Kegiatan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah. Upaya pelestarian budaya penting untuk dilakukan mengingat semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kutai Timur terus diupayakan agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap nilai budaya. Upaya peningkatan jati diri masyarakat Kutai Timur dalam Penyelenggaraan Festival seni dan budaya, dan Penyelenggaraan Festival keagamaan. Segala persoalan terkait infrastruktur, fasilitas dan sarana-prasarana mendukung rencana Sail Sangkulirang belum terkelola. Keragaman budaya dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur kurang dikenalkan secara optimal. Kondisi tersebut berakibat pada kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah yang kurang terlihat. Pengenalan budaya yang ada perlu ditujukan untuk masyarakat luar Kabupaten Kutai Timur juga, dengan harapan keragaman budaya Kabupaten Kutai Timur dapat lebih dikenal masyarakat secara luas. Pengenalan tersebut dapat dilalukan melalui berbagai event dan media informasi berbasis konsep yang terintegrasi dengan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kebudayaan dapat dilihat ditinjau dari beberapa indikator: Pertama, jumlah festival seni dan budaya. Kedua, sarana dan penyelenggaraan seni budaya. Ketiga, jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah dan yang dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya menggali dan menginventarisasi warisan budaya yang dapat dipergunakan untuk menarik minat wisatawan mengunjungi wilayah Kutai Timur.

F. Isu-isu Strategis Ekonomi 2025

Isu strategis yang akan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 tidak terlepas dari tema “Pemantapan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Mendukung Daya Saing Daerah”. Kabupaten Kutai Timur, sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar di Provinsi Kalimantan Timur, terus berupaya mengoptimalkan berbagai potensi yang dimilikinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah daerah telah mengidentifikasi enam isu strategis yang menjadi fokus utama dalam berbagai program dan kebijakan. Isu-isu strategis ini mencakup capaian investasi, kemitraan dengan Ibu Kota Negara (IKN) baru, potensi perkebunan kelapa sawit, pengembangan produk unggulan lainnya, kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy, dan pengembangan Pelabuhan Kenyamukan. Setiap isu strategis ini menawarkan peluang besar serta tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Beberapa isu strategis yang mendukung pembangunan Kutai Timur adalah sebagai berikut:

1. **Capaian Investasi:** Pada tahun 2022, Kabupaten Kutai Timur mencatat pencapaian investasi yang luar biasa dengan total nilai mencapai Rp 12,48 triliun. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi para investor. Investasi ini mencakup berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, industri, yang semuanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik dan pelayanan perizinan yang efisien, Kutai Timur terus menarik minat investor,

baik domestik maupun internasional, untuk menanamkan modal mereka di wilayah ini.

2. **Mitra IKN:** Penetapan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru Republik Indonesia membawa dampak positif bagi Kutai Timur, yang berfungsi sebagai daerah penyangga. Posisi strategis ini memberikan peluang besar untuk pengembangan infrastruktur, termasuk jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung aksesibilitas ke IKN. Selain itu, Kutai Timur juga diuntungkan dengan peningkatan kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari proyek-proyek nasional, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan swasta untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia guna mendukung pembangunan IKN.
3. **Potensi Sawit:** Kutai Timur memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, dengan luas lahan mencapai ratusan ribu hektare yang sebagian besar merupakan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Produksi kelapa sawit di daerah ini mampu menyumbang lebih dari 10 triliun rupiah pada tahun 2022, menjadikannya komoditas unggulan yang mendukung perekonomian daerah. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas perkebunan melalui penerapan teknologi pertanian yang modern dan berkelanjutan, serta memperbaiki infrastruktur pendukung seperti jalan produksi dan fasilitas pengolahan. Selain itu, program-program pemberdayaan petani sawit juga dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
4. **Potensi Produk Unggulan Lain:** Selain kelapa sawit, Kutai Timur memiliki berbagai produk unggulan lainnya, seperti hasil tambang (batubara, bijih besi) dan hasil perikanan. Produk-produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga memiliki potensi besar untuk diekspor. Misalnya, hasil perikanan dari wilayah pesisir memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan juga diekspor ke pasar internasional. Pemerintah daerah fokus pada pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk ini, serta memperkuat rantai pasokan dan distribusi. Diversifikasi produk unggulan ini

diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.

5. **KEK Maloy:** Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy dipersiapkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kutai Timur. KEK ini dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan, jalan raya, dan fasilitas pendukung lainnya yang terintegrasi. Fokus utama KEK Maloy adalah industri pengolahan dan manufaktur, yang diharapkan dapat menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan adanya KEK Maloy, diharapkan tercipta lapangan kerja baru yang signifikan, serta peningkatan daya saing produk lokal di pasar global. Pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa KEK Maloy beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian daerah.
6. **Pelabuhan Kenyamukan:** Pelabuhan Kenyamukan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang ekspor dan impor bagi Kutai Timur. Dengan akses langsung ke laut, pelabuhan ini mendukung aktivitas perdagangan dan logistik yang lebih efisien. Pelabuhan Kenyamukan dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat yang modern, gudang penyimpanan, dan akses transportasi yang baik, sehingga mampu melayani kebutuhan industri dan perdagangan dengan lebih efektif. Investasi dan pengembangan lebih lanjut pelabuhan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas daerah, mempercepat arus barang dan jasa, serta berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperbaiki fasilitas pelabuhan guna mendukung perekonomian Kutai Timur dan sekitarnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten mencakup sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan Perangkat Daerah melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kabupaten.

Berdasarkan amanat peraturan tersebut, maka evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur memuat substansi utama yaitu:

Tabel 2.53 Realisasi Indikator Makro

No	Indikator	Target 2023	Capaian Semester VII
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,1	74,98
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,61	5,93
3	Tingkat Kemiskinan	9,57	9,06
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,10	7,71
5	Indeks Gini	0,347	0,336
6	Nilai Tukar Petani	107,48	102,21

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur, 2024

Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa program yang tidak sesuai antara perencanaan dan penganggaran. Hal ini menyebabkan berbagai kendala dalam evaluasi hasil RKPD Semester II Tahun 2023, antara lain:

1. Lemahnya pemahaman dan keterampilan dalam mengukur kinerja terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan serta membangun keterkaitan antar indikator sesuai dengan jenis dan tingkatan yang seharusnya.
2. Terdapat inkonsistensi atau perbedaan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga tingkat capaian program atau kegiatan tidak dapat terukur dengan baik.
3. Penyandingan program dalam RPJMD dengan Permendagri 90 Tahun 2019 mempengaruhi program pendukung capaian indikator sasaran daerah.
4. Keterlambatan terbitnya DPA sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
5. Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dari kementerian terkait.
6. Daya serap anggaran rendah karena masih terdapat permasalahan pergeseran atau revisi anggaran.
7. Keterlambatan pengadaan barang dan jasa atau lelang serta kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan pada saat perencanaan.

8. Masih lemahnya efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat perangkat daerah dan kurang optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik dari BPK-RI maupun APIP.
9. Penyusunan Laporan Evaluasi RKPD dan Formulir E.60 masih dilakukan secara manual, sehingga sangat berpotensi terjadi kesalahan dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Terdapat program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja di berbagai dinas di Kabupaten Kutai Timur, sesuai data LKPJ tahun 2023, diantaranya:

2.2.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur menetapkan target rasio ketersediaan sekolah dasar (SD/MI) dan sekolah menengah pertama (SMP/MTs) per penduduk. Namun, realisasi pada tahun 2023 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Rasio Ketersediaan SD/MI per penduduk hanya mencapai 4,518, lebih rendah dari target sebesar 5,658. Begitu pula dengan Rasio Ketersediaan SMP/MTs per penduduk yang hanya mencapai 4,364, dibandingkan dengan target sebesar 5,326. Kendala yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran untuk pembangunan sekolah baru, serta distribusi fasilitas pendidikan yang belum merata di seluruh kecamatan.

2.2.2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur menetapkan target Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 75,11 tahun untuk tahun 2023, namun realisasinya hanya mencapai 74,33 tahun. Pencapaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan preventif. Selain itu, tantangan dalam pemenuhan standar layanan kesehatan yang berkualitas juga turut mempengaruhi capaian AHH yang tidak sesuai target.

2.2.3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dalam sektor industri dan perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menargetkan jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang terstandarisasi sebanyak 400 alat. Namun, realisasi hanya mencapai 342 alat. Kegagalan ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dalam proses kalibrasi alat UTTP, serta keterbatasan fasilitas laboratorium pengujian yang memadai. Hal ini berdampak pada upaya peningkatan kualitas dan standarisasi produk industri lokal.

2.2.4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dinas Penanaman Modal dan PTSP menetapkan target realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 8,00 Triliun untuk tahun 2023. Namun, realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp 7,52 Triliun. Kesenjangan ini diakibatkan oleh beberapa faktor, termasuk kondisi ekonomi global yang kurang kondusif, hambatan perizinan yang memerlukan waktu lebih lama, serta persaingan investasi dengan daerah lain yang lebih kompetitif.

2.2.5. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Dalam rangka mempromosikan keragaman budaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur menargetkan penyelenggaraan **Festival Keagamaan** sebanyak 1 event pada tahun 2023. Sayangnya, target ini tidak tercapai, dengan realisasi 0 event. Kegagalan ini disebabkan oleh kendala anggaran dan perencanaan yang tidak memadai, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga keagamaan lokal.

Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Semester II Tahun 2023 yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan kapasitas operator agar memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk menentukan indikator kinerja serta membangun keterkaitan antar indikator lainnya.
2. Perlunya konsistensi indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran untuk memastikan keterkaitan antar indikator.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu secara rutin melakukan pengendalian internal dan membuat laporan perkembangan kegiatan dengan mengacu pada rencana yang telah ditetapkan dalam RKPD, sehingga realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tidak menimbulkan deviasi yang tinggi, baik dalam kinerja maupun keuangan.
4. Diperlukan dukungan aplikasi yang memadai dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan, sehingga capaian kinerja dapat tepat waktu dan lebih akuntabel.

2.3. Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD Sampai Dengan Semester II

Pada Triwulan II Tahun 2024, realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur mencapai Rp. 1.841.245.728.463,80 atau 27% dari total anggaran yang telah dialokasikan untuk tahun tersebut. Evaluasi kinerja menunjukkan adanya variasi yang signifikan di antara Perangkat Daerah dalam hal pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran. Dinas Perkebunan menorehkan capaian kinerja tertinggi dengan persentase sebesar 49,80%, menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Sebaliknya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencatat capaian kinerja terendah dengan hanya 3,10%, yang mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam hal penyerapan anggaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai capaian keuangan tertinggi dengan persentase 64,78%, mencerminkan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Namun, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menunjukkan capaian keuangan terendah dengan hanya 2,34%, yang menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk memperbaiki proses perencanaan dan implementasi kegiatan di dinas tersebut. Data ini menggarisbawahi pentingnya penguatan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran di setiap Perangkat Daerah guna mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 54 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024			Capaian Kinerja dan Pagu 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024 Triwulan II	
		(6)			(8)		(9)	
		K	RP		K	RP	K	RP
MISI 1 : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA DAN BERSATU”								
Tujuan 1 : Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)								
Sasaran 1 : Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)								
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan /Kompetensi	72.00	%	8,230,000,000.00	71.75	-	99.65	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	60.00	%	9,050,000,000.00	90	394,976,104.00	150.00	4.36
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Terlaksananya Tertib Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	20.02	%	450,000,000.00	14.38	43,410,250.00	71.83	9.65
	Rasio Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60.05	%	900,000,000.00	44	103,778,350.00	73.27	11.5
	Rasio Tenaga Terampil yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	12.51	%	7,050,000,000.00	10.07	982,753,250.00	80.50	13.9
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan	69.84	%	6,500,000,000.00	64.28	431,296,965.00	92.04	6
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	%	2,650,000,000.00	90.87	336,610,652.00	90.87	12
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penguatan Cadangan Pangan	78.00	Ton	5,100,000,000.00	72.98	623,860,385.00	93.56	12
	Nilai Tukar Petani (NTP)	109.60	%		102.31		93.35	
	Ketersediaan Pangan Utama	45.66	%		32.77		71.77	

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024			Capaian Kinerja dan Pagu 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024 Triwulan II	
		(6)			(8)		(9)	
		K	RP		K	RP	K	RP
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang Difasilitasi	7842.00	UMKM	16,600,000,000.00	1016	1,236,033,488.00	12.96	8
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	%	2,850,000,000.00	100	485,931,700.00	100.00	17
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	7.05	%	13,155,000,000.00	10.66	1,275,356,831.00	151.21	9
Sasaran 2 : Meningkatkan taraf Pendidikan Masyarakat (M1.T1.S2)								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah(APS) Umur 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	100	%	936,161,972,000.00	13.37	58,840,476,225.00	13.37	8
	Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.10	Tahun		13.01		99.31	
	Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9.45	Tahun		9.45		100.00	
	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (SD)	56.68	-		41.65		73.48	
	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (SMP)	53.36	-		45.01		84.35	
	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 7-15 Tahun Pendidikan Dasar	100	%		99.69		99.69	
	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	%		70.26		70.26	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.00	Predikat Status Tinggi	174,857,850,000.00	Predikat Status Tinggi	50,076,532,299.00	0	28
	Angka Harapan Lama Sekolah	12.89	%		13.01		100.93	
	Rata-rata Lama Sekolah	9.199	%		9.45		102.73	

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024			Capaian Kinerja dan Pagu 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024 Triwulan II		
		(6)			(8)		(9)		
		K	RP		K	RP	K	RP	
(2)	(3)	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerjasama	100	Persen		28		28.00	
		Pemuka Agama yang menerima Insentif	595	Orang		678		113.95	
		Penyelenggaraan Festival keagamaan	1	Even		1		100.00	
Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan (M1.T1.S3)									
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Angka Harapan Hidup	76.67	Tahun	2,815,864,634.00	73.47	201,392,481.00	95.83	7	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD Kudungga	Paripurna	Kategori	65,048,850,000.00	Paripurna	747,717,000.00	100	1	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	%	214,314,299,641.00	98	43,218,335,212.00	98.00	20	
Sasaran 4: Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4)									
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang menerapkan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal (SD)	100	%	2,000,000,000.00	100	-	100.00	0	
	Presentase Sekolah yang menerapkan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal (SMP)	95.40	%		100		104.82		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	3,500	Orang	3,610,000,000.00	4151	642,931,890.00	118.60	17	
	Persentase Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, Sosial di Perpustakaan	79	%		76.23		96.49		

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024		Capaian Kinerja dan Pagu 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024 Triwulan II		
		(6)		(8)		(9)		
		K	RP	K	RP	K	RP	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.00	Predikat Status Tinggi	174,857,850,000.00	Predikat Status Tinggi	50,076,532,299.00	0	28
	Angka Harapan Lama Sekolah	12.89	%		13.01		100.93	
	Rata-rata Lama Sekolah	9.20	%		9.45		102.73	
	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerjasama	100	Persen		28		28.00	
	Pemuka Agama yang menerima Insentif	595	Orang		678		113.95	
	Penyelenggaraan Festival keagamaan	1	Even		1		100.00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	6	Event	484,000,000.00	5	21,336,800.00	83.33	4
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Tokoh Adat yang menerima Insentif	150	Orang	8,269,000,000.00	103	174,351,100.00	68.67	2
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase organisasi pemuda yang aktif	69.84	%	12,550,000,000.00	68.25	1,034,164,012.00	97.72	8
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	persentase prestasi olahraga	33.33	%	136,770,000,000.00	73.33	17,011,173,074.00	220.01	12
	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.33	%		0.24		0.72	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	33.33	%		23.56		70.69	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah	27	Lembaga	528,000,000.00	25	19,356,700.00	92.59	3.67

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024			Capaian Kinerja dan Pagu 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024 Triwulan II	
		(6)			(8)		(9)	
		K	RP		K	RP	K	RP
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	44	unit	510,975,000.00	43	30,005,575.00	97.73	5
MISI 2 : “MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN”								
Tujuan 1 : Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/Perkebunan/Perikanan								
Sasaran 1 : Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/perkebunan/perikanan								
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	72.50	Point	5,100,000,000.00	88.1	623,860,385.00	121.52	12
	Penguatan Cadangan Pangan	78.00	Ton		72.98		93.56	
	Nilai Tukar Petani (NTP)	109.60	%		102.31		93.35	
	Ketersediaan Pangan Utama	45.66	%		32.77		71.77	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	42.10	Kg/Tahun	1,200,000,000.00	42.02	5,360,000.00	99.81	0.45
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi sektor pertanian (Padi)	46,765	Ton	32,810,000,000.00	37298	6,651,599,000.00	79.76	20
	Produktivitas Padi	3.95	Ton/Ha		4.4		111.39	
	Produksi sektor peternakan (Daging)	3,278	Ton		4040.7		123.27	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80.11	%	102,470,000,000.00	65.28	71,789,630,115.00	81.49	73
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	8,086.11	Ton	17,285,080,000.00	8486	15,031,837,797.00	104.95	86
	Jumlah Kelompok Penangkap Ikan	50.00	Kelompok		95		190.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	13	Kelompok	5,315,500,000.00	22	4,821,003,215.00	169.23	88

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024			Capaian Kinerja dan Pagu 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024 Triwulan II		
		(2)	(3)	(6)		(8)		(9)	
				K	RP	K	RP	K	RP
	Jenis Bibit/Benih Unggul	5	Jenis Bibit/Benih		5		100.00		
	Produksi Perikanan Budidaya	950	Ton		980.72		103.23		
Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Petani (M2.T1.S2)									
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	21.43	%	4,400,000,000.00	22	3,796,324,213.00	102.66	83	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	72.50	Point	5,100,000,000.00	88.1	3,225,703,173.00	121.52	83	
	Penguatan Cadangan Pangan	78	Ton		72.98		93.56		
	Nilai Tukar Petani (NTP)	109.60	%		102.31		93.35		
	Ketersediaan Pangan Utama	45.66	%		32.77		71.77		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi sektor pertanian (Padi)	46,765	Ton	32,810,000,000.00	37298	6,651,599,000.00	79.76	20	
	Produktivitas Padi	3.95	Ton/Ha		4.4		111.39		
	Produksi sektor peternakan (Daging)	3,278	Ton		4040.7		123.27		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi komoditi Perkebunan	6,100,000	Ton	11,295,000,000.00	6366882	427,710,563.00	104.38	3	
	Produktivitas Komoditi Perkebunan	16	Ton/Ha		16		100.00		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah alat dan mesin pertanian	1,774	Unit	63,370,000,000.00	1897	1,006,108,105.00	106.93	1	
	Pembangunan prasarana pertanian	7.00	Kegiatan		6		85.71		
	Pembangunan prasarana pertanian lainnya	7.00	Kegiatan		0		-		

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024			Capaian Kinerja dan Pagu 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024 Triwulan II	
		(6)			(8)		(9)	
		K	RP		K	RP	K	RP
(2)	(3)							
	Luas Lahan Pertanian	30	Ha		20		66.67	
	Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun	162	Unit				-	
Tujuan 2 : Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat								
Sasaran 1 : Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah								
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Persentase Koperasi Aktif	58	%	2,600,000,000.00	42.07	809,049,282.00	72.53	31
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM	7,842	UMKM	2,900,000,000.00	12,050.00	108,432,708.00	153.66	3
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah IKM	1,620	IKM	8,350,000,000.00	1,540.00	1,516,328,101.00	95.06	18
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Objek destinasi wisata	15	Lokasi	74,400,000,000.00	15.00	349,975,746.00	100.00	-
	Jumlah Kunjungan Wisata	94	%		100.00		106.38	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang bergerak pada ekonomi kreatif	11	Pokdarwis	18,300,000,000.00	11.00	4,648,886,585.00	100.00	25
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	796	NIB	700,000,000.00	3,854.00	38,501,989.00	484.17	5
MISI 3 : "MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA"								
Tujuan 1 : Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)								
Sasaran 1 : Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah (M3.T1.S1)								
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap	34.41	%	732,318,699,000.00	27.97	122,109,646,332.00	81.28	16
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	26.051	%	659,519,000,000.00	23	18,336,846,000.00	88.29	2

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024			Capaian Kinerja dan Pagu 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024 Triwulan II	
		(6)			(8)		(9)	
		K	Unit	RP	K	RP	K	RP
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah KIR Kendaraan Umum	6,000	Unit	33,780,000,000.00	3884	999,291,956.00	64.73	2
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	4/1/6	Unit	62,260,000,000.00	4/1/4	44,078,168,270.00	98.12	70
Sasaran 2 : Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman) (M3.T1.S2)								
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian Akses Air Minum Layak	53.90	%	80,469,729,000.00	58.10	-	107.98	-
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase			-			-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	90.75	%	7,710,271,000.00	82.58	-	91.00	-
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air/Banjir (Perkotaan)	96.16	%	102,750,000,000.00	53.69	34,240,983,686.00	55.83	33
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	26.051	%	659,519,000,000.00	23	18,336,846,000.00	88.29	2
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	1.2309	%	29,300,000,000.00	0	-	-	-
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	0.06	%	16,801,950,000.00	0.05	4,061,710,781.00	83.33	24
	Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	98.83	%		73.35		74.22	

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024			Capaian Kinerja dan Pagu 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024 Triwulan II	
		(6)			(8)		(9)	
		K		RP	K	RP	K	RP
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik	59.26	%	300,633,855,812.00	77.58	-	130.91	-
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				-				-
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Terlaksananya Tertib Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	17	%	7,050,000,000.00	14.38	982,753,250.00	84.59	13
	Rasio Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	52	%		44		84.62	
	Rasio Tenaga Terampil yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	12.51	%		10.07		80.50	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	76.057	%	100,000,000.00	70.59	-	92.81	-
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	1.2309	%	29,300,000,000.00	0	-	-	-
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	24.91	%	349,300,000,000.00	23	-	92.33	-
Sasaran 3 : Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi) (M3.T1.S3)								
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Layanan Telekomunikasi	83.17	%	19,650,000,000.00	92.91	2,975,480,979.00	111.71	15
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase PD yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	48.57	%	35,075,000,000.00	100	9,140,498,313.00	205.89	26

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024		Capaian Kinerja dan Pagu 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024 Triwulan II		
		(6)		(8)		(9)		
		K	RP	K	RP	K	RP	
Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	100	%	936,161,972,000.00	13.37	58,840,476,225.00	13.37	8
	Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.10	Tahun		13.01		99.31	
	Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9.45	Tahun		9.45		100.00	
	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (SD)	56.68	-		41.65		73.48	
	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (SMP)	53.36	-		45.01		84.35	
	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 7-15 Tahun Pendidikan Dasar	100	%		99.69		99.69	
	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	%		70.26		70.26	
Sasaran 5 : Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5)								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	%	214,314,299,641.00	98	43,218,355,212.00	98.00	20
	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0.51	Per Satuan Penduduk		0.47		92.16	
	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0.02	Per Satuan Penduduk		0.02		100.00	

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024			Capaian Kinerja dan Pagu 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024 Triwulan II	
		(6)			(8)		(9)	
		K	RP		K	RP	K	RP
Sasaran 6 : Meningkatnya Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)								
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar	15	Pasar	25,987,972,000.00	13	259,303,952.00	86.67	1.00
MISI 4 : “MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI”								
Tujuan 1 : Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)								
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah Temuan BPK	16	Temuan	12,629,694,137.00	21	1,124,089,944.00	76.19	8.90
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap LHP	WTP	Predikat	985,291,401,665.00	WTP	278,755,413,590.00	100.00	29
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan Data Perencanaan Daerah Berbasis SIPD	100	%	10,800,000,000.00	65.58	1,978,517,709.00	65.58	18
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	%					
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusunnya dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA. Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana 5 Tahunan RPJMD Maupun Dokumen Perencanaan RKPD	1	ADA	61,640,260,000.00	ada	15,385,603,237.00	100	24.96
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	70	%	11,452,255,875.00	65	561,518,932.00	92.86	6
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender	56	persen	370,000,000.00	53.99	49,776,400.00	96.41	13
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	56	Persen	250,000,000.00	51.55	49,782,418.00	92.05	19

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024			Capaian Kinerja dan Pagu 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024 Triwulan II	
		(6)			(8)		(9)	
		K		RP	K	RP	K	RP
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	LSM/Organisasi yang Aktif	199	Organisasi	950,000,000.00	53	290,723,070.00	26.63	30
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	1	Ada	2,734,898,400.00	ada	334,152,202.00	100	12
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Anak 0-17 Tahun Memiliki KIA	60	%	4,450,000,000.00	55	280,447,277.00	91.67	7
	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	95	%		96.74		101.83	
	Pendaftaran Penduduk	1	Laporan		1		100.00	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	95	%		92.68		97.56	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	98	%	1,000,000,000.00	96.3	352,022,876.00	98.27	35
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	4	%	3,194,200,000.00	0.4	396,946,186.00	10.00	12
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	21.05	%	10,950,000,000.00	72.72	856,311,976.00	345.46	7
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	730	Hari	5,150,000,000.00	567	606,472,636.00	77.67	11
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	40	%		45.57		113.93	
Tujuan 2: Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)								
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah (M4.T2.S1)								
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase PD yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	48.57	%	35,075,000,000.00	92.91	9,140,498,313.00	191.29	26

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2024		Capaian Kinerja dan Pagu 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024 Triwulan II		
		(6)		(8)		(9)		
		K	RP	K	RP	K	RP	
(2)	(3)							
	Cakupan Layanan Telekomunikasi	83.17	%		100		120.24	
MISI 5 : “MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”								
Tujuan 1 : Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)								
Sasaran 1 : Meningkatkan Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)								
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan	77.59	Nilai	1,100,000,000.00	83.51	32,802,000.00	107.63	2
	IKLH	70.97	Nilai		72.12		101.62	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	142.8	%	1,250,000,000.00	100	15,924,100.00	70.03	1
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	41.84	%	8,225,000,000.00	58.5	20,168,064.00	139.82	0
Tujuan 2: Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)								
Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T2.S1)								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang	100	%	5,550,000,000.00		596,390,791.00		10
	Jumlah Perkada RDTR	1	Dokumen		1		100.00	
	Ketaatan Terhadap RTRW	100	%		100		100.00	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase antara Luas Bidang Tanah yang Sudah Diselesaikan Ganti Kerugian/Jumlah Bidang Tanah target Ganti Kerugian	90	%	30,000,000,000.00	96	149,930,700.00	106.67	0.50

2.4. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian antara ekspektasi terkait kinerja pembangunan yang diinginkan saat ini dengan yang telah direncanakan, serta antara harapan untuk masa depan dengan realitas yang terjadi pada saat penyusunan rencana tersebut. Isu ini sangat berkaitan dengan prioritas pembangunan daerah, serta isu-isu yang berhubungan dengan layanan dasar dan fungsi operasional dari Perangkat Daerah. Tujuan utama dari analisis permasalahan pembangunan adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Evaluasi dan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang menjadi peluang atau penghambat merupakan langkah penting dalam proses ini, sehingga memungkinkan perbaikan dan optimalisasi kinerja pembangunan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari analisa permasalahan pembangunan, setidaknya terdapat 10 (sepuluh) permasalahan, faktor pendorong dan penghambatnya, yaitu:

2.4.1. Tingkat Kemiskinan yang Masih Tinggi

Meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari 9,81% pada tahun 2021 menjadi 9,06% pada tahun 2023, Kabupaten Kutai Timur masih menghadapi tantangan serius dalam pengentasan kemiskinan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penurunan kemiskinan termasuk efektivitas program bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Namun, kegagalan bisa terjadi akibat ketidakmerataan distribusi bantuan, kurangnya dukungan infrastruktur di daerah terpencil, dan terbatasnya peluang ekonomi di sektor formal.

2.4.2. Pengangguran yang Masih Signifikan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kutai Timur masih cukup tinggi, yaitu 5,93% pada tahun 2023. Keberhasilan dalam menurunkan angka pengangguran bergantung pada upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi, memperluas sektor industri dan jasa, serta memberikan pelatihan keterampilan kerja. Di sisi lain, kegagalan dapat disebabkan oleh kurangnya sinergi antara sektor

pendidikan dan kebutuhan industri, minimnya akses ke pasar kerja, serta ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.

2.4.3. Keterbatasan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Timur masih memerlukan peningkatan signifikan, dengan hanya 27,93% dari total panjang jalan berada dalam kondisi mantap pada tahun 2023. Keberhasilan dalam meningkatkan infrastruktur sangat bergantung pada alokasi anggaran yang memadai, perencanaan yang baik, dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, kegagalan bisa terjadi akibat birokrasi yang lambat, korupsi dalam proyek pembangunan, dan kurangnya pengawasan terhadap kualitas konstruksi.

2.4.4. Degradasi Lingkungan

Kabupaten Kutai Timur menghadapi masalah serius terkait degradasi lingkungan, terutama akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan yang tidak berkelanjutan. Keberhasilan dalam mengatasi degradasi lingkungan bergantung pada penegakan hukum yang kuat, implementasi praktik-praktik berkelanjutan, dan partisipasi aktif masyarakat. Kegagalan dapat terjadi jika pengawasan lingkungan lemah, adanya tekanan dari kepentingan bisnis besar, serta kurangnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat dan pelaku industri.

2.4.5. Kesenjangan Pendidikan

Kesenjangan dalam akses pendidikan masih menjadi masalah di Kabupaten Kutai Timur. Keberhasilan dalam meningkatkan akses pendidikan bergantung pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kebijakan afirmatif untuk daerah terpencil, dan peningkatan kualitas guru. Kegagalan dapat terjadi jika distribusi sumber daya pendidikan tidak merata, infrastruktur pendidikan tidak memadai, serta rendahnya motivasi belajar di kalangan anak-anak dan dukungan dari keluarga.

2.4.6. Kualitas Layanan Publik yang Bervariasi

Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kabupaten Kutai Timur masih perlu ditingkatkan. Indeks kepuasan masyarakat berada diangka 85,14 tahun 2023. Keberhasilan dalam meningkatkan kualitas layanan publik bergantung pada reformasi

birokrasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penerapan teknologi dalam pelayanan. Kegagalan dapat terjadi akibat birokrasi yang tidak efisien, kurangnya transparansi, serta rendahnya akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik.

2.4.7. Ketimpangan Akses Kesehatan

Akses terhadap layanan kesehatan di beberapa wilayah seperti Kecamatan Muara Ancalong dan Busang masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah perkotaan seperti Sangatta Utara. Keberhasilan dalam meningkatkan akses kesehatan bergantung pada alokasi anggaran yang tepat, pembangunan fasilitas kesehatan baru, dan peningkatan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Kegagalan bisa disebabkan oleh distribusi yang tidak merata, kurangnya tenaga medis yang terampil, serta kendala geografis yang menghambat akses ke layanan kesehatan.

2.4.8. Penurunan Luas Lahan Pertanian

Penurunan luas lahan pertanian, terutama lahan sawah, menjadi masalah serius bagi ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur. Keberhasilan dalam mengatasi masalah ini bergantung pada kebijakan perlindungan lahan pertanian, intensifikasi pertanian, dan pengembangan teknologi pertanian. Kegagalan dapat terjadi jika alih fungsi lahan tidak terkendali, kurangnya insentif bagi petani untuk mempertahankan lahan pertanian, dan rendahnya adopsi teknologi modern.

2.4.9. Kinerja Pemerintahan yang Tidak Merata

Evaluasi kinerja perangkat daerah menunjukkan ketimpangan yang signifikan, dengan BPKAD mencatat capaian kinerja terendah sebesar 3,10% pada triwulan II tahun 2024. Keberhasilan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan bergantung pada penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas SDM, dan evaluasi berkala terhadap program-program pemerintah. Kegagalan bisa terjadi akibat kurangnya kepemimpinan yang efektif, birokrasi yang berbelit-belit, serta rendahnya motivasi kerja di kalangan pegawai.

2.4.10. Perlunya Peningkatan Terhadap Pengembangan Wilayah Pedesaan

Wilayah pedesaan di Kabupaten Kutai Timur masih menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi. Keberhasilan dalam pengembangan wilayah pedesaan bergantung pada perencanaan yang inklusif, alokasi anggaran yang adil, dan dukungan dari program-program pemerintah pusat. Kegagalan dapat terjadi jika ada ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, serta rendahnya kualitas infrastruktur di daerah pedesaan.

2.5. Rekomendasi

Berdasarkan gambaran umum kondisi Kabupaten Kutai Timur dan capaian Indikator Makro ekonomi tahun 2023, berikut adalah rekomendasi untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025:

1. **Peningkatan Kualitas SDM:** Mengingat nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas. Ini dapat mencakup pelatihan guru, peningkatan fasilitas kesehatan, dan program penambahan nutrisi bagi ibu hamil dan anak sekolah.
2. **Diversifikasi Ekonomi:** Dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi, diperlukan strategi diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan. Ini bisa melalui pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata terpadu, dan ekonomi kreatif.
3. **Pengurangan Ketimpangan:** Indeks Gini yang mencerminkan ketimpangan harus diatasi melalui program redistribusi pendapatan, seperti subsidi untuk kelompok miskin, perbaikan konektivitas dan investasi di daerah pedalaman.
4. **Pengurangan Pengangguran:** Tingkat pengangguran terbuka memerlukan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan ketrampilan, investasi di sektor-sektor baru dan pengembangan kewirausahaan.

5. **Pengentasan Kemiskinan:** Angka kemiskinan dapat dikurangi dengan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, peningkatan akses ke pendidikan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin. Ketersediaan data yang valid dan reliable menjadi mutlak agar tidak salah sasaran.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Kabupaten Kutai Timur dan capaian Indikator Makro ekonomi tahun 2023, serta rekomendasi yang telah disampaikan untuk RKPD tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah strategis tersebut dirancang untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur. Dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, diversifikasi ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pengangguran, serta pengentasan kemiskinan, diharapkan Kabupaten Kutai Timur dapat mencapai kemajuan yang signifikan menuju kesejahteraan yang lebih besar bagi seluruh masyarakatnya. Keterpaduan antar sektor dan koordinasi yang efektif antara pemerintah, swasta, dan komunitas akan menjadi kunci dalam realisasi rencana ini.



BAB 3

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah



BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Salah satu hal utama yang membantu suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah kebijakan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan keuangan daerah. Untuk mengembangkan kerangka kerja ekonomi dan merencanakan kebijakan ekonomi daerah, sangat penting untuk mengamati pola pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Selain itu, sangat penting untuk mengamati karakter ekonomi, sosial, dan pembangunan dari daerah-daerah sekitar. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 menjadi kerangka kerja perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025. Diharapkan target-target pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD tersebut dapat tercapai pada tahun 2025.

Kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan yang terdiri dari kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah untuk tahun 2024 memberikan gambaran umum tentang perkiraan kondisi agregat ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2024, dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi yang terjadi hingga tahun 2023, potensi pertumbuhan sektor usaha, dan faktor-faktor yang diasumsikan memiliki dampak yang signifikan baik dari internal maupun eksternal, termasuk ekonomi nasional dan internasional serta pandemi COVID-19. Dalam rangka memenuhi target kinerja daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, sistem keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan menyajikan informasi dan analisis mengenai proyeksi sumber-sumber pendapatan, proyeksi pendapatan sektoral, proyeksi belanja, dan pembiayaan pembangunan pada tahun 2025. Kerangka pembiayaan ini menjadi landasan bagi kebijakan anggaran untuk mengalokasikan dana secara efisien dan efektif dengan menggunakan konsep perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah diharapkan dapat memberikan ringkasan kondisi ekonomi daerah tahun sebelumnya dan memproyeksikan kondisi tersebut untuk kegiatan pembangunan tahun mendatang. Untuk menilai seberapa besar

pencapaian pembangunan daerah akan berdampak pada kinerja ekonomi daerah, dilakukan analisis ekonomi dengan menggunakan indikator ekonomi makro daerah. Dalam rangka memprediksi arah kebijakan ekonomi pada tahun 2025, diperlukan analisis ekonomi makro sebagai alat bantu pengambilan keputusan pada tahap pembangunan daerah.

Sebagai tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 yang bertema "Masyarakat dan Wilayah Kutai Timur Tegar dan Stabil", maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD periode 2021-2026. Rencana-rencana ini disusun dengan mengacu pada program strategis nasional dan RKP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026, fokus/tema utama pembangunan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 dikaitkan dengan tujuan nasional dan provinsi, yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

a. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Timur

Dalam hal peningkatan struktur ekonomi, terdapat korelasi yang jelas antara hal tersebut dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan yang diharapkan, yaitu kesejahteraan yang memiliki tingkat pemerataan yang tinggi. Jika membandingkan struktur ekonomi Kutai Timur saat ini dengan daerah lain, tingkat PDRB yang dimiliki sudah luar biasa. Meskipun demikian, harus diakui bahwa nilai industri pertambangan menyumbang sebagian besar dari ukuran PDRB tersebut. Industri pertambangan, khususnya pertambangan batu bara, saat ini menyumbang lebih dari 80% PDRB Kabupaten Kutai Timur.

Secara umum, tidak ada masalah dengan nilai komposisi ini. Namun, dari segi struktur ekonomi, komposisi PDRB saat ini menunjukkan struktur ekonomi yang cukup berisiko di masa mendatang. Hal ini dikarenakan tidak mungkin mengandalkan keberlanjutan industri pertambangan dalam jangka panjang. Selain itu, industri pertambangan merupakan sektor yang secara fundamental eksklusif dengan dampak

domino yang minimal. Dapat dikatakan bahwa industri pertambangan memiliki nilai ekonomi yang sangat kecil dalam hal menciptakan lapangan kerja, terutama jika industri ini dibatasi. Hal ini terutama berlaku ketika mempertimbangkan dampak ketenagakerjaan di Kutai Timur. Hal ini disebabkan industri pertambangan tidak bergantung pada pengembangan nilai tambah dalam perekonomian, industri ini bersifat ekstraktif dan hanya menawarkan dampak multiplier dan domino yang rendah. Dalam hal ini, industri pertambangan tidak secara langsung mempengaruhi perekonomian Kutai Timur secara keseluruhan dan hanya memiliki pengaruh besar melalui pembagian pendapatan. Oleh karena itu, kunci dari struktur ekonomi Kutai Timur adalah optimalisasi dana bagi hasil.

Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa struktur ekonomi Kutai Timur sedikit rapuh karena kontribusi sektor pertambangan yang signifikan terhadap produk domestik bruto daerah tersebut. Sensitivitas PDRB terhadap harga batu bara adalah penyebab kerentanan ini. Terbukti bahwa harga batubara global memiliki dampak yang signifikan terhadap pergerakan PDRB Kutai Timur dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi akan terdampak secara signifikan oleh kenaikan harga batu bara global, dan begitu juga sebaliknya. Sedikit menjadi keuntungan adalah harga batubara cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir, sebagian karena konflik yang sedang berlangsung di seluruh dunia, yang telah meningkatkan permintaan dan harga batubara secara keseluruhan. Meskipun demikian, ketika diantisipasi bahwa harga batubara akan turun dan kembali ke level stabil sehingga akan mempengaruhi PDRB.

Selain itu, tingkat ketimpangan adalah hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan dominasi struktur ekonomi di industri pertambangan. Karena indeks gini Kabupaten Kutai Timur masih berada di antara 0,3 dan 0,4, maka untuk saat ini belum dapat dikatakan aman. Hal ini menunjukkan bahwa ada cukup banyak ketimpangan yang perlu diselidiki lebih lanjut. Alokasi pendapatan yang tidak merata di berbagai sektor merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini. Meskipun tingkat pendapatan mereka yang bekerja di industri pertambangan tidak diragukan lagi lebih tinggi daripada mereka yang bekerja di sektor pertanian atau perkebunan, namun sektor-sektor tersebut memiliki populasi yang jauh lebih beragam. Mengingat kondisi tersebut di atas, yang juga sejalan dengan tujuan dan visi

Kabupaten Kutai Timur, optimalisasi hasil tambang sangat penting untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dengan meningkatkan volume dan kualitas sektor non-tambang yang lebih berkelanjutan. Hal ini tentu saja sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan keuangan daerah dan kerangka ekonomi Kabupaten Kutai Timur, terutama pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, ekonomi non sumber daya alam harus berkembang mengikuti struktur ekonomi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan ini sangat penting dan sangat penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana perekonomian Kabupaten Kutai Timur akan berkembang di masa depan. Tujuan memperluas sektor ekonomi non sumber daya alam terlihat jelas dalam kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan, meskipun saat ini mungkin tidak terlihat penting. Namun perlu diingat bahwa menciptakan kerangka kerja ekonomi ini merupakan proses yang harus segera dimulai dan tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Kinerja dan kecukupan infrastruktur pendukung dan infrastruktur dasar ekonomi harus diperhatikan, seiring dengan berkembangnya ekonomi non sumber daya alam. Penyediaan infrastruktur pendukung dilakukan setelah penyediaan infrastruktur dasar yang tetap menjadi prioritas utama. Keselarasan dalam mengarahkan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi non sumber daya alam merupakan faktor penting lainnya yang menentukan kondisi optimal untuk pembangunan kerangka ekonomi ini. Dalam jangka pendek, desain seperti itu akan meningkatkan ketersediaan infrastruktur penting dan infrastruktur pendukung, tetapi tidak boleh mengorbankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dari sumber daya alam.

Kebijakan pembangunan nasional dan strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur menjadi kerangka dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur. Pendekatan kebijakan nasional selaras dengan Tema RKP 2024 yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pemerintah memperkirakan bahwa pertumbuhan PDB akan berada di antara 5,3% dan 5,6% pada tahun 2025. Selain itu, pemerintah berharap untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,5-5% dan tingkat kemiskinan menjadi 6-7%. Selain mempercepat ekspansi ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

2025 juga diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran individu serta konvergensi atau pemerataan pertumbuhan yang lebih besar di antara daerah-daerah, dengan tujuan untuk menjaga defisit tetap berada di kisaran 2,45% dan 2,8% dari PDB (produk domestik bruto).

Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan. Sektor pertambangan, khususnya batu bara, merupakan penyumbang signifikan terhadap PDRB daerah ini. Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang sekitar 55% dari total PDRB Kutai Timur. Namun, ketergantungan yang besar pada sektor pertambangan membawa risiko ekonomi yang cukup besar, terutama saat terjadi fluktuasi harga komoditas global. Di sisi lain, sektor perkebunan seperti kelapa sawit juga memainkan peran penting dalam perekonomian daerah, dengan kontribusi sebesar 20% terhadap PDRB, meskipun tantangan terkait lingkungan dan keberlanjutan menjadi isu yang perlu diperhatikan. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur transportasi dan energi sangatlah penting. Aksesibilitas yang baik melalui jalan raya dan pelabuhan akan meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi produk. Pada tahun 2023, sekitar 65% jalan utama di Kabupaten Kutai Timur telah diaspal, namun masih ada kebutuhan signifikan untuk peningkatan jaringan transportasi di daerah pedalaman. Selain itu, investasi dalam penyediaan energi yang cukup dan berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendukung industri lokal.

Selanjutnya, diversifikasi ekonomi menjadi kunci utama untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan. Pengembangan sektor pertanian dengan teknologi modern dan peningkatan kapasitas petani dapat meningkatkan hasil dan kualitas produk. Saat ini, sektor pertanian menyumbang sekitar 15% dari PDRB. Selain itu, sektor pariwisata dengan memanfaatkan keindahan alam dan budaya lokal dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah. Pengembangan industri manufaktur ringan yang mampu mengolah hasil pertanian dan perkebunan menjadi produk bernilai tambah juga perlu didorong. Selain itu, isu sosial dan lingkungan juga harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan ekonomi. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional akan mempersiapkan

tenaga kerja yang kompeten, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan daya saing daerah. Tingkat pengangguran di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 tercatat sebesar 7,5%, menurun dari 8,2% di tahun sebelumnya. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan penerapan praktik bisnis ramah lingkungan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

3.a.1. Strategi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur

Pada tahun 2045, Kabupaten Kutai Timur memiliki visi sebagai Pusat Hilirasi Sumber Daya Alam yang Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan. Salah satu transformasi yang dicanangkan oleh Kabupaten Kutai Timur adalah transformasi ekonomi menuju kemandirian dan ketangguhan struktur ekonomi. Adapun pada periode 2025-2029, arah kebijakan yang dicanangkan adalah perkuatan fondasi transformasi. Pada periode ini merupakan tahap persiapan Kutai Timur dalam menjaloni transformasi pembangunan berkesinambungan dengan memastikan semua kebutuhan dasar, sarana prasarana fundamental sudah tersedia. Oleh karena itu, pada tahun 2025 diperlukan berbagai strategi untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi sekaligus menjadi arah pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Kutai Timur.

A. Diversifikasi Ekonomi Kabupaten Kutai Timur

Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mengambil langkah-langkah untuk mendiversifikasi ekonomi jika Kabupaten Kutai Timur terlalu bergantung pada satu industri, seperti pertambangan. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari pasar baru yang memiliki ruang untuk tumbuh, mendorong usaha bisnis lokal, dan membangun kondisi yang menguntungkan untuk pendirian usaha-usaha baru. Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan adalah pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, produksi kelapa sawit mencapai 2,7 juta ton, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatkan efisiensi dan teknologi dalam pengolahan hasil pertanian, diharapkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB dapat meningkat hingga 20% dalam lima tahun ke depan. Selain itu, pengembangan komoditas lain seperti kopi, kakao, jagung, padi, dan tanaman hortikultura juga bisa dilakukan. Kopi dan kakao saat ini merupakan

komoditas yang memiliki nilai tambah tinggi. Kabupaten Kutai Timur sudah mulai mengembangkan potensi komoditas kopi.

Pemerintah daerah telah mengidentifikasi bahwa kopi memiliki potensi pasar yang baik, baik di pasar lokal maupun internasional. Upaya peningkatan produksi kopi dilakukan melalui pelatihan kepada petani dan pemberian bantuan bibit kopi unggul. Selain itu, kakao juga menjadi salah satu komoditas yang berpotensi dikembangkan di Kutai Timur. Pada tahun 2023, luas lahan perkebunan kakao mencapai sekitar 10.000 hektar dengan produksi sekitar 12.000 ton. Pemerintah daerah bersama dengan dinas perkebunan berupaya meningkatkan kualitas dan produktivitas kakao melalui program rehabilitasi lahan, pengendalian hama dan penyakit, serta pengenalan teknologi budidaya yang lebih efisien. Adapun Jagung dan padi juga menjadi komoditas yang memiliki potensi besar di Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun 2023, luas panen jagung di Kabupaten Kutai Timur mencapai sekitar 10.500 hektar dengan total produksi sekitar 80.000 ton pipilan kering. Produksi ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan teknik budidaya yang masih konvensional. Kemudian, produksi padi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 mencapai sekitar 226.97 ribu ton gabah kering giling (GKG) dari luas panen sekitar 57.08 ribu hektar. Meskipun ada penurunan sebesar 5,20% dibandingkan tahun sebelumnya, upaya peningkatan produktivitas terus dilakukan melalui program intensifikasi dan penyediaan varietas unggul. Komoditas-komoditas ini memiliki peluang besar karena tingginya permintaan di pasar lokal dan nasional, serta adanya dukungan pemerintah melalui program intensifikasi dan bantuan bibit unggul. Strategi peningkatan yang dapat diterapkan mencakup adopsi teknologi irigasi efisien dan mekanisasi pertanian, penyediaan benih unggul yang tahan hama, program pelatihan bagi petani, serta pembangunan fasilitas dan akses jalan ke lahan pertanian. Implementasi strategi-strategi ini akan membantu Kabupaten Kutai Timur meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan, yang pada gilirannya akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, sektor perikanan juga memiliki potensi besar dengan panjang garis pantai mencapai 200 km. Pengembangan budidaya perikanan, seperti tambak udang dan bandeng, serta pengolahan hasil laut dapat memberikan kontribusi signifikan

terhadap ekonomi lokal. Diperkirakan, dengan investasi dan teknologi yang tepat, produksi perikanan dapat meningkat hingga 30% dalam lima tahun mendatang, berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Pada tahun 2023, produksi perikanan mencapai 130 ribu ton, terdiri dari perikanan tangkap dan budidaya. Peningkatan produksi dapat dicapai melalui adopsi teknologi budidaya modern seperti sistem akuakultur berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur perikanan, termasuk fasilitas penyimpanan dan pengolahan ikan, juga penting. Selain itu, pelatihan bagi nelayan tentang teknik penangkapan ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan akan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor ini. Program dukungan pemerintah, termasuk bantuan peralatan dan akses ke pasar, juga krusial untuk mendukung pertumbuhan sektor perikanan di Kabupaten Kutai Timur.

Pengembangan sektor pariwisata berbasis ekowisata juga dapat menjadi pilihan strategis. Kutai Timur memiliki potensi wisata alam yang belum digarap maksimal, seperti Taman Nasional Kutai serta Pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Pengembangan infrastruktur dan promosi pariwisata yang efektif diperkirakan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara sebesar 15% per tahun, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis ekowisata di Kabupaten Kutai Timur, beberapa strategi kunci dapat diterapkan. Pertama, melakukan survei dan pemetaan potensi wisata alam serta membangun fasilitas dasar untuk kenyamanan pengunjung. Kedua, mengimplementasikan program konservasi dan rehabilitasi lingkungan serta menyediakan fasilitas pengelolaan sampah. Ketiga, memberdayakan masyarakat lokal melalui pelatihan pengelolaan ekowisata dan kemitraan dalam pengelolaan destinasi. Keempat, melakukan kampanye promosi dan bekerja sama dengan agen perjalanan. Kelima, mengembangkan program wisata edukasi dan petualangan. Terakhir, membangun sistem pemantauan untuk menilai dampak ekowisata serta mengumpulkan feedback dari pengunjung untuk meningkatkan kualitas layanan. Strategi ini akan membantu mengembangkan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan melestarikan lingkungan.

Selain itu, pengembangan sektor industri kreatif dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur juga menjadi perhatian. Kondisi dan pengembangan industri kreatif serta UMKM di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan perkembangan yang signifikan pada tahun 2023. Saat ini, terdapat lebih dari 16.000 UMKM yang terdata, dengan berbagai upaya pendataan yang masih berlangsung untuk memastikan data yang lebih akurat dan terperinci. Peningkatan jumlah UMKM ini mencerminkan adanya pertumbuhan dan minat yang tinggi dalam sektor ini di Masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, melalui Dinas Koperasi dan UMKM, telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mendukung industri kreatif dan UMKM. Salah satu upaya penting adalah melibatkan Event Organizer (EO) lokal dalam kegiatan budaya dan pariwisata untuk mempromosikan produk-produk UMKM. Inisiatif seperti bazar dan pameran yang diadakan secara rutin di berbagai tempat merupakan bagian dari strategi ini. Selain itu, kegiatan kebudayaan dan pariwisata, seperti pesta pantai dan lomba mancing tingkat nasional, juga dijadikan ajang untuk memamerkan produk UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Timur juga fokus pada penyempurnaan data UMKM melalui proses pendataan yang bertahap hingga tahun 2024. Pendataan ini penting untuk memahami struktur pendapatan, permodalan, dan penggunaan internet oleh pelaku UMKM, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik mereka. Pendataan yang lebih akurat diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.

Beberapa Langkah strategis yang bisa didorong pada tahun 2025 adalah penyediaan akses pembiayaan yang lebih luas melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman dengan bunga rendah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga secara rutin mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan keterampilan teknis para pelaku UMKM, sehingga mereka dapat mengelola bisnis dengan lebih efektif dan kompetitif. Dalam upaya memperluas akses pasar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu memfasilitasi partisipasi UMKM dalam berbagai pameran dagang dan mulai memperkenalkan inisiatif digitalisasi untuk membantu UMKM menjual produk secara online. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang lebih luas. Selain itu, perlu adanya kemitraan antara UMKM

dan perusahaan besar di sektor-sektor utama seperti pertambangan dan perkebunan, untuk memberikan peluang bagi UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Semua inisiatif ini bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kutai Timur.

B. Hilirisasi Produk Unggulan

Hilirisasi produk unggulan di Kabupaten Kutai Timur dapat menjadi strategi yang berhasil untuk meningkatkan nilai tambah lokal, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan pangsa pasar. Dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Kutai Timur, memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai produk unggulan yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dan pasar lokal maupun internasional.

Pada aspek budaya, salah satu komoditi yang bisa didorong adalah Batik Kutai. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya, dan Kabupaten Kutai Timur memiliki motif batik khas daerahnya sendiri. Batik Kutai bisa menjadi produk unggulan yang memadukan unsur-unsur tradisional dengan sentuhan modern. Selanjutnya juga terdapat tenun Kutai, tenun merupakan warisan budaya yang penting di banyak daerah di Indonesia, termasuk Kutai Timur. Produk tenun Kutai dengan motif-motif tradisionalnya dapat dikembangkan sebagai produk unggulan yang memiliki nilai budaya dan seni tinggi.

Selanjutnya pada sektor kehutanan dengan hutan yang melimpah, Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi besar dalam industri kerajinan kayu. Berbagai produk seperti ukiran kayu, mebel, dan hiasan rumah dari kayu dapat dikembangkan dengan memanfaatkan keahlian lokal. Adapun pada sektor pertanian, Kabupaten Kutai Timur dapat mengembangkan produk pertanian organik, seperti kopi, coklat, buah-buahan tropis, dan sayuran organik. Permintaan akan produk organik semakin meningkat di pasar global, dan hal ini dapat menjadi peluang untuk memasarkan produk local dari Kabupaten Kutai Timur. Kemudian pada bidang perikanan, dengan potensi perikanan yang besar, Kabupaten Kutai Timur bisa mengembangkan produk olahan ikan seperti ikan asin, terasi, abon ikan, atau produk olahan laut lainnya yang memiliki nilai tambah.

Salah satu yang paling penting dalam kegiatan hilirisasi di Kabupaten Kutai Timur adalah hilirisasi sawit. Hilirisasi sawit di Kabupaten Kutai Timur bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit dengan memprosesnya lebih lanjut di dalam negeri sebelum diekspor, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan lapangan kerja. Langkah-langkah yang diambil mencakup pengembangan industri hilir melalui pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit seperti pabrik minyak goreng, biodiesel, dan oleokimia, sehingga produk sawit dapat diproses menjadi produk jadi atau setengah jadi. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas penyimpanan, juga dilakukan untuk mendukung distribusi produk hilir. Selain itu, kolaborasi dengan perusahaan swasta untuk investasi dalam pengembangan industri hilir sawit, baik melalui joint venture maupun kemitraan lainnya, turut diperkuat. Selain itu, Pemerintah daerah mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang mendukung hilirisasi, termasuk insentif pajak dan penyederhanaan izin usaha. Investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) juga dilakukan untuk inovasi teknologi pengolahan sawit dan diversifikasi produk turunan sawit yang memiliki nilai tambah tinggi. Selanjutnya, sosialisasi dan pelatihan kepada petani dan pelaku industri mengenai teknik-teknik pengolahan sawit dan manfaat hilirisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam mengelola produksi sawit yang lebih efisien. Dengan upaya hilirisasi ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur akan meningkat melalui penciptaan lebih banyak lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan pengurangan ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Pengembangan produk-produk unggulan ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam hal pengembangan kualitas produk, pemasaran, infrastruktur, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk lokal.

Untuk mendukung kebijakan hilirisasi ini, Kabupaten Kutai Timur perlu membuat berbagai langkah-langkah strategis, yaitu:

1. Peningkatan kualitas produk melalui pengembangan teknologi dan praktik terbaik. Hal ini dapat melibatkan pelatihan bagi petani atau produsen lokal untuk

meningkatkan teknik produksi mereka, serta penerapan standar mutu yang lebih tinggi.

2. Identifikasi peluang untuk menambah nilai produk melalui proses pengolahan, pemurnian, atau pembuatan produk turunan. Misalnya, produk pertanian mentah dapat diolah menjadi produk olahan, seperti makanan siap saji, bahan baku industri, atau produk berlabel khusus.
3. Memastikan infrastruktur yang diperlukan untuk proses hilirisasi tersedia, seperti fasilitas pengolahan makanan, pabrik pengolahan kayu, atau pusat distribusi. Investasi dalam infrastruktur ini dapat membantu mempercepat pengembangan sektor hilirisasi.
4. Kemudahan akses untuk memperluas jaringan pemasaran dan distribusi produk hilir ke pasar lokal, nasional, dan bahkan internasional. Ini dapat melibatkan promosi produk lokal melalui pameran dagang, kerjasama dengan distributor besar, atau penggunaan platform e-commerce.
5. Pengembangan Branding seperti pembangunan citra merek yang kuat untuk produk hilirisasi Kabupaten Kutai Timur. Pengembangan branding yang baik dapat membantu meningkatkan daya tarik produk dan membantu membedakan mereka dari pesaing.
6. Bentuk kemitraan dengan pemangku kepentingan lain, seperti industri swasta, lembaga riset, atau organisasi non-pemerintah, untuk mendukung pengembangan produk hilirisasi. Kolaborasi ini dapat mencakup pertukaran pengetahuan dan teknologi, akses ke sumber daya tambahan, ataudukungan pemasaran bersama.
7. Memastikan adanya dukungan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor hilirisasi, termasuk insentif fiskal untuk investasi, peraturan yang jelas dan mendukung, serta bantuan teknis bagi pelaku usaha.

3.a.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah

Prediksi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan tinggi, dengan segala dinamika dan situasi kondisi eksternal yang saling mempengaruhi. Perkembangan ekonomi global, regional, nasional, dan Kalimantan

Timur diperkirakan akan terus mempengaruhi prospek ekonomi Kabupaten Kutai Timur. Penjelasan berikut ini menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian di Kalimantan Timur, dunia pada umumnya, negara, dan Kabupaten Kutai Timur berkaitan dengan pertumbuhan dan perekonomian daerah.

A. Kondisi Perekonomian Global

Perekonomian dunia saat ini sedang menghadapi masalah geopolitik, perubahan iklim, dan volatilitas ekonomi. Pertumbuhan semua sektor melambat sebagai akibatnya. Kondisi ini sudah terjadi sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan pandemi COVID-19 sebagai keadaan darurat kesehatan global pada tahun 2020. Pemulihan ekonomi global sangat bergantung pada peristiwa tahun 2021; namun, perang antara Israel dan Palestina pada tahun 2023 dan meningkatnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022 semakin menghambat pemulihan ini. Negara-negara di seluruh dunia harus mengevaluasi kembali rencana kebijakan bisnis dan ekonomi mereka untuk mengimplementasikan program pemulihan ekonomi sebagai akibat dari dampak politik dan ekonomi dari ketegangan geopolitik ini.. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi dimana Rusia merupakan salah satu pemasok energi terbesar di dunia dengan pasokan gas alam mencapai 16% dan minyak 11%. Sementara itu, Ukraina merupakan pemasok gandum terbesar di beberapa negara.

Kedua negara ini memiliki pengaruh besar dalam kenaikan harga makanan dan energi di seluruh dunia, yang pada gilirannya menyebabkan inflasi di sejumlah negara lain. Telah diketahui bahwa kebijakan moneter yang ketat dan cepat saat ini menjadi penyebab inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya. Oleh karena itu, kemampuan kebijakan moneter untuk merespons kendala geopolitik dan kemungkinan pandemi akan berlanjut, yang dapat memengaruhi gangguan rantai pasokan, akan menentukan seberapa baik ekonomi global di masa depan. Menurut statistik Bloomberg (2023), meskipun beberapa negara menunjukkan indikasi penurunan, tekanan inflasi diperkirakan masih relatif tinggi (sedikit di atas 9%) di sejumlah negara pada tahun 2023, terutama di negara-negara industri. Angka perkiraan sebagaimana dimaksud adalah tertinggi sejak 1982. Selain itu, inflasi di negara-negara berkembang diperkirakan akan mencapai hampir 10%, level tertinggi

sejak tahun 2008. Kendala rantai pasokan, penurunan pasokan, dan permintaan global yang lebih tinggi sebagai akibat dari kebijakan sebelumnya adalah penyebab utama tingginya tingkat inflasi. Depresiasi mata uang suatu negara terhadap dolar AS dan kondisi pasar tenaga kerja yang ketat, yang menyebabkan kenaikan upah dan biaya produksi yang tinggi, juga dapat berdampak pada inflasi di negara-negara tertentu.

Dengan kondisi tersebut di atas, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat pada tahun 2024, tumbuh sebesar 2,9% (yoy), dibandingkan dengan 3,4% (yoy) pada tahun 2023. Dengan pengecualian krisis keuangan global dan fase akut pandemi COVID-19, pertumbuhan ini merupakan yang terendah sejak tahun 2001.

B. Kondisi Perekonomian Regional

Dalam laporan Asian Development Bank Outlook 2023, Asian Development Bank (ADB) memperkirakan bahwa ekonomi kawasan ini akan berkembang sebesar 4,9% pada tahun 2023 dan 4,8% pada tahun 2024. Hal ini merupakan hasil dari ketidakpastian ekonomi internasional yang terjadi setelah perang di Rusia dan Ukraina. Negara-negara berkembang di Asia akan mengalami pertumbuhan yang stabil antara tahun 2023 dan 2024. Perekonomian Asia Tenggara diprediksi akan berkembang sebesar 4,6% pada tahun 2023 dan 4,8% pada tahun 2024. Asian Development Bank (ADB) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara dapat dikaitkan dengan meningkatnya permintaan domestik yang berasal dari relaksasi peraturan-peraturan sosial di beberapa negara, seperti Indonesia. Sejumlah negara Asean memiliki estimasi yang berbeda untuk tingkat pertumbuhan ekonomi mereka; Indonesia cenderung stabil di 5%, Filipina meningkat menjadi 6,2%, dan Malaysia diperkirakan meningkat menjadi 4,6%. Pertumbuhan Singapura diperkirakan melambat menjadi 2,5%, dan pertumbuhan Thailand diperkirakan melambat menjadi 3,3%. Sementara itu, PDB Vietnam diperkirakan akan stabil pada 6%.

C. Kondisi Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tetap kuat dan terus memperlihatkan adanya perbaikan. Kinerja ekonomi domestik pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 5,05 persen. Angka ini tetap tinggi dan menunjukkan resiliensi di tengah tren perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Namun angka pertumbuhan ekonomi

Indonesia di tahun 2023 ini masih lebih kecil dibandingkan angka kumulatif tahun 2022 yang mencapai 5,31 persen. Pertumbuhan ekonomi yang menguat di 2 tahun terakhir ini didorong oleh kuatnya kinerja ekspor serta membaiknya konsumsi rumah tangga dan investasi nonbangunan.

Semakin terkendalinya kasus COVID-19 karena penanganan pandemi yang tegas oleh pemerintah, peningkatan aktivitas masyarakat, serta kenaikan pendapatan negara yang berasal dari batu bara dan sawit juga menjadi faktor pendukung realisasi pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang positif juga ditopang oleh permintaan domestik yang semakin meningkat, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada pertumbuhan mayoritas Lapangan Usaha (LU) yang semakin meningkat terutama Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi. Disusul pula dengan LU Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencatatkan pertumbuhan tinggi. Sebagian besar indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan ditengah kondisi risiko tekanan global. Perbaikan ekonomi domestik terjadi pada hampir semua komponen PDB sisi pengeluaran terutama perdagangan (ekspor impor) dan investasi nonbangunan yang tumbuh positif masing-masing sebesar 16,28 persen untuk ekspor, 14,75 persen untuk impor, dan 12,53 untuk investasi nonbangunan. Pemulihan ekonomi negara-negara mitra dagang utama meningkatkan permintaan global. Hal tersebut disambut seiring dengan peningkatan produksi dalam negeri sehingga berdampak positif pada Kinerja ekspor dan impor. Selain itu, kebijakan stimulus pemerintah berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mempengaruhi peningkatan konsumsi pemerintah.

Adapun secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia melanjutkan perbaikan ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua, diikuti Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Berdasarkan asumsi ekonomi Makro yang di launching pada Forum Konsultasi Publik RKP Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2024 diperkirakan berkisar antara 5,3 – 5,7 persen. Selanjutnya, untuk tingkat inflasi di tahun 2024 inflasi diperkirakan berada pada

kisaran $2,5 \pm 1$ persen. Prakiraan tersebut ditopang oleh berbagai indikator sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur. Prakiraan tersebut juga sejalan dengan semakin membaiknya proses bisnis, aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta kinerja ekspor yang juga diperkirakan akan tetap kuat utamanya pada batu bara, nikel, CPO, dan sektor jasa seiring permintaan dagang utama yang masih kuat. Secara keseluruhan, kinerja ekspor berpotensi akan lebih tinggi dari prakiraan semula didorong pengaruh positif perbaikan ekonomi Tiongkok.

D. Kondisi Perekonomian Kalimantan Timur

Secara umum, kondisi ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan positif, baik secara q-to-q maupun y-on-y. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan triwulan III tahun 2023, terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu triwulan III tahun 2022. Adapun faktor yang membuat kinerja ekonomi yang semakin membaik hingga Triwulan III 2023 tersebut terutama disebabkan masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Refinery Development Master Plan (RDMP). Pembangunan IKN mendorong pertumbuhan lapangan usaha lain seperti Pengadaan Listrik dan Gas; Transportasi dan Pergudangan; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Apabila dihitung secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan III tahun 2023 naik sebesar 6,34 persen jika dibandingkan dengan kumulatif periode yang sama tahun pada 2022. Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2023 tertinggi secara y-on-y dari sisi produksi adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,72 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2023 tertinggi secara y-on-y adalah Konsumsi Pemerintah sebesar 34,10 persen. Namun, apabila dibandingkan dengan triwulan I dan II tahun 2023, ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah penurunan nilai tukar rupiah. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah menyebabkan biaya input untuk produk dengan bahan baku impor semakin tinggi, sehingga berdampak pada kenaikan biaya produksi.

Mayoritas lapangan usaha utama melanjutkan perbaikan dengan pertambangan, konstruksi, dan pertanian menjadi sumber utama berlanjutnya tren perbaikan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang oleh kinerja investasi (PMTB) yang meningkat di tengah komponen utama lainnya yang mengalami perlambatan. Selain itu, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi secara q-to-q adalah konstruksi sebesar 5,59 persen yang terjadi karena didorong oleh terus berprogresnya pembangunan beberapa infrastruktur (proyek gedung, bendungan, jalan, dan infrastruktur lain pendukung IKN dan Proyek RDMP RU-V Balikpapan, serta proyek konstruksi lainnya). Dari sisi produksi, lapangan usaha yang memberikan sumber pertumbuhan terbesar secara y-on-y adalah Industri Pengolahan sebesar 1,49 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran sumber pertumbuhan terbesar secara y-on-y adalah komponen PMTB sebesar 3,33 persen. Selanjutnya disusul oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kinerja ekonomi lapangan usaha utama Provinsi Kalimantan Timur, Pertambangan dan Penggalian secara q-to-q tumbuh sebesar 1,94 persen akibat didorong oleh peningkatan produksi batubara, minyak bumi dan produksi penggalian. Selanjutnya, inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 3,07% (yoy), dimana angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan II 2023 yang sebesar 3,79% (yoy), ataupun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu triwulan III 2022 yang sebesar 5,69% (yoy).

Selanjutnya kondisi ketenagakerjaan per Agustus 2023 mengalami perbaikan sebagaimana terlihat dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi angka 5,31% dibandingkan dengan 5,71% pada Agustus 2022. Penduduk yang bekerja pada sektor formal per Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 0,41 % dibandingkan dengan Agustus 2022. Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur per Agustus 2023 semakin membaik ditandai dengan TPT yang berada pada level terendah selama dekade terakhir dan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pasar tenaga kerja Kalimantan Timur mampu menyerap 100,38 ribu orang tambahan pekerja selama periode Agustus 2022 - Agustus 2023. Pembangunan IKN menambah serapan tenaga kerja pada sektor Kontruksi, Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum, dan Transportasi & Pergudangan, serta berdampak positif pada kondisi ketenagakerjaan di kabupaten/kota sekitarnya.

E. Tantangan Pembangunan 2025

Sektor pertambangan khususnya batubara masih menjadi andalan Kabupaten Kutai Timur karena produksi dari komoditas tersebut sebagian besar diekspor ke luar negeri. Hal ini menempatkan Kutai Timur sebagai salah satu andalan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam beberapa tahun sebelumnya harga komoditas batubara pernah mengalami penurunan drastis khususnya tahun 2016 dan berakibat pada pertumbuhan ekonomi Kutai Timur yang menurun. Namun, dimulai tahun 2017 hingga 2019 pertumbuhan Sektor Pertambangan Kutai Timur mulai mengalami pertumbuhan positif. bahkan tumbuh mencapai 8.67 persen pada tahun 2019 terus berfluktuasi seiring dengan situasi dan kondisi dunia, dan sampai akhir tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kutai Timur mencapai 5,58 persen. Perkiraan perkembangan dinamika perekonomian Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2024 diperkirakan masih dipengaruhi perekonomian global, regional, nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu, tantangan Pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Kutai Timur adalah meningkatkan nilai dari produk-produk unggulan dari Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, seperti kelapa sawit, karet, dan kayu. Potensi ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan produk-produk bernilai tambah. Infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas penyimpanan sudah mulai dikembangkan, meskipun masih memerlukan peningkatan lebih lanjut untuk mendukung distribusi produk secara efisien. Selain itu, pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk mendukung pengembangan produk-produk unggulan melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung sektor pertanian dan industri hilir. Namun, berbagai tantangan harus diatasi untuk meningkatkan nilai produk-produk unggulan dari Kabupaten Kutai Timur. Keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah-daerah pedalaman, menghambat efisiensi distribusi dan pemasaran produk. Jalan yang rusak dan terbatasnya akses ke pelabuhan dan fasilitas penyimpanan menambah biaya logistik. Meskipun memiliki potensi besar, kualitas produk sering kali belum konsisten dan sesuai dengan standar internasional,

memerlukan penerapan teknologi modern dan standar mutu yang ketat seperti Good Agricultural Practices (GAP) dan sertifikasi ISO.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan berkompeten menjadi salah satu hambatan utama. Pelatihan dan peningkatan kapasitas petani serta pelaku industri sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Banyak petani dan pelaku usaha kecil juga menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan untuk pengembangan usaha mereka, dengan program kredit mikro dan dukungan keuangan lainnya yang masih terbatas dan belum merata. Produk dari Kabupaten Kutai Timur harus bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain dan produk impor yang sering kali memiliki kualitas lebih baik dan harga yang lebih kompetitif. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dapat mempengaruhi produksi dan kualitas produk unggulan. Selain itu, regulasi dan kebijakan yang ada terkadang kurang mendukung inovasi dan fleksibilitas dalam pengembangan produk baru, dengan proses birokrasi yang panjang dan kompleks sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha. Meskipun Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan produk-produk unggulan, berbagai tantangan perlu diatasi untuk meningkatkan nilai tambah produk tersebut.

Beberapa strategi dapat diterapkan untuk dapat meningkatkan nilai dari berbagai produk unggulan di Kabupaten Kutai Timur, meliputi diversifikasi produk, peningkatan kualitas produk, branding dan pemasaran, pengembangan industri hilir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penguatan infrastruktur, kolaborasi dengan akademisi dan peneliti, akses pembiayaan, sertifikasi dan standarisasi, serta pengembangan pariwisata agro. Diversifikasi produk dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai produk turunan dari komoditas utama seperti kelapa sawit, sehingga dapat menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti minyak goreng premium, biodiesel, kosmetik berbasis sawit, dan produk pangan olahan lainnya. Peningkatan kualitas produk dapat dicapai melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP), teknologi modern, serta sertifikasi mutu seperti ISO dan HACCP.

Dalam hal branding dan pemasaran, penting untuk membangun merek yang kuat untuk produk-produk unggulan dengan menonjolkan keunikan lokal, kualitas, dan nilai

tambah yang dimiliki. Strategi pemasaran digital juga penting untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pengembangan industri hilir di daerah tersebut perlu dilakukan untuk mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi petani maupun pelaku industri dalam mengelola produksi dan pemasaran produk. Penguatan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas penyimpanan penting untuk mendukung distribusi produk secara efisien.

Selain itu, kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat membantu melakukan riset dan pengembangan produk-produk inovatif serta meningkatkan efisiensi produksi. Memperluas akses pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha juga penting melalui program kredit mikro, kemitraan dengan lembaga keuangan, dan dukungan dari pemerintah. Penggunaan sertifikasi organik, fair trade, dan lainnya dapat meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Terakhir, pengembangan pariwisata agro dengan menjadikan kebun dan pabrik pengolahan sebagai destinasi wisata edukasi dapat meningkatkan nilai ekonomi dari sisi pariwisata. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, Kabupaten Kutai Timur dapat meningkatkan nilai produk unggulan mereka, memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

F. Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator yang menggambarkan kualitas sumberdaya manusia, diantaranya adalah indeks pembangunan manusia (IPM). IPM merupakan cerminan tingkat kesejahteraan suatu daerah. IPM dinilai dari tiga dimensi, yaitu (1) umur panjang dan hidup sehat; (2) pengetahuan. dan (3) standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). AHH adalah jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran. Indeks pengetahuan diwakili oleh rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tujuh kabupaten/kota yang berstatus

pembangunan manusia “tinggi”. yaitu Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

Kondisi IPM Kabupaten Kutai Timur dalam lima tahun terakhir semakin membaik. Hal tersebut menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Kutai Timur di atas rata-rata IPM nasional. Namun, capaian IPM tersebut belum merata untuk setiap desa/kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Belum imbangnya capaian komponen pembentuk IPM. Kabupaten Kutai Timur dituntut untuk meratakan capaian IPM di semua wilayah termasuk penyeimbangan komponen pembentuk IPM. Meskipun Indonesia secara keseluruhan dan Kabupaten Kutai Timur secara khusus telah mencapai kemajuan dalam penyediaan pendidikan dasar dan menengah, masih ada kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara sekolah-sekolah negeri dan swasta. Kemudian masalah lain yang dihadapi terkait dengan sumberdaya manusia adalah kurangnya keterampilan yang relevan. Banyak lulusan tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri, serta kurangnya akses terhadap pelatihan keterampilan yang relevan.

Tantangan selanjutnya adalah keterbatasan akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan. Masih ada tantangan dalam akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya di daerah Kutai Timur. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan dalam kualitas SDM. Keterbatasan akses ini menyebabkan rendahnya tingkat literasi dan numerasi: Tingkat literasi dan numerasi di kalangan penduduk Indonesia secara umum masih relatif rendah, terutama di daerah-daerah terpencil dan perkotaan kumuh. Hal ini membatasi kemampuan individu untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi serta teknologi. Faktor lain yang jadi tantangan adalah kualitas pengajaran dan kualitas guru. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah, termasuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, serta peningkatan penggunaan metode pengajaran yang inovatif dan efektif.

Selain kualitas pendidikan, hal lain yang perlu menjadi perhatian terkait dengan kondisi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah tingkat penyerapan di lapangan kerja. Persentase sumber daya manusia (SDM) yang terserap di lapangan kerja di

Kabupaten Kutai Timur menunjukkan perkembangan positif seiring dengan meningkatnya investasi di daerah tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar 70.5%, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan menjadi 4.2% pada tahun yang sama, yang mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Namun, persentase positif ini juga mendapatkan catatan kritis terkait kualitas tenaga kerja. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Kutai Timur yang dapat diserap seiring dengan peningkatan investasi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tingkat pendidikan penduduk masih memerlukan peningkatan signifikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri yang berkembang pesat, seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan industri pengolahan. Saat ini, banyak pekerja lokal hanya memiliki keterampilan dasar, sementara kebutuhan akan keterampilan teknis dan manajerial yang lebih tinggi semakin mendesak. Program pelatihan dan pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri sangat dibutuhkan.

Saat ini, Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan, namun implementasi dan efektivitas program-program ini masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dukungan dari pihak swasta dan kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi serta lembaga pelatihan dapat mempercepat peningkatan kualitas SDM. Sektor-sektor dominan di Kabupaten Kutai Timur, seperti pertambangan dan perkebunan, membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis khusus serta kemampuan manajerial dan pemahaman teknologi modern. Tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan antara kebutuhan industri dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja lokal, yang dapat diatasi melalui program peningkatan keterampilan dan pendidikan lanjutan. Infrastruktur pendidikan dan pelatihan yang memadai juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Dengan pendekatan yang komprehensif, meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, program pelatihan yang relevan, serta kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi

pendidikan, SDM lokal dapat lebih siap dan mampu bersaing untuk memanfaatkan peluang yang datang seiring dengan meningkatnya investasi di Kabupaten Kutai Timur.

3.a.3. Target Makro Ekonomi Tahun 2025

Pada tahun 2025, Kabupaten Kutai Timur memiliki target makroekonomi yang meliputi beberapa indikator utama seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita, Investasi, dan Inflasi. LPE ditargetkan untuk tetap stabil dan tumbuh secara positif seiring dengan upaya diversifikasi ekonomi, terutama dengan meningkatkan kontribusi sektor non-pertambangan seperti pertanian, pariwisata, dan industri hilir. Selanjutnya, PDRB Perkapita diharapkan meningkat, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PDRB Perkapita ini juga diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah dari sektor-sektor ekonomi utama. Adapun investasi menjadi salah satu fokus utama, dengan target peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, khususnya pada sektor infrastruktur, energi, dan industri pengolahan, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian inflasi ditargetkan untuk tetap terkendali dalam kisaran yang aman, guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga, dengan upaya pengendalian yang fokus pada ketersediaan pasokan barang pokok dan stabilitas harga energi. Melalui pencapaian target-target ini, Kabupaten Kutai Timur bertujuan untuk menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2021 hingga 2023, dapat dilakukan proyeksi untuk tahun 2025. Analisis tren historis menunjukkan bahwa LPE untuk kategori "Dengan Migas" mengalami peningkatan sebesar 1% setiap tahun, dari -1% pada 2021 menjadi 1% pada 2023. Berdasarkan tren ini, diproyeksikan LPE untuk kategori ini akan mencapai 3% pada tahun 2025. Kemudian untuk kategori "Tanpa Migas," terdapat kenaikan rata-rata sebesar 0,5% per tahun, dari 6% pada 2021 ke 7% pada 2023. Dengan

mempertimbangkan tren ini, LPE kategori ini diperkirakan mencapai 8% pada 2025. Sementara itu, kategori "Tanpa Migas dan Batu Bara" menunjukkan tren sedikit menurun dengan penurunan rata-rata sebesar 0,5% per tahun, dari 8% pada 2021 menjadi 7% pada 2023. Oleh karena itu, diproyeksikan bahwa LPE untuk kategori ini akan turun menjadi 6% pada tahun 2025. Proyeksi ini menggambarkan tren pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur dengan mempertimbangkan capaian pada tahun 2021-2023.

B. PDRB Per Kapita

Proyeksi PDRB Per Kapita untuk tahun 2025 dilakukan dengan memperhitungkan tren pertumbuhan tahunan rata-rata. Untuk PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku (ADHB), terjadi pertumbuhan signifikan dari 310,29 pada tahun 2021 menjadi 471,27 pada tahun 2022, diikuti oleh penurunan menjadi 369,42 pada tahun 2023. Rata-rata pertumbuhan tahunan ADHB selama periode ini adalah sekitar 15,12%. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan ini, PDRB Per Kapita ADHB diproyeksikan mencapai sekitar 489,35 pada tahun 2025. Sementara itu, untuk PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan (ADHK), yang menunjukkan kenaikan lebih stabil dari 209,04 pada tahun 2021 menjadi 229,77 pada tahun 2023, rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 4,85%. Proyeksi untuk ADHK pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 252,60. Proyeksi ini memberikan gambaran mengenai potensi pertumbuhan ekonomi per kapita di Kabupaten Kutai Timur. Namun, penting untuk mempertimbangkan inflasi dan stabilitas harga guna memastikan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan yang lebih stabil dalam PDRB per kapita ADHK mencerminkan adanya perbaikan dalam perekonomian riil, yang harus dijaga untuk mempertahankan momentum pertumbuhan secara berkelanjutan.

C. Investasi

Berdasarkan data yang tersedia, total investasi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, investasi di Kabupaten Kutai Timur mencapai Rp 12,48 triliun, dengan komposisi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 9,05 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 3,43 triliun. Sektor

pertambangan menjadi kontributor utama untuk investasi tersebut, baik dari sisi PMA maupun PMDN. Data tahun 2023 menunjukkan peningkatan lebih lanjut dalam investasi di wilayah ini. Pada kuartal ketiga tahun 2023, investasi nasional tercatat mengalami kenaikan sebesar 21,6% secara year-on-year, dan wilayah luar Pulau Jawa, termasuk Kalimantan Timur terus mendominasi penerimaan investasi

Dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan yang stabil dari 2021 hingga 2023, serta keberlanjutan sektor-sektor utama seperti pertambangan, dapat diproyeksikan bahwa total investasi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 akan mengalami peningkatan lebih lanjut, dengan total investasi pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp 15 triliun. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa kondisi ekonomi global tetap stabil, harga komoditas seperti batu bara dan minyak tetap tinggi, dan tidak ada gangguan besar dalam kebijakan investasi. Selain itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan memperkuat iklim investasi di wilayah ini akan menjadi faktor kunci dalam mencapai target tersebut.

D. Inflasi

Inflasi di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan penurunan dari 5,35 persen pada tahun 2022 menjadi 3,46 persen pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi, yang mencakup kebijakan moneter yang prudent, stabilitas harga komoditas penting, dan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan distribusi barang dan jasa. Jika tren ini berlanjut, dengan asumsi bahwa kebijakan yang sama efektifnya akan diterapkan, maka dapat diproyeksikan bahwa inflasi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 akan tetap terkendali, mungkin berada dalam kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Proyeksi ini mempertimbangkan keberlanjutan langkah-langkah pengendalian inflasi yang telah diterapkan, termasuk pengawasan ketat terhadap harga komoditas penting dan dukungan terhadap distribusi yang efisien.

Namun, perlu dicatat bahwa proyeksi ini sangat bergantung pada sejumlah faktor eksternal, seperti fluktuasi harga minyak global, perubahan kebijakan fiskal dan moneter nasional, serta situasi ekonomi global yang dapat mempengaruhi harga-harga di pasar lokal. Oleh karena itu, meskipun proyeksi ini menunjukkan tren inflasi yang terkendali, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap perlu untuk memonitor

perkembangan ekonomi secara berkala untuk menyesuaikan kebijakan yang diperlukan demi menjaga stabilitas inflasi di masa depan.

b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 berfokus pada pengelolaan yang efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Adapun arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah arah kebijakan pembiayaan daerah. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi, serta meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta dan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana perimbangan dan dana transfer. Selanjutnya Arah Kebijakan Belanja Daerah difokuskan pada pengalokasian anggaran yang lebih efektif untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk UMKM. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan efisiensi belanja dengan mengurangi belanja yang tidak produktif dan memprioritaskan belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah mencakup upaya untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah, serta mengelola utang daerah dengan hati-hati. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga perlu memanfaatkan pembiayaan alternatif, seperti kerjasama publik-swasta (PPP), untuk mendanai proyek-proyek strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah.

3.b.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mulai diberlakukan sejak Januari 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) adalah sebuah regulasi yang bertujuan untuk memperbarui, menyelaraskan, dan meningkatkan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU ini menggantikan beberapa peraturan sebelumnya yang mengatur tentang desentralisasi fiskal dan hubungan keuangan pusat-daerah,

termasuk UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU HKPD bertujuan untuk memperkuat desentralisasi fiskal dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka. Selain itu, UU ini juga mendorong peningkatan PAD melalui penguatan basis pajak dan retribusi daerah, serta mengatur mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Undang-Undang ini memangkas beberapa sumber pendapatan existing untuk memberikan efisiensi dan membuka peluang baru bagi daerah, terutama Kabupaten Kutai Timur. Beberapa contoh pemangkasan sumber pendapatan seperti pemangkasan dan penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan UU HKPD, alokasi DAU disesuaikan dengan kriteria yang lebih spesifik dan transparan, yang menyebabkan berkurangnya jumlah DAU yang diterima. Hal ini mendorong daerah untuk lebih efisien dalam mengelola dana yang ada. Selain itu, dengan adanya UU ini juga akan merestruktur Dana Bagi Hasil (DBH). UU HKPD mengatur agar DBH lebih adil dan sesuai dengan produksi aktual, yang bisa menyebabkan penurunan penerimaan DBH jika tidak dikelola dengan optimal. Selanjutnya, akan ada pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak efisien. DAK yang sebelumnya diberikan untuk proyek-proyek tertentu akan diperketat, terutama untuk proyek yang tidak relevan dan efisien. Bagi daerah terutama Kabupaten Kutai Timur, juga akan ada penghapusan atau penyederhanaan retribusi izin usaha. Dengan UU HKPD, retribusi ini memiliki kemungkinan untuk dihapus atau disederhanakan untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi di daerah, meskipun ini berarti kehilangan sumber pendapatan yang telah ada.

Meskipun terdapat beberapa sektor pendapatan daerah yang berkurang maupun dihapus, namun UU HKPD ini juga membuka peluang baru bagi daerah untuk meningkatkan pendapatannya. Beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Kabupaten Kutai Timur berdasarkan UU HKPD ini, antara lain sebagai berikut:

A. Optimalisasi Aset Daerah

Kabupaten Kutai Timur memiliki banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Berdasarkan Pasal 105 - 109, daerah ini bisa menyewakan lahan tersebut kepada

investor untuk membangun kawasan industri atau pertanian terpadu. Pendapatan sewa dari lahan ini bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur lokal. Selain itu, gedung-gedung milik pemerintah daerah yang tidak digunakan bisa dialihfungsikan menjadi ruang usaha atau pusat bisnis. Ini akan menambah pendapatan daerah dari sewa gedung, yang bisa digunakan untuk meningkatkan layanan publik.

B. Pengelolaan Pajak dan Retribusi yang Lebih Efisien

Mengingat Kutai Timur adalah daerah penghasil tambang, pemerintah daerah bisa mengimplementasikan sistem e-tax tambang untuk memudahkan perusahaan tambang dalam membayar pajak daerah. Ini sesuai dengan Pasal 112 - 120 yang mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak. Selain itu, juga perlu pengintegrasian data pajak antara dinas terkait akan memastikan bahwa informasi mengenai wajib pajak selalu akurat dan terbaru, sehingga mengurangi potensi kebocoran pajak.

C. Insentif dan Dukungan dari Pusat

Apabila Kutai Timur berhasil meningkatkan rasio pajak terhadap PDRB melalui inovasi dan efisiensi pengelolaan keuangan, mereka bisa mendapatkan dana insentif dari pemerintah pusat sesuai dengan Pasal 127 – 133 UU HKPD. Hal ini bisa digunakan untuk program pembangunan daerah yang lebih luas.

D. Inovasi Pendapatan Daerah

Mengingat potensi sumber daya alam, Kutai Timur bisa membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokus pada pengelolaan sumber daya energi seperti gas dan minyak bumi. BUMD ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan daerah. Selain itu, Kutai Timur bisa bekerjasama dengan perusahaan swasta untuk membangun dan mengelola fasilitas umum seperti jalan dan jembatan. Pendapatan dari tol atau retribusi jalan bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.

Berdasarkan data tahun 2021-2023, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur selalu diatas 100%. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan penerimaan lainnya. Selain

itu, pencapaian ini juga menunjukkan kinerja yang baik dalam aspek pengelolaan keuangan, dimana strategi-strategi yang diterapkan dalam mengoptimalkan pendapatan berjalan efektif.

Tabel 3.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	%	+ / (-)
2021	2.820.664.498.009,00	3.053.086.684.676,89	108,24	232.422.186.667,89
2022	4.461.066.217.447,00	5.124.474.001.353,81	113,51	663.407.783.906,81
2023	8.256.143.678.724,00	8.597.328.360.021,50	104,13	341.184.681.297,50

Capaian positif pada realisasi pendapatan tersebut, menjadi acuan dalam proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2025 seperti yang ada dalam table berikut:

Tabel 3.2 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Kode	URAIAN	APBD 2024	RAPBD 2025
4	PENDAPATAN	9,148,796,924,112	8,950,414,286,800
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	251,429,471,802	906,183,327,000
4 1 01	Pajak Daerah	112,309,300,000	208,019,299,000
4 1 01 06 01	Pajak Jasa Perhotelan	2,273,448,800	2,476,235,000
4 1 01 06 01	Bintang Empat	933,448,800	1,209,435,000
4 1 01 06 01	Hotel Melati Tiga	1,340,000,000	1,266,800,000
4 1 01 07	Pajak Jasa Restoran	29,104,740,920	34,992,728,000
1 1 01 07 01	Restoran	3,567,225,100	3,716,172,000
1 1 01 07 02	Rumah Makan	118,500,000	132,549,000
1 1 01 07 03	Cafe	203,060,900	238,059,000
1 1 01 07 04	Kantin	7,000,000	12,500,000
1 1 01 07 05	Warung	221,354,770	222,048,000
1 1 01 07 07	Katering	24,987,600,150	30,671,400,000
4 1 01 08	Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan	410,331,000	396,400,000
4 1 01 08 05	Karaoke	90,331,000	98,320,000
4 1 01 08 05	Klub Malam	-	-
4 1 01 08 08	Balap Kendaraan Bermotor	-	-
4 1 01 08 08	Permainan Ketangkasan	260,000,000	236,800,000
4 1 01 08 09	Panti Pijat / Refleksi	40,000,000	40,000,000
4 1 01 08 09	Mandi Uap / Spa	15,000,000	16,280,000
4 1 01 08 09	Pusat Kebugaran	5,000,000	5,000,000
4 1 01 08 10	Pertandingan Olah Raga	-	-
4 1 01 09	Pajak Reklame	1,540,000,000	1,418,240,000
4 1 01 09 01	Papan / Bill Board / Videotron / Megatron / Bersinar dan sejenisnya	1,250,000,000	1,155,840,000
4 1 01 09 02	Kain	200,000,000	204,800,000

Kode					URAIAN	APBD 2024	RAPBD 2025
4	1	01	09	03	Melekat / Stiker	-	-
4	1	01	09	05	Berjalan	90,000,000	57,600,000
4	1	01	10		Pajak Tenaga Listrik	21,798,827,800	24,347,830,000
4	1	01	10	01	Pajak Penerangan Jalan PLN / Dihasilkan Sendiri	20,808,827,800	23,316,830,000
4	1	01	10	02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	990,000,000	1,031,000,000
4	1	01	11		Pajak Jasa Parkir	40,000,000	42,000,000
4	1	01	11	01	Parkir	40,000,000	42,000,000
4	1	01	12		Pajak Air Tanah	969,415,280	969,415,000
4	1	01	12	01	Air Tanah	969,415,280	969,415,000
4	1	01	13		Pajak Sarang Burung Walet	97,000,000	97,000,000
4	1	01	13	01	Sarang Burung Walet	97,000,000	97,000,000
4	1	01	14		Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	5,575,536,200	523,268,000
4	1	01	14	04	Batu Kapur/ Batugunung/Gamping	1,025,220,850	141,247,000
4	1	01	14	07	Bentonit	-	-
4	1	01	14	12	Granit / Andesit/agregat	25,000,000	239,115,000
4	1	01	14	23	Sirtu/Pasir/Kerikil	3,845,315,350	13,281,000
4	1	01	14	30	Tanah Timbun/ tanah liat	680,000,000	129,625,000
4	1	01	15		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4,500,000,000	4,732,000,000
4	1	01	15	01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4,500,000,000	4,732,000,000
4	1	01	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	46,000,000,000	43,158,200,000
4	1	01	16	01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	46,000,000,000	43,158,200,000
					Opsen PKB	-	41,800,895,000
					Opsen PKB	-	41,800,895,000
					Opsen BBNKB	-	53,065,088,000
					Opsen BBNKB	-	53,065,088,000
4	1	02			Retribusi Daerah	4,988,775,000	3,695,726,000
4	1	02	01		Retribusi Jasa Umum	3,797,400,000	2,736,926,000
4	1	02	01	01	<i>Retribusi Pelayanan Kesehatan</i>	1,000,000,000	-
4	1	02	01	02	<i>Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan</i>	950,000,000	1,551,926,000
4	1	02	01	04	<i>Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum</i>	-	-
4	1	02	01	05	<i>Retribusi Pelayanan Pasar</i>	1,025,000,000	1,185,000,000
4	1	02	01	06	<i>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</i>	350,000,000	-
4	1	02	01	07	<i>Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</i>	-	-
4	1	02	01	08	<i>Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan izin lokasi</i>	-	-
4	1	02	01	09	<i>Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus</i>	-	-
4	1	02	01	13	<i>Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi</i>	472,400,000	-
4	1	02	02		Retribusi Jasa Usaha	526,000,000	458,800,000
4	1	02	02	01 002	<i>Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Menara telekomunikasi)</i>	236,200,000	-
4	1	02	02	01 004	<i>Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (uji Lab)</i>	200,000,000	300,000,000
4	1	02	02	01 005	<i>Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (sewa ruangan)</i>	39,800,000	39,800,000
4	1	02	02	07	<i>Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan</i>	40,000,000	44,000,000
4	1	02	02	09	<i>Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi , Pariwisata dan Olah raga</i>	10,000,000	75,000,000
4	1	02	03		Retribusi Perizinan Tertentu	665,375,000	500,000,000
4	1	02	03	07	<i>Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung</i>	500,000,000	500,000,000
4	1	02	03	03	<i>Retribusi Izin Trayek untuk penyediaan pelayanan angkutan umum</i>	165,375,000	-
4	1	03			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7,441,875,000	7,441,875,000
4	1	03	02	01	<i>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD</i>	7,441,875,000	7,441,875,000
4	1	03	02	01	<i>Deviden yang Berasal dari BPD</i>	7,056,000,000	7,056,000,000
4	1	03	02	01	<i>Deviden yang Berasal dari BPR</i>	385,875,000	385,875,000
4	1	04			Lain-lain PAD yang sah	126,689,521,802	687,026,427,000
4	1	04	01		Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan	-	-

Kode					URAIAN	APBD 2024	RAPBD 2025
4	1	04	01	01	Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan	-	-
4	1	04	05		Penerimaan Jasa Giro	5,000,000,000	5,000,000,000
4	1	04	05	01	Jasa GiroKas Daerah	4,500,000,000	4,500,000,000
4	1	04	05	01	Jasa GiroPemegang Kas	500,000,000	500,000,000
4	1	04	07		Pendapatan Bunga	19,480,094,802	19,480,000,000
4	1	04	07	01 000 1	Remunerasi Dana Treaury Deposit Facility	19,480,094,802	19,480,000,000
4	1	04	07	01	Pendapatan bunga jkn	-	-
4	1	04	08		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-
4	1	04	08	01	Kerugian Uang Daerah	-	-
4	1	04	09		Penerimaan Komisi Potongan, atau bentuk lain	-	547,795,000,000
4	1	04	09	01 000 1	Dana Profit Sharing	-	547,795,000,000
4	1	04	11		Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-
4	1	04	11	01	Bidang Pendidikan	-	-
4	1	04	11	01	Bidang Kesehatan	-	-
4	1	04	11	01	Pekerjaan Umum	-	-
4	1	04	11	01	Perumahan Rakyat	-	-
4	1	04	11	01	Penataan Ruang	-	-
4	1	04	11	01	Perencanaan Pembangunan	-	-
4	1	04	11	01	Perhubungan	-	-
4	1	04	11	01	Lingkungan Hidup	-	-
4	1	04	11	01	Pertahanan	-	-
4	1	04	11	01	Dst.....	-	-
4	1	04	12		Pendapatan Denda Pajak	-	-
4	1	04	12	06	Hotel	-	-
4	1	04	12	07	Restoran	-	-
4	1	04	12	08	Hiburan	-	-
4	1	04	12	09	Reklame	-	-
4	1	04	12	10	Penerangan Jalan	-	-
4	1	04	12	11	Parkir	-	-
4	1	04	12	12	Air Bawah Tanah	-	-
4	1	04	12	13	Sarang Burung Walet	-	-
4	1	04	12	14	Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-
4	1	04	12	15	Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	-
4	1	04	12	16	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-
4	1	04	13		Pendapatan Denda Retribusi	-	-
4	1	04	13	01	Jasa Umum	-	-
4	1	04	13	02	Jasa Usaha	-	-
4	1	04	13	03	Perizinan Tertentu	-	-
4	1	04	14		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-
4	1	04	14	01	Pelaksanaan Pekerjaan	-	-
4	1	04	14		Pembongkaran Reklame	-	-
4	1	04	15		Pendapatan Dari Pengembalian	-	-
4	1	04	15	01	Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-
4	1	04	15	02	Kelebihan Pembayaran Asuransi kesehatan	-	-
4	1	04	15	03	Kelebihan Pembayaran gaji dan Tunjangan	-	-
4	1	04	15	04	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	-
4	1	04	15	05	Pengembalian kelebihan pembayaran JKM	-	-
4	1	04	15	07	Pengembalian kelebihan pembayaran JKN	-	-
4	1	04	16		Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	102,209,427,000	114,751,427,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD RSUD Kudungga	58,600,000,000	71,142,000,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD RSUD Sangkulirang	8,104,452,000	8,104,452,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD RSUD Kecamatan	35,504,975,000	35,504,975,000

Kode					URAIAN	APBD 2024	RAPBD 2025
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD PKM Teluk Pandan	1,239,702,000	1,239,702,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD PKM Sepaso	2,645,588,000	2,645,588,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD PKM Kaliorang	2,682,627,000	2,682,627,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD PKM Wahau I	1,459,454,000	1,459,454,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD PKM Kongbeng	3,045,712,000	3,045,712,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD PKM M. Ancalong	1,582,464,000	1,582,464,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD Sangatta Utara	1,533,326,000	1,533,326,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD Karang	1,363,253,000	1,363,253,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD Muara Bengkal	1,640,831,000	1,640,831,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD Kaubun	2,064,870,000	2,064,870,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD Long Mesangat	1,144,678,000	1,144,678,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD Muara Wahau II	2,205,688,000	2,205,688,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD Sangkulirang	2,238,391,000	2,238,391,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD Teluk Lingga	2,762,114,000	2,762,114,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD Rantau Pulung	1,524,832,000	1,524,832,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD Tepian Baru	1,883,450,000	1,883,450,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD Batu Ampar	564,108,000	564,108,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD Busang	978,309,000	978,309,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD Sandaran	439,064,000	439,064,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD Sangatta Selatan	1,758,681,000	1,758,681,000
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD Puskesmas Telen	729,333,000	729,333,000
4	1	04	16	01	Pendapatan hasil kerjasama BLUD Kudungga	-	-
					Pendapatan Labkesda	18,500,000	18,500,000
4	1	04	17		Denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	-	-
4	1	04	17	01	Denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	-	-
4	1	04	18		Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	-	-
4	1	04	18	01	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	-	-
4	1	04	19		Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir	-	-
4	1	04	19	01	Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir	-	-
4	2				PENDAPATAN TRANSFER	8,394,688,280,310	8,044,230,959,800
4	2	01			Pendapatan Transfer pusat	7,170,442,600,830	6,898,084,027,800
4	2	01	01		Dana Perimbangan	7,023,952,540,830	6,751,593,967,800
4	2	01	01	01	Dana Transfer Umum	6,756,490,512,830	6,751,593,967,800
4	2	01	01	01	Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak	6,117,462,027,830	6,112,565,482,800
4	2	01	01	01	Bagi Hasil pajak	770,970,472,000	770,970,472,000
4	2	01	01	01	<i>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan</i>	440,132,678,000	440,132,678,000
4	2	01	01	01	<i>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perhutanan</i>	36,173,782,000	36,173,782,000
4	2	01	01	01	<i>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan</i>	232,766,316,000	232,766,316,000
4	2	01	01	01	<i>Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi</i>	61,897,696,000	61,897,696,000
4	2	01	01	01	<i>CHT</i>	-	-
4	2	01	01	01	Bagi Hasil Bukan Pajak	5,275,954,683,830	5,308,511,187,800
4	2	01	01	01	<i>Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi</i>	35,104,116,000	35,104,116,000
4	2	01	01	01	<i>Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi</i>	36,536,938,000	36,536,938,000
4	2	01	01	01	<i>Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi</i>	-	-
4	2	01	01	01	<i>Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Landrent)</i>	40,086,800,000	40,086,800,000
4	2	01	01	01	<i>Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)</i>	5,150,043,873,830	5,182,600,377,800
4	2	01	01	01	<i>Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)</i>	7,543,677,000	7,543,677,000
4	2	01	01	01	<i>Bagi Hasil Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)</i>	3,752,635,000	3,752,635,000
4	2	01	01	01	<i>Bagi Hasil dari Dana Reboisasi (DR)</i>	-	-
4	2	01	01	01	<i>Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan</i>	-	-

Kode						URAIAN	APBD 2024	RAPBD 2025
4	2	01	01	01	0013	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	2,886,644,000	2,886,644,000
4	2	01	01	01		Bagi Hasil Lainnya	70,536,872,000	33,083,823,000
4	2	01	01	01		Sawit	70,536,872,000	33,083,823,000
						-		
4	2	01	01	02		Dana Alokasi Umum	639,028,485,000	639,028,485,000
4	2	01	01	02	0001	Dana Alokasi Umum	639,028,485,000	639,028,485,000
4	2	01	01	02		Dana Alokasi Umum Tidak ditentukan Penggunaanya	487,358,367,000	487,358,367,000
4	2	01	01	02		Dana Alokasi Umum Terarah	151,670,118,000	151,670,118,000
4	2	01	01	02		Penggajian Formula PPPK	48,293,514,000	48,293,514,000
4	2	01	01	02		Pendanaan kelurahan	400,000,000	400,000,000
4	2	01	01	02		Bidang Pendidikan	69,395,625,000	69,395,625,000
4	2	01	01	02		Bidang Kesehatan	11,791,250,000	11,791,250,000
4	2	01	01	02		Pekerjaan UDUP	21,789,729,000	21,789,729,000
4	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus	267,462,028,000	-
4	2	01	01	03		Dana Alokasi Khusus Fisik	65,590,182,000	-
4	2	01	01	04		Dana Alokasi Khusus non Fisik	201,871,846,000	-
4	2	01	02	01	01	Dan Insentif Daerah	-	-
4	2	01	05	01	01	Dana Desa	146,490,060,000	146,490,060,000
4	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah	1,224,245,679,480	1,146,146,932,000
4	2	02	01	01		Dana Bagi Hasil Provinsi	1,191,595,075,480	1,146,146,932,000
4	2	02	01	01	0001	Bagi hasil dari Pajak kendaraan Bermotor	41,800,895,000	-
4	2	02	01	01	0002	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	53,065,088,000	-
4	2	02	01	01	0003	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	1,075,518,456,480	1,119,416,874,000
4	2	02	01	01	0004	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan (AP)	1,768,191,000	1,766,191,000
4	2	02	01	01	0005	Bagi Hasil Pajak Rokok	19,442,445,000	24,963,867,000
4	2	02	02	01		Dana Bantuan Keuangan	32,650,604,000	-
4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	502,679,172,000	-
4	3	01	01			Dana Profit sharing IUPK	502,679,172,000	-
4	3	01	01			Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	-	-
4	3	01	01			Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non Blud	-	-
4	3	01	01			Remunerasi Dana Treasury Deposit Facility	-	-
4	3	01	01			Pendapatan atas Dana Reducing Emmission from Deforestation and Forest	-	-

Sumber: Diolah dari SIPD RI – Dispenda Kutai Timur, 2024

3.b.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam merealisasikan belanja daerah ditunjukkan pada tahun 2021-2023 dimana tingkat penyerapannya di atas 80% pada tahun 2021 dan 2022. Namun, pada tahun 2023 realisasi anggaran meningkat hingga -4.744% dibandingkan proyeksi pada tahun tersebut. Hal ini juga membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan perubahan anggaran. Tingkat penyerapan belanja tertinggi terdapat pada belanja pegawai dan belanja hibah yang keduanya melebihi 85%. Sedangkan untuk belanja modal mengalami fluktuasi, namun tetap memiliki kinerja realisasi yang semakin baik, di tahun 2021 tingkat

penyerapannya mencapai 89%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah meningkatkan kinerja realisasi belanja modalnya, terutama yang terkait dengan peningkatan infrastruktur daerah.

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
	Belanja Daerah			
1.	Belanja Operasi	92,73	84,30	84,45
	Belanja Pegawai	96,13	87,28	83,62
	Belanja Barang dan Jasa	90,77	82,06	84,34
	Belanja Hibah	100,00	88,39	90,70
	Belanja Subsidi	80,17	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	68,76	47,77	-
2.	Belanja Modal	89,46	77,93	83,60
	Belanja Modal Tanah	93,27	73,55	70,33
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82,40	92,08	90,41
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90,21	87,94	74,61
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90,57	68,78	85,12
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	88,73	96,97	97,99
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	99,95
3.	Belanja Tidak Terduga	98,27	3,30	-
	Belanja Tidak Terduga	98,27	3,30	-
4.	Belanja Transfer	95,89	97,90	98,43
	Belanja Bantuan Keuangan	95,89	97,90	98,43
	Total Belanja Daerah	92,14	81,84	85,12

Sumber : BPKAD Kabupaten Kutai Timur, 2024

Berdasarkan realisasi di tahun 2021-2023 tersebut, dapat dijadikan acuan dalam realisasi belanja daerah pada tahun 2025. Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi 4 (empat) Kelompok yaitu : Belanja Operasi sebesar 4.757.177.320.213 (53.24%), Belanja Modal sebesar 3.128.752.665.290 (35.02%), Belanja Tidak Terduga sebesar 20.000.000.000 (0.22%), dan Belanja Transfer sebesar 1.029.484.301.297 (11.52%). Adapun rincian belanja daerah disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Proyeksi Belanja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Kode	Uraian	Pagu (Rp.)	%
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI	4.757.177.320.213	53.24
5.1.01	Belanja Pegawai	2.276.082.827.434	25.47
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.289.184.768.543	25.62
5.1.05	Belanja Hibah	191.879.724.236	2.15
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.000.000	0.00
5.2	BELANJA MODAL	3.128.752.665.290	35.02
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	233.075.770.461	2.61
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	921.533.337.544	10.31
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.941.464.352.965	21.73
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.560.877.858	0.20
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	15.118.326.462	0.17
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000	0.22
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	0.22
5.4	BELANJA TRANSFER	1.029.484.301.297	11.52
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.029.484.301.297	11.52
	Jumlah Belanja	8.935.414.286.800	

Sumber : Diolah dari SIPD-RI, Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) berperan dalam menentukan alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk dalam konteks dana desa dan sektor-sektor krusial lainnya. Di tingkat regulasi lebih detail, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.07/2012 tentang Standar Biaya Masukan menjadi acuan penting dalam mengatur pengeluaran wajib seperti pembayaran gaji PNS, utang, dan standar biaya untuk berbagai sektor.

Pengeluaran ini mencakup beberapa pos utama, seperti gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS), pendidikan, kesehatan, pembayaran utang, dan dana desa. Selain itu, pembayaran gaji dan tunjangan PNS mencapai 30-40% dari total APBD, sementara pembiayaan utang bisa dialokasikan sekitar 5-10% dari anggaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa belanja daerah juga mencakup sektor-sektor kesejahteraan masyarakat, termasuk kesehatan dan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan. Pada saat ini Pemerintah Daerah juga diminta untuk mengalokasikan anggaran untuk program penanganan stunting dan Upaya mengurangi kemiskinan. Dalam konteks penanganan stunting, alokasi dana untuk sektor kesehatan menjadi sangat penting. Hal ini meliputi pendanaan program-program gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Dana tersebut juga dialokasikan untuk edukasi dan promosi kesehatan, seperti penyuluhan tentang pola makan sehat dan pemberian nutrisi yang tepat bagi balita dan anak-anak. Sementara itu, dalam upaya penurunan kemiskinan memerlukan pendekatan yang lebih luas, termasuk dalam bidang pendidikan, pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, pelatihan kerja, dan usaha kecil menengah (UKM) sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

A. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang disesuaikan dengan

tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ini merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Alokasi Pemenuhan SPM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 menurut jenis disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Tabel Rekapitulasi Pemenuhan SPM
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No	Jenis SPM	Pagu (Rp.)
1	SPM Bidang Kesehatan	11,650,000,000.00
2	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	16,123,721,766.00
3	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	97,789,729,000.00
4	SPM Bidang Pendidikan	259,749,884,696.00
5	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	25,200,000,000.00
6	SPM Bidang Sosial	6,520,554,986.00
Jumlah		417,033,890,448.00

Sumber : Diolah dari SIPD-RI, 2024

B. Pemenuhan *Mandatory Spending*

Pada arah kebijakan belanja daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-undang (*mandatory spending*). *Mandatory spending* di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang yang mempengaruhi alokasi anggaran pemerintah daerah. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi payung hukum utama yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, termasuk pengalokasian dana untuk sektor-sektor penting seperti Pendidikan dan infrastruktur daerah. *Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang.

Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
3. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
4. Alokasi Dana Pengawasan untuk daerah dengan APBD diatas 2 triliun sekurang kurangnya sebesar 0,5%.

Adapun Alokasi anggaran Mandatory Spending pada Belanja Daerah disajikan pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6 Tabel Pemenuhan Mandatory Spending Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No.	MANDATORY	OPD PELAKSANA	PAGU (Rp.)	%
1	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,549,808,495,399.00	
		Dinas Kepemudaan dan olahraga	259,918,371,199.00	
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	52,709,598,433.00	
	Sub Total		1,862,436,465,031.00	20.84%
2	INFRASTRUKTUR	Dinas Perhubungan	16,321,823,000.00	
		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	9,050,000,000.00	

No.	MANDATORY	OPD PELAKSANA	PAGU (Rp.)	%
		Dinas Ketahanan Pangan	56,400,000,000.00	
		Dinas Perikanan	12,380,010,427.00	
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1,107,988,526,856.00	
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,414,814,071,903.00	
		Dinas Pariwisata	36,636,442,693.00	
		Dinas Kesehatan	108,400,499,042.00	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	283,434,054,838.00	
		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10,887,724,000.00	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3,767,896,303.00	
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	700,000,000.00	
		Sekretariat Daerah	25,700,000,000.00	
		Sekretariat DPRD	895,972,266.00	
		Dinas Kepemudaan dan olahraga	3,631,218,810.00	
	Sub Total		3,091,008,240,138.00	34.59%
3	Pengawasan	Inspektorat	64,043,426,527.00	0.72%
4	Alokasi Dana Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	705.522.738.797	10.50%

Sumber : Diolah dari SIPD-RI, 2024

C. Penurunan Stunting

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Berdasarkan PERPRES Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarr multisektor di pusat, daerah, dan desa. Upaya tersebut bertujuan untuk : (1) menurunkan prevalensi

Stunting; (2). meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; (3). menjamin pemenuhan asupan gizi; (4). memperbaiki pola asuh; (5). meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan (6). meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Kabupaten Kutai Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2023 angka prevalensi stunting mengalami penurunan menjadi 17 % yang semula mencapai 27,5 % pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 24,7 %.

Pemerintah Kabupaten Kutai timur pada tahun 2025 merencanakan untuk menurunkan angka stunting hingga dibawah 14 %, dengan cara mengalokasikan anggaran yang cukup kepada beberapa perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kutai Timur. Adapun perencanaan alokasi anggaran penurunan stunting dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Alokasi Anggaran Penurunan Stunting Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	400.000.0000
2	Dinas Kesehatan & RSUD	247	96.609.705.915
TOTAL		249	97.009.705.915

Sumber : SIPD-RI , diolah

D. Penanggulangan Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2025 diprioritaskan pada bidang ketenagakerjaan, bidang pendidikan, bidang Kesehatan, infrastruktur dasar, dan bidang ketahanan pangan. Dengan pola tersebut diharapkan mampu menekan angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin khususnya pendidikan dan kesehatan serta kecukupan pangan, serta ketersediaan rumah layak huni. Selain itu, program penanggulangan kemiskinan dapat memberikan dampak penurunan angka *gini ratio* yang masih cenderung meningkat, walaupun secara makro terjadi penurunan angka kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat, diharapkan secara inklusif dapat dinikmati oleh masyarakat miskin dan tidak mampu.

Penguatan data masyarakat miskin by name by adress, tetap menjadi prioritas utama yang akan dilaksanakan melalui dinas sosial melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Adapun perencanaan alokasi anggaran penurunan angka kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
1	Dinas Kesehatan	61	279,881,148,411.00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	111	607,720,000,000.00
3	Dinas Ketahanan Pangan	28	72,900,000,000.00
4	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	9	8,014,000,000.00
5	Dinas Sosial	7	4,006,561,916.00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18	8,000,000,000.00
TOTAL			980,521,710,327.00

Sumber : SIPD-RI , diolah

E. Pembangunan Desa

Peningkatan status Desa merupakan program prioritas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM). Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 tidak memiliki lagi desa dengan kategori tertinggal. Namun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2025 tetap menjadikan desa sebagai subyek pertumbuhan ekonomi melalui penguatan infrastruktur khususnya aksesibilitas antar desa dan penguatan ekonomi desa.

Program unggulan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka penguatan ekonomi desa adalah alokasi 50 juta per RT pertahun serta pemenuhan alokasi ADD sebesar 10 persen sesuai dengan UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun perencanaan alokasi anggaran penguatan desa dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Alokasi Anggaran Penguatan Desa
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
1	BPKAD (Hibah ADD dan 50 Jt Per RT)	1	788.022.738.797
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	8	19.620.618.809
3	Dinas Perumahan & Permukiman	4	549.661.860.000
TOTAL		13	1.357.305.217.606

Sumber : SIPD-RI , diolah

3.b.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Sejak tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah rutin melakukan penyertaan modal pemerintah daerah Kebijakan alokasi anggaran untuk mendanai pengeluaran, khususnya untuk kebijakan penyertaan modal yang biasanya selalu ada di hampir semua pemerintah daerah di Indonesia telah dilakukan selama tiga tahun terakhir oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur seperti yang ditunjukkan oleh tabel di atas. Penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan swasta dapat memberikan dividen atau keuntungan lain yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah. Statistik realisasi pengeluaran pembiayaan dan pertumbuhannya selama tiga tahun terakhir oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2023

Uraian	2020 (Rp. Juta)	2021 (Rp. Juta)	2022 (Rp. Juta)	2023 (Rp. Juta)	Rata-Rata pertumbuhan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.	5.000	39.000	46.500.	233.08%
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0
Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0	0	0	0	0

Adapun mengenai kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga akan memfokuskan pada penambahan penyertaan modal pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi target adalah penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah). Penambahan penyertaan modal ini sudah diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang penambahan

modal yang disertakan oleh pemerintah daerah ke perusahaan daerah air minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur. Isi dari Perda tersebut mencakup detail tentang jumlah penambahan modal, prosedur yang harus diikuti, batasan-batasan yang berlaku, dan juga mekanisme pengawasan atau pelaporan terkait penggunaan modal tersebut. Tujuan dari adanya Perda ini antara lain untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan air minum di Kabupaten Kutai Timur, mendukung pembangunan infrastruktur air minum yang lebih baik, serta memastikan pengelolaan modal dari pemerintah daerah ke perusahaan daerah tersebut dilakukan dengan transparan dan efektif.

3.b.4. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah bertujuan untuk menentukan seluruh kapasitas keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendukung program pembangunan jangka menengah daerah dan prioritas utama, serta alokasi untuk pengeluaran daerah lainnya dan pengeluaran berkala yang bersifat wajib dan mengikat. Pengeluaran ini mencakup beberapa pos utama, seperti gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS), pendidikan, kesehatan, pembayaran utang, dan dana desa. Oleh karena itu, seluruh penerimaan riil kas daerah dikurangi dengan total pengeluaran, termasuk pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Tabel 3.11 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

NO	Uraian	Pagu
1	Belanja Pegawai	2.276.082.827.434
2	Belanja BLUD	117.930.000.000
3	Belanja Operasional Wajib Perangkat Daerah	16.595.328.856
	Total Belanja Wajib dan Mengikat	2.410.608.156.290
4	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.000.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	0
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0
	Pemberian Pinjaman	0

NO	Uraian	Pagu
	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0
	Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000
	Jumlah	2.425.608.156.290

Selanjutnya, untuk sampai pada perkiraan jumlah penerimaan kas daerah secara keseluruhan, prediksi pendapatan daerah harus dihitung. Hal ini akan memungkinkan untuk menentukan kemampuan sebenarnya dari kapasitas keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah.

Tabel 3.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025

No	Uraian	Pagu (Rupiah)
1.	Pendapatan Daerah	8.950.414.286.800
2.	Pencairan Dana Cadangan	0
3.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	0
	Total Penerimaan	8.950.414.286.800
	<i>Dikurangi</i>	
1.	Total Belanja dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	2.503.218.214.681
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	6.447.196.072.119



BAB 4

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah



BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini membahas mengenai perumusan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil capaian kinerja yang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun ke-4 (empat) merupakan hasil dari penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Dalam Penyusunan RKPD Kutai Timur Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021- 2026 agar mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Kutai Timur adalah:

“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

Sebuah kondisi dimana masyarakat Kutai Timur berada dalam keadaan baik, makmur, sehat, damai dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan dasar, maka hal tersebut yang merupakan makna sejahtera dalam visi ini dijabarkan. Selain itu menata untuk semua didefinisikan sebagai kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menciptakan perubahan positif dan lebih produktif dalam mengelola sumber daya agar meningkatkan taraf hidup semua lapisan masyarakat.

Pada visi Kepala Daerah dalam RPJMD 2021-2026 ini dapat diterjemahkan dalam rumusan misi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur, di antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu.
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian.
3. Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi.

5. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Ada Tujuh (7) poin agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2025, yang menjadi prioritas pembangunan nasional tahun 2025 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdayasaing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 mengusung tema ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*** dengan delapan arah kebijakan yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tema pembangunan tahun 2025 sebagai berikut:

“Optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing”

RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun kedua dari RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah. Secara umum, kerangka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur untuk Tahun 2025 dapat di lihat seperti pada Gambar dibawah ini.

RKPD Provinsi Kalimantan Tahun 2025	
Fokus Utama	
I. SDM yang Berdaya Saing	II. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Ketenagakerjaan 4. Pemberdayaan Gender	1. Diversifikasi Ekonomi 2. Inklusifitas Ekonomi 3. Kemiskinan 4. Infrastruktur Wilayah
Fokus Pendukung/Kondisi Perlu	
III. Lingkungan Hidup	IV. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1. Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi GRK 3. Bauran Energi Baru Terbarukan	1. Reformasi Birokrasi 2. ASN BerAKHLAK

Gambar 4.1 Kerangka Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

4.3. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025

Dengan mempedomani kebijakan nasional dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2025, serta memperhatikan hasil evaluasi kinerja serta kondisi saat ini di Kabupaten Kutai Timur, maka terdapat beberapa isu strategis pembangunan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan. Adapun isu-isu strategis tersebut, yaitu:

- a. Capaian investasi melebihi 6 triliun;
- b. Kawasan strategis penyangga IKN;
- c. Potensi Perkebunan sawit;
- d. Potensi produk keunggulan lainnya (tanaman pangan);
- e. KEK MBTK Maloy;
- f. Pelabuhan Kenyamukan sebagai jalur strategis laut.

4.4. Indikator dan Target Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 telah dilakukan evaluasi seperti capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini dan PDRB per Kapita. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota pada tahun 2025. Adapun tujuan pembangunan Kutai Timur pada tahun 2025 yaitu mengakselerasi pertumbuhan industry pengolahan eksisting (terutama agroindustri), pertanian pangan, perkebunan sawit dan pisang, serta mendukung upaya revitalisasi KEK Maloy. Adapun arah kebijakan pembangunan berdasarkan indikator makro Kabupaten Kutai Timur, disampaikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Indikator Makro Arah Kebijakan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Indikator Makro	Target 2025
Indeks Pembangunan Manusia	76,18
Laju Pertumbuhan Ekonomi	8.00
PDRB Perkapita (Juta)	399,6
Tingkat Pengangguran Terbuka	5.30
Tingkat Kemiskinan	7,87
Indeks Gini	0.300

Berdasarkan hasil evaluasi dan penetapan indikator makro pembangunan tersebut, maka perlu strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Kutai Timur yang diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berdampak positif pada pengurangan kesenjangan antar wilayah. Hal ini sejalan dengan tema RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 yaitu: “Pemantapan ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat untuk mendukung daya saing daerah”.

4.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 diperlukan Arah Kebijakan Kewilayahan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Adapun arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Kutai Timur dirumuskan dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan, target sasaran pembangunan daerah, serta sektor potensial dengan mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Adapun arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Arah Kebijakan Kewilayahan dan Lokus Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
1.	Peningkatan Layanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa).• Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin).• Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SD/SMP.• Peningkatan sarana dan prasarana SD/SMP
2.	Peningkatan Layanan Kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama dan rujukan di daerah serta peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan.
3.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah.• Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan• Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
4.	Peningkatan Kapasitas Dalam Kewirausahaan Perempuan	Pendampingan Mencapai Legalitas Kewirausahaan Perempuan
5.	Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata	Pengembangan Destinasi, SDM dan Promosi Sangkulirang – Mangkalihat

No	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
6.	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Koban Bencana Alam dan Sosial
7.	Peningkatan Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan	Pengembangan komoditas Perkebunan rakyat melalui intensifikasi / ekstensifikasi/ peremajaan
8.	Peningkatan Produksi Sektor Peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)
9.	Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)
10.	Peningkatan Produktivitas TPH	Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura (pisang), dan komoditas unggulan lainnya
11.	Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan
12.	Peningkatan Pemanfaatan Biomasa Perkebunan	Pemanfaatan Limbah Sawit Menjadi Bioenergi
13.	Pengembangan Hilirisasi Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pengembangan Tata Kelola KEK MBTK. • Peningkatan Investasi. • Mitra Strategis IKN.
14.	Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
15.	Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan PJUTS. • Pembangunan Biogas
16.	Peningkatan Layanan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Rekonstruksi Jalan Kabupaten • Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mendukung perekonomian • Koordinasi dan upaya peningkatan akses layanan air minum

No	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur penunjang Pelabuhan Kenyamukan • Pengendalian banjir • Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian • Pembangunan jaringan distribusi Listrik • Sinkronisasi Pembangunan infrastruktur terhadap KEK MBTK • Koordinasi dan penyiapan readiness criteria pengelolaan air limbah domestik • Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang. • Mitra Strategis IKN.
17.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS. • Pengelolaan dan penanganan persampahan, terutama sampah laut • Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) • Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup • Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara ambien passive sampler • Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER • Pengendalian KARHUTLA • Rehabilitasi diluar kawasan hutan

4.6. Tujuan dan Sasaran, Pembangunan Kutai Timur 2025 dalam RPJMD 2021-2026

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kutai Timur tahun 2025 adalah:

“Pemantapan ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat untuk mendukung daya saing daerah”

Pada Prinsipnya tema ini selaras dengan tema pembangunan baik nasional maupun provinsi. Tema Pembangunan ini juga selaras dengan RPJPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2006-2025, yaitu: **”Masyarakat dan Wilayah Kutai Timur Tegar dan Stabil”**. Sebuah proses untuk memperkuat fondasi sekaligus mengkokohkan bangunan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan Kabupaten Kutai Timur merupakan Tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada rencana tahunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET CAPAIAN 2025
Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu	Tujuan 1: Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	76.18
	Sasaran 1: Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.44
		2. Tingkat Kemiskinan	9.43
		3. Persentase PAD terhadap pendapatan	7,14

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET CAPAIAN 2025	
	Sasaran 2: Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat (M1.T1.S2)	4. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,20	
		5. Rata - Rata Lama Sekolah	9,55	
	Sasaran 3: Meningkatnya derajat kesehatan (M1.T1.S3)	6. Angka Harapan Hidup	77,45	
	Sasaran 4: Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4)	7. Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	➤ SD= 100 ➤ SMP=96,55	
		8. Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	6	
		9. Penyelenggaraan Festival keagamaan	1	
	Misi 2: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian	Tujuan 2: Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan (M2.T1)	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	10.41
		Sasaran 5: Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/ perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1)	10. Ketersediaan Pangan Utama	45.66
			11. Produksi sektor pertanian	50,630
12. Produksi sektor perkebunan			8,456,662	
13. Produksi perikanan			8,086.36	
Sasaran 6: Meningkatnya Pendapatan Petani (M2.T1.S2)		14. Nilai Tukar Petani (NTP)	109,64	
Tujuan 3: Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat (M2.T2)		Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,19	

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET CAPAIAN 2025
	Sasaran 7: Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah (M2.T2.S1)	15. Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	1.733
		16. Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	836
Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	Tujuan 4: Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)	Indek Pembangunan Desa (IPD)	72,93
		Indeks Gini	0.349
	Sasaran 8: Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah (M3.T1.S1)	17. Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap	54.21
		18. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	31%
	Sasaran 9: Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman) (M3.T1.S2)	19. Capaian Akses Air Minum Layak	53,95
		20. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik	77,38 (aman 2,6%)
		21. Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	93,08
		22. Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan	98,83

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET CAPAIAN 2025
		Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)	
		23. Berkurangnya jumlah unit RTLH	0.24942
		24. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	42,35 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)
	Sasaran 10: Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi (M3.T1.S3)	25. Cakupan Layanan Telekomunikasi	85.48
	Sasaran 11: Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)	26. Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk	56,78
		27. Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk	53,46
	Sasaran 12: Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5)	28. Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,51
		29. Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,02
	Sasaran 13: Meningkatnya Sarana dan Infrastuktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)	30. Jumlah pasar	16
	Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis	Tujuan 5: Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)	Nilai Akuntabilitas Kinerja

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET CAPAIAN 2025
Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi	Sasaran 14: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)	31. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
		32. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60
		33. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98,00
		34. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	50,00
	Tujuan 6: Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,95
Misi 5 : Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Sasaran 15: Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah (M4.T2.S1)	35. Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	62.86
	Tujuan 7: Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.47
	Sasaran 16: Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)	36. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	77.60
	Tujuan 8: Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)	Ketaatan terhadap RTRW	100
	Sasaran 17: Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T2.S1)	37. Jumlah Perkada RDTR	2

4.7. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kutai Timur 2025 dalam RPJMD 2021-2026

Dengan memperhatikan hasil Analisa terhadap dokumen perencanaan yang ada baik dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, serta kondisi pembangunan saat ini, Dalam rangka mendukung program prioritas dan tercapainya visi misi pembangunan, maka disusun strategi dan arah kebijakan tahunan yang mengacu pada RPJMD 2021-2026 sebagaimana penjelasan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD K Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 1: "MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA DAN BERSATU"			
Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu	Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketrampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. • Peningkatan Pendapatan Per-Kapita • Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa • Penguatan Daya Beli Masyarakat akibat Bencana Sosial • Enclave TNK untuk warga Kec Sangatta Selatan dan Teluk Pandan
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat	Peningkatan taraf pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari masyarakat yang tidak mampu melalui BOSDA dan Beasiswa Kutim Tuntas Pemberian Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu • Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik secara merata • Penguatan kelembagaan sekolah melalui peningkatan akreditasi • Pemberian bantuan seragam dan buku sekolah • Pemberian seragam bagi guru negeri dan swasta • Pemberian insentif bagi guru dan tenaga kependidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan • Secara Merata
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas Pelayanan Medis dan Obat-Obatan untuk Sarana Pelayanan Kesehatan • Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS) • Peningkatan insentif tenaga kesehatan • Pemberian secara gratis biaya persalinan bagi keluarga tidak mampu
	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya	Meningkatkan Pengamalan Nilai-Nilai Budaya dan Keagamaan di Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengamalan • Nilai-Nilai Agama dan Budaya Di Lingkungan Pendidikan sebagai Muatan Lokal • Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemuka Agama/ Tokoh Adat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan festival agama, seni dan budaya • Pelestarian benda, situs dan cagar budaya
MISI 2: "MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN"			
Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan	Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/ perkebunan/ perikanan	Penguatan Cadangan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan • Peningkatan Diversifikasi Pangan
		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian/Perkebunan /Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi pertanian/perkebunan/ perikanan • Peningkatan produksi pertanian/perkebunan/ perikanan Pengembangan perikanan tangkap • Pengembangan budidaya pertanian/perkebunan/ perikanan Program peternakan rakyat mandiri • Program replanting kebun kelapa sawit mandiri. • Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
	Meningkatnya Pendapatan Petani	Peningkatan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Keterampilan Petani • Peningkatan Produktivitas Lahan
			<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Teknologi Tepat Guna Pertanian secara bertahap melalui kegiatan peduli Desa. • Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani. • Pengadaan benih dan bibit bagi petani. • Menjaga ketersediaan pupuk dan kestabilan harga hasil petani.

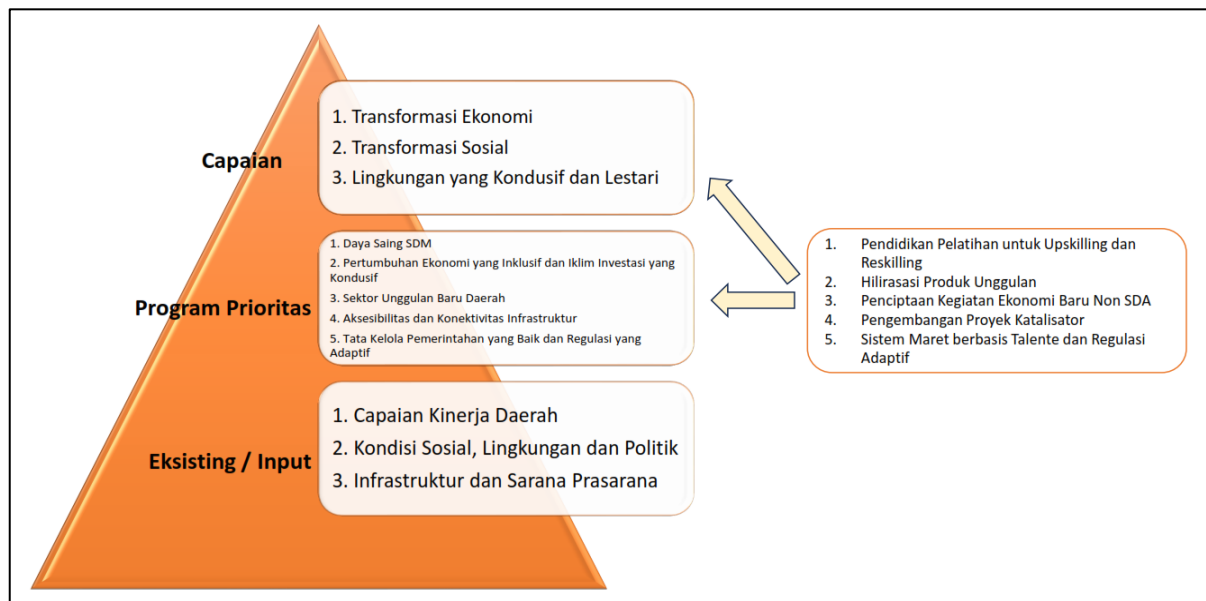
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat	Meningkatnya Kemampuan Perekonomiandi Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi
		Peningkatan Pengembangan Pariwisata, Kewirausahaan, Usaha Kecil Menengah dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Iklim Usaha UMKM/IKM yang kondusif • Pengembangan Kepariwisata di Daerah • Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Kelompok Sadar Wisata • Pemberian bantuan UMKM dan pelatihan keterampilan. • Membangun UKM Center. • Membangun fasilitas dan pengembangan wisata goa, hutan, goa lautan dan gunung.
		Meningkatkan investasi yang berbasis potensi Sumber daya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi di daerah. • Persiapan Sail Sangkulirang . • Penetapan regulasi yang mendukung penyerapan tenaga kerja. • Pembuatan BLK Mandiri. • Penyerapan 50.000 tenaga kerja. • Peningkatan perlindungan buruh.
MISI 3: "MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA"			
Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan • Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan • Pembangunan Infrastruktur Dengan Skema Multi Years
	Meningkat-nya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman)	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan • Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Rumah Layak Huni • Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh • Antisipasi Kebencanaan • Pemberian Bantuan Program 50 JT Per-RT Per-Tahun.
	Meningkat- nya Infrastruktur Teknologi dan Informasi)	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Teknologi dan Informasi	Tersedianya jaringan internet di setiap desa Peningkatan e-Government di Pemerintahan Daerah
	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah
	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Puskesmas dan Jaringan nya. • Pembangunan Rumah sakit di wilayah hulu.
	Meningkatnya Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi	Percepatan Integrasi Pembangunan Ekonomi Desa	Peningkatan Jumlah Pasar
MISI 4 : “MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI”			
Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Efisiensi pada Berbagai Pelayanan Publik berbasis Elektronik/ Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Indeks Kepuasan layanan masyarakat Evaluasi terhadap capaian efektivitas kebijakan. • Peningkatan akuntabilitas Public kapasitas pemerintahan (capacity building). • Peningkatan Kecepatan dan Akurasi Data Kutai Timur. • Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan .

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penelitian dan inovasi daerah • Implementasi 8 Area Perubahan • Penyusunan RPJMD dan RKPD Secara Sistematis dan Terstruktur • Terbukanya akses informasi public
		Peningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peluang bagi pegawai dalam pendidikan, ketrampilan dan keahlian secara optima. • Implementasi 8 Area Perubahan • Penguatan Merit System • Revitalisasi Struktur organisasi yang lincah dan beradaptasi dengan lingkungan perubahan. • Kampanye Program Keluarga Berencana
Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas	Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pembangunan wilayah	Peningkatan kemampuan system dan aplikasi antar instansi terkait untuksaling berkomunikasi dalam menghasilkan data dan layanan	Peningkatan e-Government di Pemerintahan Daerah
MISI 5 : “MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”			
Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal	Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan • Peningkatan kualitas layanan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			menunjang sektor pariwisata. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengelolaan Sampah.
Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kuantitas dan kualitas detail perencanaan ruang • Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang

Dalam rangka mendukung dan merealisasikan program-program prioritas pada RKPD 2025 Kabupaten Kutai Timur sebagaimana strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka diperlukan strategi makro spesifik yang akurat dan fokus terhadap pembangunan.



Gambar 4.2 Design Strategi dan Program Prioritas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Mengacu pada hasil evaluasi terhadap kondisi, tantangan dan peluang, menyelaraskan dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi serta mengakomodir cara pandang terhadap pembangunan dan strategi serta pendekatan

pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat 5 strategis makro pembangunan untuk dilakukan dalam rangka Pembangunan Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2025. Adapun 5 program strategis disampaikan, sebagai berikut:

4.7.1. Program Pendidikan Pelatihan untuk *Upskilling* dan *Reskilling*

Selain pendidikan formal di bangku sekolah dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM untuk memiliki daya saing juga dibutuhkan pendidikan non formal yakni pendidikan pelatihan untuk *upskilling* dan *reskilling*. Baik *upskilling* maupun *reskilling* adalah hal yang cukup penting bagi peningkatan kapasitas untuk daya saing SDM di Kabupaten Kutai Timur karena beberapa alasan yaitu: untuk mengikuti perkembangan teknologi, mengantisipasi perubahan yang ada, meningkatnya daya saing dengan daerah lain, memperluas peluang karir dan meningkatkan produktivitas. *Upskilling* bagi SDM di Kabupaten Kutai Timur merujuk pada proses mengembangkan atau meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki oleh mereka. Proses ini melibatkan perolehan pengetahuan dan keterampilan baru yang relevan dengan pekerjaan atau industri tertentu di Kabupaten Kutai Timur. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi SDM di Kabupaten Kutai Timur sesuai perannya atau untuk mempersiapkan menghadapi perubahan dalam lingkungan kerja yang terus berkembang. Selanjutnya *reskilling*. *Reskilling* bagi SDM di Kabupaten Kutai Timur merujuk pada proses mengembangkan keterampilan baru atau mengubah arah karier dengan memperoleh keterampilan yang berbeda dari yang telah dimiliki sebelumnya. *Reskilling* melibatkan proses mempelajari dan menguasai keterampilan baru yang diperlukan untuk berpindah ke pekerjaan atau industri berbeda.

4.7.2. Hilirisasi Produk Keunggulan Baru

Dengan potensi keunggulan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur, maka diperlukan program hilirisasi untuk mempercepat agenda transformasi ekonomi dan penciptaan sektor-sektor keunggulan baru selain pertambangan. Dengan hilirisasi yang dilakukan terhadap produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur, maka produk yang tadinya hanya bahan baku akan menjadi barang siap pakai. Dengan begitu, maka program hilirisasi dengan mengelola komoditas dari bidang industri tertentu bertujuan mengoptimalkan produk yang bernilai tinggi yang dimiliki

oleh Kabupaten Kutai Timur. Fungsi lain dari program hilirisasi sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten Kutai Timur adalah a) meningkatkan nilai rantai pasok industri; b) menyelamatkan komoditas dari gejolak harga, c) mempercepat puncak pohon industri, dan d) mendukung kekuatan industri yang dimiliki daerah. Dengan optimalisasi sektor-sektor unggulan non tambang dengan program hilirisasi, maka ketergantungan akan hasil sumber daya alam tambang yang beberapa resiko jangka panjang maka akan berkurang. Adapun hilirisasi non tambang yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Hilirisasi produk unggulan dari sektor kelapa sawit dan hasil hutan lainnya.

Hilirisasi sektor kelapa sawit dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas, penunjang kegiatan hilir seperti oleofood, oleokimia dan biofuel, penciptaan ekosistem, tata kelola, *capacity building* dan pengembangan teknologi untuk pengembangan usaha kelapa sawit. Selanjutnya Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi krusial sebagai upaya peningkatan produktivitas dan penguatan Sumber Daya Manusia, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya diperlukan hilirisasi industri hasil hutan lainnya yang ada karena potensi hutan di Kutai Timur sangat luar biasa besar dan dapat memberikan dampak perekonomian untuk daerah maupun nasional.

b. Hilirisasi produk hasil kelautan dan perikanan.

Hilirisasi perikanan adalah upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan menjadi produk turunan lain di Kabupaten Kutai Timur. Sebagai contoh produk perikanan tangkap dan budidaya yang dapat diolah menjadi ikan fillet, tepung ikan, susu ikan, dan ekstrak ikan. Program hilirisasi perikanan memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian nasional melalui peningkatan harga produk, pengembangan industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja dan adopsi teknologi, serta mendukung ketahanan pangan. Terdapat strategi hilirisasi diperlukan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor perikanan dan kelautan, yaitu: (i) Pertama, penyelarasan dan harmonisasi peraturan-peraturan yang ada sehingga lebih efektif dan efisien baik antar lembaga, kementerian dan daerah; (ii) Kedua, membangun sistem logistik ikan nasional. Ketiga, memperbanyak industri pengolahan perikanan; (iii) Keempat,

mempermudah skema pendanaan untuk produksi dan pengolahan perikanan. Kelima, memperpendek jalur distribusi dari UPI ke konsumen akhir untuk efisiensi biaya logistic; (iv) memperbanyak penjualan produk frozen ke pasar ritel; (v) mendorong industri untuk membuat produk yang mudah dimasak di rumah.

Apabila program hilirasi sektor non tambang ini berhasil, maka keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur tidak akan tergantung pada tambang lagi yang memiliki batasnya dan program hilirasi yang dilakukan akan berdampak positif bagi kelestarian lingkungan.

4.7.3. Penciptaan Kegiatan Ekonomi Baru Non SDA

Fokus pada pengembangan ekonomi Non SDA ini secara struktur rancang bangun pembangunan tidak hanya mempengaruhi aspek fundamental suatu daerah (input) tetapi juga aspek tata kelola dan capaian dari pembangunan itu sendiri. Dimana capaian pembangunan ini tidak hanya baik secara ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan.

Beberapa langkah strategis dalam menyokong kegiatan ekonomi non-SDA yang potensial di Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

1. Pembentukan BUMD
2. Pengembangan UMKM
3. Penguatan sektor agroindustri
4. Pelaksanaan *cultural event* (festival)
5. Pengembangan sektor wisata dan Pendidikan

Salah satu hal krusial yang perlu dilakukan dalam mendukung kegiatan ekonomi non-SDA ini adalah system pembiayaan dan investasi. Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan dan investasi ini juga terdapat beberapa sumber dana potensial diantaranya penyisihan dana bagi hasil SDA untuk pengembangan BUMD yang bergerak dibidang pembiayaan usaha (*Venture Capital*) atau penanaman modal langsung yang dilakukan pemerintah daerah; investor luar daerah (provinsi dan nasional) dan internasional. Untuk mendukung kelancaran proses ini maka dapat dikombinasikan dengan program-program utama dan strategis lainnya di tahun 2025

dengan menggunakan pendekatan *catalysator strategy* dan *soft power strategy* seperti yang dijelaskan sebelumnya.

4.7.4. Pengembangan Proyek Katalisator

Seperti telah dijelaskan di bagian sebelumnya terdapat 2 (dua) program atau agenda potensial yang dapat dijadikan katalisator pembangunan untuk mengkokohkan struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur. Ketiga program tersebut dapat dijadikan sebagai agenda utama pembangunan dan ekonomi Kutai Timur di tahun 2025. Dua agenda tersebut adalah:

b. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Salah satu agenda yang perlu mendapatkan perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah agenda KEK Maloy. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan KIPi Maloy yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perlu didukung dengan alasan yang sangat mendasar dan strategis. Sebagaimana diketahui Lokasi KIPi Maloy pada jalur ALKI II, tidak saja menjadikan Maloy sebagai salah satu jalur bebas internasional yang menghubungkan bagian Utara dan Selatan Indonesia, tetapi juga berpotensi besar menjadi *Hub Port* untuk publik Asia Timur serta akan menjadi pusat/sentra pengolahan *oleochemical* berskala internasional, mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier).

Kondisi strategis ini tentunya berpotensi untuk menjadi sentra yang dapat menarik proses pembangunan di sekitarnya, tidak hanya dalam artian pembangunan infrastruktur tetapi juga pembangunan ekonomi sosial dan budaya. Munculnya secara otomatis kegiatan-kegiatan pendukung yang ada disekitar merupakan efek dari KEK Maloy yang sudah beroperasi. Selain itu hal ini juga akan memberikan peluang untuk pengembangan sektor ekonomi lain termasuk pengembangan kegiatan ekonomi non-SDA yang dibahas sebelumnya. Ditambah lagi KEK Maloy merupakan agenda yang sangat potensial untuk dapat dijual dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Kutai Timur.

Sehingga pengembangan dan percepatan operasionalisasi KEK Maloy ini sangat strategis dijadikan agenda utama pemerintah Kabupaten Kutai Timur

tahun 2025 sesuai dengan fungsi dan wewenang yang dimilikinya dalam pengembangan Kawasan ini.

c. Percepatan dan Optimalisasi Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan

Percepatan dan optimalisasi pembangunan publik Kenyamukan merupakan agenda kedua yang dapat dijadikan program katalisator penguatan struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Pelabuhan Kenyamukan menempati posisi sangat strategis karena berada pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Wilayah Kutim yang berada di posisi sangat strategis dan berdekatan dengan selat Makassar memiliki kedalaman laut hingga 50 meter. Hal itu bukan tidak mungkin dijadikan sebagai jalur lalu lintas kapal yang tidak bisa dideteksi oleh pertahanan Indonesia di laut. Posisi ini jelas berpotensi sebagai daya dukung pertahanan Negara. Selain posisi strategis bagi pertahanan negara. Pelabuhan Kenyamukan tentunya juga mampu berkontribusi menopang perekonomian daerah apabila dikelola dengan baik. Apalagi semenjak tahun 2019, pemerintah pusat telah menyetujui penyerahan jalur *causeway* Pelabuhan Laut Kenyamukan yang terletak di Kecamatan Sangatta Utara kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Harapannya keberadaan Pelabuhan Kenyamukan ini memberi nilai lebih bagi struktur ekonomi dan pembangunan Kabupaten Kutai Timur, ditambah lagi dengan posisi Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah penyangga IKN. Oleh sebab itu menjadikan agenda ini sebagai katalisator tidak hanya memberikan manfaat di level publik tetapi juga nasional dan global. Kemudian tidak hanya memiliki nilai strategis secara ekonomi tetapi juga secara sosial, politik dan pertahanan. Dengan menjadikan Kenyamukan sebagai agenda katalisator maka juga akan memberikan efek domino terhadap kegiatan dan agenda lain sama halnya dengan agenda KEK Maloy. Beberapa program yang merasakan dampak dari percepatan kenyamukan ini adalah pengembangan usaha ekonomi/produk, ekspansi produk dan mobilitas transportasi terutama transportasi publik.

Kedua agenda katalisator di atas jika ditelisik lebih mendalam maka menunjukkan hubungan saling keterkaitan, saling mendukung, dan potensial

untuk diintegrasikan. Sehingga dalam perencanaan dan pengaplikasian juga sangat baik untuk dikoordinasikan.

4.7.5. Membangun Sistem Merit berbasis Manajemen Talenta dan Menciptakan Regulasi yang Adaptif

Upaya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan system merit berbasis manajemen talenta. Dengan terbangunnya sistem merit maka akan didapatkan sistem birokrasi dan SDM yang sesuai kebutuhan dan kualifikasi serta kompetensinya. Selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi para pegawai dan pemimpin dalam birokrasi melalui manajemen talenta yang merupakan pengelolaan aparatur sipil negara untuk memperoleh talenta yang diprioritaskan dalam menduduki jabatan tertentu. Adapun strategi program / langkah yang dapat dilakukan dalam penerapan sistem merit dan manajemen talenta di Kabupaten Kutai Timur yaitu:

- a. Perencanaan kebutuhan ASN;
- b. Pengadaan pegawai secara terbuka dan kompetitif;
- c. Pengembangan karir melalui manajemen talenta;
- d. Promosi dan mutasi secara terbuka berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja;
- e. Sistem informasi manajemen ASN;
- f. Perlindungan dan pelayanan pegawai;
- g. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin pegawai yang berjalan dengan baik;
- h. Manajemen kinerja yang berjalan secara objektif.

Dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dengan didukung SDM birokrasi yang berkualitas, maka roda birokrasi akan berjalan dengan cepat dan dinamis dalam membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya dengan regulasi yang adaptif akan menarik investor masuk dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Kutai Timur. Semakin banyak investor, maka semakin dapat menggejut pembangunan yang ada dan memiliki dampak percepatan pertumbuhan perekonomian terutama selain dari sektor tambang.

Kelima strategi dalam program prioritas pembangunan ini juga sudah disesuaikan dengan tema pembangunan Kutai Timur tahun 2025 yaitu untuk menguatkan struktur ekonomi.

Selanjutnya perlu dilakukan pemetaan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja tujuan dan sasaran, program prioritas, indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas, target kinerja program serta pagu anggaran program prioritas dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 Penjabaran Prioritas Pembangunan Dalam Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	537.326.666.856,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	25.200.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	100.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	549.661.860.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	5.337.000.000,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH >10 ha	500.000.000,00
2.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah PBS / Koperasi yang dimoitor dan di evaluasi Izinnya	662.641.200,00
3.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penurunan Indeks Resiko Bencana	13.499.999.999,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	18.390.437.067,00
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Capaian Akreditasi FKTP Angka Usia Harapan Hidup	7.750.000.000,00
5.	Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Usia Harapan Hidup Capaian Akreditasi FKTP	230.701.705.915,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
	Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)Rasio ketersediaan SD/ MI per pendudukRasio ketersediaan SMP/ MTS per pendudukAngka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 Tahun Pendidikan DasarRata - Rata Lama SekolahAngka Partisipasi Sekolah(APS) Usia 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	582.324.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Angka Harapan Hidup Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.050.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	1.092.781.416.727,00	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Angka Usia Harapan Hidup Capaian Akreditasi FKTP	650.000.000,00	
6.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	333.073.000,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
7.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Kecamatan Kombeng	143.327.130,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Busang	401.296.652,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Rantau Pulung	234.796.280,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	9.681.663.875,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	205.385.900,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	364.169.260,00

4.8. Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

4.8.1. Mekanisme Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Kutai Timur sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2025 meliputi aspek pelayanan publik dan infrastruktur yang mengarah kepada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun Penyampaian Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) dan Aspirasi Reses (Pokir). Usulan list Aspirasi Langsung (Masyarakat) dan Aspirasi Reses (Pokir) yang disampaikan disusun berdasarkan data dan informasi yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui tautan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah daerah.

4.8.2. Mekanisme Kamus Usulan

Kamus usulan merupakan pilihan usulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu usulan oleh masyarakat/lembaga atau usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan disediakan dalam aplikasi SIPD, yang dibuat berdasarkan Program Prioritas Pembangunan. Adapun proses penyusunan kamus usulan pada tahun 2025, disampaikan sebagai berikut:

1. Analisis Potensi Daerah Berbasis Kewilayahan: Menggali informasi dan Pengumpulan data potensi di seluruh desa/ kelurahan.
2. Verifikasi dan validasi Data Analisis Potensi Daerah Berbasis Kewilayahan
3. Sinkronisasi hasil Analisis Potensi Daerah Berbasis Kewilayahan dengan Tema Pembangunan Tahun 2025, Program Prioritas Pembangunan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kab. Kutai Timur 2021-2026.
4. Perumusan Kamus Usulan: Bappeda dan Perangkat Daerah terkait menyusun kamus usulan dengan berbasis kewilayahan dan *readiness criteria*, Jumlah kamus usulan sebanyak 415 terbagi atas Bidang Ekonomi dan SDA, Bidang

Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam rangka penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 melalui SIPD-RI, maka dapat diuraikan berdasarkan kelompok kamus usulan sebagai berikut :

Tabel 4.6 Hasil penginputan Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

NO	KAMUS USULAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH USULAN	PAGU DANA (Rp.)
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	400,000,000
2	Perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kepemudaan/Organisasi Kepemudaan/Wirausaha Pemuda/Wirausaha Pemula		2	600,000,000
3	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	500,000,000
4	Pengadaan Penunjang Gizi untuk Penanganan Gizi Buruk dan Stunting		1	20,000,000,000
5	Pembangunan Lantai Jemur	Dinas Ketahanan Pangan	1	400,000,000
6	Bantuan sarana dan prasarana, dan pemasaran produk hasil UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	195,000,000
7	Pelatihan peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku UMKM		1	100,000,000
8	Pengadaan Motor Roda Tiga Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	2	470,000,000
9	Mesin Pencacah Pilah dan Rumah Kompos			50,000,000
10	Pembangunan Kios Cinderamata	Dinas Pariwisata	1	200,000,000
11	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)/Jalan Setapak Penunjang Sarana Wisata		1	200,000,000
12	Pembuatan Spot Photo Penunjang Sarana Wisata		1	200,000,000
13	Pembuatan Taman Rekreasi Penunjang Sarana Wisata		1	200,000,000

NO	KAMUS USULAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH USULAN	PAGU DANA (Rp.)
14	Pembangunan Gazebo Penunjang Sarana Wisata		1	200,000,000
15	Pembuatan Tempat Parkir Penunjang Sarana Wisata		1	200,000,000
16	Pembuatan MCK Kawasan Objek Wisata		1	200,000,000
17	Pembuatan Peturasan Umum (Tempat Pembilasan Badan) Kawasan Objek Wisata		1	200,000,000
18	Pelatihan Fotografi		1	100,000,000
19	Pelatihan Desain Grafis		1	100,000,000
20	Festival Sangkulirang		1	3,000,000,000
21	Festival Sekerat		1	3,000,000,000
22	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa		1	400,000,000
23	Normalisasi/Restorasi Sung		3	1,900,000,000
24	Pembangunan BPU		2	3,500,000,000
25	Pembangunan Bronjong/ Turap		6	5,900,000,000
26	Pembangunan Drainase Perkotaan		3	5,000,000,000
27	Pembangunan Embung, Waduk, Situ		2	4,000,000,000
28	Pembangunan Jembatan		8	9,200,000,000
29	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	2,000,000,000
30	Pembangunan Sumur Bor		1	200,000,000
31	Peningkatan Kualitas Badan Jalan Kabupaten (Tanah menjadi Agregat, Agregat menjadi Aspal/Beton)		4	4,000,000,000
32	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan		1	300,000,000
33	Perbaikan Prasarana Tempat/Rumah Ibadah		11	8,800,000,000
34	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		2	1,000,000,000
35	Melaksanakan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	5,000,000,000

NO	KAMUS USULAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH USULAN	PAGU DANA (Rp.)
36	Pelatihan peningkatan keterampilan pelaku usaha perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	550,000,000
37	Musholla dan Pagar Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	3,900,000,000
38	Pagar, Toilet, UKS Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		2	900,000,000
39	Pagar, toilet, UKS, Pembuatan Halaman, Area Bermain PAUD		10	4,200,000,000
40	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (SD)		1	440,000,000
41	Pembangunan Laboratorium Sekolah Menengah Pertama (SMP)		2	1,400,000,000
42	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar (SD)		4	1,850,000,000
43	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)		2	1,210,000,000
44	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		1	300,000,000
45	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU PAUD		1	400,000,000
46	Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD		9	4,000,000,000
47	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar (SD)		5	8,000,000,000
48	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP)		1	1,620,000,000
49	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Sekolah Menengah Pertama (SMP)		1	700,000,000
50	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Dasar (SD)		2	600,000,000
51	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dasar (SD)		4	2,400,000,000
52	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Menengah Pertama (SMP)		3	1,700,000,000
53	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar (SD)		13	6,500,000,000

NO	KAMUS USULAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH USULAN	PAGU DANA (Rp.)
54	Pendampingan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP), PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1	1,300,000,000
55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		5	1,000,000,000
56	Pengadaan Mebel PAUD		3	600,000,000
57	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		1	200,000,000
58	Rehab Pagar, toilet, UKS,Pembuatan Halaman, Area Bermain PAUD		2	700,000,000
59	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		3	950,000,000
60	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar (SD)		4	1,900,000,000
61	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP)		4	2,500,000,000
62	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Menengah Pertama (SMP)		2	1,200,000,000
63	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar (SD)		1	500,000,000
64	Bimtek / Sosialisasi Program Bangga Kencana tingkat Desa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1,500,000,000
65	Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Dinas Perhubungan	1	1,000,000,000
66	Pengadaan Kolam Terpal untuk perikanan	Dinas Perikanan	1	300,000,000
67	Pengadaan Mesin atau Alat Produksi Kelompok IKM Komoditi Makanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	600,000,000
68	Pengadaan alat dan mesin pasca panen dan pengolahan komoditi perkebunan	Dinas Perkebunan	1	200,000,000

NO	KAMUS USULAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH USULAN	PAGU DANA (Rp.)
69	Pembangunan Drainase Perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	4,980,000,000
70	Pembangunan Jembatan		1	600,000,000
71	Penimbunan tanah urug/ batu Jalan Lingkungan Permukiman		10	10,815,000,000
72	Peningkatan Jembatan / gorong-gorong Dalam Kawasan Permukiman		1	475,000,000
73	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan		1	950,000,000
74	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan		2	1,900,000,000
75	Rehabilitasi jalan dengan tanah urug/ batu Jalan Lingkungan Permukiman		2	1,540,000,000
76	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman		34	31,777,500,000
77	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman		94	120,477,500,000
78	Alat dan mesin Roda Tiga dan gerobak Dorong untuk Tanaman hortikultura (Sayuran dan Buah)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	2	140,000,000
79	Bibit Tanaman Hortikultura dan Sarana produksi Cultivator, Roda tiga, gerobak dorong)		2	390,000,000
80	Pembuatan Embung Pertanian		1	200,000,000
81	Pengadaan Ternak sapi		2	675,000,000
82	Pengadaan bibit Ternak kambing		1	200,000,000
83	Pengadaan Pupuk, Cultivator, Rotari, Handsprayer untuk Tanaman Hortikultura (Sayuran dan Buah)		11	1,045,000,000
84	Penyediaan Sarana Pendukung aktivitas Pertanian lainnya (Cetak Sawah)		1	1,000,000,000
85	Penyediaan Sarana Pendukung Peternakan (Kandang dan pagar)		2	1,000,000,000
86	Pelatihan Individu Berdasarkan Klaster Kompetensi Bagi Pencari Kerja di BLK/LPK		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3
GRAND TOTAL			348	317,500,000,000



BAB 5

Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah



BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RPJPD Kabupaten Kutai Timur. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kutai Timur 2025 disusun dalam rangka pencapaian indikator kinerja pada Tahun 2024 dan visi misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Dokumen RKPD ini juga memuat program dan kegiatan prioritas disertai pagu indikatif. Sebagai bentuk konsistensi dan keterkaitan dengan pembangunan provinsi dan nasional, maka RKPD ini mengacu kepada RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RKP Nasional.

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (**output**) kegiatan maupun keluaran program (**outcome**), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan prioritas urusan pembangunan, maka kerangka pendanaan daerah dijabarkan pada urusan yang terdiri atas:

Tabel 5.1 Urusan Pembangunan

Unsur Wajib Dasar	<ul style="list-style-type: none">• Pendidikan;• Kesehatan;• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;• Perumahan dan Kawasan Pemukiman;• Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan• Sosial.
Unsur Wajib Non Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none">• Tenaga Kerja;• Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;• Pangan;• Pertanahan;

	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan Hidup; • Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; • Pemberdayaan Masyarakat Desa; • Pengendalian Penduduk; • Perhubungan; • Komunikasi dan Informatika • Koperasi dan UKM; • Penanaman Modal; • Kepemudaan dan Olahraga; • Statistik; • Persandian; • Kebudayaan; • Perpustakaan; dan • Kearsipan.
Unsur Pilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan; • Pariwisata; • Pertanian; • Perdagangan; • Perindustrian; dan • Transmigrasi
Unsur Pendukung Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Daerah • Sekretaris DPRD
Unsur Penunjang Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan; • Keuangan; • Kepegawaian; • Pendidikan dan Pelatihan; dan
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektorat
Urusan Kewilayahan	Kecamatan
Unsur Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik

5.2 Rekapitulasi Pagu Indikatif

Tabel 5.2 menyajikan rekapitulasi pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah tahun 2025. Dari tabel tersebut bisa dilihat, besaran pagu indikatif dan jumlah dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan masing masing OPD dilingkungan Kabupaten Kutai Timur dengan Rincian Rencana Kerja berbasis Rincian Belanja sebagaimana lampiran 1.

Tabel 5.2 Tabel Rekapitulasi Pagu Indikatif
Berdasarkan Perangkat Daerah Pada RKPD Kab. Kutai Timur Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	14	63	53,446,109,851
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	55	34,130,495,036
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	58	31,990,437,066
4	Badan Pendapatan Daerah	2	9	43	77,278,006,936
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	12	60	1,223,791,257,807
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	15	57	52,054,461,783
7	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	11	36	14,171,550,428
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	15	43	259,918,371,199
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	18	37	36,379,594,223
10	Dinas Kesehatan	5	20	532	525,110,841,003
11	Dinas Ketahanan Pangan	5	16	66	98,835,012,001
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	12	50	102,101,849,082
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	7	13	34	43,284,230,130
14	Dinas Lingkungan Hidup	11	20	62	54,526,250,654
15	Dinas Pariwisata	5	17	87	99,165,665,416
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	26	166	1,495,392,709,929
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	13	51	57,557,163,071
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	12	54	46,018,797,292
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	23	49	33,009,377,709
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6	14	44	32,160,587,855

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	23	181	1,549,808,495,399
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	15	49	29,162,428,702
23	Dinas Perhubungan	3	19	58	80,415,266,463
24	Dinas Perikanan	5	21	57	63,063,941,035
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	20	91	77,659,379,875
26	Dinas Perkebunan	6	15	41	45,736,076,636
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	18	65	52,709,598,433
28	Dinas Pertanahan	5	12	24	21,269,117,581
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	16	50	1,151,292,595,803
30	Dinas Sosial	6	17	80	25,625,430,849
31	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5	20	58	155,257,115,726
32	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7	20	69	81,378,051,366
33	Inspektorat	3	12	58	64,043,426,527
34	Kantor Camat Batu Ampar	6	17	42	8,883,787,662
35	Kantor Camat Bengalon	6	16	34	13,119,612,875
36	Kantor Camat Busang	6	18	47	8,980,137,464
37	Kantor Camat Kaliorang	6	18	44	8,923,223,697
38	Kantor Camat Karang	6	18	42	7,475,753,166
39	Kantor Camat Kaubun	6	18	43	8,456,727,740
40	Kantor Camat Kombeng	6	18	41	11,305,529,299
41	Kantor Camat Long Mesangat	6	17	37	10,931,208,682
42	Kantor Camat Muara Ancalong	6	16	49	12,807,574,815
43	Kantor Camat Muara Bengkal	6	17	36	14,995,091,050
44	Kantor Camat Muara Wahau	6	17	39	12,419,363,784
45	Kantor Camat Rantau Pulung	6	18	37	7,807,588,612
46	Kantor Camat Sandaran	6	17	39	8,256,683,634

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)
47	Kantor Camat Sangatta Selatan	6	17	53	20,562,700,963
48	Kantor Camat Sangatta Utara	6	18	53	24,746,037,794
49	Kantor Camat Sangkulirang	6	17	48	10,356,566,208
50	Kantor Camat Telen	6	17	39	10,245,222,219
51	Kantor Camat Teluk Pandan	6	17	41	11,263,544,910
52	Satuan Polisi Pamong Praja	2	11	39	53,723,633,688
53	Sekretariat Daerah	3	20	79	525,640,622,546
54	Sekretariat DPRD	2	18	90	152,108,547,151
55	RSUD Kudungga	2	13	37	224,661,435,975
TOTAL		291	906	3537	8,935,414,286,800

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 mendukung Program Prioritas Nasional yang termuat dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Adapun rincian Pagu yang dialokasikan oleh Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dalam Rangka mendukung masing masing Prioritas Nasional di disajikan pada Tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3 Tabel Rekapitulasi Alokasi Pagu RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 yang Mendukung Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Pagu (Rp.)
1	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	429,448,492,953.00
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	399,506,230.00
3	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	21,718,837,066.00

No	Prioritas Nasional	Pagu (Rp.)
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1,696,234,051,234.00
5	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	333,073,000.00
6	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10,403,009,510.00
Jumlah		2,158,536,969,993.00

Selanjutnya dalam Rangka Pendekatan akomodatif dalam perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan penerimaan dan integrasi usulan pembangunan dari masyarakat serta masukan dari berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD-RI) memberikan kesempatan kepada Masyarakat/ Lembaga untuk menyampaikan usulan dalam bentuk Hibah dan Bantuan Sosial. Adapun Jumlah Usulan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur dalam Bentuk Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2025 disajikan pada Tabel 5.4 dan secara rinci terlampir dalam Lampiran 2.

Tabel 5. 4 Tabel Rekapitulasi Usulan Hibah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No	Kamus Usulan Hibah	Pagu (Rp.)	Jumlah Lembaga Pengusul
1	Bantuan Hibah FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Daerah)	1,000,000,000	1
2	Bantuan Hibah FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	500,000,000	1
3	Bantuan Hibah FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)	500,000,000	1
4	Bantuan Sosial Terencana kepada Kelompok Masyarakat (Panti Jompo, Panti Asuhan)	30,000,000	1
5	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Yayasan	57,820,000,000	53

No	Kamus Usulan Hibah	Pagu (Rp.)	Jumlah Lembaga Pengusul
6	Hibah kepada Instansi Vertikal (Hibah dalam Bentuk Uang)	44,000,000,000	2
7	Hibah kepada Majelis Taklim, Gereja, TK/TPA, Masjid (Hibah dalam bentuk Uang)	100,000,000	1
8	Hibah Kepada Sekolah swasta (Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sekolah PAUD)	100,000,000	1
9	HIBAH Organisasi Keolahragaan (Uang)	35,500,000,000	2
10	HIBAH Organisasi Kepemudaan (Uang)	900,000,000	5
11	HIBAH Organisasi Kepramukaan (Uang)	1,700,000,000	1
12	HIBAH Organisasi Olahraga rekreasi (Uang)	1,000,000,000	2
13	Pengembangan Organisasi Keolahragaan.	100,000,000	1
Jumlah		143,250,000,000.00	72



BAB 6

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan indikator kinerja RKPD. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

6.1. Indikator Kinerja Utama Pembangunan

Indikator kinerja utama (IKU) memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dalam membangun Provinsi Kalimantan Timur. Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Pencapaian Indikator Kinerja Utama didorong oleh pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah dengan melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan.

Ada beberapa aspek untuk mengukur Indikator Kinerja Utama yaitu: melihat progress capaian dari (1) Indeks Pembangunan Manusia; (2) Laju Pertumbuhan Ekonomi; (3) PDRB Perkapita; (4) Tingkat Pengangguran Terbuka; (5) Tingkat Kemiskinan; (6) Indeks Gini.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kutai Timur 2025

No	Indikator Makro	Satuan	Indikasi Target 2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	76,18
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	8.00
3.	PDRB Perkapita (Juta)	Persen	399,6
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.30
5.	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,87
6.	Indeks Gini	Poin	0.300

6.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada sisi lainnya, indikator kinerja daerah ditetapkan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada tahun rencana dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator tingkat sasaran (*dampak/impact*) dan *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun. Guna kepentingan evaluasi pembangunan, indikator kinerja daerah merupakan alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) dari kegiatan (*output/keluaran*). Selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil (*outcomes*) lebih utama daripada sekedar keluaran (*output*), karena hasil (*outcomes*) menggambarkan Tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mencakup kepentingan banyak pihak.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah disusun untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian, indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja daerah dalam RKPD tahun 2025 merupakan target Bupati/Wakil Bupati periode terakhir dari pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 yang harus diwujudkan dan didukung Perangkat Daerah.

Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga untuk kesinambungan dan evaluasi pencapaian target, maka ditetapkan target tahunan. Memperhatikan kondisi tersebut, indikator kinerja daerah memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: (a) aspek kesejahteraan masyarakat, (b) aspek pelayanan umum, dan (c) aspek daya saing daerah.

Salah satu aspek kesejahteraan masyarakat yang diukur adalah indikator makro. Indikator makro merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial. Indikator-indikator tersebut seperti: (i) Pertumbuhan PDRB; (ii) Inflasi, (iii) IPM; (iv) Indeks Kesenjangan Wilayah; (v) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); (vi) Kontribusi beberapa sektor terhadap PDRB; serta beberapa indikator lainnya.

Sementara itu, aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. Indikator kinerja aspek pelayanan umum tersaji dalam indikator kinerja per kelompok urusan pemerintah daerah yang meliputi (i) urusan wajib pelayanan dasar, (ii) urusan wajib non pelayanan dasar, dan (iii) urusan pilihan dan urusan penunjang. Tidak kalah pentingnya adalah kinerja aspek daya saing daerah. Indikator ini merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang meningkat dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain (i) produktivitas total daerah, (ii) fasilitas infrastruktur wilayah, (iii) pelayanan investasi, dan (iv) penguatan sumberdaya manusia. Penentuan indikator kinerja RKP dengan sejumlah target tertentu bukanlah perkara mudah. Hal ini, dipengaruhi keterpaduan capaian program dan sasaran tertentu yang dilaksanakan Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah. Selain itu, penyusunan capaian indikator bersifat timbal balik, dimana meski menjadi acuan Perangkat Daerah tetapi penentuan indikator kinerja RKPD juga memperhatikan kemampuan sumberdaya aparatur, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat, serta dinamika tantangan dan hambatan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penetapan indikator kinerja daerah pada RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Kunci

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target RKPD 2025
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,33	75,64	76.00
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,93	5,56	5.30
3	Tingkat Kemiskinan	%	9,06	8,72	7,87
4	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	10,65	7,05	10,66
5	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	9,45	9,45	9,55
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,57	76,64	76,67
7	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	-	10,11	10,41
8	Indek Pembangunan Desa (IPD)	Indeks	65,74*	71,32	72,93
9	Indek Gini	Indeks	0,336	0,3	0.300
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,30	75,93	83,00
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	7,71	5,0	8.00
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	102,31	108,55	109.648
3.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan	Juta Rp	229,77	-	230
4.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rp	369,42	-	399,6
C	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,01	13,10	13,20
2	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	SD: 100 SMP:100	ØSD= 100 ØSMP= 95,40	SD= 100 SMP= 99,53
3	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Kegiatan	7	6	6
4	Penyelenggaraan Festival keagamaan	Kegiatan	0	1	1
5	Ketersediaan Pangan Utama	%	32,77	45,16	45,66
6	Produksi sektor pertanian	Ton	37,298	46,765	50.630
7	Produksi sektor perkebunan	Ton	6.366.882	7.956.662	6.200.000
8	Produksi perikanan	Ton	8485	8.086,11	8.086,36
9	Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	unit	-	1,62	1,733
10	Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	3,854	796	4.000
11	Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap	%	27,93	53,72	53,72

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target RKPD 2025
12	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	23	26,051	31
13	Capaian Akses Air Minum Layak	%	58,10	53,90	53,95
14	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik	%	5,47	77,08 (aman 2,03%)	77,38 (aman 1,49%)
15	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	%	82,58	90,75	93,08
16	Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)	%	73,35	98,83	98,83
17	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	0,24	0,2493	0,24942
18	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	23	24,91% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	42,35 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)
19	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	92,91	83,17	87,48
20	Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk	Rasio	45,18	56,68	56,99
21	Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk	Rasio	43,64	53,36	53,56
22	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,47	0,51	0,51
23	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,02	0,02
24	Jumlah pasar	Unit	13	15	16
25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat	-	Baik	-
26	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP
27	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	53,00	56,3	60
28	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	96,74	95,00	98,00
29	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	45,57	40,00	50,00
30	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	%	152,63	48,57	77,14
31	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	72,12	72	71,47

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target RKPD 2025
32	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	83,51	77,59	82,15
33	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100
34	Jumlah Perkada RDTR	Dokumen	-	2	1
35	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi	%	71,75	72	34,43
36	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	90,00	60	80
37	Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi	%	6,17	12,51	14,14
38	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan	%	64,28	69,84	69,84
39	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	%	100	100	100
40	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial	%	90,87	100	100
41	Penguatan Cadangan Pangan	%	69,11	76	78
42	Jumlah UMKM yang difasilitasi	%	100	150	1.430
43	Persentase Korban Bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial	%	100	100	100
44	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	91	100	100
45	Akreditasi RSUD	Indeks	Paripurna	Utama	Paripurna
46	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	98	100	100
47	Persentase Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, Sosial di Perpustakaan	%	76,23	79	81
48	Pemuka Agama yang menerima Insentif	Orang	678	595	595
49	Tokoh Adat yang menerima Insentif	Orang	103	150	175
50	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	68,05	69,84	73,01
51	Persentase Prestasi Olahraga	%	71,66	33,33	44,96
52	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	43	43	43
53	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	87,00	91,9	92,5

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target RKPD 2025
54	Konsumsi Perikanan	%	42,02	42,1	40,25
55	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	65,28	80,11	89,85
56	Jumlah/ jenis bibit/ benih unggul/ komoditi utama	Jenis	5	5	5
57	cakupan bina kelompok tani	%	22	21,43	21,47
58	Produktivitas padi	%	4,40	4	5,0
59	Produktivitas perkebunan	%	16,00	19,2	16,3
60	Peningkatan Alat Mesin Pertanian/ peternakan	Unit	1,897	1736	1783
61	Persentase koperasi yang aktif	%	42,07	57,95	58,18
62	Jumlah UMKM	Unit	7,542	7,842	13.000
63	Objek destinasi wisata	Objek	15	15	15
64	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang bergerak pada ekopnomi kreatif	kelompok	11	11	11
65	Jumlah KIR Angkutan Umum	Unit	3.884	6	6,5
66	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	Pelabuhan = 4 Bandara=1 Terminal=4	Pelabuhan = 4 Bandara=1 Terminal=6	Pelabuhan= 4 Bandara=1 Terminal=6
67	Persentase Penanganan Sampah	%	58,5	41,84	41,92
68	Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air /Banjir (perkotaan)	%	53,69	96,16	96,87
69	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	Rasio	2,26	2,499	2.499
70	Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik	%	77,58	59,26	60,64
71	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	-	0,355	0,36
72	Cakupan Penerbitan IUJK	%	-	80,07	89,02
73	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	%	70,59	76,057	83.663
74	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	0	1,2309	1,4771
75	Jumlah temuan BPK	Jumlah	21	16	15
76	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	98,97	100,00%	100

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target RKPD 2025
77	Tersusunnya dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA. Dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana 5 Tahunan RPJMD maupun dokumen perencanaan RKPD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
78	Persentase Penegakan Perda	%	65	70,00	73,99
79	LSM/Organisasi yang Aktif	Jumlah	68,05	199	280
80	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
81	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	97,01	95	98
82	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,73	4,0%	3,9
83	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	72,72	80	80
84	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	567	260	260
85	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah	100	142,8	144,2
86	Persentase antara luas bidang tanah yang sudah diselesaikan ganti kerugian/ jumlah bidang tanah target ganti kerugian	%	96	97,10%	99,41



BAB 7

Penutup



BAB 7 PENUTUP

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2025 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2025, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2025. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2025, mengacu pada analisis isu-isu strategis dan hasil evaluasi capaian penyelenggaraan pemerintahan hingga tahun 2023.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran RKPD 2025 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. RKPD tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025. Kemudian berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Pelaksanaan semua kegiatan memerlukan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD. Pelaksanaan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur harus melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan yang optimal;

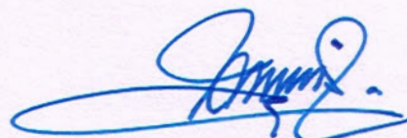
- 2) Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat antara lain:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu;
 - c. Tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
 - e. Penutup;
- 3) Tercipta sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program antara pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat; dan
- 4) Pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat berjalan efektif, apabila dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan tahun 2025.

7.2. Kaidah-Kaidah Pendanaan Pembangunan

Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada RKPD Tahun 2025 ini antara lain:

- a. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- b. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta.
- c. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

BUPATI,



ARDIANSYAH SULAIMAN